PESANTREN BURUH PABRIK

Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren

Imam Bawani, Achmad Zaini
Akh. Muzakki, Saiful Jazil
Biyanto, Masdar Hilmy

IAIN
Sunan Ampel Press

LKiS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
SURABAYA – INDONESIA

PESANTREN BURUH PABRIK
Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren

PESANTREN BURUH PABRIK

Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren

Imam Bawani, Achmad Zaini
Akh. Muzakki, Saiful Jazil
Biyanto, Masdar Hilmy

LKiS

PESANTREN BURUH PABRIK
Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren
Imam Bawani, Achmad Zaini, Akh. Muzakki,
Saiful Jazil, Biyanto, Masdar Hilmy

xii + 350 halaman; 14,5 x 21 cm
1. Pesantren 2. Buruh pabrik
3. Pendidikan pesantren

ISBN: 979-25-5341-X
ISBN 13: 978-979-25-5341-3

Editor: Farihatul Husniyah
Penyelaras Akhir: Ahmala Arifin
Rancang Sampul: Imam Mundhor
Penata Isi: Santo

Penerbit & Distribusi:
***LKiS* Yogyakarta**
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
http://www.lkis.co.id
e-mail: lkis@lkis.co.id

Cetakan I: Juni 2011

Percetakan:
PT. *LKiS* Printing Cemerlang
Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 417762
e-mail: elkisprinting@yahoo.co.id

Pengantar Redaksi

Industrialisasi sedang dihadapi oleh berbagai negara dunia ketiga dewasa ini, termasuk di dalamnya Indonesia. Industrialisasi membawa berbagai macam kelebihan dan kekurangan yang berimbas pada masyarakat, khususnya di sekitar daerah industri. Industri membutuhkan berbagai elemen dalam pelaksanaannya, seperti tenaga mesin dan tenaga manusia. Tenaga manusia yang dibutuhkan sangatlah banyak, sehingga industrialisasi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Banyaknya tuntutan produk hasil industri menyebabkan kebutuhan akan jasa pekerja atau buruh juga semakin banyak, sehingga jam kerja buruh diperpadat. Sementara itu, prinsip yang dianut para pemilik modal adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha sekecil mungkin. Maka mereka memberikan upah sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan ada yang di bawahnya. Para buruh tidak dapat mengelak terkait dengan keterbatasan yang mengikat mereka.

Selain konflik tersebut, para buruh juga menghadapi berbagai masalah dari dalam diri mereka. Karena itulah pelampiasan para buruh memunculkan berbagai masalah sosial yang mengganggu masyarakat. Sehingga muncul berbagai reaksi dari masyarakat dalam usaha untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di

sekitarnya. Dari sinilah muncul berbagai komunitas yang akhirnya menjadi contoh munculnya pesantren buruh pabrik. Kehidupan buruh pabrik yang mencerminkan kehidupan modern ternyata juga membutuhkan pendidikan spiritual yang bersifat tradisional seperti pesantren.

Keseimbangan antara gaya hidup mereka yang modern dan pendidikan spiritual yang mereka jalani, menghasilkan perpaduan yang mengesankan dan memuaskan bagi para pimpinan. Sehingga buruh pabrik yang mampu menggabungkan keduanya mendapatkan tempat khusus bagi para pimpinan. Keseimbangan yang terwujud itu, juga bisa menjadi solusi bagi banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh pabrik.

Pesantren buruh pabrik ini keberadaannya menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu antara para buruh dan pabrik itu sendiri, mengingat tujuan mulia yang ingin diwujudkan. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beberapa lembaga maupun pesantren lain yang telah lebih dahulu berdiri. Apalagi dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, maka pesantren buruh pabrik layak untuk segera didirikan.

Buku ini merupakan hasil studi tentang kehidupan buruh pabrik di berbagai kota di Jawa Timur yang juga mencerminkan daerah industri lain di berbagai kota besar di Indonesia. Buku ini juga mengulas jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh buruh pabrik, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana pesantren yang ideal sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara gamblang buku ini memaparkan kondisi dan pentingnya kehadiran pesantren buruh pabrik. Penyajiannya menggunakan aturan ilmiah sehingga bisa menjadi bahan rujukan dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh buruh pabrik. Selanjutnya, kepada pembaca yang budiman kami ucapkan selamat membaca!

Pengantar Penulis

Pada era persaingan global dewasa ini, program industrialisasi yang biasanya diikuti oleh kehadiran sejumlah besar kaum buruh pabrik selaku tenaga kerja di berbagai kawasan perkotaan, adalah merupakan realitas kehidupan modern yang terjadi hampir merata di mana-mana. Kedatangan tenaga kerja industri dalam jumlah banyak ke kota, dalam beberapa segi memang bermanfaat, khususnya bagi upaya memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, dan umumnya dalam rangka mempercepat pertumbuhan kawasan perkotaan. Akan tetapi di segi lain, seringkali dapat menimbulkan permasalahan sosial yang memerlukan perhatian dan langkah penanganan sebaik-baiknya.

Sudah cukup banyak studi yang berupaya memahami dan mencari jalan keluar atas permasalahan hidup kalangan buruh pabrik di perkotaan. Namun demikian, belum ditemukan studi yang secara khusus melihat dan mendekatinya dari sudut pandang teori dan praktek pendidikan Islam, lebih khusus lagi dalam jenis kelembagaan pesantren dan sejenisnya yang memiliki fleksibilitas realisasi kegiatan sedemikian rupa, sehingga melahirkan aktualisasi konsep *bekerja sambil belajar* atau *belajar sambil bekerja*. Atas dasar itulah dan diilhami oleh kekhawatiran atau bahkan penolakan sementara masyarakat kaum muslimin terhadap program industrialisasi sebagaimana pernah terjadi di kawasan Pulau Madura, rancangan dan aktifitas penelitian ini akhirnya terdorong untuk melakukan studi terfokus tentang

masalah kehidupan buruh pabrik dan alternatif pemecahannya dalam perspektif pendidikan Islam.

Dengan selesainya kegiatan penelitian tahap akhir, kami yang tergabung dalam tim peneliti mengucapkan terimakasihh yang sebesar-besarnya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, dalam hal ini melalui Pimpinan Proyek RUKK-LIPI, atas kesempatan dan pembiayaan yang disediakan, sehingga memungkinkan rangkaian aktifitas keilmuan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung keberhasilan penelitian ini, terutama kalangan buruh pabrik, pimpinan staf manajemen perusahaan, para ustadz dan pengelola pesantren, lembaga dan aktivitas pembinaan keagamaan di sekitar kawasan industri, para pejabat setempat, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

Mudah-mudahan, meskipun mungkin banyak terdapat kekurangan di sana-sini, apa yang secara keseluruhan tertuang pada laporan penelitian tahap akhir ini, tetap saja menghadirkan idealitas kemanfaatan, khususnya bagi upaya pemecahan masalah kehidupan buruh pabrik sehari-hari, dan umumnya dalam mendorong perkembangan dan pengembangan pesantren sebagai bagian integral dari realitas dunia pendidikan Islam di Indonesia. Daya manfaat pesantren dan berbagai lembaga serta aktivitas pembinaan agama di sekitar kawasan industri dalam mendukung pencarian alternatif pemecahan masalah kehidupan buruh pabrik sehari-hari, sesungguhnya hanya merupakan bagian integral dari keberhasilan tugas pendidikan Islam dan realisasi kewajiban suci kaum muslimin dalam arti yang seluas-luasnya.

Surabaya, 2010

Tim Penulis

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia selama ini dilakukan oleh pemerintah melalui aktivitas yang berputar dan berujung pada industrialisasi. Gerak industrialisasi itu banyak memberikan harapan bagi masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena industrialisasi memfasilitasi timbulnya kemudahan-kemudahan dalam hidup. Kemudahan-kemudahan yang diakibatkan oleh industrialisasi itu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk terlibat dalam prosesnya. Mereka—sesuai dengan tingkat keterampilannya—terdorong untuk menjadi bagian proses itu, dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup, memantapkan pilihannya untuk bekerja menjadi buruh (pekerja) di sektor industri (baca: pabrik).

Tingginya pilihan masyarakat untuk bekerja menjadi buruh pabrik, pada akhirnya, menyebabkan terjadinya urbanisasi. Hal itu sudah menjadi realitas yang tidak bisa dihindari. Akibatnya, terjadi penumpukan sumber daya manusia di sekitar kawasan pabrik. Terkonsentrasinya mereka di kawasan tersebut dilatar-belakangi oleh banyak pertimbangan, di antaranya pertimbangan efisiensi waktu, tenaga, biaya, dan seterusnya. Kenyataan ini bisa dipahami karena mereka dihadapkan pada tuntutan pekerjaan di pabrik yang memaksa mereka harus mengatur waktu dan tenaga sebaik-baiknya. Bila tidak, mereka bisa berhadapan dengan pilihan

yang paling buruk, yakni diskors atau bahkan dikeluarkan dari pabrik dengan alasan indisipliner. Akibatnya, kehidupan mereka tak ubahnya bagaikan sebuah mesin industri, sangat mekanistik.

Masyarakat buruh pabrik seperti di atas, yang merupakan bagian dari masyarakat industri pada umumnya, cenderung berkembang ke arah sekuler, meninggalkan dimensi dan institusi-institusi keagamaan.[1] Kecenderungan sekularisasi atau menurunnya dimensi dan institusi-institusi keagamaan di kalangan buruh pabrik seperti itu menunjukkan adanya proses dan bentuk dereligionisasi (*a form of dereligionization*).[2] Realitas ini menjadi pembenar terhadap tesis Bellah bahwa fenomena sosial dan fenomena keagamaan berjalan seiring; perilaku keagamaan sesungguhnya merupakan perilaku yang terdapat dalam alam kenyataan, sehingga dapat diamati dan diteliti. Bila fenomena sosial berubah, maka fenomena keagamaan pun akan berubah mengiringinya, dan begitu pula sebaliknya.[3] Singkatnya, realitas sosial-budaya merupakan realitas religius pula. Dalam perspektif Yinger, agama berkaitan erat dengan masyarakat. Hal itu bisa dibuktikan dengan wacana perubahan sosial; bahwa perkembangan keagamaan (*religious development*) dapat dipahami secara baik sebagai respon terhadap berbagai perubahan fundamental dalam lingkungan sosial masing-masing.[4]

---

[1] B.R. Wilson, "Agama dalam Masyarakat Sekuler," dalam Roland Robertson (ed.), Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, terj. Achmad Fedyani Saifudidin (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 183-4.

[2] Lihat Roland Robertson, "Religious and Sociological Factors in the Analysis of Secularization," dalam Allan W. Eister (ed.), *Changing Perspective in the Study of Religion* (Toronto: John Wiley & Sons, 1974), hlm. 48.

[3] Robert N. Bellah, *Beyond Belief* (New York: Harper & Row Publisher, 1982), hlm. 146.

[4] J. Milton Yinger, "Religion and Social Change: Functions and Dysfunctions of Sects and Cults among the Disprivileged," dalam Richard D. Knudten (ed.), *The Sociology of Religion: an Anthology* (New York: Meredith Publishing Company, 1967), hlm. 483.

Namun demikian, meski perubahan sosial seperti di atas merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari, masyarakat Indonesia sudah mempunyai komitmen sejak awal bahwa pembangunan mesti dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta antara kebutuhan jasmani dan rohani. Artinya, di dalam proses pembangunan tidak dikehendaki adanya kecenderungan mementingkan satu aspek dan mengesampingkan aspek yang lain, atau mendahulukan aspek yang satu dan mengakhirkan aspek yang lain. Yang dikehendaki adalah keduanya berjalan secara simultan agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan-ketidakseimbangan baru dalam kehidupan masyarakat.

Menurunnya dimensi-dimensi keagamaan masyarakat buruh pabrik dapat digambarkan di antaranya dengan deviasi-deviasi perilaku, salah satunya adalah dalam bentuk perilaku seksual menyimpang. Deviasi perilaku demikian tidak dapat dipisahkan dengan rendahnya tingkat pendidikan agama; bahkan penelitian A. Hamid (1996)[5] menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan agama pekerja industri mempunyai korelasi terhadap perilaku seksual menyimpang. Hal itu ditunjukkan oleh data bahwa 61,75% buruh secara formal berasal dari lulusan pendidikan umum dan hanya 38,25% dari pendidikan agama. Dari sedikit yang merupakan lulusan pendidikan agama itu, 67,32% adalah tamatan Madrasah Aliyah (MA) atau Pendidikan Guru Agama (PGA) dan selebihnya lulusan di bawah MA atau PGA. Adapun faktor yang turut mendorong terjadinya perilaku seksual menyimpang tersebut antara lain pola pemukiman atau pemondokan pekerja yang sangat longgar batasannya antara laki-laki dan perempuan. Hal itu diperparah oleh faktor yang lain, seperti memudarnya

---

[5] A. Hamid, "Agama dan Industrialisasi; Hubungan Pendidikan Agama dan Perilaku Seksual Pekerja Industri di Wilayah Kecamatan Gedangan Sidoarjo," (Laporan Hasil Penelitian, P3M Sunan Ampel, Surabaya, 1996).

norma sosial tentang kesucian seksualitas manusia yang dibuktikan dengan dilakukannya hubungan seksual di luar nikah serta longgarnya kontrol masyarakat setempat yang dibuktikan dengan diapresiasinya kehidupan individualistik. Faktor yang disebut terakhir, kehidupan individualistik, tadi memperkuat kebenaran asumsi Turner dan Marx bahwa individualisme merupakan ideologi dominan dari masyarakat kapitalis.[6]

Rendahnya tingkat pendidikan agama buruh tidak berarti bahwa kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan agama juga rendah, namun sebaliknya, mereka sangat menyadari pentingnya pendidikan agama. Hal itu terbukti dari penelitian Susanto (1996).[7] Hanya saja persoalannya, 44% dari mereka merasa tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu karena padatnya jam kerja, sementara aktivitas belajar agama di lembaga-lembaga keagamaan biasanya berjalan saat mereka bekerja; 28% memaksa diri untuk menyisihkan waktu di tengah-tengah padatnya jam kerja untuk belajar agama; serta 28% selebihnya menyatakan cukup dengan pendidikan agama yang mereka peroleh.

Hasil penelitian di atas dapat dijadikan sebagai bukti bahwa perubahan nilai dan sosio-kultur telah terjadi di kalangan buruh pabrik. Perubahan itu menggeser ikatan mereka terhadap moral keagamaan kepada nilai atau kultur yang justru bertentangan dengan agama, atau paling tidak meredupkan tingkat keberagamaan mereka. Oleh karena itu, dalam konteks ini, bisa dipahami penolakan ulama Madura terhadap rencana industrialisasi pulau itu oleh pemerintah beberapa waktu lalu akibat kekhawatiran mereka terhadap dampak sampingan negatif yang akan ditimbul-

---

[6] Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: SAGE Publications Ltd., 1994), hlm. 155.

[7] Achmad Wiherno Susanto, "Industrialisasi dan Pendidikan Agama Masyarakat Industri di Mojokerto Jawa Timur," (Laporan Hasil Penelitian, IAIN Sunan Ampel, Malang, 1996).

kannya. Rujukan mereka yang paling mencolok adalah pulau Batam, begitu pulau itu dibuka untuk kawasan industri, dampak-dampak sampingan negatif muncul mengiringinya, baik dalam bentuk prostitusi, perjudian, klub-klub serta dunia malam lainnya.

Hal di atas bukan berarti bahwa industri tidak penting, tetapi sebaliknya, industri dibutuhkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan hidup di zaman modern sekarang ini, apalagi dalam kondisi perekonomian yang ditimpa krisis ekonomi berkepanjang-an seperti saat ini. Hanya persoalannya, cara apa yang harus ditempuh agar upaya mencapai kesejahteraan duniawi tersebut dilakukan dalam keharmonisan sedemikian rupa dengan cita-cita kebahagiaan ukhrawi? Dalam konteks ini, penulis berasumsi bahwa kedua hal itu tidaklah mesti berhadapan posisinya, melainkan dapat dipertemukan dalam sebuah model pembinaan yang meng-untungkan keduanya.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menyusun langkah-langkah antisipatif-konstruktif ke arah harmonisasi dua cita-cita kebahagiaan hidup tersebut dengan cara menciptakan atmosfer kehidupan Islami untuk para buruh pabrik di sebuah kompleks *pesantren* yang ditata secara khusus hingga mereka secara leluasa namun terarah dapat melakukan tugas sehari-hari: bekerja sambil belajar atau belajar sambil bekerja. Secara konkret, penelitian ini akan memunculkan sebuah model pembinaan kehidupan para buruh pabrik melalui *Pesantren Buruh Pabrik*. Model semacam ini belum mendapatkan perhatian sedikit pun dari para pemerhati dan peneliti-peneliti sebelumnya, bahkan model tersebut termasuk realitas baru dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Karena itu, tema *Pesantren Buruh Pabrik* tersebut cukup menarik untuk dijadikan objek kajian studi. Atas dasar itulah, penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk mengisi kekosongan yang dimaksud.

Namun demikian, karena penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan (eksplorasi, verifikasi plus, dan perumusan model), maka sebelum tahap akhir yakni perumusan model, dilakukan penelitian secara konkret-operasional, yakni penelitian khusus yang bergerak pada aktivitas eksploratif mengungkap dan mengidentifikasi dua persoalan mendasar, berupa permasalahan kehidupan buruh pabrik dan model pembinaan moral keagamaan untuk mereka sebagai alternatif pemecahan terhadap permasalahan kehidupan yang dihadapi.

Dilihat dari perspektif makro, pada hakikatnya rangkaian permasalahan yang menjadi fokus studi ini, terbagi menjadi tiga tahapan; eksploratif, verifikasi plus, dan perumusan model. Masing-masing tahapan dikemas dan dilakukan dengan rumusan masalah tersendiri secara tipikal. Pada titik akhir, tahapan ketiga, rangkaian penelitian ini menghasilkan rumusan model solusi pembinaan kehidupan buruh berupa *Pesantren Buruh Pabrik*. Namun, untuk mengawali perumusan model solusi tersebut, mesti diupayakan tahapan-tahapan sebelumnya. Karena itu, penelitian pertama ini secara khusus dilakukan dalam kerangka tahapan eksplorasi terhadap permasalahan sebagaimana bisa dijumpai di bawah.

Meski dengan kesadaran penuh dipahami bahwa penelitian pertama ini bergerak dalam wilayah tahapan eksplorasi, sangat bermanfaat bila ketiga tahapan di atas juga ditampilkan secara lengkap dengan elaborasi dan rumusan masalah masing-masing secara khusus. Untuk maksud itu, patut dijelaskan kerangka kerja dan rumusan masalah untuk masing-masing tahapan:

1. Tahapan Eksplorasi

Pada penelitian tahapan pertama ini, kegiatan diarahkan untuk mengungkap dan mengidentifikasi hal-hal berikut: *pertama,* permasalahan kehidupan buruh pabrik di daerah penelitian; *kedua,*

model-model aktivitas pembinaan moral-keagamaan buruh sebagai alternatif pemecahan permasalahan kehidupan mereka.

Atas dasar kedua fokus perhatian tersebut, rumusan masalah-nya adalah: (1) Dalam aspek kehidupan apa saja permasalahan yang dihadapi buruh pabrik di daerah penelitian? (2) Mengapa permasalahan tersebut muncul dan apa akibat yang ditimbulkan-nya? (3) Apa saja model-model aktivitas pembinaan moral-keagamaan secara riil di daerah penelitian dan diperkirakan bermanfaat bagi pemecahan masalah kehidupan buruh pabrik? (4) Mengapa dan bagaimana aktivitas pembinaan moral-keagamaan dilaksanakan dalam realitas kehidupan buruh pabrik?

2. Tahapan Verifikasi Plus

Setelah model-model aktivitas pembinaan moral-keagamaan teridentifikasi secara jelas pada penelitian tahap pertama, penelitian tahapan kedua diarahkan pada upaya yang disebut verifikasi plus. Maksudnya, verifikasi yang kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi terhadap hasil verifikasi itu. Verifikasi atau pengujian empiris dilakukan melalui pembandingan antara kelompok buruh pabrik yang terlibat dalam model-model aktivitas pembinaan moral keagamaan (pesantren) dan kelompok buruh lain yang tidak terlibat di dalamnya. Verifikasi ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan ilmiah tentang signifikansi model-model pembinaan moral-keagamaan dalam upaya pemecahan masalah kehidupan buruh pabrik. Selanjutnya, setelah melakukan langkah verifikasi tersebut, penelitian tahap kedua kemudian digerakkan untuk melakukan eksplorasi secara khusus guna mengetahui pandangan dan sikap buruh pabrik pada umumnya terhadap model pembinaan kehidupan pesantren yang ditawarkan.

Terkait dengan kedua fokus kegiatan tersebut, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah nilai positif

kehidupan buruh pabrik yang terlibat dalam aktivitas pembinaan moral-keagamaan, dan bagaimana pula mereka yang tidak terlibat? (2) Sejauh mana perbedaan nilai-nilai kehidupan di antara kedua kelompok buruh pabrik tersebut? (3) Bagaimana pandangan dan sikap buruh pabrik pada umumnya terhadap model kehidupan di bawah pembinaan pesantren?

3. Tahapan Perumusan Model Solusi

Penelitian tahap ketiga ini merupakan klimaks dari rangkaian integral dua tahap penelitian terdahulu yang ditujukan untuk membangun idealitas pesantren buruh pabrik yang benar-benar kokoh secara konseptual-filosofis dan praktikal-implementatif. Masalah yang dicari jawabannya dan pemecahannya melalui rangkaian aktivitas penelitian tahap ketiga dapat dirumuskan berikut ini: (1) Dalam rangka merumuskan model ideal pesantren buruh pabrik, elemen-elemen inti apa saja yang dapat digali lebih lanjut dari beberapa lembaga atau kegiatan pembinaan keagamaan untuk kalangan buruh pabrik di daerah penelitian? (2) Untuk memantapkan pijakan empiris dan sekaligus teoretis keilmuan dalam kaitannya dengan rancangan model solusi tersebut, dasar-dasar filosofis kependidikan Islam seperti apa yang selayaknya digali dan dirumuskan sebagai pegangan? (3) Bagaimana pandangan dan sikap kalangan buruh pabrik di daerah penelitian terhadap model pesantren yang dipersiapkan untuk mereka, dan bagaimana juga menurut kalangan pakar serta pemerhati di bidang tersebut? (4) Seperti apakah wujud model ideal pesantren buruh pabrik dilihat dari komponen bangunan fisik, sarana, dan alat pendukung, manajemen pengelolaan, kurikulum pendidikan, sistem pengajaran dan bimbingan keagamaan, beberapa unit pelaksana teknis yang diperlukan dan lain sebagainya?

***

Munculnya pergeseran nilai dan sosio-kultur buruh pabrik dari kondisi yang lekat dengan dimensi-dimensi keagamaan ke kondisi yang renggang, terkait dengan benturan antara kebutuhan mencari nafkah di pabrik yang menuntut pola kerja yang mekanistis dan keharusan menjalankan ajaran agama dalam banyak aspeknya. Untuk itu, secara makro, jawaban hipotetis yang diperkirakan terhadap persoalan dalam penelitian ini adalah pembinaan kehidupan buruh melalui penemuan dan perumusan model *Pesantren Buruh Pabrik.*

Sementara itu, karena pelaksanaan penelitian mesti dilakukan secara gradual, maka secara mikro, jawaban yang diperkirakan khusus terhadap persoalan dalam penelitian tahap pertama, tahap eksplorasi, adalah *persoalan kehidupan buruh dapat dicarikan jalan pemecahannya secara signifikan melalui model-model aktivitas pembinaan moral-keagamaan.*

Berangkat dari sejumlah temuan empiris dari penelitian tahap pertama, penelitian tahap kedua dilakukan atas anggapan dasar bahwa *kehidupan sehari-hari buruh pabrik, sejauh ini masih dihadapkan pada aneka masalah yang memerlukan perhatian dan upaya guna mengatasinya.* Di luar jalur pemecahan masalah yang sudah ada, seperti dengan membangun kepastian hubungan kerja, penetapan upah minimum regional, jaminan kesejahteraan hidup, kebebasan membentuk serikat pekerja dan sebagainya, kehadiran sejumlah model aktivitas pembinaan keagamaan yang bercirikan pesantren di sekitar kehidupan buruh pabrik sehari-hari, kiranya merupakan alternatif jalan pemecahan lain yang sangat layak untuk dipertimbangkan pemanfaatannya.

Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang bersifat agamis tersebut dimungkinkan mengingat banyak sentra pengembangan industri berlokasi di kawasan masyarakat religius, yang selama ini dikenal memegang teguh dan taat menjalankan ajaran agama,

sementara cukup banyak pula kalangan buruh pabrik yang berasal dari latar belakang kehidupan religius di daerah aslinya. Dunia kepesantrenan–yang dalam pengertian luas mencakup institusi dan aktivitas keagamaan di tengah-tengah masyarakat tempat buruh pabrik tinggal dan menjalani kehidupan—dianggap relevan sebagai jalur alternatif pemecahan masalah tersebut, karena ciri khas internalnya yang cenderung bersifat luwes, tidak terlalu kaku dan bersifat formal, sehingga cocok bagi realitas kesibukan buruh pabrik yang sedemikian padat jadwal kerja mereka.

Layak kiranya diajukan hipotesis secara umum,[8] bahwa *keterlibatan sementara buruh pabrik dalam aktivitas pembinaan keagamaan baik di pesantren, di mushalla atau masjid, di komplek indekos, di tengah masyarakat, ataupun di lingkungan pabrik sendiri, akan memperkuat tata nilai kehidupan religius pada diri mereka, yang pada gilirannya melahirkan sumbangan positif bagi upaya pemecahan masalah sehari-hari.* Keterlibatan buruh pabrik dalam berbagai wadah aktivitas keagamaan tersebut dan demikian juga efek positif bagi pemecahan masalah yang mereka hadapi, dipengaruhi oleh banyak faktor seperti latar belakang religiusitas keluarga, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah ditempuh, pengalaman hidup yang pernah dilalui, kawan akrab dalam pergaulan sehari-hari, dan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal.

Sesuai dengan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di awal, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh

---

[8] Dikatakan sebagai *hipotesis secara umum*, oleh karena menurut pendekatan kualitatif yang lebih menonjol dipakai dalam penelitian ini, hipotesis merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses pengumpulan dan analisis data di lapangan, yang realisasinya terkait sedemikian erat dengan situasi dan kondisi sesaat yang begitu dinamis dan berubah-ubah, sehingga tidak mungkin dimunculkan seluruhnya dan secara rinci pada uraian metodologi ini. Lebih jauh, lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Remaja Karya, 1989), hlm. 113-117.

studi ini. *Pertama,* terhimpunnya informasi keilmuan tentang berbagai persoalan di celah-celah kehidupan para buruh pabrik, khususnya dalam konteks sosio-ekonomi maupun keberagaman dan pembinaan mental-spiritual mereka. Kedua, diperolehnya gambaran yang jelas tentang profil model-model pembinaan moral-keagamaan yang para santrinya adalah buruh-buruh pabrik atau perusahaan di berbagai sentra pengembangan industri, sebagai langkah untuk menggali data inti tentang kemungkinan adanya segi-segi yang menguntungkan bagi kelompok muda-mudi buruh pabrik yang tinggal dan sambil belajar di lingkungan pesantren yang memang secara khusus diperuntukkan bagi mereka. *Ketiga,* terdeskripsinya secara detail hasil evaluasi tentang segi-segi positif dari kehadiran pesantren industri dalam menjalankan fungsinya untuk membina keberagaman dan mental-spiritual para buruh yang menjadi santrinya, dan *keempat,* tercapainya rumusan pemikiran secara sistematis tentang kemungkinan pengembangan model *Pesantren Buruh Pabrik* di masa-masa yang akan datang, sebagai langkah antisipatif ke depan manakala wilayah yang selama ini dikenal memiliki tradisi yang sedemikian kokoh dalam kehidupan beragama, karena pertimbangan tertentu yang bersifat strategis, akhirnya ditetapkan sebagai wilayah pembangunan sentra perindustrian.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat studi ini secara keseluruhan dapat dilihat kaitannya antara lain dengan upaya pemecahan masalah sosial ketenagakerjaan di kota-kota besar, pengembangan dan aktualisasi wawasan *pendidikan seumur hidup* dalam Islam, dan penggalian model pendidikan yang bercorak spesifik bagi buruh-buruh pabrik dalam rangka menerapkan semboyan *"Belajar Sambil Bekerja"* atau sebaliknya, *"Bekerja Sambil Belajar"* sebagai salah satu wujud tuntutan dunia modern dan bagaimana memenuhinya secara baik menurut ajaran Islam.

***

Mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pesantren atau perburuhan dengan segala problematikanya, ada beberapa karya tulis yang terkait, baik dengan jarak yang dekat maupun agak jauh. Baik dalam bentuk buku, laporan penelitian, maupun artikel. Karya tulis terpenting yang berbentuk buku antara lain: Dawam Raharjo (ed.) yang berjudul *Pesantren dan Pembangunan* (1995). Karya yang untuk pertama kali terbit tahun 1974 ini merupakan bunga rampai dari hasil pemikiran konseptual dan penelitian lapangan beberapa pemikir dan pemerhati Indonesia tentang masalah pendidikan pesantren. Karya ini melukiskan gambaran keadaan dan kehidupan pesantren serta proses yang sedang dan akan terjadi [berangkat dari *setting* awal tahun 1970-an], termasuk berbagai tantangan pembaruan pendidikan dan pemikiran Islam di Indonesia. Hal-hal penting dari karya ini yang banyak menjadi rujukan pemikiran-pemikiran berikutnya di antaranya: *Pertama,* lahirnya tesis bahwa pesantren di samping merupakan *sub-culture* yang unik dari kehidupan, juga merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang memiliki pranata tersendiri dan memiliki hubungan fungsi amal dengan masyarakat serta hubungan tata nilai dengan kultur masyarakat.

Lalu karya Zamakhsyari Dhofier yang berjudul *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (1994). Karya ini untuk pertama kali terbit tahun 1982 dan merupakan hasil penelitian lapangan terhadap dua pesantren, Tebuireng di Jombang dan Tegalsari di Salatiga, selama setahun, dari September 1977 sampai Agustus 1978. Di antara tesis terpenting dari karya ini yang sering diacu oleh banyak peneliti adalah mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah institusi pesantren. Elemen-elemen tersebut meliputi lima aspek: pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai. Selain itu, tulisan ini juga membicarakan tentang keberadaan pesantren dengan paradigma pelarian. Buku lainnya adalah karya Karel A. Steenbrink, *Pesan-*

tren, Madrasah, Sekolah (1994). Karya yang diterbitkan untuk pertama kali tahun 1986 ini mengkaji pendidikan Islam Indonesia masa modern. Pembahasannya diletakkan pada landasan sosio-historis dengan menggunakan paradigma perubahan (*change*). Secara konkret, karya ini meneliti perubahan-perubahan yang menimpa pendidikan pesantren, baik dari sisi kelembagaan maupun akademis, hingga munculnya sekolah. Dalam bidang kelembagaan, misalnya, pesantren disinyalir oleh karya ini mengalami perubahan sejak zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan, dan bahkan sampai masa modern. Adapun di bidang akademis, perubahan ditunjukkan dengan perubahan kurikulum dan silabus mata pelajaran.

Kemudian karya Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (1987). Karya ini merupakan antitesis terhadap studi Geertz mengenai posisi seorang kiai (*ajengan*) di Jawa Barat. Horikoshi menyimpulkan bahwa kiai bisa berperan aktif dan kreatif dalam perubahan sosial. Kiai tidak berkehendak meredam akibat perubahan yang terjadi, tetapi justru memelopori perubahan sosial itu dengan bentuk dan caranya sendiri. Kiai bukan melakukan penyaringan informasi, melainkan menawarkan agenda perubahan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang menjadi *concern* kiai adalah bagaimana kebutuhan terhadap perubahan, yang dianggapnya sebagai keharusan (*sunnatullah*), dapat dipenuhi tanpa harus merusak jalinan sosial yang ada, melainkan justru memanfaatkan jalinan-jalinan itu sebagai prosedur dan mekanisme perubahan sosial yang diidealkan. Karya Mastuhu berjudul *Dinamika Pendidikan Pesantren* (1994). Karya ini bergerak dalam konteks pencarian butir-butir sistem pendidikan pesantren, baik yang positif maupun negatif, dalam kerangka pengembangan sistem pendidikan nasional. Karya ini juga mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk pendidikan pesantren yang akan terjadi sehubungan dengan tuntutan zamannya.

Selain itu, karya Pradjarta Dirdjosanjoto berjudul *Memelihara Umat; Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa* (1999). Karya ini merupakan sintesis dari studi Geertz dan Horikoshi di atas. Karya ini mengeksplisitkan masalah pola hubungan antara kiai (pesantren) sendiri. Tesis pentingnya adalah tidak menolak baik tesis Geertz yang menunjuk kiai sebagai makelar budaya (*cultural broker*) maupun Horikoshi yang menyebut kiai sebagai *enterpreuner* sejati. Lalu karya Marzuki Wahid (ed.), *Pesantren Masa Depan* (1999). Buku ini merupakan bunga rampai dari hasil pemikiran konseptual para pemerhati pesantren. Karya ini tidak memunculkan satu tesis yang strategis kecuali menyuguhkan masalah-masalah pokok yang semestinya menjadi perhatian pesantren dewasa ini serta dimensi-dimensi pemikiran yang mungkin dapat direkonstruksi, terutama kaitannya dengan paradigma keilmuan, tradisi kajian kitab kuning, metode pengajaran, dan pola-pola budaya pesantren.[9]

---

[9] Selain karya tulis berbentuk buku, terdapat beberapa karya tulis yang berupa laporan, bukan buku, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, di antaranya adalah tulisan A. Hamid, "Agama dan Industrialisasi; Hubungan Pendidikan Agama dan Perilaku Seksual Pekerja Industri di Wilayah Kecamatan Gedangan Sidoarjo" (1996), Achmad Wiherno Susanto, "Industrialisasi dan Pendidikan Agama Masyarakat Industri di Mojokerto Jawa Timur", Muhammad Basjir Sju'aib, "Kehidupan Umat Beragama Islam pada Masyarakat Transisi dari Agraris ke Industri di Kecamatan Wringin Anom Gresik," (1996). Lanny Ramli, et. al., "Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Izin", Tien Sumartini, "Pekerja Menghadapi Kemajuan Teknologi (Studi Kasus pada Buruh Industri di Kotamadya Surabaya)", Imam Darmawan, "Studi tentang Kesenjangan Struktur Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Terdidik di Jawa Timur", dan Sri Sanituti Hariadi, "Analisis Jender terhadap Perilaku Perceraian di Kalangan Wanita Bekerja." Empat penelitian terakhir dimuat di *Jurnal Kumpulan Abstrak Penelitian Universitas Airlangga Tahun 1997-1998/1998-1999 (Kelompok Ilmu Sosial)* (2000).

Adapun karya yang berbentuk artikel di antaranya adalah tulisan Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji; The Changing Roles of Cultural Broker," dalam *Comparative Studies in Society and History*, 2 (1960), Taufik Abdullah, "The Pesantren in Historical Perspective," dalam Taufik Abdullah & Sharon Siddique (ed.) dalam *Islam and Society in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1988), Abdul Jamil, "Pesantren dan Kebudayaan; Kajian Ulang

Dari tinjauan teoretis di atas, tampak beberapa teori, konsep, tesis, atau wacana yang telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Kaitannya dengan keberadaan atau kehadiran pesantren, misalnya, terdapat setidaknya dua kelompok besar yang mempunyai konsep yang berbeda. Kelompok pertama menyebut bahwa kehadiran atau keberadaan pesantren didasarkan pada paradigma pelarian (*escapistic paradigm*); pelarian dari kekuasaan represif kolonial maupun praktik-praktik kehidupan kota. Dalam pandangan kelompok ini, pergerakan pesantren dengan melakukan pelarian atau pengasingan tersebut terjadi karena adanya pembatasan-pembatasan yang dilancarkan oleh kolonial Belanda terhadap Islam sehingga membatasi aktivitas Islam sebagai kekuatan sosial, kultural, dan politik. Kolonial Belanda senantiasa bertindak represif terhadap setiap aktivitas maupun institusi yang mewadahi aktivitas Islam. Dalam kondisi demikian, Islam tidak dapat memainkan peranan penting dalam percaturan politik di kota-kota Jawa sehingga pusat-pusat studi Islam mesti pindah ke desa-desa dalam kompleks pesantren yang dikembangkan oleh para kiai. Akibat dari strategi pelarian atau pengasingan ini, pola pikiran politik para kiai hanya didasarkan pada kepentingan yang terbatas, yakni kekuasaan agama dan kepentingan usaha penyebaran ajaran dan inti Islam. Adapun salah seorang yang termasuk dalam kelompok yang memiliki pandangan seperti ini adalah Zamakhsyari Dhofier.[10]

---

tentang Peran Pesantren sebagai Pembentuk Kebudayaan Indonesia," dalam *Walisongo*, edisi 12, (1999), dan Fatah Syukur, "Kemandirian Pesantren; Studi Kelembagaan dan Proses Pendidikannya," dalam *Walisongo*, edisi 13, (1999).

Sejauh pengetahuan penulis, belum ada satu pun karya yang membicarakan pembinaan kehidupan buruh melalui model *Pesantren Buruh Pabrik* seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, pesantren yang dijalankan dalam kerangka pembinaan kehidupan keagamaan santri yang notabene kaum buruh pabrik dengan cara yang sangat fleksibel disesuaikan dengan jam kerja santri dan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

[10] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 13.

Sementara itu, kelompok kedua memiliki konsep berlainan dengan kelompok pertama. Kelompok ini melihat bahwa keberadaan pesantren bukan didasarkan pada paradigma pelarian, melainkan justru berlandaskan paradigma perlawanan (*oppositional paradigm*); perlawanan baik terhadap penguasa kapital maupun penguasa politik. Dalam kasus penguasa kapital, awalnya pesantren memainkan posisi sebagai pusat resistensi kultural, namun kemudian pemaksimalan posisi itu bergerak kepada posisi perlawanan. Perlawanan yang dimaksud di sini dilakukan oleh pesantren dengan cara mem*back-up* masyarakat melalui tabligh secara aktif dan terus menerus dari generasi ke generasi untuk meneguhkan posisi mereka di hadapan penguasa kapital. Perlawanan itu dilakukan karena penguasa kapital dianggap sebagai simbol gaya hidup yang tidak suci dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini. Sementara itu, dalam kasus penguasa politik, pesantren memainkan posisinya sebagai lembaga pesaing atau pelawan terhadap kekuasaan (kraton). Kondisi ini ditunjukkan dengan seringnya pesantren menjadi tempat pengasingan dan perlindungan bagi kerabat raja atau pelaku politik yang sedang tidak disukai oleh penguasa saat itu. Dalam kondisi demikian, keberadaan pesantren menguat disamping sebagai pusat pengajaran agama, juga sebagai pusat perlawanan politik. Adapun peneliti yang termasuk dalam kelompok yang mempunyai pemahaman konseptual semacam ini di antaranya adalah Hermawan Sulistiyo[11] dan Taufik Abdullah.[12]

Dalam keadaan saat itu, pesantren memainkan perannya dalam perlawanan politik sebagai pesaing atau pelawan kekuasaan

---

[11] Hermawan Sulistiyo, *Palu Arit di Ladang Tebu* (Jakarta: KPG, 2000), hlm. 110-111.

[12] Taufik Abdullah, "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: Sebuah Perspektif Perbandingan," dalam Taufik Abdullah & Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, terj. Rochman Achwan (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 90.

seperti dikemukakan oleh kelompok kedua di atas, muncul sebuah proses sosiokultural yang pengaruhnya kembali kepada pesantren itu sendiri. Proses yang dimaksud adalah munculnya suatu tipe tradisi tertentu oleh pesantren dan atau kaum santri di tengah tradisi-tradisi lain yang ada di tengah kehidupan masyarakat.[13] Dalam konteks inilah, Abdurrahman Wahid menyebut pesantren sebagai sebuah subkultur.[14] Penyebutan ini, menurutnya, tidak terlepas dari tiga elemen esensial yang membentuk pondok pesantren sebagai sebuah subkultur. *Pertama,* pola kepemimpinan pondok pesanntren yang mandiri tidak terkooptasi oleh negara. *Kedua,* kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari berbagai abad. *Ketiga,* sistem nilai (*value system*) yang digunakan adalah bagian dari masyarakat luas.[15]

Namun demikian, Abdurrahman Wahid mengakui adanya kesulitan besar dalam melakukan identifikasi terhadap pesantren secara keseluruhan sebagai sebuah unit subkultural. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa tidak semua aspek kehidupan dalam pesantren berwatak subkultural, bahkan aspek-aspek utamanya pun ada yang bertentangan dengan batasan-batasan untuk disebut sebagai sebuah subkultur atau, paling tidak, hanya tinggal dalam kerangka ideal semata, dan tidak riil. Atas dasar kenyataan ini, Abdurrahman Wahid merumuskan kriteria minimal untuk pesantren sebagai sebuah subkultur. Kriteria itu meliputi lima aspek. *Pertama,* eksistensi pesantren sebagai sebuah lembaga kehidupan yang menyimpang dari pola kehidupan umum di negeri ini. *Kedua,* terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pesantren. *Ketiga,* berlangsungnya proses pem-

---

[13] *Ibid.*

[14] Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur," dalam Dawam Raharjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan,* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 39.

[15] Abdurrahman Wahid, "Pondok Pesantren Masa Depan," dalam Marzuki Wahid (ed.), *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), hlm. 13-14.

bentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren lengkap dengan simbol-simbolnya. *Keempat,* adanya daya tarik ke luar sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada dalam masyarakat itu sendiri. *Kelima,* berkembangnya suatu proses pengaruh-mempengaruhi dengan masyarakat di luarnya yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang secara universal diterima kedua pihak.[16]

Sementara itu, tesis lain yang sangat signifikan terkait dengan fokus penelitian ini adalah menyangkut perihal kelembagaan pesantren. Menurut Zamakhsyari Dhofier, sebuah lembaga atau institusi dapat disebut sebagai pesantren jika memiliki lima elemen dasar: pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai. Hal ini berarti bahwa selama elemen yang lima itu tidak dipenuhi oleh sebuah institusi, apapun nama dan aktivitas keagama-annya, maka selama itu pula institusi tersebut tidak akan berubah statusnya menjadi pesantren.[17] Dengan demikian, parameter yang digunakan Zamakhsyari Dhofier untuk sebuah institusi pendidikan yang bernama pesantren bersifat mutlak; ia tidak memberi ruang gerak sedikit pun terhadap berkurangnya elemen dimaksud.

Pendekatan dan Metode

Studi ini bersifat eksploratif karena permasalahan yang dijadikan objek kajiannya boleh dikatakan langka, belum cukup tersentuh oleh kegiatan-kegiatan studi tertentu. Sebagai upaya awal untuk membangun informasi keilmuan tentang sesuatu yang bersifat baru, studi ini semaksimal mungkin akan mencapai target utama, yakni dapat menyajikan gambaran yang utuh tentang apa,

---

[16] Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur," dalam Raharjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan,* hlm. 39-40.

[17] Dhofier, *Tradisi Pesantren,* hlm. 44.

mengapa, dan bagaimana hal-ihwal *Pesantren Buruh Pabrik*. Target utama tersebut berangkat dari bergesernya fungsi pesantren di sekitar kawasan industri. Oleh karena itu, pendekatan *komprehensif* yang berupaya memahami sesuatu dari sudut pandang keutuhannya lebih sesuai untuk dipergunakan dalam studi ini.

Dilihat dari inti permasalahan yang menyangkut kehidupan sosial-ekonomi dan mental-spiritual buruh pabrik, studi ini sangat memerlukan bantuan *metodologi kualitatif* dalam rangka menjamin diperolehnya pemahaman yang relatif utuh terhadap realitas lapangan yang kaya akan nuansa psiko-religius. Realitas tadi tidak mungkin terungkap secara tuntas dengan mengandalkan angka-angka kuantitatif yang muncul di permukaan. Sehubungan dengan hal itu, gabungan antara pendekatan yang mengacu kepada paradigma *rasionalistik* dan *fenomenologis* paling cocok untuk dipergunakan dalam studi ini. Paradigma *rasionalistik* dimaksud membangun kebenaran informasi keilmuan dengan bertumpu pada kecermatan pikir, ketajaman nalar, dan kekuatan logika argumentatifnya, baik ketika menggali data, menganalisis, maupun memaparkan temuan finalnya. Sementara itu, paradigma *fenomenologis* menunjuk kepada diskursus bagaimana studi ini memiliki fleksibilitas sedemikian rupa dalam memandang permasalahan yang menjadi fokus perhatiannya sehingga kebenaran informasi keilmuan dapat diperoleh semaksimal mungkin sesuai dengan realitas alamiah lapangan.[18] Dengan kata lain, metode-metode riset kualitatif secara jelas ditekankan dalam penelitian ini melebihi yang kuantitatif. Meski demikian, informasi numerik yang relevan dengan pertanyaan penelitian tidak dihindarkan sama sekali. Data tidak dianalisis dalam kerangka kuantitatif, diteliti secara statistik dan "diukur", namun digunakan sebagai bukti

[18] Lihat Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 9.

tambahan (*supporting data*) untuk mendukung data kualitatif dan interpretasi-interpretasi.

Apabila dihubungkan dengan basis filosofis keilmuannya, maka dari sudut pandang epistemologi yang mendasari paradigma *rasionalistik* dan *fenomenologis,* studi ini bergerak di atas empat kriteria kebenaran, yaitu kebenaran sensual, kebenaran rasional (logis), kebenaran etis, dan kebenaran transendental.[19] Kebenaran sensual adalah kebenaran yang didasarkan atas kemampuan indera untuk menangkapnya, sedangkan kebenaran rasional bertumpu pada ketajaman akal dalam melakukan penalaran terhadap sesuatu akibat keterbatasan indera manusia untuk menangkapnya. Meski demikian, ternyata, kebenaran rasional tidak mampu menyelesaikan semua persoalan, karena sesuatu yang benar menurut akal belum tentu secara tuntas sesuai dengan budi nurani dan nilai sosial di masyarakat tertentu sehingga perlu didukung oleh kriteria kebenaran etis. Hanya saja, kebenaran sensual, rasional, dan etis masih terbatas sesuai dengan keterbatasan apa yang dimiliki oleh manusia. Karena itu, untuk menutupi keterbatasan ketiga kriteria kebenaran tersebut, diperlukan kriteria lagi yang bersifat lebih absolut. Kriteria tersebut adalah kebenaran yang sumbernya adalah wahyu Tuhan.

Konsep

Penggunaan istilah "Pesantren Buruh Pabrik" pada judul penelitian ini, disadari memang belum sebegitu akrab di khazanah kebahasaan Indonesia, baik dalam percakapan rutin sehari-hari maupun dalam aktivitas studi keilmuan. Rangkaian kata *pesantren, buruh,* dan *pabrik,* sepintas lalu boleh jadi terkesan kurang serasi, mengingat antara satu dengan yang lain memiliki konotasi dan latar belakang historis pemaknaan yang berbeda. Pesantren adalah

[19] *Ibid.*, hlm. 13-14.

jenis institusi pendidikan Islam khas Indonesia,[20] yang sarat dengan penampilan dan kesan tradisionalitasnya, sebagai peninggalan masa lalu yang masih dilestarikan sampai sekarang. Sementara, pabrik sebagai bangunan dengan peralatan mesin-mesin untuk memproduksi barang dalam jumlah besar,[21] cenderung menampilkan simbol kecanggihan teknologi industri pada abad modern. Dan buruh, selaku *person* yang bekerja untuk pihak lain dengan mendapatkan upah,[22] dalam sejarahnya sudah ada sejak zaman kuno hingga di era modern yang semakin mengglobal sekarang ini.

Namun demikian, perbedaan tiga kata dalam hal latar belakang historis kebahasaan tersebut, rupanya memiliki celah kemungkinan yang cukup menarik untuk dipertemukan. Pesantren, memiliki siswa yang disebut dengan istilah *santri*, yakni sebutan khusus untuk murid-murid sekolah agama Islam.[23] Pabrik, memiliki komponen tenaga kerja yang sering disebut dengan istilah *buruh*. Sejak dahulu kala, sudah ada santri yang belajar agama Islam di pesantren, sambil bekerja di sawah atau menjadi buruh dalam sektor pertanian. Maka, selaras dengan perubahan zaman, tidak aneh kiranya jika sebaliknya kini terjadi, ada buruh pabrik yang seharian bekerja di sektor industri, sambil menambah ilmu dan amaliah keagamaan di sebuah pesantren. Jadi, ada buruh di sektor industri yang sekaligus adalah santri di sebuah pondok pesantren, seperti halnya di masa lalu ada santri pondok pesantren

---

[20] Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 7.

[21] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1990), hlm. 633.

[22] *Ibid.*, hlm. 139.

[23] Lihat Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda,* alih bahasa S.Gunawan (Jakarta: Penerbit Bhratara Karya Aksara, 1983), hlm. 25.

yang sekaligus menjadi buruh atau tenaga penggarap lahan pertanian milik orang-orang kaya di sekitarnya.

Demikianlah, dengan mempergunakan istilah *Pesantren Buruh Pabrik,* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah institusi atau aktivitas pendidikan/pembinaan keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu di lingkungan atau kawasan perusahaan, diikuti oleh sejumlah tenaga kerja yang sehari-harinya bergerak pada sektor industri. Ciri khas pesantren jenis ini, berbeda dengan pesantren *konvensional* yang cenderung menjadi tempat belajar dan melatih para santri dalam hal ilmu dan amaliah keagamaan.[24] Karena terkait dengan lapangan kerja industri yang cukup banyak menyita tenaga dan pikiran para santri yang sekaligus pekerja itu, maka fungsi pesantren buruh pabrik lebih bersifat sebagai wahana pelengkap dan penyeimbang religiusitas para santri pekerja di tengah kesibukan sehari-hari dan hiruk pikuk kehidupan kota yang penuh tantangan dan godaan. Prinsip *bekerja sambil belajar* atau sebaliknya *belajar sambil bekerja,* adalah ungkapan yang cukup mewakili gambaran riil program pendidikan dan pembinaan keagamaan bagi kalangan santri pekerja di lingkungan pesantren buruh pabrik tersebut.

Sumber Data

Data untuk mendukung penyelesaian studi ini dan otomatis berkaitan erat dengan jenis-jenis sumbernya adalah: (1) Data literer khususnya tentang pesantren dan buruh. (2) Data tentang kehidupan buruh pabrik, khususnya aspek keberagamaan dan mental-spiritual mereka. Sumbernya adalah buruh pabrik itu sendiri atau hasil penelitian yang telah dilakukan orang terdahulu.

---

[24] Lihat, H.A.R.Gibb & J.H.Krammers, *Shorter Encyclopedia of Islam,* (Leiden: E.J.Brill, 1965), hlm. 460-461.

(3) Data tentang situasi dan kondisi lingkungan. Sumbernya adalah realitas keadaan fisik dan sosial masyarakat yang, secara langsung maupun tidak langsung, termasuk ke dalam objek studi ini. (4) Data tentang alih fungsi pesantren dan atau hal lain yang menunjuk kepada *Pesantren Buruh Pabrik* yang menjadi fokus studi ini, yakni kos-kosan menjadi pesantren, penggunaan masjid sebagai sentra pembinaan kehidupan buruh, pembinaan keagamaan oleh pabrik sendiri dan majlis taklim dari rumah ke rumah. Adapun sumbernya adalah dokumentasi pesantren, realitas keadaan fisiknya, dan keterangan lisan kiai, para ustadz, staf pengelola, para santri dan pihak-pihak lain yang terkait baik langsung maupun tidak.

Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis, ciri, dan sumbernya, pengumpulan data dalam seluruh aktivitas studi ini dilakukan melalui teknik sebagai berikut: (1) Wawancara secara mendalam (*depth interview*) dengan responden tokoh masyarakat, kiai, ustadz, staf pengelola pesantren, santri, dan pihak terkait lainnya yang dipandang relevan dengan inti permasalahan yang menjadi fokus perhatian studi ini. (2) Observasi secara langsung dengan sasaran profil dan kondisi fisik bangunan pesantren, situasi kehidupan para santri di asrama (pondokan) beserta aktivitasnya, pergaulan mereka dengan masyarakat sekitar, dan realitas dunia buruh pabrik pada umumnya. (3) Angket sebagai teknik pelengkap untuk menggali data tentang latar belakang kehidupan para santri yang sehari-harinya adalah buruh pabrik dan perihal yang berkaitan dengan keterlibatan mereka di aktivitas pesantren, serta untuk kepentingan pengumpulan data lain yang melibatkan responden dalam jumlah besar. (4) Dokumentasi dalam rangka menghimpun dan menelaah arsip-arsip pesantren yang menyimpan data historisnya di masa lalu, di samping data tertulis lain yang menginformasikan keadaan riilnya sekarang. (5) Studi pustaka dalam wujud

telaah buku atau karya tulis lain, khususnya yang berkaitan dengan informasi tentang dunia pesantren dan buruh pabrik di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Bertolak dari judul, permasalahan, jenis dan karakteristik data, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses analisis data. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kedalaman dan keutuhan informasi keilmuan tentang *Pesantren Buruh Pabrik* yang menjadi fokus perhatiannya. Secara konkret, sebagaimana studi kualitatif pada umumnya, analisis data dalam studi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pengumpulan data di sepanjang aktivitas empirik lapangan. Ketidakterpisahan proses analisis dan pengumpulan data tersebut digerakkan oleh pengajuan hipotesis dan pengujiannya di lapangan secara terus menerus sampai menemukan titik kejenuhan informasi pada saat kegiatan studi dipandang cukup untuk kemudian diakhiri.

Dalam pemanfaatannya secara proporsional, analisis data dalam studi ini juga tidak mengabaikan sama sekali perolehan informasi atau data yang berwujud angka, khususnya berkaitan dengan upaya untuk mengetahui dan menggambarkan adanya kecenderungan-kecenderungan umum tertentu di masyarakat sehubungan dengan hadirnya model pendidikan Islam untuk kalangan buruh pabrik. Sikap semacam ini diambil dengan pertimbangan bahwa kecenderungan-kecenderungan dimaksud merupakan suatu hal yang boleh jadi tidak dapat terdeskripsikan secara tuntas jika semata-mata mengandalkan dukungan data verbal dalam wujud kata-kata.

Populasi dan Sampel

a. Tahap Pertama (Eksplorasi)

Penelitian ini menentukan populasinya di daerah Jawa Timur, daerah yang dikenal pesat pengembangan sektor industrinya

melalui pabrik-pabrik yang didirikan. Namun demikian, untuk memenuhi tuntutan efektivitas dan efisiensi sedemikian rupa dengan tetap mempertimbangkan asas *representativeness,* populasi tersebut disederhanakan ke dalam bentuk sampel yang meliputi empat kota. Keempat kota tersebut adalah kawasan Surabaya dan sekitarnya yang menjadi kawasan pendukung kota tersebut, yakni Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik. Dipilihnya kawasan tersebut dilatarbelakangi oleh pertimbangan empiris bahwa daerah-daerah tersebut merupakan kawasan yang menempatkan sektor industri sebagai tulang punggung pembangunan daerahnya. Pengembangan industri di kawasan tersebut berjalan pesat hingga menyedot banyak tenaga kerja, baik dari dalam kota maupun luar kota.

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Digunakannya teknik ini karena ia mengeksplisitkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh responden yang dijadikan sebagai sumber data. Di dalam proses *sampling* ini, pembatasan jumlah responden tidak akan dilakukan. Hal ini bergantung pada besar kecilnya pesantren beserta santri buruhnya dan atau pabrik beserta buruh yang dipekerjakan di dalamnya.

b. Tahap Kedua (Verifikasi Plus)

Dalam penelitian tahap kedua, verifikasi plus, penggalian data lebih difokuskan pada dua kelompok buruh pabrik, yakni (1) mereka yang terlibat baik secara aktif maupun tidak dalam unit-unit kegiatan keagamaan, dan (2) mereka yang tidak sama sekali dalam kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Pembagian responden ke dalam dua kelompok ini dimaksudkan untuk menghadirkan dua gambaran komunitas yang memiliki latar belakang sosio-kultural berbeda, sekaligus memverifikasi bahwa "terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pekerja yang terlibat dalam kegiatan keagamaan dengan mereka yang tidak terlibat".

Sedemikian banyak jumlah buruh pabrik di setiap daerah yang telah ditetapkan menjadi sampel penelitian tersebut, misalnya di Kotamadya Surabaya saja mencapai hampir dua ratus ribu orang,[25] sulit kiranya untuk mengambil seluruhnya sebagai responden dalam rangka pengumpulan data. Berdasarkan itulah, akhirnya dipilih secara acak (*random*) 400 orang buruh pabrik, dengan rincian setiap daerah penelitian 100 orang. Sesuai dengan fokus dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya 100 orang untuk masing-masing daerah penelitian tersebut dibagi ke dalam dua kelompok: 50 orang buruh pabrik yang tinggal di rumah kos dan tidak mengikuti pembinaan keagamaan di pesantren dan sejenisnya, 50 orang lagi buruh pabrik yang tinggal di lingkungan pesantren atau sejenisnya dan mereka aktif mengikuti pembinaan keagamaan.

c. Tahap Ketiga (Membangun Model)

Sedangkan pada tahap ketiga, pencarian model, penggalian data lebih banyak diarahkan untuk menguji kembali berbagai varian embrio pesantren buruh pabrik sebagaimana yang telah ditemukan pada penelitian tahap pertama, untuk selanjutnya dikonfirmasikan kembali kepada berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam proses industrialisasi, sebelum model pesantren buruh pabrik benar-benar dirancang. Pengkonfirmasian kembali data yang terkait dengan bagaimana model pesantren buruh pabrik sebaiknya dirancang bersama pihak-pihak berkompeten merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka mencari masukan dan kritik sebanyak-banyaknya, dalam rangka memadukan dimensi teoretis dan dimensi praksis-empiris sebagaimana dikehendaki di lapangan.

---

[25] Pada tahun 2000, jumlah buruh pabrik di Surabaya, tepatnya mencapai angka 197.767 orang, Lihat, Pemerintah Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka* (Surabaya: Dinas Pengelola Statistik Kota, 2000), hlm. 236.

Bab II
Tinjauan Teoretis

A. Buruh

Dalam sejarah peradaban manusia Indonesia, masalah perburuhan merupakan persoalan yang sangat krusial dan sarat dengan konflik. Kaum buruh[1] tidak jarang menjadi "kuda tunggangan" untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Buruh ibarat sapi perah yang selalu diperas dan dipacu dengan tuntutan-tuntutan yang tinggi dari pemilik modal dan atau pengambil kebijakan yang kerap berkolaborasi dengan pemilik modal. Persoalan yang mesti dimintakan pertanggungjawaban kepada buruh, dan ini yang selalu menjadi tuntutan buta pemilik modal, adalah produktivitas. Selama buruh masih mampu menjual atau mengeluarkan tenaganya untuk melahirkan produktivitas, selama itu pula ia akan dihargai. Jadi, tenaga kaum buruh dihargai dan diletakkan pada posisi sejauh mana ia masih mampu mengeluarkan tenaganya demi produktivitas, apa pun caranya.

Sementara itu, persoalan yang dihadapi buruh dalam hidupnya tidak terbatas pada persoalan ekonomi semata, namun ada

---

[1] Mengenai pengertian buruh secara definitif, lihat Mulli Trisna, "Buruh, Siapa sih Sampeyan?." *Gerbang*, Nomor 08, Vol. 03, Agustus-Oktober 2000, 5; Ryadi Gunawan, "Di tengah Deru Himpitan Mesin-mesin Pabrik," dalam Aris Wibawa (ed.), *Menuju Hubungan Demokratik* (Yogyakarta: Fisipol Universitas Atamajaya Yogyakarta & Lapera Pustaka Utama, 1998), hlm. 5.

persoalan lain yang bersentuhan dengan mental spiritual sesuai dengan keberadaannya sebagai manusia dengan segala kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan mendalami persoalan-persoalan buruh seperti yang dimaksud penelitian ini, upaya-upaya pembahasan mesti dilakukan dengan berkisar pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sejarah perkembangan buruh dalam kerangka pengalaman industrialisasi di Indonesia, keberadaan buruh di tengah industrialisasi dan perubahan sosial, serta strategi mereka dalam mempertahankan hidup.

Buruh dan Sejarah Perkembangannya: Pengalaman Industrialisasi di Indonesia

Secara historis, perkembangan industrialisasi di Indonesia berlangsung secara cepat mulai tahun 1970-an. Sebelum masa itu, institusi-institusi yang bergerak pada aktivitas-aktivitas industrial, seperti pabrik dan institusi-institusi pabrik industrial lainnya, memang sudah eksis di negeri ini, namun akselerasinya baru terjadi pada tahun 1970-an seiring dengan proses atau tuntutan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.[2] Pada era Orde Lama, Soekarno, terutama periode Demokrasi Terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965, industrialisasi dijalankan dengan fokus utama pada perkembangan cara menasionalisasi kebanyakan perusahaan asing berskala besar yang ada di Indonesia. Pada era tersebut, kondisi kerja tidak jauh lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan Soekarno menekankan perjuangan antikolonial dan antikapitalis dalam konfrontasinya dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat.[3] Oleh Soekarno, isu-isu

---

[2] Setiawan. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologi Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 61.

[3] Menurut Taufik Abdullah, kebijakan Soekarno tersebut semakin memencilkan pergaulan Indonesia dalam pergaulan internasional, dan akhirnya menyeret bangsa Indonesia kepada tragedi sosial dan polotik. Lihat Taufik Abdullah, "Kata Pengantar," dalam M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994), hlm. xiv.

politik dipandang lebih penting daripada ancaman memburuknya situasi ekonomi, kondisi ini pada akhirnya memperburuk wajah perburuhan Indonesia. Saat itu, standar upah secara komparatif lebih rendah dibanding sebelum perang kemerdekaan.[4]

Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan serangkaian reformasi di bidang ekonomi secara mendasar. Sistem ekonomi diliberalisasikan dan aliran investasi swasta asing secara serius didorong masuk. Upaya yang dilakukan pemerintah ini membawa hasil yang cukup menggembirakan, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup baik pada saat itu.[5]

Upaya demi upaya untuk meningkatkan atau mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional itu dilakukan tahap demi tahap hingga pada Repelita ketiga tahun 1979/1980-1983/1984. Saat itu dicanangkan sasaran utama dalam memajukan industrialisasi sebagai aktor pembangunan perekonomian yang utama. Penekanan utama diletakkan pada promosi industri-industri yang menyerap banyak tenaga kerja *(labour intensive industries)*. Pola pembangunan ekonomi dengan penekanan pada industri seperti tersebut menjadi basis bagi Repelita berikutnya. Pada pasca Repelita ketiga, prioritas pembangunan ekonomi digeser ke sektor industri mesin. Investasi-investasi swasta diidentifikasi sebagai aktor-aktor utama dalam proses industrialisasi.[6]

Seiring dengan proses industrialisasi tersebut, terjadi pula arus migrasi atau urbanisasi penduduk pedesaan. Kota dengan proyek-proyek industrialisasinya, meminjam istilah Dawam Rahardjo, menjadi *pull factor*, daya tarik bagi penduduk pedesaan

---

[4] Lihat Soe Hok Gie, *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Serikat Islam Semarang,* 1917-1920 (Jakarta: Franz Fanon Foundation, 1990), hlm. 5.

[5] Lebih lanjut mengenai hal ini lihat Huib Poot, Arie Kuyvenhoven dan Jaap Jansen, *Industrialisation and Trade in Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 4.

[6] Setiawan, *Konflik Sosial,* hlm. 62.

dalam kaitannya dengan perihal peluang kerja dan kesempatan berusaha.[7] Hal ini terjadi dengan tidak terlepas dari tiga faktor pemicunya. *Pertama,* pembangunan pertanian di pedesaan menimbulkan *push factor* akibat penggunaan teknologi dan akses kredit pertanian yang tidak merata. Sementara itu, pada saat yang sama, dan ini yang menjadi faktor yang *kedua,* industrialisasi [di perkotaan] dipahami dapat memfasilitasi tercapainya kebutuhan hidup dengan cara yang lebih mudah dan cepat. *Ketiga,* secara ekonomis, pendapatan yang mereka peroleh sebagai konsekuensi dari keterlibatan mereka bekerja di sektor industri dapat diraih dengan risiko kerugian yang jauh lebih kecil dibanding dengan terlibat dalam aktivitas pertanian yang dikelolanya di pedesaan. Dengan demikian, urbanisasi seiring dengan terjadinya pergeseran struktur mata pencarian penduduk dari sektor pertanian menuju sektor jasa.[8]

Migrasi atau urbanisasi tersebut, oleh masyarakat lapisan bawah dilakukan secara berbondong-bondong sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sumber daya manusia pedesaan di kantong-kantong sekitar kawasan industri [di perkotaan]. Maka, muncullah kantong-kantong masyarakat pedesaan di kota-kota besar. Di kota, masyarakat migran lapisan bawah umumnya mengejar kesempatan bekerja di pabrik-pabrik, proyek-proyek konstruksi, sektor transportasi dan perusahaan-perusahaan dagang dan jasa.[9] Namun demikian, bidang-bidang usaha tersebut

---

[7] Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani,* hlm. 9.

[8] Hanya saja, Nasikun mencatat, urbanisasi di negara-negara Dunia Ketiga (termaksud Indonesia, pen.) cenderung terjadi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dari ekspansi industri manufaktur, tidak seperti di negara maju. Fenomena ini disebut dengan "urbanisasi berlebih" *(over-urbanization),* "urbanisasi semu" *(pseudo-urbanization),* atau "hiper-urbanisasi" *(hyper-urbanization).* Lihat Nasikun, "Kata Pengantar," dalam Alkan Gilbert & Josef Gugler, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. xiv.

[9] Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani,* hlm. 10.

tidak sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja yang datang. Padahal pada saat yang sama, semakin lama tenaga kerja yang datang semakin membesar jumlahnya. Hal ini pada akhirnya semakin membebani ketenagakerjaan (baca: perburuhan) di sektor industri, sebab banyaknya tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Akibatnya, daya tawar mereka sangat lemah di hadapan pemilik institusi-institusi industrial.

Dalam kaitan ini, persoalan-persoalan yang menimpah kaum buruh (tenaga kerja) dewasa ini dalam perspektif sosio-ekonomi pada umumnya meliputi beberapa hal. *Pertama,* jumlah jam kerja yang tinggi. Dalam kaitannya dengan produktivitas, buruh selalu dihadapkan pada tuntutan untuk selalu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Tuntutan itu mesti dipenuhi mesti apapun kondisinya serta merupakan satu-satunya poin yang ditekankan kepada buruh. Pemilik modal tidak mau tahu bagaimana cara memenuhi tuntutan itu. Yang mereka tahu hanyalah produktivitas buruh itu tinggi. Tuntutan itu selanjutnya menyebabkan jam kerja buruh tinggi dan padat. *Kedua,* upah yang rendah dibarengi dengan jam kerja dan kedisiplinan yang tinggi. Penentuan upah buruh masih banyak didasarkan pada standar kebutuhan dasar. Hal ini masih diperparah lagi oleh sikap perusahaan atau pemilik modal yang selalu membuat alibi mengenai institusi industrialnya yang selalu dalam keadaan kritis secara finansial. Sikap yang demikian ini kemudian membawa dampak pada sistem penggajian yang tidak sebanding dengan volume kerja yang mesti dilakukan oleh buruh. Oleh karena itu, buruh dihadapkan pada persoalan besarnya tuntutan yang harus dipenuhi sementara pendapatan yang ia terima sebagai konsekuensi dari pemenuhan tuntutan itu lebih rendah. *Ketiga,* kurangnya jaminan keamanan dan keselamatan kerja. Dalam menjalankan tugas-tugas kerjanya, buruh dalam banyak kasus tidak dilengkapi dengan peralatan dan instrumen-instrumen pengamanan diri yang cukup. Akibatnya, risiko

kecelakaan kerja selalu menjadi ancaman yang kerap menghantui setiap aktivitas kerjanya. Persoalan yang ketiga ini semakin memperparah kondisi kerja buruh, sebab di satu sisi mereka dihadapkan pada tuntutan produktivitas yang tinggi, sementara di sisi lain tidak dilengkapi dengan instrumen-instrumen pengamanan diri. Akibatnya, buruh berada dibawah tekanan dari dua arah, produktivitas kerja dan ancaman kecelakaan kerja.[10]

Permasalahan-permasalahan di atas, bagi buruh perempuan khususnya, dirasakan sangat berat bebannya. Dalam kaitannya dengan hubungan industrial misalnya, buruh perempuan sering mendapat perlakuan yang tidak menguntungkan. Mereka masih kerap diposisikan secara diskriminatif dalam hal penggajian, termaksud tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan hak-hak reproduksinya.[11]

Berbagai persoalan di atas merupakan bagian dari rangkaian persoalan yang melilit kehidupan buruh dan tidak mungkin dielaborasi semuanya dalam tulisan ini. Hal ini sesuai dengan tingkat volume dan perkembangan persoalan yang selalu muncul dan menimpa buruh. Namun yang jelas, beberapa contoh dari rangkaian persoalan yang dihadapi buruh seperti tersebut di atas berkontribusi positif terhadap pengkondisian dan penciptaan pola hidup buruh yang serba mekanistis. Kondisi yang serba mekanistis demikian, selanjutnya menggeser pola dan bentuk-bentuk kehidupan yang sebelumnya mereka jalani. Permasalahan sosio-ekonomis tadi selanjutnya mengantarkan pada munculnya permasalahan psiko-religius yang penjelasannya saling berkaitan antara keduanya dan dapat dijumpai pada bagian lain dari tulisan ini.

---

[10] Lihat Razif, "Pengalaman Kelas Buruh dan Industri Manufaktur di Indonesia," dalam Aris Wibawa (ed.), *Menuju Hubungan Industrial*, hlm. 22-23.

[11] Lihat *Sehat*, tahun VI, No. 31, Juli 2000, hlm. 2.

Buruh di Tengah Industrialisasi dan Perubahan Sosial

Industrialisasi merupakan suatu proses yang penting dalam sejarah peradaban manusia. Industrialisasi dianggap sebagai kunci ke arah kemakmuran oleh setiap bangsa meski bukan satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sebagaimana watak dasarnya yang memfasilitasi lahirnya instrumen-instrumen teknis, industrialisasi sebangun dengan terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam suatu masyarakat. Selain itu, terlepas dari kritik yang dialamatkan kepadanya, industrialisasi juga membawa suatu bangsa kepada kemajuan *(progress)*. Kemajuan itu baik berkaitan dengan materi maupun simbol-simbol kebudayaan.

Secara prinsipil, industrialisasi merupakan upaya meningkatkan produktivitas kerja dengan menggunakan prinsip rasionalisasi dan efisiensi. Atas dasar ini, berbagai teknologi mekanis yang efektif dan efisien banyak digunakan. Akibatnya, sudah barang tentu, adalah tidak terelakkannya munculnya perubahan sosial.[12] Eratnya kaitan antara industrialisasi dengan perubahan sosial mendorong tumbuhnya apa yang disebut dengan masyarakat industri *(industrial society)*. Saint-Simon mengidentifikasi masyarakat industri ini sebagai masyarakat yang terlibat dalam proses memproduksi barang-barang dalam industri.[13] Dalam konteks ini, wacana perburuhan menemukan penjelasannya secara baik perihal keberadaannya dalam proses industrialisasi dan perubahan sosial. Perubahan sosial ini mempengaruhi banyak

---

[12] Dalam konteks ini, Yinger memberikan perjelasan bahwa jika kekuatan perubahan itu besar, maka arusnya pun terasa di serangkaian sistem. Salah satu sistem tersebut adalah agama. Dus, perubahan sosial itu juga membawa dampak terhadap perubahan keberagamaan. Lihat J. Milton Yinger, "Religion an Sosial Change: Functions and Dysfunctions of Sects and Cults among the Disprivileged," dalam Richard D. Knudten (ed.), *The Sociology of Religion: an anthology* (New York: Meredith Publishing Company, 1967), hlm. 483.

[13] Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani,* hlm. 37.

aspek masyarakat, mulai dari pola dan tingkat konsumerisme, orientasi sosial, urbanisasi, institusi-institusi sosial budaya, sampai pada tingkat kesakralan agama. Oleh karena itu, masyarakat industri identik dengan lahirnya struktur, tradisi, dan cara berpikir baru dalam masyarakat. Nilai-nilai tradisional banyak tergeser dan terdorong ke pinggir, bahkan tergantikan posisinya oleh nilai-nilai modern yang banyak merasuki individu maupun sosial, baik dalam pengertian kelembagaan formal maupun informal. Dengan kata lain, sebagaimana kata Nurcholis Madjid, perubahan sosial berarti perubahan susunan kemasyarakatan dari suatu sistem sosial praindustrial (agraris, misalnya) menuju sistem sosial industrial.[14]

Di tengah tingkat perubahan sosial yang tinggi seperti itu, bentuk dan sifat agama atau keyakinan cenderung diekspresikan secara dinamis, dan bahkan kerap menjadi saling berbeda dan variatif seiring dengan tingkat perubahan itu sendiri.[15] Bahkan, dalam banyak kasus, masyarakat industri yang tenaganya terkuras oleh pekerjaan yang keras di pabrik atau institusi-institusi industrial lainnya, tidak hanya terikat pada dunia modern secara ekonomis, tetapi secara kultural juga cenderung sekuler.[16] Akibat proses industrialisasi yang menempatkan kemampuan rasio dan semangat individualitas yang tinggi, masyarakat cenderung bergerak secara dinamis. Pengedepanan kemampuan rasio mengantarkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah di antara yang banyak mempengaruhi cara beradaptasi dan cara memandang terhadap lingkungan, baik fisik maupun nonfisik, serta hubungan

---

[14] Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 141.

[15] Joachim Wach's, *Sociology of Religion* (London: The University of Chicago Press, 1971), hlm. 268.

[16] Hermawan Sulistiyo, *Palu Arit di Ladang Tebu* (Jakarta: KPG, 2000), hlm. 111.

kemanusiaan. Persepsi dan respons terhadap masalah kemanusiaan banyak didasarkan pada metode berpikir empirik yang dilandasi oleh penalaran dan rasionalisasi. Karena itu, lingkungan sekuler menemukan lahan yang subur untuk berkembang dan bahkan mendesak lingkungan yang sakral. Nottingham menyebutkan bahwa kecenderungan sekularistik seperti ini semakin mempersempit dan melemahkan ruang gerak agama.[17]

Terkait dengan wacana perubahan sosial dari bentuk yang kurang maju ke bentuk yang maju, atau menurut istilah Nurcholish Madjid, dari sistem sosial praindustrial ke industrial di atas, Talcott Parson mengembangkan sebuah teori yang terkenal dengan nama *pattern variabel.* Dalam perspektif teori ini, perubahan sosial dari kurang maju ke maju juga berarti perubahan dari:

a. *Affectivity versus affectivity neutrality,* yakni hubungan sosial dari sifatnya yang mementingkan dan berlandaskan emosi (masyarakat tradisional) ke hubungan sosial netral (masyarakat maju).

b. *Self-orientation versus collective-orientation,* yakni perubahan dari tindakan yang berorientasi kelompok ke yang berorientasi individu.

c. *Universalism versus particularism,* yakni pergeseran dari hubungan sosial yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan khusus (subjektif) ke pertimbangan objek, berlaku untuk semua orang.

d. *Quality versus performance,* yakni pergeseran hubungan sosial karena pertimbangan primordialisme ke pertimbangan kecocokan secara timbal balik.

---

[17] Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama,* terj. Abdul Muis Naharong (Jakarta: CV. Radjawali, 1985), hlm. 60.

e. *Specificity versus diffuseness*, yakni pergeseran dari sifat hubungan sosial yang berorientasi komunitas (keluarga) ke hubungan sosial yang terbatas atau tersegmentasi.

Industrialisasi sebagai Akar Masalah

Di Indonesia, proses industrialisasi merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawa-tawar lagi. Industrialisasi merupakan suatu proses pembangunan dan upaya manusia dengan budaya beserta kelembagaan dari masyarakat dalam suatu struktur ekonomi dan kurun tertentu sehingga mampu mendorong pertumbuhan penghasilan dan kesejahteraan yang diharapkan dapat memberi kemajuan dan kemandirian bangsa.[18] Untuk mendukung proses industrialisasi tersebut, dibutuhkan banyak tenaga kerja yang mesti terlibat di dalamnya, baik pada level pengambil kebijakan, pengaman, pelaksana, dan bahkan pekerja kasarnya. Maka, muncullah dalam kaitan ini buruh dalam jumlah yang tidak kecil.

Seperti halnya yang telah dialami oleh banyak negara maju lainnya, proses industrialisasi telah dianggap sebagai salah satu *main gates* menuju kemakmuran bangsa secara luas. Sebagai bangsa yang masih bertumpu pada keunggulan *natural sources* dan budaya agraris, program pembangunan yang berorientasi pada industrialisasi di Indonesia masih mengalami banyak kendala.[19] Kesiapan sumber daya manusia, baik berupa kapabilitas keilmuan dan penguasaan teknologi maupun akseptabilitas budaya dan kemungkinan dampak ekologisnya adalah persoalan paling mendasar dari setumpuk persoalan lainnya yang belum

---

[18] Lihat Dipo Alam, "Perencanaan dan Pengembangan Industri dan Perdagangan," dalam *Prisma*, Nomor Khusus 25 Tahun (1971-1996), tahun XXV, (1996), hlm. 97-98.

[19] Mengenai masalah-masalah proses industrialisasi beserta dampak negatifnya dalam konteks pulau Jawa, lihat, misalnya, Ines Smyth, *Industrialization and Natural Resaurces* (Bandung: Akatiga, 1997).

terpecahkan secara memuaskan dalam menghadapi program pembangunan di sektor ini. Terdapat banyak prakondisi industrialisasi yang sulit untuk diciptakan akibat gesekan dan aksi saling tarik menarik antara unsur-unsur eksternal (*external elements*) pada satu sisi, dengan sejumlah modalitas domestik (*domestic modalities*) yang sangat resisten terhadap kedatangan unsur-unsur eksternal dimaksud, di sisi lain.

Pertautan dua nilai yang berbeda dalam setiap proses industrialisasi merupakan hal niscaya yang kerap terjadi di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pada umumnya, proses dialog dua nilai yang berbeda ini bisa membawa pada salah satu dari dua konsekuensi: "perkawinan kultural" (*cultural intermarriage*) antar keduanya maupun konflik kultural yang berakibat pada rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat penerima industrialisasi. Sepanjang yang dialami adalah proses dialog intim–bahkan perkawinan kultural-antara keduanya, sudah barang tentu tidak perlu dipersoalkan. Namun ketika kedatangan industrialisasi justru membawa pada konsekuensi kedua, konflik kultural antara keduanya, hal ini berarti bahwa proses industrialisasi justru membawa permasalahan baru di kalangan masyarakat penerima yang akan semakin memperberat beban mereka di kemudian hari. Kemungkinan terjadinya konsekuensi yang kedua inilah yang harus diperhatikan agar tidak terjadi di Indonesia di tengah gencarnya proyeksi program pembangunan berorientasi industri.[20]

---

[20] Bandingkan dengan persoalan alih teknologi yang terjadi di sejumlah negara Amerika Latin, terutama Brazil, yang tidak mempertimbangkan potensi domestik dan kesiapan sumber daya manusianya. Akibat persoalan ini, proyek alih teknologi secara besar-besaran justru menambah daftar penderitaan negeri ini. Menurut Soedjatmoko, persoalan yang muncul akibat program industrialisasi yang tidak dibarengi dengan kesiapan pihak penerima di antaranya adalah masalah pengangguran (*unemployment*), ketidakadilan yang berupa disparitas ekonomi antara si kaya dan si miskin, ketergantungan daerah (*countryside*) terhadap pusat-pusat industri, dan kerusakan ekologis. Lebih lanjut lihat Soedjatmoko, "Teknologi,

Di samping dampak kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh proyek industrialisasi, dampak serupa juga banyak terjadi pada kehidupan sosiokultural masyarakat sekitar. Paradigma industri kapitalistik seringkali menafikan realitas humanisme psikologis para pelaku industri, terutama sekali kaum buruh dan masyarakat sekitar, sehingga akibat yang ditimbulkan adalah fenomena dehumanisasi masyarakat industri.[21] Fenomena dehumanisasi ini ditandai dengan tercerabutnya kehidupan masyarakat dari akar-akar tradisi dan budaya dan terkikisnya nilai-nilai spiritual. Kehidupan industri yang mekanistik ini, dalam perspektif psikoanalisis, melahirkan manusia-manusia mesin yang tidak berbasis pada kehidupan spiritual dan nilai-nilai tradisi yang dalam bahasa Erich Fromm disebut sebagai *homo mechanicus, automaton man,* dan *homo consumens.*[22] Terjadinya prototipe manusia semacam ini lebih disebabkan pendekatan manusia modern dalam melihat realita kehidupan lebih bersifat mekanikal mengikuti gelombang arus kehidupan industri yang ada di sekitarnya. Tujuan utama dalam kehidupan mereka disejalankan dengan bagaimana memproduksi sesuatu atau meraih untung sebanyak-banyaknya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Manusia modern pada gilirannya tereduksi menjadi sekadar bagian dari barang-barang komoditas yang bernuansa hitungan matematis. Memang dalam struktur kehidupan semacam ini segala kebutuhan duniawi manusia dapat tercapai, hanya dengan sekali pencet (tombol) saja. Waktu terasa semakin efisien dan energi bisa dihemat melalui teknologi dan atau industri. Namun yang patut

---

Pembangunan dan Kebudayaan," dalam Y.B. Mangunwijaya (ed.), *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya,* Vol. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 49-57.

[21] Sayyed Hossein Nasr, *Islam and the Plight of Modern Man* (London: Longman, 1975), hlm. 77.

[22] Erich Fromm, *The Heart of Man: Its Genius for Good and Devil,* (New York: Harper & Row, 1964), hlm. 57-59.

dipertanyakan di sini adalah bukan pada persoalan apakah manusia modern bisa diperlakukan dengan enak oleh industri, sekalipun kenyataannya segala sesuatu terasa lebih nikmat. Persoalannya justru terletak pada apakah manusia itu termasuk barang mati atau barang hidup (*living things*). Inilah pertanyaan mendasar yang sulit dijawab oleh realita modernitas industrial.[23]

Secara teoretis, proses dehumanisasi manusia industri ini praktis lahir sejak munculnya industrialisasi di muka bumi ini yang diawali pada abad pencerahan di Eropa Barat (*Renaissance/ Aufklarung*) pada abad ke-16 dan kemudian diikuti oleh Revolusi Industri pada abad ke-18.[24] Abad ini menandai berdirinya negara-negara modern yang sekuler dan terjadinya tantangan yang serius terhadap dominasi nilai-nilai tradisional dalam kehidupan masyarakat.[25] Lokus original sekularisasi adalah di sektor-sektor ekonomi yang dipoles oleh proses kapitalistik dan industrial. Dalam konteks teoretis Berger, masyarakat industrial modern telah melahirkan apa yang disebut *liberated territory* (teritorial yang terbebaskan) dari wilayah agama.[26] Dari sinilah sekularisasi menyeruak dan menyebar ke seluruh sendi kehidupan masyarakat modern. Menurutnya, "laju agama terhenti di depan pintu pabrik" ("*religion stop at the factory gate*"). Namun yang menarik adalah bahwa fenomena sekularisasi di kalangan masyarakat industri ini "boleh jadi" tidak berlaku di sejumlah institusi tradisional dan privat semacam keluarga, sebab dari sektor keluargalah simbol perlawanan agama terhadap merasuknya iklim sekuler bisa dibangun. Kenyataan ini sekaligus mengindikasikan bahwa

---

[23] *Ibid.*, hlm. 57.

[24] Haedar Nashir, *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 7.

[25] Kenneth Thompson, "Religion, Values, and Ideology," dalam Stuart Hall, et. al. (eds.), *Modernity: An Introduction to Modern Societies* (Cambridge: Blackwell Publishers Inc., 1996), hlm. 398.

[26] Peter L. Berger, *The Secred Conopy* (New York: An Anchor Book, 1990), hlm. 129.

terdapat kecenderungan polarisasi kehidupan agama antara sektor kehidupan industri yang sekuler dan institusi privat dan tradisional yang religius, seperti keluarga. Polarisasi kehidupan keagamaan ini, dalam beberapa hal, barangkali bisa dijadikan sebagai *entry point* untuk menjelaskan terjadinya serangkaian konflik spiritual yang melanda masyarakat industri.

Namun demikian, konstruk teoretis Berger di atas boleh jadi tidak *applicable* di tengah *setting* sosiokultural yang religius seperti bangsa Indonesia, dimana agama sudah menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Ini artinya bahwa kehadiran industri yang *by nature,* adalah sekuler sangat boleh jadi akan memunculkan konflik-konflik sosiokultural lebih keras di tengah masyarakat kita. Konflik sosiokultural dimaksud mengerucut dan mengkristal menjadi krisis spiritual dan ketercerabutan budaya atau nilai-nilai tradisional di kalangan masyarakat industri. Dalam konteks inilah polarisasi keagamaan sebagaimana dijelaskan di atas bisa dipakai untuk menjelaskan proses konflik sosiokultural yang dimaksud. Paradigma berpikir semacam ini tentu saja bisa dipahami dari kenyataan bahwa sebagian besar buruh pabrik yang bekerja di sektor industri kebanyakan berasal dari keluarga tradisional yang memiliki intensitas keterlibatan keagamaan relatif tinggi sebelum mereka meninggalkan daerahnya menuju ke kota (pusat industri). Sesampainya di pusat industri, mereka menemukan realita kehidupan yang jauh berbeda, bahkan bertentangan secara diametral dengan latar belakang kehidupan sosiokultural di tempat di mana mereka berasal. Sehingga muncullah kesenjangan-kesenjangan antara realita kehidupan industri yang sekuler di satu sisi, dengan nuansa keagamaan di daerah asal. Fenomena semacam ini oleh Berger disebut sebagai *cultural lag* (ketertinggalan kultural).[27] Dengan kata lain, terdapat anakronisme simbol-simbol tradisional di wilayah industri.

[27] Berger, *The Sacred Canopy*, hlm. 129.

Upaya apapun untuk *reconquista* (menaklukan kembali) *the liberated territory* tersebut melalui lembaga-lembaga tradisional keagamaan, di mata Berger, hanya akan membahayakan proses produksi industri.[28] Sebuah komunitas industri, lanjutnya, membutuhkan kehadiran generasi ilmiah teknologis yang disertai tingkat rasionalitas tinggi. Argumentasi Berger ini mungkin bisa dipahami dari dua sudut pandang. *Pertama,* logika argumentasi ini dibangun di atas landasan berpikir sekuler yang mengasumsikan bahwa sekularisme adalah pilihan terbaik bagi masyarakat Barat. Oleh karena itu, Berger sebenarnya sedang menjelaskan proses industrialisasi di tengah masyarakat Barat yang sekuler. Jalan berpikir ini, sekali lagi, tidak serta merta relevan dengan konteks kehidupan sosiokultural bangsa Indonesia. *Kedua*, agama seringkali dipahami secara berbeda antara sebuah komunitas keagamaan tertentu dengan komunitas lainnya. Di sebuah komunitas sekuler, agama barangkali tidak menemukan relevansi dan signifikansinya terhadap kehidupan industri. Namun di komunitas lain, terutama yang memiliki pandangan kalvinistik tinggi seperti Protestan,[29] agama bisa dipahami secara terbalik: ia memberi elanvitalitas bagi seluruh aktivitas kehidupan masyarakat.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa fenomena *cultural lag* yang terjadi di kalangan buruh pabrik tidak bisa dipandang sebelah mata, oleh karena dampak yang ditimbulkan dari gejala

---

[28] *Ibid.*, hlm. 132.

[29] Lihat, Max Weber, *The Protestant Etich and the Spirit of Capitalism* (New York: Charles Scribner's Sons, 1958). Lihat juga bukunya yang lain, *The Sosiology of Religion* (Boston: Beacon Press, 1964), terutama halaman 223-245. Sayang sekali konsepsi Weber tentang sikap Islam terhadap kapitalisme dan ekonomi terlihat reduktif dan kurang memiliki nilai objektivitas yang memadai. Dalam bukunya yang kedua (bab 16) Weber secara distortif memberikan atribusi kepada Islam sebagai agama yang kurang memberikan ruang bagi berkembangnya semangat kapitalistik. Sebaliknya, agama ini lebih memberikan perhatiannya kepada perkembangan mistisme sufistik yang menghindarkan diri dari hingar bingar kehidupan duniawi. Untuk selengkapnya, lihat Weber, *The Sociology*, hlm. 262-274.

semacam ini sangat tidak menguntungkan bagi sistem kehidupan ekonomi-industri secara umum. Memang betul bahwa keterlibatan agama di kalangan masyarakat industri sekuler tidak menemukan relevansi, signifikansi, bahkan kontraproduktif dengan semangat kapitalisme ekonomi ketika kita melihat realita kehidupan buruh dari perspektif teoretis sekularisme Berger. Namun tidak sedikit *counter thesis* dari sejumlah ilmuwan telah membuktikan kecenderungan sebaliknya: ternyata semakin banyak masyarakat industri yang rindu dan haus akan nilai-nilai agama –dalam pengertiannya yang substantif- di tengah gejala krisis spritualitas-psikologis.[30] Oleh karena itu, agama menemukan relevansinya dengan kehidupan masyarakat industri dalam sisi fungsionalnya sebagai terapi psikologis dan rujukan nilai-nilai moral bagi mereka, di wilayah sekuler sekalipun.[31] Ini pula satu-satunya *raison d'etre* bertahannya agama di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekuler, di samping misi seteriologis atau *salvation* terhadap seluruh umat manusia.

Berdasarkan elaborasi di atas, kehidupan industri negeri kita tidak bisa begitu saja disimetriskan dengan watak dasar kehidupan industri Barat yang sekuler. Menegaskan nilai-nilai agama dari kehidupan industri, dengan demikian, adalah tidak bijaksana dan justru akan menjadi *blunder* bagi program pembangunan yang tengah gencar-gencarnya dikampanyekan bangsa kita. Bukan saja watak dasar kehidupan sosiokultural yang berbeda, nilai-nilai

---

[30] *Counter thesis* semacam ini sudah banyak dilontarkan oleh ilmuwan Barat seperti futurolog Alvin Toffler melalui *Future shock* dan *The Third Wafe* (New York: Bantam Books, 1989), Gilles kepel melalui *The Revenge of God* (Pennsylvnia: The Pennsylvania State University Press, 1994), dan Sayyed Hossein Nasr melalui *The Encounter of Man and Nature: The Spritual Crisis of Modern Man* (London: Allen & Unwin, 1968).

[31] Wolfgang Schuchter, "The Future of Religion," dalam Jeffery C. Alexander & Steven Seidman (eds.), *Cultural and Society: Contemporary Debates* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 259.

agama itu sendiri di sisi lain diasumsikan bisa berperan menjadi *supporting values* dan penangkal bagi dampak destruktif bagi pengembangan industri selama keduanya dilaksanakan dalam irama harmoni dan equilibrium. Dalam konteks ini, barangkali peringatan Herbert Marcuse akan bahaya masyarakat industri sangat relevan untuk dicamkan bersama: *contemporary industrial society tends to be totalitarian.*"[32] Oleh karena totalitarianisme, menurut Marcuse, bukan saja merupakan koordinasi masyarakat industrial yang teroristik, melainkan juga koordinasi ekonomi-industri nonteroristik yang boleh jadi berkembang melalui manipulasi kebutuhan-kebutuhan kepentingan sesaat (*vested interests*) semata. Terhadap gejala ini, nilai-nilai agama bisa diharapkan mampu membekali para pelaku industri agar tidak terseret logika kehidupan industri yang mekanistik.

Strategi Pertahanan Hidup Buruh: Perspektif Sosio-ekonomi dan Psiko-religius

Terhadap beragam persoalan yang dihadapi, buruh memiliki dan menerapkan strategi yang tidak seragam *(uniform)* dalam mempersepsi dan meresponnya. Keragaman strategi itu terkait dengan latar belakang, kondisi, dan pengalaman-pengalaman yang masing-masing dimiliki buruh. Beragam strategi itu dilakukan dalam rangka mempertahankan hidup. Menurut Setiawan, setidak-tidaknya terdapat tiga strategi pertahanan hidup *(survival)* yang dipraktikkan oleh buruh. *Pertama,* bekerja keras dengan tidak hanya bergantung pada kerja pabrik, melainkan juga mengembangkan aktivitas-aktivitas ekonomis luar pabrik dengan pertimbangan *self-sufficiency* (kecukupan diri) dan *self-assertiveness* (ketegasan diri) dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua,* kepatuhan terhadap otoritas-otoritas baik di dalam keluarga

[32] Herbert Marcuse, "From Consensual Order to Instrumental Control," dalam Jeffery C. Alexander & Steven Seidman (eds.), *Culture and Society,* hlm. 284.

maupun di tempat kerja yang dibuktikan dengan hidup bersama dengan keluarga dan ketaatan terhadap atasan. *Ketiga,* menekankan maksimalisasi cara-cara memperoleh materi sebagai sasaran utama dalam hidup meskipun harus mengabaikan nilai-nilai religius.[33]

Strategi pertama di atas tidak bisa dilepaskan dari latar belakang keluarga yang dikarakteristikkan oleh hubungan-hubungan konfliktual yang mendorong *self-sufficiency* dan *self-assertiveness* dalam kehidupan buruh. Pengalaman-pengalaman biografis menyebabkan buruh fleksibel dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan kontribusi terhadap *self-sufficiency* dan *self-assertiveness* dalam personalitas mereka. Pengalaman-pengalaman tersebut memberikan keberanian kepada mereka untuk mengambil risiko dalam perjuangan mempertahankan hidup.

Strategi kedua, berkaitan dengan latar belakang keluarga yang dikarakteristikkan oleh sedikit hubungan konfliktual, sehingga wajar jika diwarnai oleh kepatuhan terhadap otoritas-otoritas baik di dalam keluarga maupun di tempat kerja. Akibat dari strategi ini, buruh kurang independen dalam menanggung segala risiko ekonomis serta bermaksud untuk meminimalisir risiko dalam kehidupan ekonomis. Kenyataan ini dibuktikan di antaranya dengan tinggal bersama keluarga.

Strategi ketiga, mengendalikan hubungan dengan orang lain didasarkan kepada pertukaran dan berorientasi pada ganjaran-ganjaran material. Dengan kata lain, strategi ini menjunjung tinggi prinsip bahwa dalam pekerjaan, berkooperasi dengan orang lain dilakukan demi meningkatkan gratifikasi material yang diterima.[34]

---

[33] Setiawan, *Konflik Sosial,* hlm. 289-291.

[34] *Ibid.,* hlm. 291.

B. Pesantren

Terhadap persoalan yang berkaitan dengan pesantren, terdapat beberapa poin penting yang perlu diuraikan sesuai dengan maksud dilakukannya penelitian ini. Poin-poin tersebut meliputi pesantren dan sejarah perkembangannya, peranan pesantren dalam kehidupan masyarakat, dan jenis-jenis pesantren. Secara rinci, penjelasan mengenai hal dimaksud dapat dijumpai sebagaimana di bawah ini.

Pesantren dan Sejarah Perkembangannya

Pandangan kesejarahan menunjukkan bahwa kehadiran pesantren di negeri ini seiring dengan proses penyebaran agama Islam yang untuk pertama kalinya dilakukan atau dibawa oleh kepemimpinan para wali. Awalnya, pesantren merupakan pusat-pusat penyebaran Islam oleh para wali yang merupakan sambungan sistem *zawiyah*[35] di India dan Timur Tengah.[36] Hal ini berarti para wali itulah yang merintis berdirinya model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang bernama pesantren. Oleh karena itu, pesantren oleh Tilaar disebut sebagai sebuah bentuk pendidikan yang *indigenous*.[37] Karena para wali juga dikenal sebagai tokoh spiritual atau bahkan perancang skenario bagi munculnya kesultanan Islam di berbagai wilayah Nusantara, maka dapat dibayangkan betapa penting dan strategisnya kedudukan pesantren ketika itu dalam percaturan puncak kekuasaan pemerintahan. Sebagai contoh, Sunan Giri dengan pesantrennya

---

[35] Sistem *zawiyah* adalah sistem pembelajaran atau transmisi keilmuan yang mula-mula diselenggarakan di dalam masjid secara berkelompok berdasarkan diversivikasi aliran sehingga pada tataran selanjutnya mengkristal menjadi aliran-aliran pemikiran agama *(shcools of thought)*.

[36] Nurcholish Madjid, "Tasawuf dan Pesantren," dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 104.

[37] Lihat HAR Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 151.

di puncak perbukitan, yang berlokasi di bagian selatan kota Gresik, Jawa Timur, dikabarkan adalah figur di belakang layar bagi lahirnya kesultanan Islam Demak Bintoro di Jawa Tengah yang cukup terkenal itu.[38]

Kehadiran pesantren di awal pertumbuhannya sudah tentu menampilkan suasana Islam ketika itu, baik di kawasan asalnya (Timur Tengah) maupun ketika menjejakkan kaki untuk pertama kali di wilayah Nusantara. Di kawasan asal perkembangannya (Timur Tengah), pada saat itu Islam sudah tidak lagi berada di puncak kejayaannya, setelah Baghdad dan Spanyol jatuh ke tangan bangsa Mongol pada kurang lebih abad XIII Masehi.[39] Akibatnya, keunggulan di bidang sains dan peradaban yang pernah didominasi kaum muslim sebelum itu secara perlahan menjadi lenyap. Kaum Muslim berganti menoleh dan kemudian tenggelam dalam tasawuf, seolah ingin terlepas dari keruwetan duniawi. Pada kondisi inilah Islam–dalam pengertian massal, bukan individual orang-per orang–masuk ke berbagai daerah Nusantara, bersentuhan dengan adat istiadat dan tradisi budaya lokal yang bernapaskan Hindu-Budha dan animisme, sehingga mau tidak mau akan terbawa pula hasil asimilasinya ke dalam wujud lembaga pesantren.[40]

Berdasarkan latar belakang historis seperti inilah, kiranya dimengerti mengapa sosok pesantren di Indonesia menampilkan diri–paling kurang menurut keadaan aslinya–secara umum

---

[38] H.J. De Graaf & Th. G, Th. Pigeaud, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram,* cet.III (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 80-85.

[39] K. Ali, *A Study of Islamic History* (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1980), hlm. 287-289.

[40] Dalam kaitan ini terjadi perbedaan pendapat mengenai asal-usul pesantren apakah orisinal Indonesia ataukah merupakan bentuk adopsi dan imitasi dari lembaga yang pernah didirikan dan dijalankan kaum Muslim pada abad pertengahan Islam. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah,* cet II (Jakarta: LP3ES, 1994), 3-21.

sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada ilmu keagamaan,[41] khususnya fiqh, tasawuf, dan *nahwu-sharaf*. Artinya, tidak ada pesantren yang sejak—katakanlah—awal kemunculannya, mengajarkan ilmu fisika atau kimia, padahal ilmu-ilmu semacam itu pernah berkembang pesat dan menjadi kebanggaan kaum muslimin pada zaman keemasan Islam, di samping tentunya ilmu-ilmu keagamaan yang lain.[42] Andaikata pesantren untuk pertama kalinya muncul dan berkembang di Indonesia dalam suasana kecemerlangan Islam pada periode kejayaan di abad pertengahan, niscaya muatan pengajarannya di samping ilmu-ilmu khusus keagamaan juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum seperti tersebut di atas.

Meskipun proses kelahiran pesantren di negeri ini, barangkali, memang terjadi ketika suasana keberadaan umat Islam kurang menguntungkan, namun setelah menempuh jalan perjuangannya yang panjang dan berliku-liku, akhirnya berhasil membangun posisi dan akar tradisinya yang sedemikian kuat, menggantikan model pendidikan Hindu-Budha yang juga pernah mengalami kejayaan di kawasan ini pada masa lalu. Keberhasilan pendidikan pesantren menancapkan posisi dan tradisinya di masyarakat ini tidak terlepas dari model jalinan yang dikembangkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan budayanya, atau apa yang dalam perspektif pendidikan modern disebut dengan *Community Based Education Management* (manajemen pendidikan berbasis masyarakat).[43] Sedemikian

---

[41] M. Dawam Rahardjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan," dalam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, hlm. 2.

[42] Bahkan Nurcholish Madjid memberi catatan bahwa tumbuhnya pesantren secara historis bermula dari sistem *zawiyah* kaum sufi meski dalam perkembangan berikutnya bukan merupakan pusat gerakan tasawuf semata. Praktik-praktik syari'ah juga digerakkan secara rapi. Lihat Nurcholish Madjid, "Tasawuf dan Pesantern," hlm. 105.

[43] Lihat Tilaar, *Paradigma Baru*, hlm. 94.

kokoh dan mengakarnya kehadiran pesantren di Nusantara ini, sampai-sampai di kemudian hari berperan menjadi semacam markas kekuatan rakyat dalam menentang dan melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kaum penjajah. Dalam sejarah kesederhanaannya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan, rupanya pesantren memiliki daya ikat yang cukup tangguh untuk menyatuhkan semangat rakyat dalam membela hak-haknya yang dirampas dan ditindas oleh orang-orang yang mereka sebut sebagai kafir karena menjajah tersebut. Barangkali tidak sulit untuk mengemukakan bukti bahwa sebagian besar pemberontakan terhadap kesewenang-wenangan kaum penjajah memang timbul dan berkobar di bawah kepemimpinan seorang kiai atau ulama yang memiliki pesantren. Hal ini berarti bahwa pesantren tidak saja menampilkan diri sebagai lembaga pendidikan Islam, melainkan sekaligus juga perintis dan penggerak perjuangan rakyat untuk menentang penjajah; atau meminjam istilah Dawam Rahardjo, pusat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.[44]

Namun demikian, sebagaimana realitas kehidupan dunia pada umumnya bahwa pihak yang kuat cenderung menguasai dan memaksakan kehendaknya kepada yang lemah dalam konteks persaingan yang tidak seimbang, maka demikian pula halnya yang terjadi pada pesantren menghadapi penjajah. Dengan taktik pecah belahnya, orang-orang penjajah itu berhasil mengadu domba dan melemahkan pusat-pusat kekuasaan Islam (kesultanan), sehingga kondisi pesantren ikut terkena getahnya, menjadi incaran untuk

---

[44] Lihat Dawam Rahardjo, "Dunia Pesantren," 10. Adapun mengenai peranan pesantren pada masa-masa perjuangan, lihat Aboebakar Atjeh, *Sejarah al-Qur'an* (Surabaya: Sinar Trading Company, 1955), 289-317; Hamka, *Sejarah Ummat Islam* (Jakarta: NV. Nusantara, 1961); R. Muchammad Ali, *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara* (Jakarta: Bhratara, 1963); Taman Jaya, *Pustaka Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965); Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup KHA. Wahid Hasjim* (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Almarhum KH A. Wahid Hasjim, 1957); serta Hamka, *Dari Perbendaharaan Lama* (Medan: Firma "Madju", 1963).

dicurigai, ditekan, dan diintimidasi.[45] Setelah satu demi satu kesultanan Islam jatuh ke dalam pelukan penjajah, yang berarti hanya menyisakan kelompok penguasa lokal yang setia dan mau diajak kerja sama untuk menghisap dan menindas rakyat yang mayoritas kaum muslimin, maka timbulah kecenderungan *'uzlah* (mengasingkan diri) dari kalangan santri dan para ulama untuk mengundurkan diri dan menyingkir dari pusat-pusat pemerintahan kolonial di kota. Akibatnya, pesantren dan masjid kuno, yang didukung oleh masyarakat sekitar yang sedemikian patuh dan konsisten dalam menjalankan ajaran Islam, biasanya mengambil lokasi di pedesaan atau pelosok kampung dengan jalan kecil berliku-liku dan cukup sulit untuk dijangkau dan didatangi orang dari luar.[46]

Bagaimanapun kondisinya, tindakan *'uzlah* semacam itu di satu segi merupakan cermin dari sikap oposisi atau nonkooperatif kalangan pesantren terhadap penjajah, sehingga mendorong dilakukannya upaya terus menerus untuk bangkit kembali sewaktu-waktu dengan mengobarkan semangat *jihad* yang baru terhadap kemapanan kaum penjajah.[47] Semangat jihad semacam ini telah mengilhami munculnya program *gemblengan*[48] di lingkungan pesantren tertentu–di samping program pengajaran ilmu-ilmu keagamaan seperti biasa–yang intinya untuk membina kekebalan fisik mereka sebagai andalan kekuatan alam semesta

---

[45] Menurut Kraemer, meski kelompok kolonial mengadakan pembatasan-pembatasan, penekanan-penekanan, dan jenis intimidasi lainnya, kenyataannya, Islam justru menjadi daya tarik utama sebagai wadah perjuangan melawan penjajah. Lihat H. Kreamer, *Agama Islam* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1952).

[46] Meski dalam keadaan riil seperti itu, pengaruh pesantren cukup besar di mata masyarakat, baik di sekeliling pesantren maupun yang jauh dari lokasi pesantren. Lihat Dawam Rahardjo, "Dunia Pesantren," hlm. 3.

[47] Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 22.

[48] Program *gemblengan* adalah program peningkatan kekuatan tubuh dengan cara olah kanuragan dan pengisian kekebalan oleh guru kepada muridnya.

bila menghadapi gangguan kecil-kecilan, dan sekaligus sebagai persiapan yang tiada hentinya jika suatu ketika ada momentum untuk kembali melakukan pemberontakan. Semangat jihad ini dibuktikan secara nyata oleh keberanian para santri itu untuk maju ke medan laga dalam perang kemerdekaan.

Keteguhan sikap kalangan pesantren untuk tidak mau berkompromi dengan penjajah meski dengan iming-iming apapun dan lebih memilih tindakan *'uzlah* ke daerah-daerah terpencil di luar keramaian kota, menurut ukuran tertentu, bisa dinilai sebagai wujud semangat patriotisme dan kebangsaan. Namun demikian, tindakan semacam itu di kemudian hari telah menimbulkan berbagai akibat yang kurang menguntungkan bagi kalangan pesantren sendiri atau bahkan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam hal kemampuan dan penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan modern untuk mengambil peran selayaknya di zaman kemerdekaan. Riilnya, tindakan memencilkan diri dari orbit keramaian kota di masa penjajahan itu menyebabkan kalangan santri tertinggal atau bahkan kehilangan banyak sekali kesempatan emas, seperti menyekolahkan putera-puterinya di lembaga pendidikan modern, suatu hal yang sangat penting artinya di kemudian hari untuk mengisi berbagai posisi di pemerintahan yang lowong akibat hengkangnya kaum penjajah.

Tampaknya, perspektif ke depan semacam itu belum sempat muncul dan dipertimbangkan secara cermat, karena yang menjadi fokus utama kalangan pesantren dan masyarakat santri di negeri ini ialah bagaimana penjajah harus lenyap dahulu. Maka, terbuktilah ketika genderang revolusi kemerdekaan dikumandangkan, para santri itu berlomba mendaftarkan diri sebagai pejuang, dan dengan bekal seadanya mereka siap maju ke medan tempur[49] sehingga

---

[49] Zamakhsyari Dhofier memberikan catatan bahwa keterlibatan yang tinggi dari santri dalam gerakan perlawanan tersebut tidak bisa dipisahkan dari tingginya

banyak yang kemudian gugur sebagai syuhada. Dengan cucuran darah dan air mata, akhirnya kemerdekaan bisa dicapai. Untuk beberapa saat lamanya, kalangan pesantren dan umumnya kaum santri seperti terbuai oleh perasaan lega karena dapat mempersembahkan segalanya untuk kemerdekaan negara tercinta. Namun, setelah kehidupan normal dan merdeka, baru timbul perasaan dan kesadaran lain bahwa ternyata mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk ikut mengatur corak dan arah perjalanan bangsa, apalagi mewarnainya dengan nilai-nilai kehidupan yang dicita-citakan ajaran Islam.

Dalam batas-batas tertentu, dunia memang berhasil meningkatkan kualitas pengabdiannya seperti dengan cara mendirikan madrasah klasikal sebagai model pendidikan semi modern, termaksud juga berhasil menegerikan status madrasah yang dimilikinya dan menyelenggarakan pesantren yang secara khusus mengajarkan bahasa asing (Arab dan Inggris) kepada para santrinya; namun demikian, jika dibanding dengan cepatnya perjalanan bangsa menuju pola kehidupan modern, apa yang dilakukan oleh dunia pesantren tersebut, kenyataannya masih belum memadai. Sementara itu, tiba-tiba saja roda sejarah bergerak ke arah semakin menguatnya paham komunis di negeri ini. Sudah barang tentu, akibatnya dirasakan pula oleh pesantren yang jelas-jelas mengembangkan ideologi Islam. Kekurangserasian langkah atau bahkan benturan di antara kedua belah pihak, mau tidak mau sering terjadi, dan baru berakhir dengan hancurnya paham komunis di Indonesia. Lagi-lagi, setelah sekian lama ditekan dan disakiti, kalangan pesantren pun untuk kedua kalinya mengambil peran besar dalam menumpas orang-orang yang berpaham komunis tersebut.

---

kehormatan yang dimiliki kiai di mata santri. Dengan kehormatan tersebut, kiai dengan mudah menggerakkan santri. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, cet. VI (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 10-11.

Dengan tumbangnya pemerintahan yang didominasi kalangan komunis, untuk sementara waktu pamor pesantren dan kaum santri pun naik kembali. Seolah-olah ketika itu, masyarakat Indonesia hendak mengarah ke pola kehidupan Islami, misalnya ditandai dengan merebaknya aktivitas dan syiar keagamaan di mana-mana. Namun ternyata, apa yang terjadi semacam itu hanya berjalan beberapa saat saja. Rupanya, setelah lepas dari pengaruh paham komunis, negeri ini bukannya segera menerima pesantren atau Islam sebagai basis tata nilai dalam memajukan masyarakat, melainkan dalam metafor halusnya, bandul pendulum justru bergerak ke paham liberalis Barat yang sekuler. Kalangan santri bertambah lagi sakitnya, karena ternyata dari kanan-kiri di dalam negeri pun justru ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau ditelusuri, akar penyebabnya yang terpokok tidak lain adalah karena sumber daya manusia kalangan santri hingga saat itu belum cukup siap untuk segera ambil bagian dalam penetapan pola kehidupan modern. Jika santri sendiri kenyata-annya belum siap, mana mungkin dapat melakukan sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa secaraa keseluruhan.

Menyadari kenyataan seperti itu, kalangan santri memuncul-kan ide untuk mundur selangkah, kembali membenahi beberapa aspek pendidikan di pesantren yang dirasakan belum sesuai dengan perspektif juang ke masa depan. Maka, layaknya sebuah gerakan massal, akhirnya timbul upaya pembaharuan besar-besaran pada sejumlah pesantren keamanan, yang wujud konkretnya tidak saja sekadar mempertahankan pengajaran ilmu-ilmu murni keagama-an dan pendidikan model madrasah yang sudah boleh dikatakan mapan, melainkan juga membuka sekolah umum bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi.[50] Selain itu, muncul juga penyeleng-

[50] Sebagai contoh kasus, pesantrenTebuireng telah mengalami perkembangan-perkembangan baru, misalnya, pada tahun 1967 dibuka Universitas Hasyim Asy'ari yang terbuka untuk putera dan puteri. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren,* hlm. 110.

garaan khusus teknik dan keterampilan, serta unit-unit kegiatan yang bergerak di bidang pembinaan lingkungan hidup, koperasi dan lembaga penerbitan di sejumlah pesantren. Bahkan ada pesantren yang secara khusus yang memfokuskan diri sebagai semacam panti rehabilitasi sosial untuk membina dan menyembuhkan kembali korban penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Patutlah dicatat, bahwa semua yang disebutkan itu merupakan bukti nyata bahwa pesantren sesungguhnya memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan dinamika dan corak pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Karena pada dewasa ini proses modernisasi bergerak semakin cepat, antara lain ditandai oleh munculnya berbagai proyek industri yang mampu menghadirkan tenaga kerja dalam jumlah besar hingga jutaan orang, agaknya dunia pesantren untuk kesekian kalinya memiliki peluang lagi untuk melakukan sesuatu bagi pendidikan dan pembinaan mental keagamaan di kalangan masyarakat urban yang pada umumnya masih tergolong berusia muda tersebut. Keberhasilan model pengabdian terakhir ini akan semakin melengkapi dan memperkuat bukti signifikansi pesantren di tengah-tengah kehidupan.

Peranan Pesantren dalam Kehidupan Masyarakat

Integrasi pesantren dengan masyarakat sungguh telah mengakar sejak lama. Kenyataan historis ini digambarkan oleh Abdul Djamil dengan sebuah konklusi: *the pesantren's tradition has a historical and ideological continum.*[51] Hubungan simbiotik yang demikian ini terjadi dengan begitu dominan dan mewarnai berbagai tradisi pesantren dan masyarakat itu sendiri. Bahkan, dalam beberapa hal, pesantren di sejumlah kasus telah maju dengan mengambil inisiatif ke depan. Pesantren-pesantren tersebut bukan

[51] Lihat Abdul Djamil, "Pesantren dan Kebudayaan: Kajian Ulang tentang Peran Pesantren sebagai Pembentuk Kebudayaan Indonesia," *Walisongo*, Edisi 12, (1999), hlm. 21.

saja memproduksi alumni yang ahli dalam bidang agama untuk masyarakat lingkungannya, melainkan juga memberdayakan masyarakat dengan program-program pendampingan dan pengembangan masyarakat *(community development)* secara fungsional.

Oleh karena itu, dalam kaitan di atas, pesantren pada hakikatnya bukan semata-mata merupakan lembaga pendidikan, melainkan juga sebagai lembaga kemasyarakatan. Sebagai lembaga kemasyarakatan, pesantren berarti memiliki pranata tersendiri, dan pranata itu memiliki hubungan fungsi amal dengan masyarakat serta hubungan tata nilai dengan kultural masyarakat, khususnya yang ada dalam lingkungan pengaruhnya.[52] Bahkan menurut Mastuhu, kehadiran pesantren di tengah masyarakat juga merupakan lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan atau sebagai gerakan pengembangan Islam.[53] Dalam kaitan inilah, kiranya Abdurrahman Wahid bukan menyebut pesantren sebagai subkultur.[54]

Pesantren, pada hematnya, bergerak sesuai dengan tuntunan zamannya; kehadiran pesantren senantiasa dalam kerangka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat secara kontekstual. Pada masa sekitar abad ke-18-an, nama pesantren sebagai pendidikan rakyat terasa sangat berbobot terutama dalam bidang penyiaran agama. Keberadaan pesantren saat itu selalu diawali dengan, meminjam istilah Mastuhu, wacana "perang nilai" antara pesantren yang akan berdiri dengan masya-

---

[52] Lebih lanjut lihat M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuaan*, cet. V (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 3-7.

[53] Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, hlm. 21. Lebih lanjut mengenai peranan pesantren ini juga bisa dilihat pada Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 17-18.

[54] Abdurahman Wahid, "Pesantren sebagai Subkultur," dalam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, hlm. 39.

rakat sekitarnya, dan diakhiri dengan kemenangan pesantren.[55] Kenyataan ini selanjutnya membuat pesantren dapat diterima keberadaannya serta dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya sehingga gerak pesantren selalu diikuti oleh masyarakat. Dengan kondisi demikian, pesantren dapat hidup dengan baik. Tingkat perkembangan positif pesantren tersebut terlihat dari tingginya antusiasme santri untuk belajar di pesantren. Kehadiran pesantren dengan berbagai latar belakang etnis dan budaya tersebut pada tahap berikutnya menyebabkan terjadinya kontak budaya antara berbagai suku dan masyarakat sekitar dengan difasilitasi oleh keberadaan pesantren.

Tingginya peranan pesantren dalam kehidupan masyarakat juga dapat dijelaskan dengan diterimanya nilai-nilai moral keagamaan yang dibawa pesantren menggantikan nilai-nilai lama yang tidak terpuji dan lebih dulu ada dalam masyarakat. Nilai-nilai tidak terpuji di masyarakat tersebut diantaranya dikenal dengan *mo limo* atau perilaku yang meliputi maling (mencuri), *madon* (melacur), minum (minum-minuman keras), *madat* (candu), dan main (judi) serta kedengkian, kebodohan, guna-guna serta santet dan sebagainya.[56] Pola pembinaan dan pendidikan yang dikembangkan pesantren secara mendasar diidealisasikan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, praktik pendidikan yang dikembangkan pesantren secara signifikan dapat menghindari, *to some extent,* terjadinya tiga kesenjangan pendidikan: kesenjangan akademik, kesenjangan okupasional, dan kesenjangan kultural.[57]

---

[55] Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, hlm. 20.

[56] Mastuhu menyebut nilai-nilai moral keagamaan pesantren tersebut dengan "nilai putih" dan nilai-nilai lama yang lebih dulu ada di masyarakat dengan "nilai hitam". Lihat Mastuhu, *Dinamika Pendidikan*, hlm. 20-21.

[57] Kesenjangan akademik menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari tidak ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesenjangan okupasional menunjuk pada ketidak atau kekurangterkaitannya antara dunia pendidikan dan

Besarnya pengaruh dan peranan pesantren ini sangat dirasakan dan disadari sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Pesantren dianggap sebagai sebuah kekuatan Islam yang akan dapat merongrong kewibawaan pemerintah kolonial di mata masyarakat terjajah. Karena itu, mereka sangat ketakutan terhadap perkembangan pesantren, sebab berkembang dan menguatnya pesantren sama halnya dengan menguatnya Islam itu sendiri.[58] Atas dasar ini, pesantren secara sengaja diisolasi dari perencanaan pendidikan pemerintah kolonial Belanda.

Pesantren juga terlibat secara intens dalam pergerakan melawan pemerintah kolonial. Secara fisik-kelembagaan, pesantren merupakan salah satu pusat gerakan melawan pemerintah kolonial Belanda untuk meraih kemerdekaan. Kegiatan-kegiatan perlawanan terhadap pemerintah banyak dirancang dan dilakukan di bawah komando pesantren. Secara personal, banyak santri yang dilibatkan oleh pesantren dalam gerakan-gerakan tersebut dan akhirnya membentuk barisan Hizbullah. Barisan inilah yang kelak menjadi salah satu embrio bagi Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, bisa dimaklumi jika angkatan darat saat itu sarat dengan corak dan kekhasan pesantren.[59]

Posisi pesantren seperti tergambar di atas membuat bobot pesantren sangat tinggi di mata masyarakat dan bangsa. Seakan menjadi bukti terhadap tingginya bobot tersebut, muncul anggapan di tengah masyarakat muslim bahwa akan menjadi rendah nilai seseorang bila tidak bersekolah di pesantren. Pesantren menjadi

---

dunia kerja. Kesenjangan kultural menunjukkan ketidakmampuan peserta didik memahami persoalan-persoalan yang sedang dan akan dihadapi bangsanya di masa depan. Lihat Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000), hlm. 36-37.

[58] Lebih jauh mengenai perkembangan pesantren masa kolonial ini, lihat Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah,* hlm. 1-7.

[59] B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 14-27.

tempat yang sangat bergengsi bagi generasi muda muslim. Bahkan, ada anggapan bahwa semakin besar kiai, dan bertambah jauh pesantren yang dikunjungi, semakin tinggi harga sosial seseorang di mata masyarakat secara umum.[60]

Dalam konteks kekinian, pesantren dalam perkembangannya terlihat memasuki babak baru di tengah-tengah dinamika sosio-kultural masyarakat Indonesia. Hal itu, paling tidak, dapat dibuktikan dengan beberapa fenomena sosial yang memperlihatkan menguatnya kembali posisi pesantren secara fungsional dalam mewarnai, untuk tidak mengatakan membentuk, kebudayaan masyarakat Indonesia. Di saat banyak pihak menyebut fenomena menguatnya proses akulturasi yang menyebabkan manusia semakin terasing dari harkat kemanusiaannya, justru pesantren penampilkan tradisi-tradisi atau produk-produk budaya yang mampu menyodorkan kesadaran etis seperti tahlilan, mujahadah akbar, pesantren kilat dan sebagainya. Tampilan-tampilan itu seakan sudah menjadi bagian dari aktivitas dan peran pesantren yang selalu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kaitannya dengan konteks sosial ekonomi, keberadaan pesantren di tengah-tengah masyarakat semakin menunjukkan nilai signifikansinya, di antaranya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang dapat menampung aspirasi kalangan yang tergusur dari pergulatan ekonomi atau kalangan yang terdorong ke pinggir dari jalur-jalur untuk mengakses sumber ekonomi. Dalam kapasitasnya yang demikian itu, pesantren sangat potensial untuk menjadi katalisator dari kesenjangan sosio-ekonomi, kesenjangan yang secara grafikal menunjukkan jarak antara

[60] Lihat Mastuhu, *Dinamika Pendidikan*, hlm. 22-23. Adapun mengenai pengakuan kebanggaan sebagai santri dapat dibaca, Syaefuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren* (Bandung: Al-Ma'arif, 1977), hlm. 92.

golongan kaya dan miskin semakin tajam. Gejala seperti ini memang merupakan kontinuitas dari perkembangan pesantren itu sendiri yang memang telah memperlihatkan kemampuannya untuk berdialog dan sekaligus memberi isi terhadap persoalan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat sebagaimana tampak dari pengalaman historisnya.

Dalam interaksinya dengan kekuasaan, pesantren secara sosiologis memainkan peran sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan yang dianggap menyimpang dalam arti seluas-luasnya, terutama berkaitan dengan menjalankan amanat dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam posisi ini, pesantren juga sekaligus menjadi agen perubahan kebudayaan *(agent of cultural change)* dari kebudayaan yang sarat dengan penyimpangan agama ke arah kebudayaan agamis, yang kemudian dikenal dengan sebutan santri. Berbagai pesantren memperlihatkan peran ini ketika menunjukkan sikap nonkooperatifnya dengan pemerintah sebagai kebalikan dari para penghulu yang bersedia menjadi instrumen kekuasaan, khususnya dalam melayani kebutuhan umat Islam. Peran tersebut secara kualitatif akan terus menjadi bagian yang akan dimainkan pesantren, namun bentuknya akan selalu seiring dengan fenomena dan tuntutan zaman dan sosial *(zaman ini)* yang dihadapi.

C. Pesantren Buruh Pabrik

Pandangan dari konteks kesejahteraan menunjukkan pada kita bahwa pesantren selalu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Abdurrahman Wahid dalam salah satu tulisannya, mengutip hasil sebuah penelitian tentang pandangan hidup ulama Indonesia, menjelaskan bahwa pondok pesantren merupakan latar belakang pendidikan yang mampu membentuk pola pikir dan perilaku santrinya. Hal ini secara mendasar menggambarkan suatu fakta

tentang kebutuhan riil masyarakat terhadap peran partisipatoris pesantren.[61]

Salah satu kebutuhan riil masyarakat Indonesia dewasa ini adalah terjaganya moralitas keagamaan di tengah-tengah derap industrialisasi yang pesat. Kebutuhan terhadap terjaganya moralitas keagamaan ini muncul dilatarbelakangi oleh realitas bahwa industrialisasi menawarkan realitas yang berbeda dari realitas kehidupan sebelumnya (non industrial). Realitas yang berbeda itu baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan horizontal antara sesama sering diwarnai oleh isu-isu individualisme, hedonisme dan permisifisme akibat dari mekanisasi oleh instrumen-instrumen industrial, sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya sering dihadapkan pada isu-isu eksploitasi sumber daya alam, kesehatan lingkungan, dan menurunnya daya imunitas lingkungan hidup akibat tuntutan produktivitas hingga mengharuskan diambilnya berbagai macam cara asal dapat memenuhi tuntutan produktivitas itu. Adapun hubungan manusia dengan Tuhan sering diakrabi dengan gejala-gejala, atau bahkan realitas-realitas meredupnya aktivisme terhadap ritual keagamaan dan atau menurunnya religiusitas dan sebagainya.

Kenyataan seperti di atas tidak bisa diwadahi oleh institusi-institusi pendidikan Islam dan atau kemasyarakatan yang selama ini ada *(established)*. Pendidikan Islam di sekolah umum maupun madrasah, misalnya, dikenal cukup ketat, untuk tidak mengatakan sangat, dalam melaksanakan sistem pembelajarannya. Sebagai contoh, dalam soal waktu pembelajaran, pendidikan di sekolah umum maupun madrasah diselenggarakan secara tertentu, dalam durasi waktu yang tetap dan tidak bergerak dengan tingkat

---

[61] Abdurrahman Wahid, *"Pondok Pesantren"*, hlm. 14.

perubahan yang tidak dapat diprediksi serta terbatas. Dalam soal target materi, pendidikan Islam model tadi menetapkan *targetting* materi yang jelas dan bergraduasi sehingga siswa tidak akan dapat mengikuti suatu materi secara formal tanpa menyelesaikan materi sebelumnya.

Pendidikan Islam model pesantren "konvensional" yang dikenal selama ini juga tidak dapat menyiapkan kerangka kebutuhan terhadap terjaganya moralitas keagamaan buruh di tengah aktivitas-aktivitas industrial. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa pembinaan moral keagamaan terhadap buruh dengan jam kerja yang padat dan tidak bisa ditawar-tawar itu tidak dapat diwadahi oleh pesantren "konvensional" yang dikenal ketat dalam menjalankan aktivitas-aktivitas pembinaannya. Ketaatan itu baik meliputi waktu pembinaan, sistem pembelajaran, kurikulum dan penegakan aturan akademisnya. Penelitian Susanto[62] yang menjelaskan bahwa 44% buruh tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan harus dipahami kebenarannya bahwa ukuran atau model pendidikan yang ia maksud adalah model pendidikan pesantren "konvensional" yang sangat *rigid* dan tidak fleksibel sesuai dengan kesempatan santri sehingga wajar mereka mengaku tidak mempunyai kesempatan belajar.

Adapun model pembinaan yang diidealisasikan dapat memecahkan dan memayungi kebutuhan serta kenyataan di atas adalah model yang secara karakteristik diselenggarakan dengan mengapresiasi nilai fleksibilitas yang tinggi dalam sistem pembelajarannya. Pembelajaran yang dapat memerankan posisi ini mesti dijalankan dengan tingkat "kompromi" yang tinggi sesuai dengan tingkat keluangan waktu dan tenaga buruh. Dalam kerangka

---

[62] Lihat Achmad Wiherno Susanto, "Industrialisasi dan Pendidikan Agama Masyarakat Industri di Mojokerto Jawa Timur," (Laporan Hasil Penelitian, IAIN Sunan Ampel, Malang, 1996).

inilah, model pembinaan moral-keagamaan yang disebut dalam studi ini dengan *Pesantren Buruh Pabrik* menemukan signifikansinya secara tepat.

Hakikat Pesantren Buruh Pabrik: Perspektif Pendidikan Islam

Pesantren Buruh Pabrik adalah pesantren yang menampilkan diri sebagai lingkungan pembinaan moral-keagamaan untuk kalangan buruh sebagai basis santrinya dengan pola pembinaan yang disesuaikan dengan jam kerja mereka. Pola pembinaan demikian menjadi tipologi pesantren jenis ini karena nilai fleksibilitasnya yang tinggi sehingga tidak mengganggu jam kerja santri; pola seperti ini dikenal dengan pola *bekerja sambil belajar* atau *belajar sambil bekerja.*

Fleksibilitas penampilan jenis lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia ini di tengah keberagamaan dan dinamika kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih jelas terpahami ketika disebutkan, misalnya, adanya pesantren yang menekankan pengajaran bidang *akidah/tauhid,* al-Qur'an/hadits, syari'ah/*fiqh,* akhlak/tasawuf/tarekat, bahasa Arab/nahwu-sharaf, ilmu falak/astronomi, dan belakangan adanya pesantren yang bergerak dalam bidang pertanian, pertukangan, industri kecil, koperasi, lingkungan hidup, serta bahkan ada pula yang menekuni bidang rehabilitasi korban narkoba. Karena sedemikian fleksibel, akhirnya juga muncul istilah lain seperti pesantren salaf, pesantren modern, pesantren anak-anak, pesantren kilat, dan pesantren ramadhan. Melengkapi diversifikasi tersebut, penelitian ini pun menawarkan kategori baru, Pesantren Buruh Pabrik.

Dari segi dasar-dasar pemikiran teoretisnya, kehadiran pesantren mesti berpijak pada nilai-nilai ajaran pendidikan Islam. Salah satu nilai tersebut yang sangat penting adalah konsep belajar atau menuntut ilmu sepanjang hayat, atau dalam hadits nabi

dikenal dengan pendidikan *min al-mahdi ila al-lahdi,* dari buaian sampai ke liang lahat. Inti dari konsep pendidikan semacam ini adalah bahwa dalam rentang kehidupan manusia, pendidikan seawal mungkin dimulai dan seakhir mungkin disudahi. Dikaitkan dengan realitas buruh pabrik yang kebanyakan masih berusia relatif muda, kesadaran pihak-pihak penyelenggara pembinaan moral-keagamaan di kalangan mereka bisa diidentifikasi tidak terlalu jauh landasan idealnya dari nilai-nilai pendidikan Islam tersebut. Bagaimana pun, yang namanya hayat jelas ada pada diri setiap buruh pabrik. Selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kewajiban untuk terlibat dalam aktivitas pendidikan tetap merupakan kewajiban. Tanggung jawab para penyelenggara pembinaan moral-keagamaan di kalangan buruh pabrik, pada akhirnya, adalah bagaimana kewajiban tersebut dapat terpenuhi dalam batas-batas yang memungkinkan.

Nilai-nilai ideal pendidikan Islam yang kiranya relevan juga dengan kehadiran pesantren buruh pabrik adalah keharusan untuk membangun keseimbangan harmonis antara dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di satu pihak, dengan nilai-nilai dasar agama yang dilambangkan dengan iman dan takwa kepada Tuhan (imtak) di pihak lain. Keseimbangan dimaksud didasarkan pada salah satu diktum agama: *iqra' bi ismi rabbika al-ladzi khalaq, khalaqa al-insana min al'alaq* (Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan; menciptakan manusia dari segumpal darah). Secara tekstual, perintah "membaca" itu memang tertuju kepada apa yang tersurat dalam kitab suci al-Qur'an. Namun demikian, jika dikaitkan dengan ayat berikutnya yang menjelaskan proses kejadian manusia di dalam rahim ibunya, makna perintah "membaca" ini menjadi bergerak ke arah *merenung, memikirkan, meneliti* dan seterusnya, yang kurang lebih selaras dengan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bersamaan dengan itu, rambu yang mesti diperhatikan dalam melakukan

pengembangan tersebut juga ditentukan, yakni *bi ismi rabbika* (dengan nama Tuhanmu), yang merepresentasikan keharusan yang sama untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, atau dengan bahasa lain (normatif), iman dan takwa kepada Allah SWT.

Semangat *iqra' bi ismi rabbika,* sebagaimana termaktub dalam ayat suci al-Qur'an yang pertama kali diturunkan itu, secara mendasar, bisa diaktualisasikan sebagai pondasi untuk memperkuat bangunan Islam dalam fungsionalisasinya sebagai arahan *(guidance)* bagi kehidupan manusia di zaman modern. Adapun aplikasi nilai keseimbangannya menunjuk kepada bagaimana kehidupan modern dapat dipandu sedemikian rupa dengan tingkat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi dan sekaligus, bersamaan dengan itu, diimbangi dengan tingkat kepatuhan yang tinggi pula terhadap nilai dan praktik keagamaan dalam rangka iman dan takwa kepada Allah SWT seperti dimaksud di atas. Kesadaran para penyelenggara pembinaan moral-keagamaan di kawasan masyarakat industri dan keterlibatan kalangan buruh pabrik dalam aktivitas tersebut dapat dimaknai sebagai upaya membangun keseimbangan realitas hidup duniawi dan sekaligus idealitas ukhrawi. Upaya membangun keseimbangan itu, dalam perspektif pendidikan Islam, sesuai dengan posisi Islam sebagai *rahmatan li al'alamin,* penyebar dan pengembang kemaslahatan bagi maanusia dan alam secara keseluruhan.

Karakteristik Sistem Pembelajaran Pesantren Buruh Pabrik

Dalam kerangka pesantren buruh pabrik ini, disadari sepenuhnya bahwa masalah kehidupan buruh pabrik dengan segala suka dan dukanya adalah persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sudah sedemikian rupa kecenderungannya mengiringi hadirnya era industrialisasi. Kesadaran itu kemudian diwujudkan dengan menawarkan formulasi pemecahan secara riil

masalah yang berdimensi psikologis, ekonomis, sosiologis, dan kultural tersebut. Tawaran formulasi itu dilakukan melalui pendekatan edukatif-religius yang diwujudkan melalui sejumlah aktivitas pembinaan moral-keagamaan yang terindikasikan dalam sebuah lembaga pesantren. Pesantren Buruh Pabrik ini memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara kepentingan buruh sebagai pekerja dan sekaligus santri dengan tidak menimbulkan persoalan baru di kalangan yang lebih luas (baca: dunia industri). Hal ini dibuktikan dengan tampilannya yang fleksibel disesuaikan dengan tingkat kesempatan atau keluangan waktu dan tenaga serta kebutuhan santri dalam pengertian seluas-luasnya.

Dalam konteks sistem pembelajaran, secara umum, Pesantren Buruh Pabrik ini mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. *Pertama,* bahwa model pembinaan moral-keagamaan yang dikembangkan senantiasa dilakukan di sela-sela kepadatan jam kerja santri serta dengan tingkat kelenturan yang demikian rupa hingga tidak secara kuat memperhadapkan aktivitas ekonomis dengan aktivitas-aktivitas pembinaan moral-keagamaan. Dimungkinkan bahwa jika santri secara kebanyakan harus terlibat kerja di pabrik sejak pukul 07.00-16.00 WIB, maka aktivitas-aktivitas pembinaan moral-keagamaan dijalankan seusai shalat magrib. Aktivitas pembinaan itu pun dimungkinkan juga diselenggarakan kurang lebih satu setengah sampai dua jam saja; riilnya bisa jadi sejak pukul 18.30-20.00 WIB. Penyelenggaraan itu dibuat sedemikian rupa dengan pertimbangan bahwa daya tahan tubuh santri sudah banyak terkuras saat mereka kerja di pabrik, sehingga mereka tidak bisa dikondisikan untuk selalu dalam keadaan terkonsentrasi dalam sebuah aktivitas pembinaan, terutama berkaitan dengan aspek-aspek akademis. Sementara itu, kesempatan pagi hari disadari oleh pesantren sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menuju tempat kerja sehingga dalam

banyak hal diputuskan untuk tidak digunakan sebagai kesempatan pembelajaran agar santri tidak mengalami tekanan psikologis yang tinggi akibat terburu-buru ke tempat kerja. Adapun waktu selebihnya dari santri diperuntukkan bagi kepentingan pemulihan energi (istirahat) dan penegakan kewajiban-kewajiban keagamaan secara personal.

Kedua, bahwa fleksibilitas juga menyentuh aspek materi pembinaan. Dari sisi ini, pesantren sangat dimungkinkan mengalami proses penurunan tingkat kesulitan atau muatan-muatan sebelumnya diidealisasikan untuk kepentingan ahli agama lalu berubah untuk menunjang dan membekali kehidupan santri buruh secara pragmatis. Selain itu, perubahan materi juga bisa jadi berupa penambahan materi, seperti pengadaan pembinaan belajar baca tulis al-Qur'an. Hal ini mungkin terjadi karena tidak semua santri datang dengan latar belakang dan kondisi keberagamaan yang sudah tertata seperti halnya dilakukan oleh pesantren "konvensional" melalui proses seleksi.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari model pembinaan yang sangat lentur waktu dan materinya, maka persoalan target materi atau pembelajaran secara kognitif akan dikondisikan seiring dengan target aplikatif-psikomotorik dari muatan-muatan material.

Keempat, dalam hal penegakan aturan, pesantren jenis ini secara mendasar melakukan klasifikasi sesuai dengan jenis aturannya. Terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan jam belajar dan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin, pesantren jenis ini melakukan penegakan secara fleksibel dan tidak *rigid* seperti pesantren "konvensional". Namun demikian, terhadap aturan yang berkaitan dengan moralitas dan atau kewajiban keagamaan secara individual, pesantren jenis ini tetap melakukan penegakan secara *rigid.* Persoalan moralitas tersebut di antaranya berkaitan dengan praktik-praktik *mo limo*: maling (mencuri),

madon (melacur), minum (minum-minuman keras), *madat* (candu), dan main (judi).

Pesantren sebagai "Kawan" Industri

Penelitian ini telah mengukuhkan sebuah hipotesis bahwa dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang serba bernuansa keseimbangan (*equilibrium*) antara kehidupan industri sebagai *locus* sekularisasi yang serba materialistik-konsumeristik di satu pihak, dengan kehidupan spritual psikologis di pihak lain, bagi masyarakat di sekitar kawasan industri merasa perlu diadakan pola-pola pembinaan keagamaan yang kelak disebut sebagai *pesantren buruh pabrik*. Pola-pola pembinaan dan pengembangan keagamaan yang berlangsung di "pesantren" jenis ini belum memiliki paradigma yang *established* yang disesuaikan dengan watak dasar masing-masing dua dunia yang berbeda itu. Hal ini disebabkan karena wacana pesantren yang ada masih dijukstaposisikan sebagai "sesuatu yang berbeda sama sekali" dengan dunia industri, sehingga tidak ditemukan titik penghubung di antara kedua entitas tersebut. Keduanya tumbuh berkembang dalam *locus* yang berbeda; kalau dunia industri tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan urban yang sekuler, maka pesantren lahir dari kultur rural tradisional yang jauh dari hiruk pikuk modernitas perkotaan. Di samping itu, proses penyelenggaraan pembinaan moral-keagamaan di lembaga-lembaga tersebut masih bersifat spontan dan sporadis sebagai wujud reaksi instingtif para pelaku industri (buruh pabrik) terhadap kebutuhan spiritual yang bersifat mendesak itu. Oleh karena itu, untuk disebut *pesantren buruh pabrik* dalam maknanya yang utuh dengan segala sistem kehidupan yang berlangsung di dalamnya, perlu dilakukan verifikasi lebih jauh terhadap elemen atau variabel-variabel yang terlibat dalam proses pembinaan keagamaan dimaksud.

Dalam perspektif pengembangan pesantren, telah dikenal adanya wacana pesantren sebagai subkultur. Wacana teoretis yang pertama kali dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid ini meniscayakan adanya sebuah sistem besar yang di dalamnya dihuni oleh sistem pendidikan pesantren dengan segala atributnya, dan sistem kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengelilinginya.[63] Secara garis besar, pesantren sebagai subkultur memiliki karakteristik berikut ini: (1) eksistensi pesantren sebagai sebuah kehidupan yang berbeda dari pola kehidupan masyarakat sekitar; (2) terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pesantren; (3) berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri (*solitary*) dalam pesantren, lengkap dengan segala atributnya yang tentu saja berbeda dari tata nilai yang berlaku di masyarakat sekitar; (4) adanya daya tarik keluar (sentripetal) yang memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri, dan; (5) berkembangnya proses dialog kultural yang saling mempengaruhi di antara keduanya yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai baru yang secara universal bisa diterima kedua belah pihak.[64]

Sejumlah karakteristik di atas mengindikasikan bahwa pesantren merupakan entitas kebudayaan yang secara sosiologis memiliki akses terhadap proses transformasi masyarakat di sekitarnya.[65] Akses transformatif yang diperankan pesantren ini setidaknya tercermin dalam kemampuannya memberikan warna—kalau bukan mendominasi—proses pembentukan tata nilai

[63] Abdurrahman Wahid, "Pesantren sebagai Subkultural," dalam Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 39-60.

[64] Abdurrahman Wahid, "Pesantren," hlm. 40.

[65] Marzuki Wahid, "Pesantren di Lautan Pembangunanisme: Mencari Kinerja Pemberdayaan," dalam Sa'id Aqiel Siradj, et. al., *Pesantren Masa Depan* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 160.

bersama antara komunitas pesantren dan masyarakat, tanpa harus mengorbankan identitas dirinya. Pola transformasi kultural semacam inilah yang pernah dialami oleh pesantren Tebuireng Jombang pada masa awal pertumbuhannya. Pesantren ini telah berhasil melahirkan sistem kultur kehidupan yang disepakati bersama dengan masyarakat sekitar yang menganut pola kehidupan ekonomi kapitalistik sebagai akibat berdirinya sebuah pabrik gula di sekitar pesantren. Sekalipun pada awalnya pesantren Tebuireng banyak mendapat tantangan dari masyarakat sekitar, akan tetapi berkat resistensinya yang tinggi dan kelenturan budaya yang ia miliki, pada akhirnya eksistensinya semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat dengan kapasitas transformasi kultural yang relatif lebih kuat dibanding unsur lain dalam masyarakat.[66] Dengan demikian, asumsi teoretis yang menempatkan kiai (salah satu unsur utama pesantren) sebagai makelar budaya (*cultural brokers*)[67] dan pencipta kreatif budaya[68] mendapatkan justifikasi dari asumsi teoretis pesantren sebagai subkultur.

Salah satu alasan mengapa pesantren memiliki kapasitas transformatif di tengah kehidupan masyarakat diperlihatkan oleh kuatnya struktur dan sistem nilai yang ada di dalamnya dan dipancarkan ke seluruh jaringan budaya masyarakat sekitarnya. Struktur dan sistem nilai ini dibentuk oleh tempaan aktivitas keseharian yang dilakukan oleh para kiai terhadap santri yang pada gilirannya membentuk *way of life* yang inheren dalam kepribadian santri. Pola komunikasi, interaksi, dan dialog ini dilandaskan pada

[66] Abdurrahman Wahid, "Pesantren," hlm. 43-44.

[67] Periksa kembali, Clifford Geertz, "The Javanese Kijai: The Changing Role of A Cultural Broker," dalam *Comparative Studies in Society and History*, 2 (1960), hlm. 228-249.

[68] Lihat antitesis Horikoshi terhadap asumsi teoretis Geertz dalam Hiroko Horikoshi, *Kiai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987).

prinsip-prinsip keagamaan yang mengikuti paradigma *replika* dan *resistensi*.[69] Paradigma *pertama* mengasumsikan adanya upaya pemindahan nilai-nilai keagamaan yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan para ulama salaf ke dalam sistem kehidupan sehari-hari pesantren seperti peribadahan, kesadaran terhadap kondisi material yang serba kurang, dan kesadaran hidup sosial yang tinggi. Sementara itu, paradigma *kedua* meniscayakan adanya peranan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan segala aktivitas pesantren, loyalitas terhadap penerapan nilai-nilai yang berlaku di pesantren, dan watak dasar tidak mau hanyut dalam arus kehidupan di luar komunitas pesantren.

Salah satu bagian terpenting dari sistem nilai yang berlaku di pesantren adalah materi kurikulum yang terdiri dari kitab-kitab klasik yang berorientasi pada pemahaman *fiqh*, *tauhid* (*akidah*), dan tasawuf.[70] Materi-materi tersebut diajarkan oleh para kiai dalam suasana kesederhanaan dan keikhlasan sesuai dengan pola kehidupan pesantren yang serba bersahaja, tidak materialistik atau untuk memenuhi ambisi keduniaan. Secara garis besar, materi pembelajaran di pesantren memang terkesan serba akhirat *oriented*. Sistem nilai yang tercermin dalam struktur kurikulum pesantren adalah sikap untuk memandang kehidupan secara keseluruhan sebagai kerja ibadah, mengabdi kepada Tuhan, sehingga perilaku yang muncul ke permukaan adalah sikap rendah diri di hadapan kiai dan para gurunya (*tawadhu*), serta gaya hidup yang sederhana atau bahkan sufistik. Dengan substansi materi yang demikian, ditambah lagi dengan bekal ilmu olah batin (*riyadah*) yang selalu diamalkan, santri selalu dibekali dengan cara hidup yang resisten terhadap kerasnya gelombang kehidupan di luar ling-

---

[69] Bandingkan dengan paradigma Abdurrahman Wahid yang menggunakan isilah *peniruan* dan *pengekangan*. Lihat Abdurrahman Wahid, "Pesantren," hlm. 45.

[70] Mengenai kitab-kitab yang diajarkan di sejumlah pesantren, lihat, misalnya, Martin van Bruinessen, *Pesantren dan Kitab Kuning*, V (2) (Mizan, 1992), hlm. 34-39.

kungan pesantren. Materi jenis ini pulalah yang telah memberikan ruang sublimasi bagi menggejala dan menjalarnya *pathos* masyarakat industri yang serba mekanistik dan materialistik itu.

Fisibilitas Pesantren Buruh Pabrik

Setelah kita sepakat akan pentingnya pembinaan kehidupan spritual yang serba seimbang dan harmonis di wilayah industri, hal selanjunya yang harus dipikirkan adalah bagaimana menghadirkan pesantren buruh pabrik yang secara substantif mampu memerankan fungsinya sebagai ruang sublimasi spiritual bagi buruh pabrik. Bukan saja pesantren buruh pabrik diharapkan menjadi "benteng terakhir" pertahanan nilai-nilai moralitas para buruh dan masyarakat sekitar, pesantren jenis ini juga diharapkan mampu menciptakan nuansa "perkawanan" atau simbiosis mutualisme antara pembangunan industri dan nilai-nilai budaya bangsa. Pada akhirnya, pesantren buruh pabrik juga membawa misi turut melahirkan generasi bangsa yang berwawasan industri tanpa harus meninggalkan dan menanggalkan identitas keagamaannya.

Langkah pertama yang harus ditempuh untuk memproyeksikan kehadiran pesantren buruh pabrik adalah mempelajari fisibilitas atau kemungkinan-kemungkinan apa yang mendukung dan menghambat pesantren buruh pabrik. Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian tahap I, ditemukan hal-hal yang mendukung terciptanya pesantren buruh pabrik berikut ini. *Pertama,* sudah ada prakondisi-prakondisi bagi berdirinya pesantren jenis ini, baik secara fisik maupun nonfisik. Unsur-unsur fisik meliputi tempat berlangsungnya proses pembinaan keagamaan layaknya pesantren konvensional, kiai, santri, dan sebagainya. Sementara itu, unsur-unsur non fisik meliputi tatanan nilai-nilai dan aktivitas keagamaan yang berlangsung di sentra-sentra pembinaan keagamaan, sekalipun tidak berlangsung di pesantren dalam pengertiannya yang konvensional. *Kedua,* lingkungan industri sebagai tempat buruh

pabrik bekerja yang pada umumnya terletak di dekat kawasan pemukiman penduduk atau mudah dijangkau oleh buruh. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pesantren buruh pabrik adalah kemungkinan terdapatnya *cultural lag* antara pesantren dan industrialisasi yang sekuler, jauh dari norma agama dan moral.

Pesantren buruh pabrik bukanlah pesantren konvensional yang dipindahkan dalam konteks kehidupan industri. Memang benar di antara keduanya terdapat banyak kesamaan. Akan tetapi ada banyak juga perbedaan mendasar antara keduanya, terutama dalam sistem penyelenggaraan proses pengajaran atau pengajian. Prakondisi-prakondisi pesantren buruh pabrik di atas tidak harus memenuhi tuntutan persyaratan pesantren konvensional yang sistem pengajarannya mengikuti pola yang sudah baku dan permanen, tetapi pesantren buruh pabrik harus berjalan di atas landasan elastisitas dan fleksibilitas yang tinggi, agar para santri buruh tidak menemui banyak kesulitan ketika harus mengikuti aktivitas-aktivitas pesantren. Di samping itu, aspek pembinaan keagamaan yang dipraktikkan di dalamnya harus mampu memberi nuansa spritual dalam rangka memenuhi fungsi pesantren buruh sebagai terapi psikologis dan sosio-kultural.

Namun demikian, gambaran-gambaran ideal di atas pada gilirannya tunduk pada kondisi-kondisi riil yang ada di lapangan. Artinya, terdapat sejumlah aspek yang harus dipegang sebagai prakondisi wajib atau "harus ada" di pesantren buruh seperti bangunan fisik pesantren beserta nilai-nilai normatif keagamaan, dan ada pula prakondisi yang bersifat prosedural-teknis seperti proses penyelenggaraan pengajaran yang bersifat fakultatif. Sebagai misal, jika idealnya proses pembelajaran di pesantren harus dilaksanakan di siang hari, sebagai alternatif bagi para buruh yang bekerja di siang hari, maka proses pembinaan keagamaan bisa saja diselenggarakan di malam hari. Atau, jika dalam sebuah pesantren buruh terdapat santri yang harus bekerja secara *shift*,

penerapan pola pembelajaran bisa diselenggarakan sesuai dengan jam kerja buruh.

Demikianlah, pada prinsipnya kehadiran pesantren buruh pabrik dimaksudkan untuk memerankan dirinya sebagai–meminjam istilah Peter Berger–*the Sacred Canopy* bagi para buruh yang diasumsikan akan mengayomi, melindungi dan menyediakan oase spirit keagamaan agar ekses-ekses kehidupan industri sedapat mungkin bisa dicegah. Ditinjau dari dimensi apa pun, baik sosiologis, ekonomis, maupun kultural, idealisasi pesantren buruh pabrik merupakan fenomena yang positif di tengah kehidupan industri yang serba hedonistik, mekanistik dan materialistik. Pesantren jenis inilah yang pada akhirnya akan menjadi benteng pertahanan terakhir (*the last defence*) untuk mencegah terjadinya deteriorasi, degradasi, erosi, abrasi nilai-nilai moralitas keagamaan yang selama ini menjadi pilar penyangga sistem kehidupan kultural bangsa kita, sembari tidak menafikan masuknya sistem kehidupan industri untuk tujuan kesejahteran bersama dan pemerataan ekonomi.

D. Pendidikan Islam sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Kehidupan Buruh

Signifikansi Pendidikan Islam

Salah satu elemen mendasar dari proses pendidikan dalam Islam yang tidak bisa ditinggalkan adalah dimensi teologis pendidikan Islam, yakni tujuan dan target (*aims and objectives*) dari sebuah proses pembelajaran. Secara konseptual normatif, pendidikan harus mampu berfungsi sebagai wahana bagi proses humanisasi individu manusia (*to humanize human being*), yakni mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan dasar yang inheren dalam diri manusia seperti dimensi fisik, psikologis, spiritual,

intelektual dan sosial.[71] Oleh karena itu, konsep pendidikan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari epistemologi nilai-nilai dasar manusia sebagai pelaku dan target dari proses pendidikan itu sendiri yang dikembangkan dalam sebuah sistem pembelajaran yang integralistik, seimbang, dan simultan menuju tingkat kesempurnaan hakiki, dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan dalam Islam tidak bisa direduksi hanya untuk memenuhi salah satu dari kedua domain tersebut, misalnya hanya untuk mengejar kenikmatan duniawi semata. Domain spiritual psikologis, sebagai sisi elementer kehidupan manusia, tidak bisa dinafikan begitu saja dan sudah seharusnya menjadi target penting dalam proses pendidikan.

Tujuan pendidikan Islam yang bersifat integralistik di atas, dalam konteks kehidupan modernisasi yang *by nature* adalah sekuler, sangat dipertaruhkan, sebab watak dasar modernisasi beserta segala atributnya cenderung melihat realitas kehidupan manusia hanya dari perspektif serba bendawi dan biologis yang membawa pada implikasi-implikasi penafian dimensi psiko-religius manusia.[72] Fenomena semacam inilah yang banyak diyakini telah dikembangkan dalam spektrum modernisasi dan industrialisasi kehidupan Barat, sehingga segala bentuk aktivitas manusia selalu dilihat dari perspektif kebendaan. Pendidikan, dalam konteks ini, tidak lebih dari sekadar alat untuk mengembangkan "kualitas kehidupan", sebuah idealitas yang tidak ada relevansinya dengan dunia spiritual dan hidup sesudah mati.[73] Kondisi ketidakseimbangan semacam inilah yang akhir-akhir ini menjadi keprihatinan sebagian masyarakat Barat sehingga mereka mulai "melirik" akar-akar tradisi Timur yang kaya akan dimensi spiritual dan kearifan hidup.

---

[71] Syed Ali Ashraf, *New Horizons in Muslim Education* (Cambridge: Hodder and Stoughton the Islamic Academy, 1985), hlm. 3-4.

[72] *Ibid.*, hlm. 8.

[73] R.D. Peters, *Education as Initiation* (London: The Maemillan Press Ltd., 1964), hlm. 48.

Memang, konsep dasar pendidikan Barat pada dasarnya sangat memperhatikan paradigma humanistik yang berakar pada pengaktualisasian dari nilai-nilai kemanusiaan.[74] Pendidikan humanistik diartikan sebagai sebuah "*the cultivation of man, his self-cuiltivation and self-unfolding into full humanity*".[75] Sedangkan makna *self-cultivation* dalam konteks ini diterjemahkan sebagai "*cultivation, preservation and transmission of values and justified by society and accepted by 'free' people*.[76] Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa kerangka pikir pendidikan humanistik semacam ini dikembangkan dalam spektrum kehidupan sekuler yang memang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Barat. Dengan demikian, paradigma humanistik dalam dunia pendidikan Barat tidak anakronistik dengan semangat zamannya yang memang sedemikian sekuler.

Yang menjadi persoalan dalam konteks ini adalah ketika modernisasi beserta segala atributnya memasuki realitas empiris masyarakat non-Barat yang tidak sekuler, katakanlah seperti Indonesia yang jelas-jelas memiliki *socio-historical setting* yang berbeda dari yang pertama. Artinya, ada semacam *cultural lag* yang jauh antara keduanya. Dengan demikian, pola dan paradigma pendidikan humanistik sekuler bukan saja anakronistik dengan *socio-historical setting* masyarakat Indonesia, namun juga tidak akan memberikan solusi apa-apa bagi persoalan krisis kemanusiaan akibat penerapan program industrialisasi yang semakin akseleratif. Oleh karena itu diperlukan kearifan, kecermatan, dan kehati-hatian dalam merancang pola pendidikan bangsa yang tidak anakronistik dengan pengembangan industrialisasi. Dalam menjawab persoalan

---

[74] Tetsuya Kitaji, *Islamic versus Modern Western Education: Prospects for the future* (t.tp.: IMES – I.U.J. Working Papers Series, No. 19, 1990), hlm. 73.

[75] Laszo Versenyl, *Eduacation as a Human Enterprice* (New York: Harper & Row, 1973), hlm. 23.

[76] Syed Ali Ashraf, *New Horizons*, hlm. 9.

inilah pensisikan yang dikemas dalam nilai-nilai religiusitas keislaman memiliki relevansi dan signifikansi yang perlu dipertimbangkan.

Tawaran solusi pendidikan Islam terhadap krisis kehidupan industri barangkali terletak pada penegasan nilai-nilai moral, etika, kearifan, dan latihan spiritual sebagai imbangan tehadap bahaya terjadinya fenomena krisis kemanusiaan.[77] Nilai-nilai tersebut diasumsikan sebagai keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh "pendidikan umum" yang cenderung menitikberatkan pengembangan ilmu dan teknologi sekuler.[78] Dalam pendidikan Islam, konsep dasar manusia selalu saja menjadi tema sentral dari keseluruhan rangkaian aktivitas pendidikan yang ditujukan untuk menempatkan harkat dan martabat manusia dalam tempatnya yang proporsional atau mencegah terjadinya proses dehumanisasi. Berpijak pada idealita semacam inilah pendidikan Islam memiliki *concerns* tinggi terhadap upaya membangun sebuah peradaban manusia yang dibimbing oleh nilai-nilai transendental.

Jenis-jenis Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan dalam Islam pada dasarnya seluas Islam itu sendiri. Ia tidak hanya dimulai dan dilaksanakan di lembaga-lembaga formal tertentu seperti sekolah atau madrasah, melainkan seluruh sistem kelembagaan yang memiliki fungsi edukatif di dalam Islam masuk dalam kategori lembaga pendidikan. Sejak dilahirkan dari rahim sang ibu, bahkan jauh sebelum dilahirkan, seorang anak manusia pada hakikatnya telah menjalani sebuah proses pendidikan dan akan terus berlangsung hingga akhir hayatnya (*life*

---

[77] Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf, *Crisis in Muslim Education* (Jeddah: Hodder and Stoughton King Abdul Aziz University, 1979), hlm. 40.

[78] Muhammad Atiya el-Ibrashi, *Education in Islam* (t.tp.: The Supreme Council of Islamic Affairs,t.th.), 11. Lihat juga, Dr. Mohd. Sharif Khan, *Islamic Education* (New Delhi: Ashish Publishing House, 1986), hlm. 36-37.

long education). Proses pendidikan tersebut terjadi dalam kerangka sistemik dan integratif; dimulai dari internal individu manusia, lingkungan keluarga, lembaga-lembaga formal dan nonformal dan masyarakat lingkungannya.[79] Dengan begitu bisa dipahami bahwa kategorisasi lembaga pendidikan dalam Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang selama ini banyak dipahami dalam dunia pendidikan; formal, informal, dan nonformal.

Lembaga pertama dan terkecil dalam sistem pendidikan Islam adalah keluarga. Dari lembaga ini seorang anak manusia mulai menjalani proses pembelajaran dalam pengertian sangat elementer, atas bimbingan orang tua. Berbagai perjumpaan manusia dengan dunia sekitarnya dimulai dari sini, untuk selanjutnya terjadi proses internalisasi dalam dirinya yang menghasilkan akumulasi pemahaman dan pengetahuan yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Secara teologis normatif, Islam memberikan aksentuasi terhadap penting dan strategisnya lembaga pendidikan keluarga bagi pengembangan potensi dasar manusia.[80] Lembaran kehidupan manusia, apakah putih ataukah hitam, akan selalu berangkat dari pendidikan keluarga. Selama proses pendidikan yang dijalani di lingkungan keluarga berjalan secara alamiah dan positif, maka potensi dasar manusia bisa teraktualisasikan ke permukaan. Sebaliknya, potensi dasar manusia tidak bisa teraktualisasikan bila proses pendidikan di lingkungan terkecil ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

Sementara itu, dalam konteks lembaga pendidikan formal, proses pendidikan dilaksanakan di madrasah-madrasah (padanan bagi sekolah bernafaskan Islam) dengan pola penyelenggaraan

---

[79] Mawdudur Rahman, "A Holistic and Institutional Analysis of Islamic Education," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 11:4; 5, hlm. 19-31.

[80] Sesuai dengan hadits Nabi SAW, "Setiap anak manusia terlahir dalam keadaan suci (fitrah), orang tuanyalah yang bisa menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (H.R. Muttafaq Alaih).

yang terstruktur sesuai dengan tingkat penjenjangan, mulai dari tingkat dasar (*madrasah ibtidaiyah*), tingkat menengah pertama (*madrasah tsanawiyah*), tingkat menengah lanjutan (*madrasah aliyah*), hingga perguruan tinggi.[81] Dalam sejarah peradaban Islam, penyelenggaraan pendidikan secara formal sebenarnya sudah mulai dilaksanakan sejak Dinasti Fatimi berkuasa di Mesir pada abad ke-10 M.[82] Tradisi penyelenggaraan pendidikan Islam secara formal semacam ini semakin menguat ketika al-Ghazali mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang disebut sebagai *Madrasah Nizamiyah* di Bagdad. Dalam perjalanan sejarahnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam formal berkembang pesat hingga akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia muslim, tidak terkecuali Indonesia.

Lembaga pendidikan Islam ketiga, nonformal, berlangsung di lembaga-lembaga di luar kedua lembaga pendidikan di atas, yakni masyarakat. Setiap lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disebut sebagai lembaga pendidikan nonformal. Di negeri ini lembaga pendidikan seperti pesantren, *dayah*, dan *meunasah* menjadi lembaga nonformal yang banyak diselenggarakan oleh masyarakat dengan struktur kurikulum, sistem penyelenggaraan, dan tujuan yang dirancang oleh mereka sendiri. Ia tumbuh dan berkembang secara mandiri, tanpa topangan dana permanen dari pemerintah. Dari lembaga ini telah lahir generasi bangsa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan masyarakat secara mandiri, terutama dalam hal

---

[81] Untuk konteks Indonesia, pendidikan tinggi Islam dilaksanakan di lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah seperti IAIN (Institut Agama Islam Negeri) dan STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) dan nonpemerintah yang berbentuk universitas seperti UII (Universitas Islam Indonesia) di Yogyakarta, UNISMA (Universitas Islam Malang), UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), dan lain sebagainya.

[82] A.L. Tibawi, *Islamic Education: Its Traditions and Modernization into the Arab National Systems* (London: Lucaz & Company Ltd, 1979), hlm. 29-30. Lihat juga Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas 1987), hlm. 18.

pengembangan keagamaan. Watak dasar kemandirian lembaga nonformal pendidikan Islam telah membuktikan dirinya menjadi lembaga yang kokoh dan tetap *survive* sepanjang perjalanan sejarah Indonesia. Prinsip dasar pengembangan lembaga ini didasarkan pada rasa tanggungjawab dan keikhlasan yang tinggi terhadap pemberdayaan umat di bidang agama sehingga ia menjadi alternatif utama masyarakat ketika negara dirundung krisis, misalnya. Atas dasar ini pula, kiranya tidaklah berlebihan jika banyak hal yang diharapkan dari lembaga nonformal ini bagi perbaikan tata kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum secara garis besar dapat diartikan dengan seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai.[83] Karena senantiasa menyesuaikan dengan tujuan pendidikan, kurikulum akan selalu berubah dari masa ke masa. Bahkan untuk setiap bangsa yang memiliki tujuan pendidikan yang berbeda, akan memiliki kurikulum yang berbeda pula. Sebagai contoh, pendidikan di zaman Sparta (Yunani Kuno) menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang sehat dan kuat jasmaninya. Sesuai dengan tujuan ini, maka aspek lain seperti kecerdasan dan budi pekerti menjadi diabaikan. Sebaliknya, di Athena, tujuan pendidikan mementingkan kecerdasan otak. Karenanya fungsi pendidikan di masyarakat Athena adalah sebagai lembaga pengembangan kecerdasan.[84] Maka untuk memberi kemungkinan bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, baik di Sparta maupun Athena, disusunlah seperangkat materi yang berbeda dalam sistem

[83] Crow dan Crow, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, terj.[?] (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 75.

[84] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, hlm. 30.

penyusunan kurikulum pendidikannya. Selanjutnya, di zaman modern, seperti halnya di Sparta dan Athena, praktik pendidikan di beberapa negara juga menampilkan kurikulum pendidikan yang berbeda-beda sesuai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Adapun secara garis besar materi kurikulum dalam pendidikan Islam meliputi tuntunan untuk mematuhi hukum-hukum Allah (*sunnatullah*). Selanjutnya kerangka tersebut dikembangkan dalam bentuk materi kurikulum yang dinilai relevan dengan lingkungan pendidikan masing-masing, baik pendidikan di rumah tangga, sekolah, pesantren, dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, dapat dikatakan jika pendidikan akhlak menjadi inti dari kurikulum pendidikan Islam. Seperti dikatakan al-Jundi, tujuan pendidikan Islam adalah menghaluskan akhlak dan mendidik jiwa.[85] Senada dengan al-Jundi, Ibn Sina menyatakan tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti.[86] Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan ilmu yang meliputi pengetahuan secara teoretis dan praktis. Pada konteks inilah kurikulum pendidikan Islam juga harus mempertimbangkan adanya kenyataan klasifikasi ilmu, seperti yang telah dirumuskan oleh pemikir-pemikir muslim. Dan, yang lebih penting lagi kurikulum pendidikan yang disusun harus senantiasa mempertimbangkan konteksnya.

Metode Pendidikan Islam

Setelah menyimak kurikulum pendidikan Islam, agaknya perlu diketahui bagaimana cara menerapkan pendidikan itu sendiri, sehingga materi kurikulum yang diberikan dapat

[85] Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 49.

[86] Abidin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 67.

ditransformasikan kepada anak didik. Materi yang baik bukan jaminan bagi keberhasilan pendidikan. Sebab, boleh jadi materi kurikulum yang baik akan berakibat buruk pada anak didik, jika dalam praktik pembelajaran dilaksanakan metode yang salah. Berkaitan dengan hal itu, maka metode harus disesuaikan dengan materi, kondisi dan keadaan anak didik. Karenanya, metode pembelajaran dapat bervariasi. Suatu metode pembelajaran mungkin tidak diterapkan pada materi, anak didik dan kondisi tertentu, tetapi tidak cocok untuk materi, anak didik dan kondisi yang berbeda.

Menurut Al-Syaibany, terdapat banyak metode yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, misalnya, induksi, perbandingan (*qiyasiyah*), kuliah, dialog (perbincangan), *halaqah,* riwayat, *imla',* hafalan, mendengar, membaca, pemahaman, dan lawatan untuk menuntut ilmu. Selain menjelaskan metode pendidikan Islam, al-Syaibany juga mengemukakan dasar-dasar yang harus digunakan dalam menentukan penerapan metode pendidikan Islam. Menurutnya, terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan metode pendidikan Islam. *Pertama,* dasar agama, meliputi pertimbangan bahwa metode yang digunakan bersumber pada tuntunan al-Qur'an, Hadits Nabi, dan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama salaf. *Kedua,* dasar biologis, meliputi pertimbangan kebutuhan jasmani dan tingkat perkembangan usia anak didik. *Ketiga,* dasar psikologis, meliputi pertimbangan terhadap motivasi, kebutuhan, emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat dan intelektual anak didik. *Keempat,* dasar sosial, meliputi pertimbangan kebutuhan sosial di lingkungan anak didik.[87] Dari uraian tersebut, jelas bahwa metode pendidikan Islam itu bersifat luwes, sesuai dengan kebutuhan anak didik dan lingkungan zamannya.

---

[87] Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam,* hlm. 55.

Bab III
Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebagaimana yang termaktub dalam bab pertama, bahwa populasi penelitian tentang "Pesantren Buruh Pabrik" ini adalah provinsi Jawa Timur. Ada empat daerah yang dijadikan sasaran penelitian, yakni Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik. Dipilihnya keempat daerah itu didasari oleh suatu realitas, bahwa tingkat pertumbuhan industri dalam satu-dua dekade terakhir di kawasan tersebut sangat signifikan. Pertumbuhan sebagaimana dimaksud dapat dipahami, mengingat Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta merupakan pintu gerbang bagi Indonesia, khususnya kawasan Timur. Tersedianya sarana-prasarana, seperti bandar udara dan pelabuhan laut dengan terminal peti kemasnya, juga prasarana transportasi (jalan) yang cukup baik dan sarana penunjang lainnya, menjadikan Surabaya sebagai tempat yang strategis bagi pengembangan industri. Tiga kota lainnya: Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik yang lokasinya tepat berbatasan dengan Surabaya, memanfaatkan faktor kedekatannya (jarak tempuh), di samping faktor lainnya, dalam memacu pertumbuhan industri di wilayahnya.

Jawa Timur, yang terletak pada posisi 111°-114°4' bujur timur dan 7°12'- 8°48' lintang selatan, sampai saat ini merupakan salah satu basis pengembangan industri di Indonesia. Dari data statistik,

diketahui ada 588.638 unit usaha (*enterprises*)[1] mulai dari industri rumah tangga sampai industri besar. Besarnya jumlah unit usaha, diikuti pula dengan meningkatnya produksi pabrik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk memenuhi pasar baik regional, nasional, maupun internasional.[2] Pesatnya perkembangan industri memancing minat masyarakat di sekitarnya bahkan dari luar kota atau propinsi untuk menjadi karyawan atau buruh pabrik.

Pertumbuhan industri ini langsung maupun tidak langsung merangsang pula pertumbuhan penduduk, sehingga menimbulkan ledakan dan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di wilayah perindustrian. Pertumbuhan yang pesat tersebut berdampak pula pada pola kehidupan buruh pabrik, pergeseran norma sosial dan norma agama, baik di kalangan buruh pabrik sendiri maupun masyarakat sekitar. Bab ini akan memaparkan gambaran umum empat objek sasaran penelitian, yang meliputi kondisi geografis, pertumbuhan industri termasuk jenisnya, jumlah tenaga kerja, dan kondisi sosial-keagamaan masyarakat di wilayah perindustrian.

A. Surabaya

Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur merupakan kota yang strategis. Dengan ketinggian 2 meter dari permukaan laut dan posisinya yang menghadap Selat Madura, Surabaya merupakan jalur utama yang menghubungkan kota-kota lain di Jawa Timur dengan kota-kota di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, Surabaya menjadi jalur palang pintu transportasi, khususnya transportasi laut.

---

[1] BPS Provinsi Jawa Timur, *Jawa Timur dalam Angka 1998* (Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur, 1998), hlm. 234.

[2] Jumlah nilai produksi pada tahun 1998 sebanyak 20.149 milyar rupiah; dan jumlah nilai ekspornya adalah $US 4.863.615.000. Lihat BPS Provinsi Jawa Timur, *Jawa Timur dalam Angka* 1998, hlm. 234.

Dilihat dari arealnya, Surabaya mempunyai luas daerah 326,37 km^2. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, wilayah Surabaya relatif kecil. Apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjumlah 2.473.272 jiwa.[3] Tingkat kepadatan kota Surabaya adalah 7.578 per km^2. Jumlah kepadatan tersebut sangat jauh di atas rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur secara keseluruhan, yaitu berjumlah 662 per km^2.[4]

Secara umum, lahan yang diperuntukkan untuk pertanian di Surabaya relatif kecil. Semakin tahun jumlahnya bahkan semakin menyempit. Sebagai ilustrasi dapat dilihat diagram tentang luas tanah pertanian yang diusahakan menurut jenis pengairan per kecamatan (Ha)[5] sebagaimana berikut:

Tahun	Jenis Pengairan			
	Teknis	Setengah Teknis	Sederhana	Total
1994	839,597	387,815	-	1.227, 391
1995	394,317	207,294	-	601,611
1996	366,217	171,294	-	537,511
1997	316,217	173,894	-	490,111
1998	300,217	143,815	-	444,032

Memperhatikan diagram di atas, jelas bahwa tiap tahun luas lahan yang diperuntukkan bagi mereka berkurang. Dalam kurun waktu 5 tahun, berkurangnya lahan mencapai hampir 60%. Berkurangnya lahan pertanian dapat dipahami dengan semakin banyaknya penduduk yang mengalihkan fungsi tanah pertanian untuk tempat tinggal. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya adalah berkurangnya lahan pertanian, karena semakin gencarnya

[3] BPS Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka 1998*, hlm. 69.

[4] BPS Provinsi Jawa Timur, *Jawa Timur dalam Angka 1998*, hlm. 56.

[5] BPS Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka 1998*, hlm. 215.

pemerintah daerah mengalihkan fungsi tanah tersebut ke areal perindustrian yang lebih menjanjikan dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah. Berubahnya fungsi tanah pertanian ini sejalan dengan semboyan Surabaya, yaitu kota indamardi (industri, perdagangan maritim dan pendidikan). Maka, bukanlah mengherankan jika tanah yang diperuntukkan untuk pertanian berkurang sangat signifikan, dan sebaliknya areal perindustrian berkembang sangat menakjubkan.

Dalam kurun waktu lima tahun, pertumbuhan industri naik kurang lebih sekitar 1000 %. Pada tahun 1994/1995, industri di Surabaya berjumlah 817 buah. Pada tahun 1999/2000, jumlah industri sudah mencapai angka 10.169 buah.[6] Adapun jenis industri yang berkembang di Surabaya meliputi industri makanan dan minuman, tekstil, kulit, kayu, kertas, kimia dan obat-obatan, plastik, barang-barang dari galian bukan logam, dan sebagainya.[7]

Penyebaran industri di Surabaya cukup bervariasi di 28 kecamatan[8] yang ada di Surabaya. Pengembangannya cenderung diarahkan pada sisi luar kota, seperti kecamatan Lakarsantri, Tenggilis, Rungkut, dan Karangpilang. Hal ini mengingat masih banyaknya lahan-lahan [pertanian] atau lahan tidak produktif di kawasan tersebut yang bisa dialihfungsikan menjadi areal perindustrian. Industri dengan berbagai ragamnya di empat wilayah itu, secara rata-rata, berjumlah di atas 100 unit per kecamatan.

Berkembangnya areal perindustrian juga membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Tahun 1999/2000, buruh pabrik

---

[6] BPS Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka 1998,* hlm. 236.

[7] *Ibid.,* hlm. 240.

[8] Kecamatan yang ada di Surabaya adalah Tegalsari, Genteng, Bubutan, Simokerto, Pabean Cantikan, Semampir, Krembangan, Kenjeran, Tambaksari, Gubeng, Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, Sukolilo, Mulyorejo, Sawahan, Wonokromo, Karangpilang, Dukuh Pakis, Wiyung, Wonocolo, Gayungan, Jambangan, Tandes, Sukomanunggal, Asemrowo, Benowo, dan Lakarsantri. Lihat BPS Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka 1998,* hlm. 65.

sudah mencapai 197.767 orang. Jumlah ini merupakan dua kali lipat lebih dari tenaga kerja (buruh) yang diserap oleh industri pada tahun 1994/1995 yang berjumlah 75.704 orang.[9] Tenaga kerja di berbagai pabrik direkrut selain dari wilayah Surabaya sendiri, juga dari luar kota, bahkan luar provinsi Jawa Timur. Banyaknya pendatang, secara umum, dilatarbelakangi oleh keberadaan industri di Surabaya yang lebih menjanjikan secara ekonomi dan status, dibandingkan hanya sekadar menjadi buruh rumah tangga di kampung halaman ataupun di perkotaan. Menurut data statistik, pada tahun 1998, pendatang yang melapor ke kecamatan berjumlah 48.902 jiwa,[10] suatu jumlah yang mengalami kenaikan sekitar 20 % dibanding jumlah pendatang tahun sebelumnya.

Keberadaan areal perindustrian dan banyaknya pendatang yang mengadu nasib, sedikit banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat asli di sekitar pabrik. Secara umum, masyarakat Surabaya mayoritas beragama Islam, dan daerah yang ditempati areal perindustrian merupakan daerah santri. Secara keagamaan, langsung dan tidak langsung, keberadaan industri (pabrik) dan pendatang memberikan perubahan sikap keberagamaan masyarakat sekitar. Di antaranya adalah cara berpakaian, hubungan antartetangga, dan sikap yang lebih berorientasi kepada ekonomi semata (*economic oriented*). Bahkan, begitu besar orientasinya kepada ekonomi, ditemukan pondok pesantren yang dulunya menjadi tempat proses belajar mengajar ilmu agama bagi santri, berubah statusnya menjadi kos-kosan yang lebih berorientasi kepada *profit*. Tetapi di pihak lain, kesantrian masyarakat asli di kawasan industri, juga merupakan salah satu faktor penting dimungkinkannya tumbuh kembali atmosfer keagamaan, sebagaimana terlihat dengan munculnya semacam "embrio"

---

[9] BPS Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka 1998*, hlm. 236.

[10] *Ibid.*, hlm. 82.

pesantren buruh pabrik yang menjadi fokus perhatian penelitian ini.

B. Sidoarjo

Daerah ini terletak antara 112,5°-112,9° bujur timur dan 7,3'-7,5' lintang selatan. Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo mempunyai ketinggian 3-10 meter di atas permukaan air laut, merupakan kota industri baru di Jawa Timur. Meskipun relatif baru, sejak 1995 sampai 2000, tingkat pertumbuhan atau percepatan jumlah industri baru di Kabupaten Sidoarjo meningkat cukup signifikan.

Dengan luas 63.438,534 Ha., Sidoarjo berbatasan dengan Surabaya di sebelah utara dan berbatasan dengan Selat Madura di sebelah Timur. Sedang di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Posisi Sidoarjo cukup strategis karena menjadi kota penghubung atau jalur utama yang menghubungkan kota-kota di Selatan dan Timur dengan Surabaya.

Letaknya yang amat berdekatan (berhimpit) dengan Surabaya, menjadikan Sidoarjo terimbas dengan keberadaan industri di Surabaya. Hal ini disebabkan ketika para pemilik modal mencari lahan di Surabaya, dan ternyata sudah begitu padat dan relatif mahal harganya, maka Sidoarjo merupakan alternatif kedua dengan pertimbangan masih banyaknya lahan kosong yang bisa dialihfungsikan menjadi areal perindustrian. Masih murahnya harga tanah dan jarak tempuh ke Surabaya yang relatif dekat, juga menjadi pertimbangan bagi para pemilik modal untuk membuka usahanya di Sidoarjo. Ketiga hal tersebut, tentunya, menjadi pertimbangan dalam menekan *cost production* sehingga hasil industrinya bisa bersaing di pasaran.

Semakin banyak wilayah di Kabupaten Sidoarjo dipergunakan untuk areal perindustrian, secara keseluruhan lahan pertanian

(sawah) mengalami penurunan sebesar 1,16% atau sekitar 311 Ha, yaitu dari 26.700 tahun 1998 menjadi 26.389 tahun 1999.[11] Adapun jumlah industri menunjukkan angka sebaliknya. Tabel di bawah ini menggambarkan adanya peningkatan jumlah industri di Sidoarjo.[12]

Tahun	Industri Besar	Industri Kecil	Kerajinan Rakyat
1998	325	43.093	11.323
1999	336	45.450	11.540

Meningkatnya jumlah industri di Sidoarjo, berdampak pula pada peningkatan dukungan sektor industri terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sidoarjo. Tabel berikut menginformasikan peran sektor industri dalam dan terhadap total PDRB Sidoarjo:

Tahun	Nilai Tambah PDRB (dalam juta rupiah)	Prosentase Industri dalam jumlah total PDRB
1995	2.235.599,32	52,89 %
1996	2.683.062,41	54,80 %
1997	3.198.948,80	55,33 %
1998	4.488.756,36	54,16 %

Melihat data di atas, jelas signifikasi industri dalam menambah *income* PDRB Sidoarjo. Nilai tambah yang diberikan tiap tahunnya selalu meningkat. Meskipun pada tahun 1998 ada penurunan prosentase sumbangan industri terhadap PDRB, jumlah nominal yang disumbangkan tetap meningkat dari kurang lebih 3 milyar pada tahun 1997 mendekati 5 milyar pada tahun 1998.[13]

[11] BPS dan Bappeda Kab. Sidoarjo, *Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 1999*, (Sidoarjo: BPS Kab. Sidoarjo, 1999), hlm. 149.

[12] *Ibid.*, hlm. 187.

[13] *Ibid.*, xxxix.

Pihak Pemerintah Sidoarjo, tampaknya terus berusaha meningkatkan jumlah industri dan diversifikasinya. Hal ini wajar, karena mengingat *income* pendapatan yang dihasilkan dari sektor perindustrian cukup menggembirakan, jauh lebih besar dibanding sektor-sektor lainnya.

Industri yang berkembang di Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi tiga: industri besar, industri kecil, dan kerajinan rakyat. Berdasarkan jenisnya, terdiri dari industri makanan, tekstil, industri kayu, kertas, logam, dan sebagainya.[14] Berbagai industri tersebut tersebar di 18 kecamatan dengan penyebaran yang tidak merata. Ada beberapa kecamatan yang tingkat pertumbuhan industrinya cukup signifikan, yakni Kecamatan Waru, Gedangan, Buduran dan Tanggulangin. Tiga pertama lebih mengarah pada industri besar dan kecil, sedang satu terakhir (Tanggulangin) lebih mengarah pada pengembangan kerajinan rakyat.

Berkembangnya industri di Sidoarjo menarik masyarakat untuk menjadi karyawan (buruh) di berbagai perusahaan. Kenyataan seperti ini dapat kita lihat dari data jumlah tenaga kerja yang cenderung mengalami peningkatan. Tahun 1999/2000, sebanyak 7.913 orang. Jumlah ini merupakan kurang lebih dua kali lipat tenaga kerja (buruh) yang diterima oleh sektor industri pada tahun 1997/1998 yang berjumlah 4.759 orang.[15] Di samping menerima tenaga kerja dari wilayah/daerah Sidoarjo sendiri, industri-industri yang ada di Sidoarjo, baik yang kecil maupun yang besar, juga menerima tenaga kerja (buruh) dari luar, dan ini tidak hanya terbatas dari kawasan yang ada di wilayah Jawa Timur saja, melainkan banyak juga yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya.

Seiring dengan banyaknya orang yang ingin menjadi karyawan atau buruh pabrik, jumlah pendatang dari luar senantiasa meng-

[14] *Ibid.*, hlm 187.

[15] *Ibid.*, hlm 64.

alami peningkatan dari tahun ke tahun. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1997, jumlah pendatang adalah 21.584 orang, tahun 1998, berjumlah 33.557 orang, sedangkan pada tahun 1999, pendatang sudah mencapai 46.192 orang. Jumlah tersebut menginformasikan tentang adanya kenaikan yang cukup besar bila dibanding dengan jumlah pendatang tahun sebelumnya.

Di samping dikenal sebagai kawasan industri baru, Sidoarjo lebih dulu dikenal sebagai daerah agamis. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari banyaknya masjid, langgar/musholla yang berdiri dan maraknya aktivitas/kegiatan rutin keagamaan, seperti pengajian, tahlil, diba'an, dan sebagainya. Namun, seiring dengan berkembangnya industri dan banyaknya pendatang dari berbagai daerah baik yang secara menetap atau musiman mengadu nasib dan memperbaiki taraf ekonomi di Sidoarjo, maka heterogenitas keagamaan, pola atau perilaku sosial keagamaan masyarakat, khususnya remaja (pemuda) mengalami perubahan.

Adanya heterogenitas keberagamaan di Sidoarjo dapat dilihat dari data statistik yang menunjukkan bahwa lima agama (Islam, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha) tumbuh dan hidup subur di wilayah Sidoarjo. Berdasarkan data statistik tahun 1999, jumlah penduduk di Sidoarjo yang beragama Islam sebanyak 1.178.238 orang, Katholik berjumlah 12.931 orang, Protestan 16.683 orang. Hindu 2.650 orang dan Budha 3.103 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 1.213.605 orang.[16]

Kegiatan/rutinitas keagamaan di Sidoarjo, secara umum, tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kegiatan keagamaan di Sidoarjo, secara turun temurun sudah berjalan sejak lama dan sebagian besar dilaksanakan setiap malam Jum'at serta diikuti oleh berbagai unsur masyarakat. Namun, dengan semakin gencarnya

---

[16] *Ibid.*, hlm. 125.

pengaruh dunia industri, ada kecenderungan bahwa peserta aktivitas tersebut mulai terbatas dari kalangan orang tua dan anak-anak, sementara para remaja (pemuda) agak enggan mengikutinya. Mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan dan memanfaatkan waktu senggangnya untuk mencari hiburan, ketimbang mengikuti pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya.

C. Mojokerto

Mojokerto merupakan salah satu dari kota yang diproyeksikan menjadi daerah industri Jawa Timur. Hal ini didasari oleh suatu realitas bahwa jarak Mojokerto berdekatan dengan kabupaten-kabupaten yang tergabung dalam Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Keenam daerah tersebut memang diarahkan secara berencana sebagai kawasan industri, kecuali Bangkalan yang masih menunggu realisasi jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) dan kesepakatan jenis industri yang akan dikembangkan, sementara Lamongan, pergerakan industrinya baru menyentuh wilayah bagian pinggir yang berbatasan langsung dengan daerah Gresik.

Secara geografis, Kabupaten Mojokerto memang berbatasan dengan Lamongan dan Gresik di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Sidoarjo dan Gresik. Malang dan Pasuruan menjadi batasan bagi Mojokerto di sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Jombang dan Malang. Terdiri dari 17 kecamatan, luas Mojokerto adalah 96.936 Ha[17] dengan klasifikasi area pertanahan sebagai berikut:

---

[17] BPS Kab. Mojokerto dan Bappeda Tk. II Mojokerto, *Kabupaten Mojokerto dalam Angka 1998*, (Mojokerto: BPS Kab. Mojokerto dan Bappeda Tk. II Mojokerto, 1999), hlm. 8.

Klasifikasi	Keterangan	Ha
I	Lereng 0-2 %	46.220
II	Lereng 2-15 %	21.718
III	Lereng 15-40 %	8.474
IV	Lereng > 40 %	20.524

Jumlah penduduk Mojokerto, sesuai dengan data tahun 1997 adalah 859.290 jiwa, dan pada akhir tahun 1998, meningkat menjadi 866.684 jiwa.[18] Adapun kepadatan dan penyebarannya adalah 1.206,91 orang/km^2. Jumlah tersebut dua kali lipat dibanding dengan rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur. Besarnya jumlah penduduk merupakan potensi tersendiri, yakni tersedianya tenaga kerja bagi pabrik yang ada di daerah setempat. Dengan tersedianya tenaga lokal, ongkos produksi dapat ditekan, sebab pabrik bisa menekan ongkos upah buruh bila dibanding harus mendatangkan dari luar kota.

Pengembangan industri di Mojokerto lebih difokuskan pada kecamatan tertentu yang memang disiapkan menjadi kawasan atau area khusus, di antaranya adalah Ngoro, Jetis, Kutorejo, dan Mojosari untuk kategori perusahaan besar, sedang untuk yang berskala sedang dan kecil diarahkan pada Kecamatan Trowulan, Gedek, dan Jetis. Secara umum, kegiatan industri di Mojokerto berjumlah 135 unit, dengan komposisi perbandingan 46 unit termasuk dalam kategori besar dan sisanya, 89 unit, masuk dalam kategori sedang.[19]

Dari jenis usaha yang dilakukan, perusahaan atau pabrik yang berkembang cukup variatif. Setidaknya ada sembilan kelompok industri yang berkembang,[20] yaitu:

---

[18] *Ibid.*, hlm. 31-32.

[19] *Ibid.*, hlm. 150.

[20] *Ibid.*, hlm. 151.

Kelompok Industri	Kategori Perusahaan		Jumlah
	Besar	Sedang	
Makanan, minuman dan tembakau	5	23	28
Tektil, pakaian jadi dan kulit	6	12	18
Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga	10	6	16
Kertas, barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan	4	5	9
Kimia, barang dari kimia dan plastik	6	13	19
Bahan galian non logam	2	10	12
Logam dasar	4	11	15
Barang dari logam	6	7	13
Pengolahan lainnya	3	2	5
Jumlah	46	89	135

Melihat kompisisi di atas, untuk perusahaan berskala besar kelompok kayu, bambu, rotan, dan perabot rumah tangga cukup banyak, disusul kemudian dengan kelompok kimia, logam, tekstil, dan makanan. Dominannya perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan tidak lepas dari potensi yang dimiliki Mojokerto, yaitu hutan kayu dan sejenisnya yang masih banyak. Tersedianya bahan baku, jelas menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemilik modal untuk menanamkan investasi.

Berkembangnya industri di Mojokerto diikuti oleh perekrutan tenaga kerja (buruh). Jumlah buruh yang direkrut menurut kelompok industri dan jenis kelaminnya[21] adalah sebagai berikut:

[21] *Ibid.*, hlm. 153.

Kelompok Industri	Kategori Perusahaan (unit)		Jumlah
	Pria	Wanita	
Makanan, minuman dan tembakau	1.463	1.369	2.832
Tekstil, pakaian jadi, dan kulit	1.773	825	2.598
Kayu, bambu, rotan dan perabot rumah tangga	2.568	2.001	4.569
Kertas, barang dari kertas, percetakan, dan penerbitan	1.177	823	2.000
Kimia, barang dari kimia dan plastik	815	733	1.548
Bahan galian non logam	251	190	441
Logam dasar	610	256	866
Barang dari logam	1.664	475	2.139
Pengolahan lainnya	425	460	885
Jumlah	10.746	7.132	17.878

Sebagai daerah tapal kuda, tingkat keberagamaan masyarakat Mojokerto secara umum cukup tinggi. Dengan kata lain, masyarakat Mojokerto termasuk agamis (santri). Hal ini, setidaknya, dapat dilihat dari segi kuantitas, bahwa mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam. Dari jumlah keseluruhan 866.684 jiwa, 837.356 beragama Islam. Di samping itu tingkat religiusitas masyarakat dapat dilihat dari banyaknya pondok pesantren yang tersebar di berbagai kecamatan. Keberadaan pesantren "konvensional", sampai saat ini masih mempengaruhi pola keberagamaan masyarakat, misalnya kegiatan yasinan, hadrah, maulid diba', dan tahlilan. Meskipun demikian, perubahan pola keberagamaan, sebagaimana di daerah industri lainnya, juga mulai terlihat di kalangan masyarakat, termasuk buruh pabrik yang notabene rata-rata masih tergolong usia muda. Kehidupan mereka yang seperti mesin dengan jam kerja dan aturan yang sangat ketat, tiap akhir minggu cenderung dimanfaatkan untuk refreshing bersama rekan-rekan sekerja. Uang upah yang diterima, misalnya pada Sabtu sore setiap minggunya, bisa jadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang berbau negatif. Sementara itu, mengarahkan mereka untuk *concern* terhadap masalah keagamaan dengan aktif di

pesantren konvensional, merupakan hal yang sulit. Ini dikarenakan, jam belajar dan aturan yang cukup ketat. Kalaupun dipaksakan bisa menjadikan mereka acuh (*careless*) bahkan *skeptic* terhadap ajaran agama yang akhirnya, mengarah pada demoralisasi buruh itu sendiri.

D. Gresik

Dengan luas wilayah 1.192 km², kabupaten Gresik terletak di antara 7°-8° lintang selatan dan 112°-113° bujur timur. Secara geografis, sepertiga wilayah Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yakni sepanjang Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, Bungah, dan Ujung Pangkah. Terdiri dari 18 kecamatan dan 356 desa, Gresik di sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah timur oleh Selat Madura, sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan Kotamadya Surabaya, dan di sebelah barat berbatasan dengan Lamongan.[22]

Letaknya yang dekat dengan ibukota provinsi Jawa Timur, juga posisinya yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan selat Madura, serta ditunjang tersedianya sumber daya alam yang cukup melimpah menjadikan Gresik sebagai kabupaten yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah perindustrian. Hal ini sejalan dengan pola dasar pembangunan daerah tingkat II Gresik yang meletakkan sektor industri sebagai penggerak tumbuhnya ekonomi kerakyatan, sedang sektor pertanian menjadi faktor alternatif yang menunjang perekonomian daerah.[23] Di samping itu, pengembangan industrialisasi di Gresik juga diuntungkan oleh keberadaan pantura (Gelam dan Gelamban) sebagai pintu utama

---

[22] BPS Kab. Gresik, *Gresik dalam Angka 1998*, (Gresik: BPS Kab. Gresik, 1999), hlm. 5.

[23] Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, *Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1999/2000-2003/2004*, (Gresik: Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, tt), hlm. 54.

jalur utara transportasi di Jawa, sehingga mendorong timbulnya industri strategis berskala regional dan nasional, seperti pabrik semen dan Petro Kimia yang terkenal.

Ada tiga jenis industri, menurut jumlah tenaga kerjanya, yang dikembangkan di Gresik, yakni industri besar, industri sedang, dan industri kecil kerajinan rumah tangga (IKKR). Ada peningkatan dari tahun ke tahun baik dari jumlah industri, angka investasi dan jumlah nilai produksinya selama 1997-1998 bagi industri kecil. Perusahaan kecil, pada tahun 1997 berjumlah 4.493 unit. Jumlah ini meningkat menjadi sebanyak 4.585 unit pada tahun berikutnya. Meskipun pertumbuhan tersebut relatif kecil, namun jumlah investasi maupun nilai produksinya meningkat cukup tajam. Nilai investasi bagi industri kecil pada tahun 1997 berjumlah 1.263.230 rupiah dan pada tahun 1998 investasinya naik menjadi 1.419.920 rupiah. Demikian pula dengan nilai produksinya, dari 6.127.015 milyar rupiah pada tahun 1997 menjadi 6.851.344 milyar rupiah pada tahun 1998.[24]

Berkembangnya industri di Gresik diikuti pula oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja (buruh) yang terlibat. Ada sebanyak 145.723 orang yang direkrut oleh perusahaan (industri kecil) pada tahun 1997. Jumlah tersebut meningkat menjadi 159.996 orang.[25] Meskipun ada peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap, namun data dari kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Gresik menyatakan, bahwa dari 3.320 lowongan kerja yang ditawarkan pada tahun 1998, ternyata hanya 1015 lowongan yang bisa dipenuhi. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat banyaknya peluang yang tidak bisa dimasuki, bisa jadi disebabkan oleh sumber daya manusia yang masih lemah dan tidak memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh perusahaan atau pabrik.

---

[24] BPS Kab. Gresik, *Gresik dalam Angka 1998,* hlm. 230-233.

[25] *Ibidi.*, hlm. 229.

Hal inilah yang menjadi *concern* pemerintah daerah untuk memprogramkan "peningkatan kualitas sumber daya pekerja yang produktif, efisien, efektif, berjiwa wirausaha, sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta berusaha."[26]

Adanya dampak negatif dengan berkembangnya industrialisasi di Gresik, juga telah diantisipasi oleh pemerintah daerah. Setidaknya, mulai ada terobosan melalui: *pertama*, program pembenahan kehidupan umat beragama melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan ajaran agama; *kedua*, program peningkatan pembangunan di bidang agama melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan perkembangan situasi sosial budaya masyarakat yang terjadi; *ketiga*, program peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh agama yang profesional dengan memperhatikan penyediaan tenaga tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan.[27]

---

[26] Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, *Pola Dasar Pembangunan Daerah*, hlm. 65.

[27] *Ibid.*, hlm. 93.

Bab IV
Variasi Pola Pembinaan Agama di Kalangan Buruh Pabrik

Paralel dengan bangunan logika penelitian sebagaimana dituangkan pada bab-bab terdahulu, pada bab ini akan diketengahkan sejumlah temuan di lapangan tentang variasi pola pembinaan agama di kalangan buruh pabrik. Pemaparan pola pembinaan buruh pabrik di "embrio" pesantren buruh pabrik ini merupakan hal yang signifikan sebagai bahan dalam rangka merumuskan konstruksi model pesantren buruh pabrik yang akan dipaparkan di bab berikutnya.

A. Sketsa Biografis Pesantren Buruh Pabrik

Salah satu kerangka pikir untuk mengelaborasi pesantren buruh pabrik dengan berbagai macam persoalannya adalah dengan menggunakan pendekatan tipologisasi yang akan memotret pola-pola pembinaan agama di kalangan buruh. Pendekatan dimaksud berangkat dari upaya pencarian secara empiris varian pembinaan agama di kalangan buruh pabrik di lapangan. Kerangka tipologis ini pada gilirannya diharapkan bisa mengantarkan penelitian ini pada analisis pencarian model pesantren buruh yang ideal. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian yang tengah dilakukan ini tidak memiliki basis teoretis tentang pesantren buruh pabrik sama sekali (*academically groundless*), namun basis teoretis tersebut lebih diarahkan, tunduk, dan berakar pada temuan-

temuan empiris di lapangan. Temuan-temuan empiris inilah yang pada tahap pencarian model akan menjadi pijakan signifikan bagi penciptaan paradigma pesantren buruh pabrik. Di bawah ini diketengahkan beberapa temuan empiris di lapangan seputar varian-varian pembinaan agama sebagai embrio paradigma pesantren buruh pabrik.

1. "Embrio" Pesantren Buruh Pabrik Hasil Alih Fungsi Pesantren Konvensional

Pesantren jenis ini berangkat dari proses evolusi yang panjang akibat pergeseran nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Pada awal berdirinya, pesantren ini memang dirancang sedemikian rupa untuk keperluan pendidikan agama bagi santri murni. Mengikuti alur definisi pesantren yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier, proses pembelajaran yang berlangsung di pesantren jenis ini pada awalnya berjalan secara konvensional, dalam arti memenuhi persyaratan fisik untuk disebut sebagai pesantren konvensional. Namun dalam proses selanjutnya, pesantren jenis ini mengalami perubahan secara perlahan seiring dengan perubahan zaman. Perubahan dari pesantren konvensional menuju pesantren buruh pabrik hampir bisa dipastikan akibat rendahnya tingkat resistensi yang dimiliki oleh pesantren tersebut dalam menghadapi derasnya arus perubahan yang terjadi.

Secara sederhana, pesantren buruh pabrik dalam konteks ini barangkali bisa diartikan sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran Islami yang santrinya sebagian atau mayoritas terdiri dari para buruh pabrik. Namun demikian, definisi semacam ini belum bisa diangkat sebagai paradigma ideal bagi pesantren buruh pabrik. Sebab di dalam varian pertama ini saja, terdapat minimal tiga sub-varian: *Pertama*, pesantren yang semua santri-nya adalah buruh pabrik. *Kedua*, pesantren yang mengakomodasi

para buruh pabrik sebagai santrinya dan mereka diberi pengajaran agama secara khusus mengingat kekhususan yang dimiliki oleh santri konvensional. *Ketiga,* pesantren yang sebagian santrinya adalah buruh pabrik yang membaur dengan santri konvensional dan kepada mereka tidak diberlakukan pembelajaran, peraturan ataupun perlakuan yang berbeda dengan santri konvensional.

Terlepas dari variasi pesantren buruh pabrik di atas, elemen terpenting dari jenis ini adalah kehadiran buruh pabrik yang menempati posisi sebagai santri. Dari serangkaian penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah pesantren yang memenuhi kualifikasi semacam ini, seperti PP. Al-Mubarok, PP. Al-Asy'ari, PP. Mubarok dan PP. Al-Karim, PP. Salafiyah Nurudh Dholam dan PP. Sunan Kalijogo. Di bawah ini dijelaskan sekilas tentang masing-masing pesantren tersebut secara biografis:

a) PP. Al-Mubarok (I)

Pondok pesantren yang beralamatkan di Jabon Tambak Sawah, Weru, Sidoarjo ini didirikan pada tahun 1982 oleh KH. Ali Mujahidin yang merupakan pendatang baru di kawasan tersebut. Ia berasal dari Demak, Jawa Tengah. Jumlah santri saat ini secara keseluruhan sekitar 200 orang, meliputi santri TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), majelis taklim, dan santri buruh. Dari jumlah keseluruhan ini, jumlah santri buruh mencapai 25 orang. Santri buruh yang bermukim hanya mencapai 12 orang; 10 putera dan 2 puteri, sementara yang lainnya pulang ke tempat tinggal masing-masing (yakni kos-kosan sekitar pesantren).[1]

Semula, ketika mata pencaharian masyarakat adalah buruh tani, pesantren ini didiami sekitar 30 santri buruh. Namun sejak kedatangan industri, sejumlah santri buruh yang bermukim

[1] Hasil wawancara dengan KH. Ali Mujahid Bushro, tanggal 03-08-2000, pukul 14.00-15.30 WIB.

menurun hingga mencapai 10 orang saat ini. Jadi, kedatangan pabrik menyebabkan turunnya santri yang mukim. Penurunan jumlah ini terjadi karena kehidupan pesantren dianggap cukup mengikat kehidupan mereka, sementara mereka sendiri di lingkungan pabrik memiliki keterikatan yang tidak bisa diganggu gugat. Selain itu, mereka merasa kelelahan setelah bekerja di pabrik. Karena itulah mereka lebih senang untuk tinggal di kos-kosan karena bisa hidup bebas dan tidak terikat.

Jika dibandingkan dengan biaya hidup di kos-kosan, tinggal di pesantren memang jauh lebih murah. Di pesantren, santri buruh hanya dikenakan biaya tinggal sebesar Rp15.000,00/bulan. Sekalipun demikian, minat buruh untuk "nyantri" dan tinggal di pesantren masih minim. Hal ini terjadi karena: *pertama,* semangat mereka pergi ke wilayah itu memang untuk kerja; *kedua,* mereka terpengaruh kebiasaan masyarakat sekitar yang suka nongkrong dan bersantai-santai di kos-kosan, dan bahkan di tempat-tempat terbuka, dan; *ketiga,* masyarakat buruh masih enggan jika harus menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pesantren, karena mereka merasa sudah begitu lelah akibat volume pekerjaan di perusahaan.

Untuk mengatasi persoalan anggapan ketatnya jam pengajaran pesantren oleh buruh, pihak pesantren sebenarnya pernah mencoba selebaran kepada masyarakat, terutama kalangan buruh tentang tawaran pembinaan oleh pesantren yang lebih lunak lagi. Isi tawaran tersebut adalah bahwa pesantren, dengan seluruh tenaga pengajarnya, akan siap setiap waktu untuk melayani buruh yang menginginkan pembelajaran pesantren, tidak harus mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Meski begitu, para buruh masih tidak tertarik dengan pesantren. Dari sini sepintas diketahui bahwa ternyata faktor keinginan untuk hidup bebas jauh lebih besar dari pada faktor pola kebijakan pesantren itu sendiri yang mempengaruhi minat mereka untuk "nyantri" dan tinggal di pesantren.

Selain faktor minat di atas, terdapat pula kendala yang bersifat eksternal yang datang dari masyarakat sekitar. *Pertama,* secara moral masyarakat dianggap kurang mendukung terhadap terciptanya lingkungan kehidupan yang diinginkan pesantren. *Kedua,* keyakinan masyarakat yang terlanjur menggejala bahwa mengaji tidak harus membayar. Sementara itu, jika pengajaran di pesantren tidak dikenakan biaya, maka pesantren tidak bisa memenuhi kebutuhannya seperti untuk menggaji guru.

Persoalan di atas semakin diperburuk dengan adanya sistem kerja *shift* yang cenderung tidak tetap. Akibat sistem kerja ala *shift* yang selalu berubah-ubah ini, santri merasa semakin kesulitan menyesuaikan jam kerjanya dengan kegiatan pesantren. Sekalipun begitu, pihak pesantren bukan tidak pernah memberikan kompensasi bagi para buruh yang terbentur oleh sistem kerja *shift* tersebut. Bagi buruh yang bekerja di siang hari, pesantren mengadakan pengajian di malam hari, yakni sehabis shalat magrib. Sedangkan bagi mereka yang bekerja di malam hari, maka waktu pengajiannya bisa dilakukan sehabis shalat Shubuh.

Sementara itu, peran serta dari pihak perusahaan yang buruh-nya menjadi santri boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Artinya, mereka tidak mau tahu tentang keberadaan para buruh yang nyantri di pesantren tersebut, kalaupun ada usaha untuk mengetahui, itu pun hanya sebatas lewat petugas keamanan (satpam) saja. Ikatan santri perusahaan lebih merupakan ikatan transaksional bisnis semata. Kalau ada santri yang nganggur, petugas keamanan akan memberitahu kepadanya tentang lowongan pekerjaan di perusahaannya. Ini artinya bahwa kerja sama sistematis antara perusahaan dan pesantren tidak ada sama sekali.

Peraturan yang ditetapkan oleh pesantren tersebut bisa dikatakan sangat efektif. Apabila diketahui terdapat seorang santri yang melanggar ketentuan tersebut, maka ia dikenakan dam atau

denda sepantasnya. Peraturan-peraturan tersebut sudah tertulis secara jelas dan bisa dibaca secara langsung oleh setiap santri. Misalnya santri A melanggar salah satu aturan yang dilarang oleh pesantren tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh pihak pesantren adalah memanggil santri tersebut. Jika ia tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut, langkah kedua ditegur. Jika tidak berubah juga, maka pihak pesantren akan melakukan langkah ketiga, yakni mengeluarkan santri yang bersangkutan dari pesantren. Pertimbangannya adalah, lebih baik menerima sedikit santri tapi bisa diatur, daripada banyak santri tapi tidak bisa diatur atau dibina.

b) PP. Al-Asy'ari

Nama pesantren ini pada mulanya diambil dari nama pendirinya, yakni K.H. Asy'ari. Pesantren buruh yang terletak di dusun Kundi, Kelurahan Kepuh Kiriman, Waru, Sidoarjo ini, belakangan juga terkenal dengan sebutan *pesantren Kundi.*[2] Awalnya, pesantren ini memang dimaksudkan murni sebagai pondok pesantren. Namun, pengelolanya juga mempunyai usaha kecil-kecilan, yakni produksi sandal. Secara kebutuhan, tenaga kerjanya juga *nyantri* di tempat ini. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan berdiri, pesantren dipenuhi oleh santri yang juga buruh pabrik.[3]

Menurut informasi pengelola, mereka yang "mondok" (belajar agama) di sini memang sengaja agar tidak terkena "polusi" yang tidak sehat dari lingkungan yang tidak Islami. Semula, pesantren ini diperuntukkan bagi mereka yang datang dari jauh dan

[2] Wawancara dengan KH. Munir Mansur, tanggal 03-08-2000, pukul 16.30-18.30 WIB.

[3] Selain sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar, pesantren ini juga menjadi mediator perjodohan antara santri laki-laki dan perempuan. Polanya bermacam-macam: mereka mengawali perkenalan sendiri, lalu lapor ke kiai dan dijodohkan; atau, pesantren yang mempunyai inisiatif menjodohkan santri.

tidak punya bekal, sehingga ditampung di pesantren. Selain itu, mereka yang berasal dari masyarakat sekitar, pada sore hari datang dan bermalam di pesantren, lalu pagi harinya pulang. Sementara itu, santri kategori kedua ini sudah tidak ada. Alasannya, pesantren dipenuhi buruh pabrik, sementara lokasinya tidak memungkinkan untuk itu karena dipakai kegiatan pendidikan formal MI yang berdiri pada tahun 1972. Bahkan, bila ada lokasi baru, pasti akan dipenuhi lagi oleh buruh pabrik. Karena saat itu, pesantren memang hanya menampung santri dengan kapasitas yang terbatas. Jumlah santri saat ini adalah 160 orang, dengan perincian: 70 putera dan 90 puteri.

Gejala masuknya para buruh ke pesantren ini mulai merebak sekitar tahun 1989. Sejak tahun 1991 memang ada maksud untuk mengelola pesantren secara murni, tetapi tantangannya besar dan seakan-akan tidak mungkin terwujud, karena antusiasme buruh untuk nyantri di pesantren semakin besar, maka untuk mempertahankan nuansa dan semangat pesantren secara murni, diadakanlah TPA (untuk anak-untuk) dan majelis taklim dua kali seminggu sehabis dzuhur dan sehabis Shubuh selama 20 hari di awal bulan Ramadhan yang diikuti oleh ibu-ibu. Meski realitasnya, buruh datang untuk kerja, namun ada kebanggaan di mata keluarga santri bahwa mereka datang ke Surabaya bukan untuk kerja, tetapi untuk mondok.

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pesantren sangat besar karena pengelola pesantren adalah warga pribumi dan sejak awal memang menyelenggarakan kegiatan majelis taklim sore hari. Namun, majelis taklim ini semakin lama semakin tergeser keberadaannya karena lokasinya tergeser oleh kedatangan santri buruh yang jumlahnya sangat besar. Kedatangan santri buruh ini memang memenuhi lokasi pesantren sehingga hampir seluruh lokasi pengajian akhirnya dijadikan tempat tidur (inap) santri luar. Akhirnya, kedatangan santri luar membuat masyarakat sekitar

enggan untuk datang mengaji lagi di pesantren. Sebelum masuknya buruh, pesantren pernah mengalami penurunan jumlah santri. Namun, setelah kedatangan buruh, jumlah santri cenderung meningkat, bahkan untuk kasus tertentu malah sempat menolak karena kapasitasnya tidak mencukupi.

Kurikulum yang diajarkan di pesantren tersebut lebih banyak bertumpu pada pelajaran fiqh karena pesantren tidak bisa idealis seperti pesantren salaf sehingga yang diajarkan adalah pelajaran yang praktis-praktis saja yang sekiranya bisa mereka terapkan di dalam praktik-praktik kehidupan.[4] Sementara itu, kitab yang diajarkan tidak mengalami perubahan antara sebelum dan setelah kemasukan santri buruh.

Perlu diketahui bahwa semua guru yang mengajar di pesantren ini tidak digaji. Mereka mencari nafkah sendiri-sendiri di luar pesantren, termasuk di antaranya dengan membuka wartel. Oleh karena itulah, pesantren ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Peran masyarakat berbentuk baik secara fisik maupun moral. Secara fisik materi, peran mereka dirasakan terutama jika pesantren sedang mempunyai kegiatan pembangunan masjid dan sebagainya. Sementara secara moral, peran masyarakat sangat kuat terutama dalam memberikan kontrol terhadap setiap penghuni pesantren dalam masyarakat luas. Kontrol sosial ini sangat bermanfaat sekali hingga tidak pernah terjadi perilaku yang dianggap tidak sesuai untuk ukuran pesantren. Sementara itu, donatur tidak ada; yang ada hanya iuran SPP dan bantuan masyarakat secara insedentil jika ada program pembangunan fisik.

c) PP. Al-Mubarok II

Pesantren ini berdiri jauh sebelum kemerdekaan oleh keluarga pesantren dari Sidoresmo, Surabaya. Awalnya Berbek

[4] Di sini letak perbedaannya dengan PP. al-Mubarok Berbek Dalem yang banyak mengajarkan akhlak tasawuf, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

ini dikenal dengan wilayah "merah", sarat dengan perilaku-perilaku menyimpang seperti judi, mabuk dan sebagainya. Lalu, ada sayembara dari seorang tokoh masyarakat setempat yang bernama Royan yang berisi barangsiapa yang mampu menyembuhkan penyakit seorang puterinya akan diberi hadiah: jika muda, diangkat sebagai menantunya, dan jika tua dianggap sebagai tokoh masyarakat. Mendengar sayembara itu, salah seorang putera (kelurga) pesantren Sidoresmo, Tolhah, datang memenuhi sayembara itu, dan akhirnya dengan izin Allah SWT berhasil menyembuhkan yang bersangkutan. Sebagai imbalannya, dilaksanakanlah janji tokoh tersebut. Inilah awal dari misi penyebaran agama di kalangan masyarakat Berbek, dan ini pula awal dirintisnya pengajaran agama melalui model pesantren. Bahkan, menurut pengelola (kiai), pesantren ini bisa dikatakan pesantren tertua di Sidoarjo hal itu bisa dibuktikan dengan evidensi-evidensi fisik arsitektur bangunan pesantren dengan ornamen-ornamen berupa tiang-tiang jati kuno dan layaknya dipakai di masjid Ampel Surabaya.[5]

Oleh karena itu, untuk menampung para pendatang di tengah maraknya industrialisasi di kawasan tersebut, sedangkan wilayah-wilayah lain dari Desa Berbek (I, II, dan III) sarat dengan tempat kos-kosan, dan Berbek Dalem steril dari kos-kosan, semua buruh harus menjadi penghuni pesantren.[6] Hal ini karena kos-kosan dengan berbagai tradisi yang menurut pesantren, serba bebas sangat bertentangan tradisi Keluarga Dalem.

---

[5] Hasil wawancara dengan KH. Jazuli, 05-08-2000, 10.15-11.15 WIB.

[6] Pesantren ini mulai dihuni oleh santri kira-kira pada tahun 1990/1991 seiring dengan masuknya industrialisasi di kawasan tersebut. Saat ini, pesantren dihuni oleh 55 santri (putera) dan 5 puteri, dengan perincian:

- 50 % dari mereka adalah pekerja pabrik
- 25 % pekerja serabutan
- 25 % lainnya sekolah (SMA/PT).

Mengikuti proses pembelajaran bagi santri buruh pabrik di pesantren ini bukan tanpa kendala sama sekali. Secara umum, kendala atau kesulitan yang mereka hadapi adalah sebagai berikut: (1) Jika santri buruh terkena *shift* kerja malam, target pengajaran tersendat karena tertinggal dalam pelajarannya; sementara pelajaran hanya ada malam hari; (2) Karena para guru tidak mendapat gaji, pengelola tidak mungkin mendesain pengajaran ulang bagi santri buruh yang ketinggalan pelajaran akibat *shift* malam. Dengan kata lain, pesantren tidak mengadakan kurikulum alternatif untuk mengatasi realitas *shifting* jam kerja santri buruh; (3) Resistensi yang bersifat provokatif dari masyarakat pemilik kos-kosan di daerah sekitar Berbek Dalem. Mereka memberikan informasi yang keliru terhadap calon santri dari buruh yang ingin masuk pesantren. Informasi itu di antaranya bahwa pesantren itu kumuh, ketat, tidak bisa bersantai atau istirahat, dan sebagainya. Akibatnya tertanam kesan bahwa pesantren buruh itu seperti yang dikesankan masyarakat tersebut. Kenapa ini terjadi? Secara historis, sebelum masuknya industrialisasi, masyarakat di situ rata-rata adalah buruh tani atau minimal petani yang tidak mempunyai lahan garap. Ketika industralisasi masuk, mereka semakin kehilangan mata pencaharian kecuali mendirikan kos-kosan. Jadi, kos-kosan adalah mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, keberadaan pesantren, yang secara ekonomis dianggap lebih meringankan pekerja dari pada kos-kosan, dianggap oleh mereka sebagai saingan yang mesti dibuat sedemikian rupa agar tidak sampai berkembang dan mengancam keadaan kos-kosan; (4) Menjamurnya kos-kosan itu seakan menjadi tantangan bagi pesantren karena kehidupan kos-kosan menjanjikan kebebasan yang begitu besar serta tradisi kontrol lingkungan yang permisif yang berbanding terbalik dengan pesantren.

Adapun keuntungan yang dimiliki oleh santri buruh adalah: (1) Santri bisa memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah dari

hasil kerja. Menurut ungkapan pengelola pesantren, yang membedakan pesantren ini dengan pesantren konvensional adalah, jika pada yang pertama santri memikirkan keluarga di rumah, sedangkan pada yang kedua keluarga di rumah memikirkan mereka yang di pesantren; (2) Santri bisa menjadi cermin berperilaku bagi teman kerja dan keluarganya dengan status santri dan kemampuan ilmu agamanya. Hal ini terbukti bahwa santri akhirnya bisa mengajak orang tuanya untuk shalat dan mengaji. Sementara bagi perusahaan, pekerja santri dianggap sangat menjunjung kedisiplinan serta memiliki tingkat ketenangan, dan bahkan produktivitas yang lebih tinggi dari lainnya. Kondisi ini mengandung daya tarik yang tinggi bagi pemilik atau atasan di perusahaan. Sebagai akibat dari daya tarik ini, pekerja santri selalu ditempatkan di bagian yang rawan konflik, yang rendah produktivitasnya, atau bahkan bagian yang mesin-mesin produksinya suka *ngadat* (akibat persoalan keyakinan terhadap dunia magis). Namun setelah dimasuki oleh pekerja santri, bagian itu meningkat produktivitasnya seperti yang diharapkan perusahaan; (3) Sebagai akibat dari kelebihan poin di atas, terjalinlah kerjasama antara pesantren dengan perusahaan. Bentuk kerjasamanya adalah perusahaan meminta pesantren dengan segenap penghuninya untuk melakukan pembinaan kehidupan mental karyawan melalui kegiatan *istighatsah* dan *tahlil* yang diadakan pada sore hari (sebulan sekali) dengan didahului oleh shalat ashar berjama'ah. Kerjasama ini sangat dirasakan nilai positifnya oleh perusahaan, setidaknya dapat meningkatkan ketenteraman karyawan dan meminimalkan ketegangan, baik antar karyawan maupun karyawan dengan perusahaan. Di samping itu, kerjasama tersebut juga dapat menambah keuntungan finansial perusahaan, karena produktivitas karyawan dirasakan meningkat setelah diselenggarakannya kegiatan pembinaan mental tersebut.

Cara pesantren untuk mengantisipasi pergaulan bebas adalah dengan diberikannya santri lelaku-lelaku (amalan) konkret seperti puasa 40 hari berturut-turut pada awal masuk pesantren atau awal tahun yang dibarengi dengan wirid-wirid, tidak pernah meninggalkan shalat jama'ah (selama berpuasa 40 hari itu), tidak boleh dalam keadaan batal wudlu, serta tidak melakukan maksiat. Selain itu, ditekankan falsafah ikan; ikan meski berada di laut yang asin airnya, ia tetap tidak berubah menjadi asin. Mengapa demikian? Karena ikan dalam keadaan hidup. Tapi begitu mati, ia menjadi asin ketika diasini oleh manusia. Begitu pula yang diharapkan pada santri. Ketika hati nuraninya hidup, maka ia tetap bisa hidup di mana saja tanpa terpengaruh oleh lingkungan.

Untuk menjaga motivasi dan niat santri agar tidak melenceng dari ajaran agama, motto yang mesti diterapkan adalah: "Saya pergi ke Surabaya untuk belajar sambil bekerja, bukan bekerja sambil belajar". Cara pesantren menegakkan aturan sangat fleksibel sesuai dengan kondisi yang dihadapi masing-masing santri dan tingkat persoalannya.

Selain santri yang mukim, ada juga santri buruh yang tidak mukim. Mereka rata-rata adalah santri yang dulunya mukim di pesantren, lalu menikah dan tinggal di kos-kosan. Sekalipun tinggal di luar pesantren, ia tetap aktif mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di pesantren.

Terhadap pertanyaan mengapa perusahaan tidak mau tahu keberadaan pesantren, hal ini karena prestasi santri di perusahaan selalu ditutup oleh kepala bagiannya dan kemudian prestasi itu diakui sebagai prestasinya sendiri, sehingga kesannya seolah-olah adalah prestasi kepala bagian. Akibatnya, perusahaan tidak pernah tahu sumbangan yang banyak diberikan oleh buruh santri.

d) PP. Al-Karimi, Lolawang, Ngono, Mojokerto.

Pondok pesantren yang beralamat di Dusun Sukorejo, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini, menempati area pusat industri Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Ngoro Persada Industri, kurang lebih 30 km ke utara dari pusat kota Mojokerto. Status kepemilikan pondok adalah milik pribadi, berasal dari tanah wakaf Bani Karim kepada KH. Muslih Arif, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren al-Karimi.

Pondok pesantren al-Karimi didirikan pada tahun 1984. Pada saat itu, sarana pondok pesantren hanya terdiri atas sebuah mushalla dan dua kamar santri. Perkembangan selanjutnya, pondok pesantren memiliki tiga kamar (tempat tinggal santri), dua MCK, satu ruang tamu, satu mushalla, dan sebuah koperasi yang bernama al-Karimi (mengelola kebutuhan santri). Koperasi tersebut didirikan pada tahun 1991.

Pada tahun-tahun pertama didirikan, pondok pesantren ini hanya dihuni oleh tiga orang santri. Selanjutnya, pada tahun 1997 pesantren ini menampung santri cukup banyak,[7] dengan memanfaatkan ruang tempat tinggal santri dan mushalla. Memang, sebagian besar santri memanfaatkan mushalla sebagai tempat istirahat. Dalam perkembangan terakhir, jumlah santri mengalami

---

[7] Komposisi jumlah santri, seperti telah dijelaskan, adalah campuran (buruh dan anak sekolahan). Perbandingan jumlahnya adalah 12 santri berprofesi sebagai buruh pabrik dan dua santri sebagai pelajar. Salah satu santri sekolah di STM Mojosari, sementara yang lainnya di SMA Islam Manduro, Ngoro, Mojokerto. Berdasarkan keaktifannya di pondok, santri dapat dikelompokkan menjadi santri yang *mukim* (tinggal di pondok) yang berjumlah 14 orang, semuanya putera, dan *dodok* (hanya mengikuti kegiatan pondok) berjumlah sekitar 70 orang (30 putera dan 40 puteri). Latar belakang pendidikan santri berkisar antara SMP dan SMU. Mereka umumnya berusia produktif, datang ke Ngoro Persada Industri untuk bekerja. Dalam kesibukan kerja itulah mereka merasa membutuhkan pembinaan di bidang mental keagamaan. Pada akhirnya, hati mereka tertambat di pondok pesantren al-Karimi. Mengenai daerah asal santri adalah Madiun, Nganjuk, Ngoro, Pacet, dan Waru.

penurunan hingga berjumlah 14 orang (berdasarkan data tahun 2000). Jumlah santri tersebut diklasifikasikan dalam dua kelompok, yakni buruh pabrik (12 orang) dan anak sekolah (berjumlah 2 orang). Penyebab berkurangnya jumlah santri beragam, mulai dari alasan sarana pondok pesantren yang kurang memadai, lokasi pondok pesantren berjauhan dengan tempat kerja, dan banyak santri telah menikah.[8]

Alasan pendirian pesantren murni didorong oleh faktor keagamaan. Artinya, pondok pesantren didirikan karena buruh pabrik yang indekos di wilayah Ngoro dirasa membutuhkan pembinaan agama. Dugaan tersebut diperkuat oleh respons positif buruh pabrik terhadap keberadaan pondok pesantren, baik ketika tinggal di asrama pondok maupun dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Motivasi santri untuk mondok amat beragam, meski umumnya didorong oleh motivasi keagamaan. Selain faktor keagamaan, santri memilih mukim di pondok juga dikarenakan faktor ekonomi. Mereka menganggap hidup di pondok lebih ekonomis dibanding ngekos di luar. Sebab, kenyataannya di pesantren, santri tidak ditarik uang SPP, kecuali bayar uang listrik sebesar Rp2.000,00/bulan.

Selama mengikuti kegiatan pesantren, santri tidak mengalami persoalan dengan waktu bekerja. Secara kebetulan santri yang ada memperoleh *shift* kerja siang (pukul 07.30-16.00 WIB). Lagi pula, kegiatan pondok dilaksanakan setelah shalat Ashar hingga ba'da shalat Isya' (16.00-12.00 WIB), serta ba'da shalat Shubuh.

Tata tertib pondok pesantren juga sangat longgar. Mereka tidak diwajibkan makan di pesentren (umumnya mereka masak

---

[8] Penyebab terbesar berkurangnya jumlah santri dikarenakan mereka telah menikah. Yang menarik, proses pernikahan senantiasa difasilitasi pihak pondok pesantren. Artinya, pengelola pondok turut berperan menjodohkan di antara santri buruh pabrik, selebihnya akad perkawinan umumnya dilaksanakan di pondok pesantren, dan resepsinya dilangsungkan di rumah masing-masing.

sendiri), meskipun salah seorang pengelola pondok memiliki warung. Mereka hanya dianjurkan membeli kebutuhan sehari-hari di koperasi al-Karimi (itu pun tidak diwajibkan). Mengenai tata tertib pondok, seperti kewajiban shalat berjama'ah, mengaji kitab, yasinan, diba', khatam al-Qur'an, majelis taklim, hanya diumumkan setiap santri masuk pesantren. Sebenarnya peraturan tersebut tidak terlalu ketat. Memang, jika ada santri yang tidak mengikuti kegiatan akan mendapatkan peringatan dari pimpinan pesantren. Hanya saja selama ini belum ada santri yang dikeluarkan pimpinan pesantren akibat tidak mengikuti kegiatan.

Jenis kegiatan pondok pesantren meliputi; mengkaji al-Qur'an, membaca kitab kuning, pengajian umum, yasinan, dan hadrah. Kegiatan mengkaji al-Qur'an pondok pesantren membeikan fasilitas mengajar santri mulai dari nol (sistem iqra'), dan bagi yang telah mampu diajarkan tajwid dan seni baca al-Qur'an (qira'ah). Kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren adalah; *Jurumiyah* dan *'Imriti* (Nahwu), *Bulugh al-Maram* (Hadits), *Wasaya* dan *ihya' 'Ulum al-din* (Akhlak dan Tasawuf), serta *Tafsir Jalalayn* (Tafsir). Hari efektif belajar santri di pondok pesantren al-Karimi adalah Ahad, Senin, Rabu, Jum'at, dan Sabtu. Sementara pada hari Selasa dan Kamis, di pesantren diadakan pengajian umum dengan melibatkan masyarakat (hari Selasa) dan yasinan (hari Kamis). Untuk jenis kegiatan yasinan dan pengajian umum dilaksanakan setelah shalat Isya dan diikuti tidak kurang dari 70 orang.

Karena santri tidak diharuskan membayar SPP, melainkan hanya membayar uang listrik sebanyak Rp2000,00 per bulan, maka biaya operasional pengelolaan pesantren ditanggung pengurus. Di samping itu, pesantren juga memiliki saham di koperasi al-Karimi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk fasilitas pesantren. Memang, masyarakat sekitar sedikit banyak turut membantu pembiayaan pesantren, meski sifatnya insidental, misalnya jika ada pembangunan pesantren. Singkatnya, sebagian

besar biaya operasional pesantren diambil dari dana pengurus, hasil usaha koperasi, dan dukungan masyarakat. Karena kondisinya demikian, maka guru-guru di pesantren tidak mendapatkan gaji sama sekali sekali, mereka ikhlas *li Allah ta'ala*.

e) PP. Salafiyah Nurudh Dholam

Pondok pesantren yang berada di Dusun Oro-Oro Jipang, Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini didirikan pada tahun 1988, dengan bangunan awal rumah kiai dan masjid. Selanjutnya fasilitas pesantren bertambah, berupa 13 kamar untuk santri (6 kamar untuk putera dan 7 kamar untuk puteri), empat MCK, satu masjid, satu ruangan majelis taklim, dan satu ruang tamu.

Perkembangan awal santri yang mukim di pesantren hanyalah tiga orang. Kemudian bertambah hingga mencapai 40 orang (22 putera dan 18 puteri). Di samping santri yang mukim (40 orang), terdapat pula santri *dodok*, berjumlah sekitar 50 orang. Asal santri berkisar dari Kediri, Blitar, Banyuwangi, dan daerah sekitar pesantren. Dari 40 santri yang mukim, lima di antaranya adalah santri yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Santri buruh pabrik ini berasal dari Malang, Ngoro, dan Probolinggo.

Seperti umumnya pelajaran di pesantren, maka sebagai pelajaran dasar yang diterima santri di pesantren salafiyah Nurudh Dholam adalah belajar al-Qur'an, baik tajwid maupun seni baca. Selain mengkaji al-Qur'an, santri juga mendapat pelajaran baca kitab. Kitab-kitab yang diajarkan meliputi; *Mabadi' Fiqhiyah, Fath al-Qarib, Fath al-Mu'in* (fiqh), *Jawahir al-Bukhori* (hadith), *Tafsir Jalalayn*, *Munir* (tafsir), *Bidayah*, *Ihya' Ulum al-Din* (tasawuf), *Fath al-Mujib,* dan *Qatr al-Ghayth* (tauhid), *Jurumiyah* dan *Imriti* (nahwu). Pelajaran kitab diajarkan dengan sistem *watonan.* Selain mendapat pelajaran baca al-Qur'an dan kitab kuning, santri juga mendapat pelajaran ekstra-kurikuler, yakni seni hadrah dan muhadharah (seni berpidato).

Sejauh ini, santri dapat mengikuti program pesantren, terutama santri buruh pabrik. Sebab, mereka umumnya mendapat *shift* siang (pukul 07.30-16.00 WIB). Dengan demikian proses belajar di pesantren sama sekali tidak mengganggu pekerjaan di pabrik. Tentang motivasi santri mondok, khususnya santri buruh pabrik, adalah murni untuk belajar agama. Mereka datang dari daerah memang untuk belajar agama, hanya saja ada kendala biaya, maka mereka bekerja untuk belajar. Artinya, mereka bekerja memang untuk kelangsungan proses belajar di pesantren.

f) PP. Sunan Kalijogo

Pondok pesantren yang berlokasi di Simomulyo, Surabaya ini, didirikan pada tanggal 31 Agustus 1989 oleh seorang ulama setempat bernama K.H Muchsin Nurhadi. Cikal bakal Pondok Pesantren Sunan Kalijogo ini adalah langgar Sunan Kalijogo yang didirikan pada tahun 1986. Di langgar ini pula, dulu dipakai sebagai tempat mengaji anak-anak dan generasi muda yang ada di kelurahan Simomulyo dan sekitarnya, mengingat tempat ini merupakan satu-satunya tempat untuk mengaji pelajaran ilmu agama Islam yang diasuh oleh seorang ulama sebelum K.H Muchsin Nurhadi, yakni K.H Abdul Muntholib.

Di langgar ini dulu diadakan pengajian rutin sekali dalam seminggu. Karena semakin lama daerah ini semakin ramai dan di sekitarnya telah berdiri banyak industri berskala besar maupun kecil, maka langgar tersebut pada akhirnya dikembangkan menajadi pondok pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian lingkungan sekitar dari kontaminasi budaya industri yang terkesan mengesampingkan pentingnya ilmu agama. Untuk itu, di samping para buruh mengadu nasib dengan bekerja di pabrik, mereka juga menuntut ilmu agama dengan mondok di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo.

Berdirinya pondok ini mendapatkan tanggapan positif dari pihak masyarakat dan warga setempat. Kemudian tidak lama kemudian, berdatanganlah para santri dari berbagai daerah yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, dengan maksud ingin bekerja sebagai buruh sambil mengaji ilmu agama dan menetap di Pondok Pesantren tersebut.[9] Berangkat dari sinilah Pondok Pesantren Sunan Kalijogo mempunyai peranan penting dalam mengefektifkan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan mental spiritual untuk menuju manusia yang utuh. Hal inilah yang memicu dan memacu pesantren ini berkiprah dalam meghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan di pesantren ini, di antaranya adalah:

1) Kajian Keislaman

   Dalam rangka kajian Keislaman, pondok ini mengkaji secara rutin kitab-kitab atau sumber-sumber hukum Islam, seperti *Tafsir Jalalain, Durratun Nasihin, Ta'lim al-Muta'allim, Safinatun Najah, Sulam Taufiq, Aqidatul al-Awam, Fathul Qarib,* dll. Kajian terhadap kitab-kitab tersebut dilaksanakan dengan metode diskusi dan *halaqah.*

2) Hadrah dan Qasidah

   Hadrah dan Qasidah ini merupakan pesan agama (Islam) yang disampaikan melalui syair yang diiringi musik khas Islam.

   Hadrah merupakan kesenian kaum Ahl al-Sunnah Wa al-Jama'ah, yang umumnya digunakan untuk mengiringi bacaan Shalawat Nabi. Seni hadrah yang dilaksanakan, diikuti oleh para

[9] Adapun jumlah santri sampai sekarang sudah mencapai 300 santri besar kecil dan kurang lebih 50% diantaranya mereka adalah sebagai pekerja atau buruh pabrik.

santri laki-laki yang sudah ditentukan oleh pengurus, dan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu malam Minggu ba'da Isya'. Dalam menjalankan seni hadrah peserta dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang satu sebagai pemegang alat hadrah, yang jumlahnya kurang lebih 8 orang dan kelompok lainnya sebagai kelompok tim koor yang jumlahnya antara 20 sampai 4 orang.

Adapun qasidah merupakan kesenian yang bernafaskan Islam yang berisikan pesan-pesan Islam, yang dilantunkan dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Kesenian qasidah yang diadakan khusus diikuti santri perempuan yang telah lulus seleksi. Kesenian qasidah penampilannya diadakan pada hari-hari tertentu. Kesenian hadrah dan qasidah ini dilaksanakan dengan maksud untuk memupuk dan mengembangkan jiwa seni pada anak santri, khususnya kesenian yang bernapaskan Islam. Dengan demikian tertanamlah rasa estetis pada santri.

3) Manaqib

Manaqib adalah bacaan yang mengungkapkan riwayat dari seorang Waliyullah. Di antaranya adalah manaqib Syaikh Abdul Qadir Jailani, manaqib Syaikh Abi Hasan Asy-Syadzily, manaqib Syaikh Ibrahim dan sebagainya. Adapun manaqib yang biasa dibaca setiap malam jum'at oleh para santri di pondok adalah manaqib Syaikh Abdul Qadir Jailani, karena manaqib ini sudah terkenal di Indonesia. Setelah pembacaan manaqib selesai, kemudian diisi ceramah agama, yang di dalamnya diungkapkan tentang sifat-sifat dan riwayat para waliyullah. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan teladan-teladan yang telah dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu agar diteladani oleh orang-orang sesudahnya.

4) Khitobah

   Acara ini dimaksudkan untuk melatih para santrinya memupuk kecakapan dalam menyampaikan pesan agama secara lisan. Program latihan tersebut dilaksanakan seminggu sekali setiap malam Sabtu, baik oleh santri laki-laki maupun perempuan.

5) Membaca Shalawat (Diba')

   Bacaan diba' adalah kumpulan Shalawat Nabi dalam bentuk syair serta riwayat Muhammad SAW. Kitab yang dibaca adalah karangan Abdurrahman al-Diba'. Kegiatan ini dilaksanakan pada malam Jum'at. Kegiatan membaca Shalawat ini dimaksudkan agar timbul rasa cinta para santri kepada Rasulullah Muhammad SAW khususnya bagi mereka yang mengerti dan mau merenungkan maksud bacaan tersebut.

6) TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)

   Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah suatu wadah pendidikan Islam pada tahap pemula yang diasuh oleh beberapa santri yang sudah mencapai kelas III madrasah salafiyah. Aktivitas-aktivitas tersebut bermaksud untuk mengajak dan menuntun manusia kepada hidup yang lebih baik dan Islami, agar terhindar dari perbuatan mungkar.

Pesantren ini menjadi tempat signifikan bagi perubahan pola perilaku para santrinya. Di samping faktor eksternal yang berupa ajakan dari teman sesama buruh yang menjadi santri, perubahan perilaku di kalangan buruh pabrik adalah karena faktor internal yang muncul dari dalam dirinya. Pada dasarnya, mereka rata-rata mempunyai sedikit wawasan keislaman dan ingin memperdalam ilmunya di pesantren. Selain itu, mereka sadar hidup di kota yang heterogen, banyak godaan iman yang sangat besar. Untuk itu mereka masuk ke pesantren sebagai langkah antisipatif, sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif.

Adapun proses perubahan perilaku buruh yang menjadi santri di Pondok Sunan Kalijogo adalah sebagai berikut: (1) Setelah mereka mengikuti aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan di pesantren, mereka mempunyai kesan positif bahwa kehidupan di pesantren ternyata banyak memberikan manfaat, sehingga mereka betah tinggal di pondok; (2) Sedikit demi sedikit secara tidak langsung mereka mulai terpengaruh oleh tradisi atau kebiasaan di pondok yang mengarah pada perilaku yang Islami. Misalnya, pada mulanya bila mereka saling bertemu dengan temannya mereka tidak mengucapkan salam, tetapi setelah "nyantri" mereka mengucapkan salam bila bertemu dengan temannya. Selain itu, setelah mondok mereka aktif menjalankan saat fardhu tepat pada waktunya, bahkan mulai mengubah cara atau mode pakaiannya. Sebelum masuk pesantren mereka pada umumnya memakai rok mini, tetapi setelah mondok mereka memakai jilbab (busana muslimah); (3) Dalam kaitannya dengan pergaulan dengan keluarga dan masyarakat, mereka juga mengalami perubahan. Menurut pengakuan dari salah seorang santri, sebelum mereka mondok, mereka selalu menghabiskan uang hasil kerjanya, tetapi setelah mondok, mereka dapat dan mau menyisihkan uang hasil kerjanya untuk ditabung dan membantu orang tuanya. Oleh tetangga sekitarnya, dia dihormati karena sikapnya yang terpuji.

2. Pesantren Buruh Pabrik Hasil Alih Fungsi Kos-kosan

Pesantren jenis ini berasal dari kos-kosan yang pada umumnya dibangun oleh tokoh Islam yang memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib kaum buruh dan pendidikan agamanya yang tergolong cukup memperhatinkan. Namun pada perkembangan berikutnya, kos-kosan tersebut diubah menjadi pesantren dengan dilandasi oleh semangat kepedulian dan animo kaum buruh untuk mengikuti pendidikan agama.

Ada beberapa penyebab mengapa kos-kosan bisa berubah menjadi pesantren. *Pertama,* ada kehendak dari ahli waris atau keluarga untuk mengubah kos-kosan menjadi pesantren. Untuk keperluan ini, keluarga mengirimkan salah satu atau beberapa anggota keluarganya ke pesantren untuk menimba ilmu agama. Setelah pulang, barulah upaya perubahan tersebut dilakukan. *Kedua,* ada keterlibatan faktor sosial kemasyarakatan yang menghendaki lingkungannya bernuansa agamis. Namun, dalam kasus pesantren yang menjadi fokus penelitian ini (Pesantren Al-Istiqomah), faktor keterlibatan keluarga tampaknya lebih dominan ketimbang faktor sosial kemasyarakatan.

Namun demikian dalam perjalanan sejarahnya, ada dinamika pergumulan identitas yang menarik untuk dikaji lebih jauh, khususnya yang terkait dengan perkembangan pesantren di atas. Dinamika yang dimaksud adalah menyangkut niat pengubahan kos-kosan menjadi pesantren konvensional yang tidak terwujud lantaran kondisi masyarakat sekitarnya yang tidak kondusif untuk itu. Artinya, jika pendiri bersikeras untuk tetap mendirikan pesantren konvensional, maka pesantren akan ditinggalkan oleh para santrinya yang mayoritas adalah buruh pabrik. Mereka ternyata lebih memilih kos-kosan sebagai tempat tinggal, daripada tinggal di pesantren konvensional dengan berbagai peraturannya yang mengikat santri.

Pesantren Al-Istiqomah pada awalnya merupakan lokasi kos-kosan para buruh pabrik. Lokasinya cukup strategis, yaitu di Jalan Kendangsari II/5, sebuah wilayah yang dekat dengan areal perindustrian di daerah Rungkut, menyebabkan tingginya permintaan dari buruh pabrik yang bekerja di berbagai pabrik untuk mendapatkan kos-kosan. Mengingat dekatnya lokasi kos-kosan dengan areal perindustrian, para buruh pabrik cenderung untuk mendapatkan lokasi yang tidak terlalu jauh (kurang lebih 1 kilometer). Sebelum menjadi pesantren, areal yang ditempati

pesantren sekarang ini merupakan kamar kos-kosan yang berjumlah sekitar 20 kamar yang disewakan kepada buruh pabrik.

Berubahnya status kos-kosan buruh pabrik menjadi pesantren terjadi ketika salah seorang putera pemilik kos-kosan tersebut, yakni Moh. Muflik Syarif pulang dari menuntut ilmu di Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, pada tahun 1989. Moh. Muflik, setelah tamat dari SMP, langsung mengikuti kelas mu'allimin (persiapan) di Bahrul Ulum, dan menghabiskan waktunya menimba ilmu selama empat tahun di sana. Ketika pulang, ayahandanya berkeinginan agar Muflik menyebarkan ilmu yang telah didapatkan di daerah tersebut. Orang tuanya dengan suka rela memberikan tempat kos-kosan tersebut untuk dijadikan pesantren.

Ketika awal berdirinya, tentu banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga dan diri Muflik sendiri. Para tetangga sangat menyayangkan tempat kos yang tiap bulannya dapat memberi pemasukan sekitar 1,5 juta rupiah tiba-tiba harus dibongkar dan dijadikan pondok pesantren. Namun, keinginan dan tekad bulat dari orang tua Muflik tidak tergoyahkan, bahkan kedua orang tuanya memberikan dorongan kepada puteranya agar terus berjuang. Tantangan yang lain adalah masyarakat masih memandang sebelah mata kemampuan dan keinginan Muflik yang dianggap masih "bau kencur", masih muda dan tak tahu apa-apa. Tantangan ini pun dijawab dengan kesabaran dan bukti kesungguhan dalam mengelola pondok pesantren. Para buruh yang sudah menempati kos-kosan tersebut, setelah diinformasikan perihal pengubahan kos-kosan menjadi pesantren, sadar dan mau pindah.

Jumlah santri, sebagaimana dikatakan Muflik, mengalami pasang-surut.[10] Salah satu penyebab utamanya yaitu, ketika

---

[10] Animo buruh pabrik ternyata cukup besar sehingga kenyataan ini diterima oleh pengasuh dan menjadikan pesantren ini menjadi pesantren campuran. Jumlah santri sampai saat ini berjumlah sekitar 150 orang dengan rincian sebagai berikut:

pesantren kedatangan tamu dari kalangan pejabat mulai dari lurah sampai walikota dan didampingi oleh fungsionaris dari salah satu partai politik. Kedatangan mereka ke pesantren dalam rangka berbuka puasa. Pimpinan pesantren tidak bisa menolak kedatangan mereka, sebab mereka adalah tamu yang wajib dihormati. Kondisi politik pada waktu itu diwarnai oleh kuatnya dominasi Golkar. Kedatangan mereka (para pejabat) bisa jadi, dalam pandangan masyarakat sekitar dan sebagian para santri, sebagai upaya "kuningsari" yang diasumsikan tidak bisa diantisipasi oleh pimpinannya. Inilah yang menyebabkan masyarakat tidak terlalu simpati dan santri pun banyak yang keluar. Penurunan jumlah santri sempat mencapai 50% dari jumlah santri yang ada. Sekalipun demikian, kegiatan pondok tetap dijalankan apa adanya tanpa adanya pengurangan kegiatan. Dalam waktu enam bulan sampai satu tahun, santri mulai berkembang lagi.

Ada dua pola yang diterapkan ketika para santri buruh mondok di pesantren ini: *pertama,* mereka sudah bekerja dan memilih tinggal di pesantren; *dua,* mereka datang untuk mondok, tapi untuk meringankan biaya orang tua, mereka disarankan bekerja. Perbedaan pola di atas turut serta dalam membedakan etos santri yang ada di pesantren. Mereka mengikuti kegiatan pesantren dengan serius dan ikut serta membantu dalam pembangunan pesantren. Dengan cara bergilir, mereka membantu tukang yang sudah disediakan pondok, bahkan kiai sendiri yang masih cukup muda turun tangan membantu, misalnya menyediakan lulur semen. Kiai sendiri mengakui tanpa bantuan mereka, sulit kiranya terwujud pembangunan yang sampai sekarang ini masih terus berlangsung.

- Mukim 90 orang dan 60 orang tidak mukim
- Komposisi santri: 80% buruh; 15% mahasiswa/pelajar; 5%santri murni
- Dari 90 orang yang mukim: 35 laki-laki; 55 perempuan.

Jadwal kegiatan mengaji ditentukan pada waktu pagi hari (ba'da Shubuh pukul 06.00) dan malam hari (ba'da Isya' pukul 22.00). Setelah itu mereka diwajibkan untuk belajar mandiri atau kelompok selama satu jam dan pukul 23.00 mereka diwajibkan tidur, kecuali yang terkena piket jaga (5 orang tiap harinya), jadwal tersebut diperuntukkan bagi para santri. Sedang pengajian bagi ibu-ibu yang ada di sekitar pondok dijadwalkan pada sore hari (ba'da ashar sampai magrib), dan waktu magrib sampai isya' dikhususkan bagi bapak-bapak yang tinggal di sekitar pondok setelah melaksanakan shalat magrib berjama'ah di aula pondok. Bagi anak-anak (TPQ) dijadwalkan pada sore hari (sesudah ashar).

Harus diakui bahwa menerima buruh pabrik yang *shift-shift*-an juga sedikit menimbulkan masalah dalam hal penyampaian pelajaran. Mereka yang kena *shift* dengan terpaksa harus meninggalkan kelas dan tentunya mereka tertinggal pelajaran. Sementara itu, kiai dan ustadz tidak mau mengulang pelajaran. Sebagai solusinya, mereka diminta untuk "*nyulam*" atau "*nembel*" (di-*drill*) oleh teman-temannya. Adanya jadwal belajar satu jam (22.00-23.00) dimanfaatkan oleh mereka yang ketinggalan, di samping waktu lain yang telah mereka sepakati. Adanya "nyulam" dan "nembel" secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar mengajar (*training* mengajar) yang kelak bermanfaat bagi mereka apabila diminta mengajar (menjadi ustadz).

Materi yang diajarkan (kurikulum), antara lain: al-Qur'an dengan metode Iqra', *Fath al-Qarib* (fiqh), *Ta'lim al-Muta'alim* (akhlak), *Tafsir Jalalayn, Bulugh al-Maram* (Hadits). Bagi santri yang telah menyelasaikan kitab-kitab tersebut, mereka akan belajar kitab lainnya langsung di bawah asuhan kiai. Hal ini dikarenakan pondok pesantren tidak membatasi berapa lama mereka tinggal di sana dan dianggap lulus dari pesantren. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem klasikal (kelas 1-3). Hal ini disesuaikan dengan kemampuan santri.

Selain belajar ilmu-ilmu keislaman, santri mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, yang terdiri dari bacaan Shalawat Diba', Hadrah al-Banjari (santri laki-laki), rebana (santri perempuan), kursus mengetik, kursus komputer, dan kursus menjahit. Tiga kursus terakhir diberikan kepada santri yang dipandang mampu untuk mempelajari dan nantinya bisa mengajarkan pada santri lainnya. Sampai saat ini, pesantren belum mengkomersialkan kepandaian mereka (khususnya jahit) untuk masyarakat luas mengingat keterbatasan waktu yang ada. Meskipun demikian, mereka menerima "order" khusus bagi santri TPQ Al-Istiqomah sendiri.

Dukungan dari masyarakat sekitar cukup besar. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari perkembangan bangunan pesantren yang cukup pesat. Kotak amal yang ada di depan pesantren tampaknya cepat terisi dengan uang dengan nilai nominal yang cukup besar. Sebenarnya kalau kiai mau meminta sumbangan dari rumah ke rumah (*door to door*), beliau akan sangat mudah mendapatkannya karena kepercayaan dari masyarakat sudah mulai pulih kembali.

Demikian juga dukungan dari pabrik, PT. HM. Sampoerna dan PT. Abadi cukup besar juga. Ada keinginan dari pihak pesantren untuk mengadakan kerja sama tetapi sampai saat ini belum terealisir. PT. Abadi memberikan bantuan material bangunan. Adanya bantuan ini tampaknya tidak lepas dari banyaknya santri yang bekerja di pabrik ini. Secara umum, mereka mengetahui bahwa buruhnya yang mondok di pesantren tersebut mempunyai etos kerja yang cukup tinggi dan jarang mengikuti demonstrasi. Meskipun demikian, ada juga sisi negatif yang sering dikeluhkan oleh pihak pabrik tentang adanya buruh yang sering mengantuk di tempat kerja. Untuk mengatasi hal tersebut, pesantren mengupayakan dengan memberikan dispensasi bagi mereka yang telah lembur malam boleh tidak mengikuti pengajian ba'da Shubuh.

Mereka diperbolehkan tidur sampai pukul 06.30 dan selanjutnya mereka harus segera bekerja.

Pesantren juga memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan. Sanksi yang terberat dikenakan kepada santri yang bohong (misalnya izin keluar bekerja tetapi sebenarnya berkunjung ke tempat lain bersama pacarnya). Pimpinan pondok akan memanggil dan mengingatkannya. Jika sampai tiga kali tidak diindahkan juga, santri yang melanggar tersebut akan dikeluarkan dari pesantren. Adapun hukuman yang ringan, diberikan apabila santri melanggar peraturan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya ada santri yang tidak shalat jama'ah, mereka diminta untuk *neteli* tembok (karena pondok sedang membangun). Bagi yang berpacaran, mereka dipanggil dan difasilitasi segera menikah. Setelah menikah mereka diharuskan keluar pondok. Meskipun demikian, mereka diminta untuk mencari kos-kosan yang tidak jauh dari pondok sehingga mereka masih bisa mengaji.

3. Masjid/Mushalla sebagai Pusat Pembinaan Keagamaan bagi Buruh Pabrik

Pola pembinaan agama yang berlangsung di masjid atau mushalla lebih banyak dilatarbelakangi oleh keprihatinan sejumlah masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar yang mayoritas dihuni oleh para buruh. Sebagai langkah antisipasi untuk membendung arus kemaksiatan yang mula-mula boleh jadi dimunculkan oleh kaum buruh. Maka didirikanlah pusat pembinaan agama yang ditempatkan di masjid atau mushalla. Justru karena statusnya yang bukan pesantren dalam pengertiannya yang konvensional, pusat kegiatan keagamaan di masjid atau mushalla bisa menarik perhatian kalangan buruh yang tinggal di tempat sekitar.

Fenomena pembinaan agama yang ditemukan di PP. Masjid Baitullah memperkuat asumsi di atas. Adalah kenyataan bahwa,

pada tingkat tertentu, ternyata kaum buruh selalu membutuhkan proses pembinaan agama yang berlangsung secara simultan, sekalipun mereka tidak mau mukim di tempat belajar. Hal ini, sekali lagi, semata-mata karena buruh tidak mau terikat dengan rutinitas kegiatan keagamaan sebagaimana di pesantren. Ikatan antara buruh dengan sentra kegiatan keagamaan dikehendaki tidak lebih dari sekadar ikatan kebutuhan agama semata.

Pada awal perkembangannya, pondok pesantren yang terletak di Bungurasih Timur, dekat pintu keluar bus antarkota Terminal Bungurasih ini merupakan masjid. Masjid ini awalnya berdiri sebagai tempat shalat semata, tidak dirancang untuk kegiatan pembinaan agama. Sekitar awal tahun 1995, di masjid ini mulai diadakan kegiatan mengaji dengan pesertanya santri anak-anak sebanyak 5 orang; 3 putera dan 2 puteri. Tiga bulan berikutnya, masjid ini kedatangan remaja yang bernama Tajudin dan Idris (mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel). Oleh pengurus, disepakati bahwa masjid ini harus dikelola semaksimal mungkin, tidak hanya menjadi tempat shalat semata, tetapi juga pembinaan-pembinaan mental lainnya. Akhirnya diputuskan kedua orang tersebut sebagai penanggung jawab pengelolaan aktivitas pembinaan mental keagamaan masyarakat masjid.

Pada akhir tahun 1995, di masjid ini berdiri lembaga diniyah. Berdirinya diniyah merupakan bentuk pengembangan seksi pendidikan takmir masjid yang mulai diakui keberadaannya. Untuk menampung antusiasme masyarakat sekitar terhadap keberadaan aktivitas pembinaan mental keagamaan melalui model sekolah diniyah, pada tahun 1998 atas biaya seorang muslim bernama H. Muhadi, berdirilah bangunan dua lantai dengan lokal sebanyak 16 unit. Pembangunan lokal tersebut selesai dalam waktu satu tahun. Ia adalah seorang pengusaha yang memiliki 12 kios di dalam terminal Bungurasih serta beberapa kios lain di luar terminal. Ia sangat terobsesi untuk beramal lewat pendidikan masjid sebagai

rasa syukur mengingat masa awal karirnya yang cukup pahit, yakni sebagai pedagang asongan, yang kini diberi kelebihan rizki oleh Allah.[11]

Untuk mengorganisir santri yang mengikuti aktivitas pendidikan di masjid ini, dibentuklah sebuah organisasi yang bernama HISISBA (Himpunan Santri Islam Salafiyah Baitullah). Sebagaimana tenaga pengajar yang tinggal di kompleks, santri yang mukim di situ pun sebenarnya juga ditanggung biaya hidupnya (tempat tinggal, makan dan minum gratis). Namun demikian, kenyataan ini ternyata tidak terlalu menarik bagi santri-santri lainnya untuk ikut mukim di kompleks tersebut. Untuk mencari faktor-faktor penyebabnya, tampaknya perlu diadakan penelitian lebih jauh. Diduga keras, hal itu karena mereka rata-rata adalah pekerja terminal yang dalam mencari nafkahnya bergerak setiap waktu. Jadi, santri pekerja yang mengikuti kegiatan di masjid ini lebih banyak tinggal di luar. Hanya, ketika kegiatan pembinaan tiba waktunya mereka datang mengikutinya. Oleh karena itu, menurut pengakuan mereka, di satu sisi mereka sangat ingin belajar ilmu agama dan mengaji al-Qur'an, namun di sisi lain mereka juga tidak mau kalau disuruh meninggalkan judi. Sebab berjudi, menurut mereka, dianggap sama dengan kerja, yakni menggerakkan uang dalam aktivitas mencari nafkah. Jika uang tidak digerakkan lewat judi, maka uang mereka juga tidak akan mengalami perkembangan. Dengan kata lain, judi itu merupakan bagian dari bentuk aktivitas pencarian nafkah. Oleh karena itu, mereka tidak mau dan meminta tidak disuruh memilih antara dua hal tersebut: belajar agama dan berjudi. Yang mereka mau, belajar agama dan tidak harus meninggalkan berjudi. Melihat kondisi ini yang diterapkan pihak pengelola dan tenaga pengajar berangkat dari moto: "mereka tidak perlu diajar, tapi diajak".

---

[11] Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Mansur dan Ulfa, pengelola aktivitas masjid, 03-08-2000, pukul 09.00-10.00 WIB.

Obsesi pengelola PP. Masjid Baitullah adalah agar institusi ini benar-benar bisa maksimal keberadaannya sebagai pusat pembinaan mental para pekerja, baik pabrik maupun (terutama) pekerja terminal. Alasannya, di terminal Bungurasih terdapat banyak pekerja dan anak jalanan yang mengais rizki, baik dengan cara halal maupun tidak. Jika keberadaan PP. Masjid Baitullah bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka bisa diharapkan bahwa institusi ini, selain menjadi semacam "ranah singgah", juga menjadi model pembinaan kehidupan kerohanian pekerja dan anak jalanan.

Pertimbangan diangkatnya mereka sebagai pengurus adalah pengabdian dan loyalitas serta keaktifan. Latar belakang pengurus seluruhnya adalah mahasiswa dan alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya. Berstatus sebagai hak milik pribadi (keluarga) H. Mansur, PP. Masjid Baitullah memiliki cerita yang cukup menarik. Keluarga H. Mansur ini semula adalah saudagar keliling yang tempat tinggalnya berpindah-pindah. Pada suatu waktu tatkala H. Mansur dan isteri menginjak usia senja, anak-anaknya menginginkan kedua orang tua mereka tinggal menetap di suatu tempat dengan segala kebutuhan yang akan dipenuhi sepenuhnya oleh anak-anaknya. Namun, ibu Hj. Mansur mengajukan syarat bahwa ia mau menuruti kemauan anak-anaknya kalau di sebelah tempat tinggalnya dibangunkan masjid. Lalu dibangunlah masjid Baitullah itu yang letaknya persis bersebelahan dengan terminal Bungurasih. Masjid ini diresmikan oleh seorang ulama besar, KH. Imron Hamzah, ketua Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

Terhadap pertanyaan mengapa menginginkan dibangun masjid, ibu Hj. Mansur menjawab bahwa itu adalah kemauan dan niat sucinya yang diamini oleh anak-anaknya. Hal ini, menurut pengakuannya, tidak lepas dari semangat keagamaan yang selalu membara dalam hatinya. Ibu Hj. Mansur berasal dari keluarga santri; bapaknya seorang haji, sehingga pada masa akhir hidupnya,

ia ingin hidup dalam suasana keagamaan yang tinggi dengan masjid sebagai sentralnya.

Melihat lokasinya yang sangat strategis untuk digunakan aktivitas komersial, semisal pertokoan atau penginapan, sebagaimana tempat-tempat lainnya di sekitar terminal, sebenarnya lokasi PP. Masjid Baitullah ini akan mendatangkan uang yang sangat besar per harinya jika saja tidak digunakan untuk masjid. Namun potensi riil-komersial ini ditolak mentah-mentah oleh keluarga H. Mansur. Menurut mereka, mereka tidak mencari rizki dari (pemanfaatan potensi secara komersial) di situ. Mereka sudah merasa cukup dari hasil perdagangan mereka di tempat-tempat lain, terutama dari kios-kios yang banyak mereka miliki dan tersebar di hampir seluruh kawasan dalam terminal. Bahkan, menurut mereka, PP. Masjid Baitullah ini bisa dibilang *teleke terminal,* hasil dari usaha di terminal.

Awal berdirinya masjid ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak para buruh atau pekerja di sekitar terminal. Sebab dalam pandangan mereka, orang yang statusnya adalah pekerja atau buruh sudah tidak banyak memiliki kesempatan untuk belajar akibat kelelahan mencari rizki. Perihal ini dimusyawarahkan dengan warga sekitar. Warga masyarakat sangat mendukung maksud itu. Dukungan itu lalu memantapkan kegiatan-kegiatan masjid. Lalu, muncullah kegiatan mengaji untuk anak-anak.

Pada awal-awal memantapkan kegiatan masjid, PP. Masjid Baitullah ini juga tidak terlepas dari masalah dengan warga sekitar, terutama dengan para elite keagamaan. Masalah itu terutama berkaitan dengan akan digunakannya masjid tersebut sebagai tempat shalat Jum'at. Alasan warga, karena di Bungurasih sendiri sudah ada masjid besar yang sudah biasa digunakan untuk shalat Jum'at sehingga kurang bisa diterima jika masjid Baitullah juga

digunakan shalat Jum'at. Namun keluarga H. Mansur menduga bahwa hal itu terjadi karena mereka adalah pendatang baru sehingga warga masih tanda tanya tentang identitas keluarga H. Mansur. Meskipun begitu, keluarga H. Mansur tetap berusaha menyelenggarakan shalat Jum'at.

Sebagaimana hasil wawancara pertama, meski segala kebutuhan tempat tinggal pemondokan, makan, dan minum santri ditanggung oleh keluarga H. Mansur, tetapi kenyataan itu tidak terlalu menarik santri sehingga tidak banyak santri yang mukim di situ. Menurut mereka, penyebabnya tidak lepas dari beberapa kemungkinan berikut: (1) Para santri yang berstatus pekerja di terminal rata-rata bertempat tinggal di Bungurasih, sehingga mereka cenderung untuk mengikuti kegiatan belajar PP. Masjid Baitullah saja tanpa tertarik untuk mukim di sana; (2) Belum adanya seorang figur yang bisa dijadikan tokoh kharismatik untuk banyak urusan kehidupan masyarakat setempat sehingga keterikatan dan ketertarikan kepada pesantren tidak terlalu besar; (3) Kehidupan di masjid ini bisa jadi dianggap mengikat kehidupan mereka, sementara mereka belum mampu membatasi diri dari kehidupan di Bungurasih dan sekitarnya yang penuh dengan keramaian dan kemudahan-kemudahan fasilitas apa saja.

4. Pembinaan Moral-Keagamaan Buruh oleh Pabrik

Sekalipun pengelolaan dan inisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan acapkali muncul dari buruh, pola pembinaan agama oleh pabrik dilaksanakan murni atas swadaya pabrik. Aktivitas keagamaan semacam ini dengan sendirinya berada di bawah pengawasan pabrik dan masuk dalam struktur aktivitas resmi pabrik. Pola agama semacam ini pada umumnya dilakukan di pabrik atau perusahaan berskala besar untuk keperluan upaya peningkatan etos dan produktivitas kerja. Pola pembinaan agama oleh PT. Ajinomoto Ajinex Internasional yang berlokasi di desa

Mlirip, Jetis, Mojokerto, menjadi poros kajian dalam penelitian ini.

Kegiatan keagamaan karyawan yang dilakukan di perusahaan ini, meliputi pengajian rutin bulanan, pengajian *ramadhanan*, kursus baca tulis al-Qur'an, peringatan PHBI, istighfar, dan bakti sosial terhadap karyawan yang kurang mampu. Kegiatan pengajian bulanan dilaksanakan sebulan sekali (waktu fleksibel), diikuti sekitar 100 orang yang dipusatkan di mushalla Baiturrahman. Mushalla tersebut adalah milik pabrik, dibangun pada tahun 1999. Kegiatan pengajian rutin bulanan tersebut telah berlangsung sejak tahun 1979 hingga sekarang. Sebelum memiliki mushalla, kegiatan pengajian dilaksanakan di ruang *recreation house*, tempat yang memang disediakan pihak pabrik. Sejak tahun 1999, pengajian dilaksanakan di mushalla. Terkadang pengajian juga dilaksanakan di rumah karyawan, berdasarkan permintaan. Tema pengajian tidak ditentukan secara sistematis, diserahkan kepada penceramahnya.

Adapun pengajian pada bulan Ramadhan dilaksanakan tiga kali seminggu. Acara ini dikenal dengan "Dhuhur Bersama", karena dilaksanakan pada pukul 11.00-12.00 WIB, dilanjutkan shalat dzuhur berjama'ah. Pengajian tersebut diikuti sekitar 100 karyawan (baik karyawan tetap maupun harian). Dari jumlah tersebut 40 diantaranya adalah perempuan, dan sisanya laki-laki. Tema kajian Dhuhur Bersama selama bulan Ramadhan ditentukan, mulai dari masalah tauhid, thaharah, ibadah, dan akhlak. Kegiatan lain adalah baca tulis al-Qur'an, dilaksanakan setiap hari Senin sore. Kegiatan ini telah berlangsung sejak tahun 1999 hingga sekarang. Santri buruh yang mengikuti kegiatan baca tulis al-Qur'an ini berjumlah 15 orang (2 puteri dan 13 putera). Metode belajar baca tulis al-Qur'an menggunakan metode Iqra'. Di samping kegiatan pengajian, ramadhanan, dan baca tulis al-Qur'an, di pabrik juga diadakan kegiatan memperingati hari besar Islam, misalnya *Mauludan*, Isra Mi'raj, Nuzul al-Qur'an, dan lain-lain.

Seluruh kegiatan keagamaan untuk karyawan PT Ajinomoto Ajinex Internasional dilaksanakan di bawah koordinasi ketua warga muslim. Hubungan pengurus warga muslim dan pihak perusahaan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi perusahaan terhadap kegiatan keagamaan. Bahkan setiap rapat pimpinan, pihak perusahaan selalu mendapat laporan tentang keberadaan kepengurusan warga muslim dan aktivitas yang dilaksanakan. Terlebih ketika terjadi pergantian kepemimpinan, pihak perusahaan selalu mendapat laporan pengurus yang terpilih.

Sebagian besar kegiatan keagamaan di kalangan warga muslim dibiayai oleh kelompok warga muslim, baik yang mengikuti pengajian maupun tidak. Perlu diketahui, di pabrik Ajinomoto Ajinex Internasional terdapat kurang dari 1.500 buruh muslim. Mereka umumnya diminta secara sukarela menyumbang kegiatan keagamaan antara Rp1.000,00 hingga Rp10.000,00. Iuran ini sifatnya tidak memaksa, sebab tidak diatur secara ketat, seperti menggunakan kartu pembayaran atau lainnya. Karena sifatnya tidak memaksa, maka jumlah iuran warga muslim setiap bulannya mendapat sekitar Rp400.000,00. Uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan keagamaan juga disimpan menjadi kas warga muslim.

5. Majelis Taklim bagi Buruh di Rumah, bukan Masjid/ Mushalla

Varian terakhir dari pola pembinaan agama buruh pabrik adalah kegiatan mandiri yang diselenggarakan di rumah pengajarnya atau pesertanya secara bergiliran, bukan di masjid ataupun mushalla. Pola semacam ini biasanya berangkat dari perkenalan antara satu atau beberapa buruh pabrik dengan salah seorang pengajar yang dianggap mampu memberikan pembinaan agama. Dari perkenalan tersebut, disusunlah rencana kegiatan keagamaan yang jadwal aktivitas, materi, dan metode penyampaiannya telah

disepakati bersama. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, terdapat tiga majelis taklim yang layak masuk dalam rangkaian penelitian ini. Ketiga majelis taklim tersebut adalah sebagai berikut:

a) Majelis Taklim/Lembaga Kajian Keislaman (LKK) "Jama'ah Tauhid"

Lembaga yang beralamat di Dusun Bendil, Desa Keputihan, Kec. Menganti, Gresik ini, berdiri pada pertengahan tahun 1996 oleh seorang sarjana dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang bernama Tamanni Nasrullah. Motif pendirian lembaga kajian ini berangkat dari keprihatinan sosial kondisi masyarakat sekitar yang cukup memprihatinkan; anak-anak muda yang terdiri dari buruh pabrik banyak minum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba. Sementara itu, dari segi tingkat pemahaman keagamaan, warga setempat tergolong minus. Atas permintaan warga setempat dan dorongan dari beberapa pihak, termasuk keluarganya sendiri, akhirnya didirikanlah sebuah lembaga pengajian yang diberi nama "Jama'ah Tauhid".

Secara geografis, daerah Menganti merupakan basis industri yang terletak di perbatasan antara Gresik dan Surabaya. Di sekitar lokasi pengajian berdiri berbagai bangunan pabrik yang menjamur terutama di sepanjang Jalan Kepatihan. Pada umumnya, buruh tinggal di rumah penduduk atau kos-kosan. Namun, ada juga di antara mereka yang memilih pulang ke rumahnya masing-masing karena jaraknya yang dekat dengan tempat kerja.

Jumlah peserta Jama'ah Tauhid sebanyak 54 orang (aktif), dengan komposisi 94 % buruh pabrik tinggal di kos-kosan, sedangkan 6 persen lainnya terdiri dari pemuda dan warga kampung setempat. Jumlah peserta yang sudah dibai'at (dinyatakan lulus) sebanyak 46 orang. Peserta pengajian ini berasal dari berbagai macam daerah di Jawa Timur seperti Banyuwangi, Blitar, Kediri, dan wilayah-wilayah lainnya. Sementara itu, motif peserta

mengikuti aktivitas pengajian karena mereka ingin mencari kedamaian batin dan keselamatan dunia akhirat.

Sumber pendanaan lembaga ini diambilkan dari dana jariyah peserta tiap malam Minggu secara suka rela. Namun, pembayaran setiap peserta berkisar antara Rp500,00-Rp2000,00. Bendahara diambil secara bergiliran dari peserta. Besarnya uang jariyah yang sengaja tidak ditentukan memberikan pelajaran bagi para peserta agar senantiasa berbuat ikhlas dalam beramal, tidak pernah mengharapkan pamrih ketika mereka melakukan sesuatu. Atau, belajar mem-*fana*-kan (meleburkan) segala sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain dan tidak boleh mengingat-ingat kembali di kemudian hari.

Melihat sekilas, nama LKK "Jama'ah Tauhid" memiliki signifikasi sebagai wadah bagi penggemblengan batin para jama'ah melalui berbagai macam amalan atau *riyadah* tertentu. Materi yang ditekankan dalam kelompok pengajian ini adalah masalah ketauhidan (ushul al-din) yang diambil dari berbagai macam sumber sebagaimana banyak dipakai di sejumlah kelompok tarekat.

Adapun rangkaian aktivitas keagamaan lainnya dalam jama'ah ini adalah sebagai berikut:

1. Jam'iyyah 'Ataqah

   Secara literal, makna *'ataqah* adalah pembebasan, pemerdekaan. Dalam konteks pengajian ini, 'ataqah adalah sebuah aktivitas terikat yang berorientasi pada upaya pemerdekaan peserta dari segala hingar bingar persoalan dunia yang membebaninya. Acara ritual ini merupakan acara wajib setiap bulan sekali (setiap Minggu Legi) yang harus diikuti oleh semua peserta dengan membaca lafal *la ilaha illa Allah* sebanyak 70.000 kali. Amalan ini berdasarkan tradisi tarekat yang dilakukan oleh mursyid dari Pasuruan yang dianutnya, yakni

KH. Faqih Kholil dan KH. Hasan Husain. Sementara itu, acara yang sama dan bersifat tidak wajib (sunnah) dilaksanakan pada hari Sabtu malam Minggu. Untuk kesuksesan acara 'ataqah ini, baik yang wajib maupun yang sunnah. Setiap peserta dikenakan iuran 'ataqah wajib sebanyak Rp10.000,- setiap bulan.

2. Sosial Kematian (Soskem)

   Program ini dilaksanakan sebagai wujud solidaritas sosial untuk menghormati kematian anggota (jika memang terjadi) maupun saudaranya, seperti anak dan orang tuanya. Demi kelangsungan program ini, setiap anggota dikenakan iuran wajib sebanyak Rp1000,00. Sementara itu, bagi anggota yang sudah dibai'at dikenakan uang muka (UM) sebanyak Rp5.000,00 untuk keperluan lain. Jumlah uang yang terkumpul dari program sosial kematian ini tidak boleh dipinjam atau dipakai oleh siapapun, kecuali untuk keperluan kematian. Uang soskem ini juga tidak boleh disimpan di bank untuk menjaga kemurnian nilai intrinsik uang tersebut dari hal-hal yang bersifat syubhat (*debatable*).

Sistem penyampaian materi pengajian adalah dengan metode tanya jawab, ceramah (*bandungan*), dan diskusi. Proses pengajian dilakukan di balai depan rumah pemimpin Jama'ah Tauhid. Waktu penyelenggaraannya pada malam hari (pukul 07.00 setelah shalat 'isya sampai selesai). Sebagai pemimpin jama'ah adalah Ust. Tamanni Nasrullah dibantu oleh Ust. Aliman dari Desa Ngebret, Kecamatan Cerme, Gresik. Acara pembai'atan dilakukan oleh Ust. KH. Syamsul Ma'arif dari Desa Ngebret, Cerme, Gresik.

Hal-hal yang dibai'at adalah 5 rukun Islam dengan kualifikasi khusus (syahadat "hakikat", shalat "hakikat", puasa "khusus al-khusus", zakat "akal", dan haji "akal") yang dilakukan secara rahasia (*sirr rabbani*). Tidak boleh ada orang lain yang tahu tentang apa yang di bai'atkan oleh mursyid, sekalipun itu istrinya sendiri. Bai'at

selalu diberikan kepada masing-masing individu dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Peserta diharuskan menganut filsafat padi yang semakin menguning maka ia akan semakin merunduk; ketika dia memiliki ilmu pengetahuan agama (tauhid) maka ia harus bersifat *low profile* di hadapan banyak orang, bahkan kalau perlu merahasiakan identitas keagamaannya dari mereka. Ini dimaksudkan agar ia bisa menyusup kemana-mana dan bisa berkomunikasi dengan siapapun dengan bahasa sesuai lawan bicara. Sementara itu, amalan-amalan yang diperbincangkan atau ditampakkan di hadapan khalayak adalah amalan biasa (syariah). Hukumnya haram bagi peserta jama'ah untuk bersifat sombong di hadapan banyak orang dengan cara memamerkan kedalaman ilmu agamanya, karena ilmu tauhid ini tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Hal ini dimaksudkan agar orang yang tidak siap menerimanya tidak bermain-main dengan ilmu tauhid yang bisa berakibat fatal seperti gangguan penyakit jiwa atau gila. Sebab hal ini sudah banyak dibuktikan dengan sejumlah kasus di daerah lain.

Sifat bai'at yang dilakukan oleh Jama'ah Tauhid adalah mengikat. Artinya, amalan-amalan ritual telah mengontrol perilaku keseharian peserta dengan sendirinya. Apabila terjadi perilaku menyimpang, maka akibatnya akan terjadi suatu peristiwa yang merugikan dirinya dalam jangka waktu 40 hari. Namun apabila seorang peserta menghadapi peristiwa di luar 40 hari tersebut, sementara dia tidak melakukan pelanggaran apapun, maka peristiwa tersebut dianggap sebagi cobaan dari Tuhan.

b) Persatuan Pemuda Netral (PPNA) "Al-Rasyid"

Lembaga yang berlokasi di Dusun Bendil, Desa Kepatihan, Menganti, Gresik ini baru dirintis pada tanggal 12 Juli 2000. Sekalipun demikian, lembaga ini sudah memiliki santri sebanyak

40 orang aktif (34 laki-laki dan 6 perempuan). Hampir semua pemuda yang terlibat di sini adalah para buruh pabrik, baik yang tinggal di kos-kosan, bermukim di desanya sendiri, maupun tidak punya mukim (sebanyak 5 orang, dan sementara ditampung oleh tuan rumah di halaman belakang). Lembaga pengajian ini dirintis oleh adik kandung Ust. Tamanni Nasrullah S.Ag, yaitu Ramli. Sekalipun ia tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi seperti kakaknya, namun kiprahnya dalam menggalang pemuda (yang sebagian besar buruh pabrik) perlu diacungi jempol. Ia menempuh pendidikannya dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Pesantren pertama yang ia kunjungi adalah Sarang, Rembang, Jawa Tengah, asuhan KH. Maimun Zubair. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya di salah satu pesantren Darul Hadits, Bangil, Pasuruan. Terakhir, ilmu agamanya ia mantapkan di salah satu pesantren di Pare, Kediri.

Pendirian lembaga ini berawal dari keprihatinan yang bersangkutan terhadap situasi daerah setempat yang dipenuhi oleh pemuda pemabuk dan pengguna narkoba. Pada awalnya, ia mengajarkan ilmu bela diri tenaga dalam kepada para pemuda setempat. Namun, ketika ia berangkat kembali ke pesantren, ilmu tenaga dalam yang pernah ia ajarkan ternyata disalahgunakan oleh para pemuda tersebut untuk tawuran dengan geng pemuda lain. Perlu dicatat, *semua* anggota lembaga ini pernah merasakan minum-minuman keras dan narkoba. Daerah Menganti dikenal sebagai daerah minus yang berdekatan dengan pusat-pusat "kesenangan" seperti *billyard*, gedung bioskop, tempat lokalisasi, dan lainnya.

Sepulang dari pesantren, barulah ia menggagas berdirinya Persatuan Pemuda Netral Al-Rasyid (PPNA) ini. Misi dasar organisasi ini adalah murni sosial, dengan tujuan ingin menyelamatkan kembali pemuda yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja, seperti minum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba.

Keikutsertaan mereka dalam kelompok pengajian ini ternyata bisa menyembuhkan kebiasaan buruknya itu. Bahkan, mereka menjadi penengah setiap kali terjadi tawuran antar geng pemuda.

Lembaga keagamaan ini didirikan tanpa sokongan dana dari pihak manapun, dan para anggotanya tidak dipungut biaya atau iuran wajib. Oleh karena itu, mereka belum memiliki fasilitas apapun baik tempat proses belajar mengajar maupun fasilitas lainnya seperti alat tulis menulis. Fasilitas yang selama ini dipergunakan kondisinya sangat memprihatinkan; mereka menggelar tikar dan karpet di halaman tanah terbuka di belakang rumah kakaknya yang cukup luas sebagai tempat berlangsungnya semua aktivitas keagamaan. Sekalipun demikian, para anggotanya bukan orang yang sama di kelompok pengajian kakaknya. Semua aktivitasnya dilakukan pada malam hari, karena pada siang harinya para pemuda itu harus bekerja di perusahaan di sekitar lokasi.

Pendekatan yang diterapkan oleh Ramli adalah pendekatan dialogis dan persuasif. Dilihat dari segi usia, Ramli memang tidak jauh berbeda dengan kebanyakan anggota perkumpulan yang ia pimpin. Ia berusaha mendekati mereka dengan cara mengajak dialog dari hati ke hati. Ia tidak pernah melarang atau menegur kebiasaan jelek pemuda setempat dengan cara keras dan tidak simpatik, karena hal demikian hanya akan menimbulkan rasa antipati terhadapnya. Dengan cara seperti itu, ia dapat merekrut pemuda dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Dilihat dari segi subtansi, proses dan aktivitas pengajian di tempatnya sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai pesantren buruh pabrik. Sayangnya, perkumpulan ini tidak memiliki tempat yang layak dan fasilitas memadahi untuk disebut sebagai pesantren.

Ada dua kata yang perlu digarisbawahi di sini; kata "Netral" dan kata "Al-Rasyid." Kata "Netral" mengindikasikan bahwa kelompok keagamaan ini didirikan bukan untuk sebuah kelompok

tertentu yang berafiliasi pada organisasi atau ideologi tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika di dalam kelompok ini ditemukan banyak pemuda dari latar belakang yang berbeda. Di sinilah tempat "nongkrong"-nya pemuda dari Muhammadiyah dan NU atau dari organisasi keagamaan lainnya.

Kata yang kedua "al-Rasyid". Ini menunjukkan adanya itikad yang tulus di balik pembentukan perkumpulan ini, yakni untuk membimbing para pemuda nakal yang mayoritas buruh pabrik itu ke jalan yang benar (sesuai dengan ajaran agama). Bimbingan tersebut diberikan dalam bentuk pengajian rutin setiap malam dan aktivitas tarekat pada hari Kamis malam Jum'at.

Untuk menjaga kemaslahatan bersama dan menjauhkan kemadlaratan, Ramli membuat sebuah rancangan jadwal pengajian yang sudah *establish* bagi para anggotanya sesuai dengan jenis kelamin; kegiatan itu terbagi ke dalam dua kelompok, yakni kelompok santri laki-laki dan santri perempuan. Materi yang disajikan dalam pengajian pun tergolong relatif berbobot sesuai dengan kitab yang dijadikan rujukan dalam setiap pengajian. Di bidang syariat, Ramli menggunakan kitab *Nasaih al-'Ibad* sebagai rujukan utama. Sementara itu, amalan tarekat yang dipraktikkan setiap hari Kamis malam Jum'at adalah *Shalawat al-Fatih*, karangan al-Tijani, tokoh terkenal tarekat al-Tijani.

c) Majelis Taklim "Ya Salam", Surabaya

Majelis taklim "Ya Salam" berdiri sekitar 7 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1993. Majelis ini dikelilingi oleh berbagai pabrik, di antaranya Lotus, pabrik plastik Vilgo, Sampoerna, dan sebagainya. Lokasi majelis taklim ini dapat dikategorikan sebagai tempat yang sangat strategis bagi pembinaan buruh pabrik yang rata-rata bertempat tinggal (kos) di daerah tersebut. Dua tahun pertama, majelis taklim ini menempati rumah ustadz yang jaraknya sekitar 100 meter dari letaknya sekarang. Karena dijual, ustadz pindah

ke lokasi sekarang ini, yaitu di Jalan Kedung Asem (sebelah kelurahan) Rungkut, Surabaya.

Berdirinya majelis taklim "Ya Salam" dilatarbelakangi oleh suatu kondisi, yakni banyaknya buruh pabrik yang memakai rok mini, pergaulan yang tidak Islami, dan adanya kejenuhan di antara mereka melakukan rutinitas sehari-hari bagaikan mesin; datang, kerja, pulang, makan, tidur, berangkat kerja lagi. Hal ini menggugah hati Ustadz Salam untuk memperbaikinya karena selain memberikan sedikit pengetahuan agama, juga di daerah tersebut terkenal sebagai lingkungan santri, sehingga citra lingkungan santri terkesan tetap ingin dipelihara.

Ustadz Salam adalah lulusan SMA yang kemudian meneruskan pendidikan di pondok di bawah asuhan Kiai Chozin selama 7 tahun. Pengembaraan menuntut ilmu tersebut tampaknya lebih difokuskan pada olah rohani seperti tirakat dan menata hati utamanya keikhlasan dalam melakukan perbuatan. Akhir dari pengembaraan tersebut, Salam diperintahkan untuk mengajar *ngaji* (al-Qur'an) di daerahnya dengan tetap menerapkan prinsip keikhlasan (tanpa adanya iuran dan tanpa adanya nama bagi pengajiannya tersebut).

Perintah dari gurunya tersebut dilaksanakan dengan membuka pengajian al-Qur'an di rumahnya. Ustadz Salam menerapkan Iqra' bagi pemula kemudian dilanjutkan dengan mengaji al-Qur'an. Usaha yang sudah mulai dirintisnya tersebut, beriringan dengan adanya industrialisasi yang tampaknya menggugah hati Salam untuk mengajarkan al-Qur'an dan ilmu agama lainnya kepada para buruh. Melalui perkenalan dengan para buruh pabrik dan ngobrol-ngobrol, sedikit demi sedikit mereka tertarik untuk mengaji bersama Ustadz Salam di rumahnya.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Ustadz Salam tidak pernah memberi nama bagi pengajiannya. Hal ini sesuai dengan

amanah gurunya, untuk mengajar mengaji yang didasari oleh keikhlasan. Nama "Ya Salam" bukanlah nama yang diberikan. Awal ceritanya, ketika ada lomba antar langgar atau mushalla, Ustadz Salam juga mengirim peserta didiknya untuk mengikuti lomba tersebut. Di antara lomba yang diikutinya, salah seorang peserta didiknya menang. Pada waktu hadiah lomba akan diumumkan dan dibagikan, para peserta lomba memakai nama perwakilan langgar atau mushalla. Tiba giliran anak didik Ustadz Salam menang dan pembinanya diminta untuk tampil. Ustadz Salam sebagai pembina tidak mau tampil dan mewakilkan kepada saudara dan muridnya. Akan tetapi, masyarakat yang sudah mengetahui bersorak untuk menyatakan bahwa yang tampil bukanlah pembina yang sebenarnya. Akhirnya, dengan terpaksa Ustadz Salam tampil dan ditanya apa nama langgar/mushalla atau institusinya, beliau menjawab tidak ada namanya. Ketika itu pula MC menyatakan dan menanyakan bagaimana kalau nama pengajian Ustadz Salam dinamakan "Ya Salam", yang diambil dari nama pengasuhnya. Dengan serta merta masyarakat dengan persetujuan dari para kiai yang hadir menyetujuinya. Walaupun sudah ada namanya, akan tetapi di rumah di mana aktivitas pengajian berlangsung tidak ada nama papan tersebut.

Pengajian yang dilakukan Ustadz Salam utamanya berorientasi pada pengajian al-Qur'an. Selain mengajarkan pengajian untuk anak-anak dan ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya, Ustadz Salam juga memberikan pengajian bagi buruh pabrik tiap harinya. Ibu-ibu dijadwalkan pada pukul 2-3 siang. Anak-anak dijadwalkan pada pukul 3-6 sore. Sedang bagi buruh pabrik perempuan dijadwalkan habis magrib sampai pukul 8 malam. Bagi buruh laki-laki mulai pukul 8 malam sampai tidak ada batas waktunya. Di samping jadwal tersebut di atas, Ustadz Salam juga memberikan pengajian bagi buruh pabrik sehabis Shubuh sampai pukul 8 pagi. Ustadz Salam juga memberikan les privat bagi mereka yang

tertinggal. Dalam melaksanakan kegiatan pengajian, Ustadz Salam dibantu oleh keluarga (istri dan saudaranya) dan para ustadz yang rata-rata berasal dari IAIN tanpa dibayar, serta para pengurus majelis taklim yang ditunjuk dan dipilih di antara buruh sendiri.

Di samping kegiatan di atas, Ustadz Salam juga mengadakan kegiatan ekstra yaitu kegiatan mengaji kitab (*Fath al-Qarib* dan *Lubab al-Hadits*) yang diajarkan oleh ustadz dari IAIN dan malam Jum'at diadakan kegiatan tahlilan, diba'an dan ceramah agama. Majelis taklim juga mengadakan khataman keliling 2 minggu sekali di kos-kosan para santrinya.

B. Karakteristik "Embrio" Pesantren Buruh Pabrik

Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya Tradisi Pesantren menyatakan institusi pendidikan Islam yang bernama pesantren paling tidak mempunyai lima elemen dasar: kiai, santri, kitab kuning, pemondokan, dan masjid/mushalla.[12] Apabila salah satu elemen tidak dipenuhi, maka institusi tersebut belum bisa dinamakan pondok pesantren. Pernyataan Dhofier tersebut bisa jadi benar, sebab objek kajian penelitiannya adalah pesantren konvensional yang lazim dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Namun, elemen yang menjadi komponen sebagaimana dinyatakan Dhofier bisa tidak berlaku. Atau dengan kata lain bahwa elemen yang ditemukan pada "embrio" pesantren buruh tidak semuanya memenuhi ktiteria yang disebut Dhofier. Hal inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian selanjutnya dalam rangka menentukan elemen ataupun karakteristik dari pesantren buruh pabrik. Namun demikian, sebagai langkah awal perlu dipaparkan data yang diperoleh di lapangan mengenai elemen-elemen yang ada pada "embrio" pesantren buruh pabrik.

---

[12] Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 44.

Kondisi riil lapangan menunjukkan bahwa elemen yang ada di berbagai "embrio" pesantren buruh pabrik bervariasi tanpa meninggalkan esensi dari keberadaan sebuah pondok pesantren. Esensi dari keberadaan pesantren adalah mengajarkan agama Islam. Hal ini sudah berlangsung sejak awal keberadaan pesantren di Indonesia. Demikian pula yang terjadi pada "embrio" pesantren buruh pabrik, meskipun dari kelima elemen ada yang tidak terpenuhi. Dari lima elemen dasar keberadaan pesantren, data di lapangan menunjukkan bahwa kesemua objek penelitian mempunyai elemen kiai. Elemen ini tampaknya sangat krusial dalam konteks pendirian pondok pesantren. Hal ini dikarenakan keberadaan pesantren tidak lepas dari keberadaan kiai yang menjadi pelopor dan pemegang kendali pelaksanaan proses belajar mengajar. Kiai dalam "embrio" pesantren buruh pabrik, tampaknya memegang peran yang tidak berbeda dengan kiai di pondok konvensional. Sosok mereka cukup disegani oleh para santri walaupun masih ada di antara mereka yang usianya cukup muda dibanding dengan santrinya.

Dalam hal kualitas pendidikan, secara umum para kiai di "embrio" pesantren buruh pabrik adalah jebolan perguruan tinggi (IAIN) atau paling tidak pernah mengenyam pendidikan tingkat menengah, tentunya selain menghabiskan waktunya juga mondok di pesantren konvensional. Latar belakang yang dimiliki oleh kiai, setidaknya bisa memberikan bekal yang cukup dalam hal memberikan wawasan kepada para santri, selain memberikan keterampilan-keterampilan lainnya guna meningkatkan sumber daya santrinya. Meskipun demikian, para kiai cenderung untuk mengajarkan kitab kuning yang sudah pernah dipelajarinya sewaktu mereka mondok. Hal ini bisa dipahami dalam konteks transmisi keilmuan harus didahului dengan "syahadah/ijazah", yakni santri memperoleh izin dari gurunya untuk mengajarkan suatu kitab/ ilmu kepada orang lain. Hal inilah, sebagaimana yang terjadi di

pondok konvensional, yang menyebabkan kiai di "embrio" pondok pesantren buruh pabrik cenderung mengajarkan apa-apa yang sudah pernah diajarkan oleh gurunya saja.

Elemen pesantren yang juga dimiliki oleh semua "embrio" pesantren buruh pabrik adalah santri. Meskipun pada awal mulanya sebagian pendiri pesantren memperuntukkan pesantrennya khusus bagi mereka yang hanya menuntut ilmu (santri murni), karena lokasinya di kawasan industri, dalam perkembangannya pesantren terpaksa menerima buruh pabrik menjadi santrinya. Hal ini tidak terlepas dari realita lapangan bahwa banyak buruh pabrik yang "haus" akan pengetahuan agama. Kehidupan mereka yang seperti mesin menyebabkan mereka bosan bahkan galau dan resah, sehingga mereka mencari *way out*-nya. Bagi mereka yang sadar, mereka cenderung untuk menekuni ilmu agama di pondok pesantren. Sebaliknya, banyak juga buruh yang hanya berfoya-foya, terlibat narkoba, dan minuman keras.

Selain itu, ditemukan juga di lapangan bahwa ada santri yang sengaja bahkan disuruh oleh kiainya untuk bekerja. Hal ini untuk meringankan beban biaya hidup selama menuntut ilmu. Bahkan tak jarang ditemukan banyak buruh pabrik yang menjadi santri, sadar akan kewajiban membantu orang tua dan keluarganya dengan mengirimkan sebagian penghasilan yang diperolehnya. Kesadaran ini timbul tidak lepas dari ajaran agama yang disampaikan oleh kiai.

Kemampuan buruh pabrik yang nyantri, ketika pertama kali masuk pondok, cukup beragam. Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi kemampuan agama mereka. Mereka yang lulus madrasah, setidaknya, sudah bisa membaca al-Qur'an dan sebagian ada yang sudah bisa membaca kitab kuning. Sedang yang lulus sekolah umum, kemampuannya masih sangat dasar, bahkan membaca al-Qur'an pun tidak bisa. Bagi sebagian pondok yang mempunyai tingkatan kelas, mereka ditempatkan sesuai dengan

kemampuannya. Sedang yang tidak menerapkan jenjang pendidikan, biasanya santri dikhususkan mempelajari al-Qur'an ditunjang dengan pengajian umum yang secara rutin diadakan.

Sebagaimana di pesantren konvensional, di "embrio" pesantren buruh pabrik dikenal ada dua klasifikasi santri, yaitu santri mukim dan santri kalong/dodok. Santri yang mukim, bertempat tinggal di pesantren. Sedangkan santri yang kalong/dodok, belajar di pesantren tetapi bertempat tinggal di luar pesantren. Adanya jenis santri kedua disebabkan: *pertama,* rumah atau kos-kosan santri dekat dengan pesantren; *kedua,* "embrio" pesantren buruh pabrik memang tidak menyediakan pemondokan bagi para santri; *ketiga,* santri yang sudah kawin tidak diizinkan lagi tinggal di pesantren. Untuk kasus yang terakhir, ada upaya yang sedang dirintis untuk mendirikan pesantren bagi buruh pabrik yang sudah berkeluarga.

Pengajaran kitab kuning merupakan ciri khas dari sebuah pesantren. Melihat data di lapangan, sebagai dasar pengetahuan yang diajarkan di semua "embrio" pesantren buruh pabrik adalah membaca al-Qur'an. Pengajaran al-Qur'an, menurut Nakamura,[13] seharusnya diberikan pada tingkat pengajian al-Qur'an, bukan pada level pesantren yang tingkatannya lebih tinggi. Diberikannya pelajaran membaca al-Qur'an di "embrio" pesantren buruh pabrik tidak terlepas dari keberagaman latar belakang para santri. Setelah menguasai membaca al-Qur'an, mereka masuk pada pengajaran kitab kuning. Secara umum, kitab kuning yang diajarkan berkaitan dengan masalah fiqh, disusul kemudian dengan kitab tafsir dan kitab akhlak/tasawuf, di samping kitab-kitab kuning tentang ilmu-ilmu bantu (nahwu). Besarnya porsi kitab fiqh yang diajarkan tidak

[13] Nakamura dan Nishino mengklasifikasikan pendidikan Islam dua tingkat: Pengajian Al-Qur'an sebagai pendidikan dasar dan Pesantren sebagai pendidikan tingkat tinggi. Lihat Mitsuo Nakamura dan Setsuo Nishino, "Islamic Higher Education in Indonesia," *Higher Education Policy,* vol. 6, no. 2, (1993), hlm. 51.

terlepas dari *fiqh-oriented* yang dikembangkan hampir di seluruh pesantren di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa fiqh merupakan ajaran yang sangat penting berkaitan dengan sah-tidaknya amal ibadah seseorang.

Demikian pula dengan kitab kuning yang berkaitan dengan akhlak juga banyak diajarkan. Sedang kitab yang berkaitan dengan tafsir dan hadits tidak begitu banyak diajarkan. Besarnya porsi pengajaran kitab tasawuf dibanding kitab tafsir dan hadits dapat ditelusuri dari sejarah panjang masuknya Islam di Indonesia dan transmisi keilmuan tafsir dan hadits. Islam masuk dan diterima tidak bisa lepas dari peran tasawuf yang mempunyai kesamaan dan kebiasaan penduduk pribumi. Sehingga eksistensi pengajaran tasawuf cukup subur. Sedang pengajaran kitab tafsir sangat jarang disebabkan sedikitnya ulama yang mendalami kedua bidang ilmu tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak adanya "kewenangan" yang diberikan untuk mengajarkannya. Penelitian Van Den Berg yang kemudian dilanjutkan oleh Martin van Bruinessen[14] satu abad kemudian menunjukkan bahwa ulama yang menguasai dan mendapat ijazah/izin sangat langka. Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan Pesantren Tebuireng, adalah yang pertama kali mengajarkan ilmu hadits setelah memperoleh ijazah dari Syaikh Mahfud Termas.

Adapun jenis kitab kuning yang diajarkan di "embrio" pesantren buruh pabrik sangat menyerupai kitab-kitab kuning yang diajarkan di pesantren konvensional. Hal ini berkaitan dengan transmisi keilmuan dari seorang kiai kepada santrinya. Seorang kiai "berhak" menyampaikan sebuah ilmu apabila dia sudah mendapat "ijazah" dari gurunya. Transmisi model demikianlah yang berkembang sehingga adanya kesamaan kitab kuning yang diajarkan merupakan hal yang biasa. Berkaitan dengan metode

[14] Baca Martin van Bruinessen, "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Millieu," *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde,* 146, no. 2-3 (1990), hlm. 254.

penyampaian materi, tampaknya tidak ada perubahan yang signifikan. Selain menggunakan metode *sorogan* dan *bandongan*, kiai juga mengadakan diskusi tentang isi kitab kuning. Elemen pemondokan yang merupakan satu elemen penting, menurut Dhofier, bagi institusi pendidikan yang bernama pesantren bukan menjadi suatu hal esensial bagi "embrio" pesantren buruh pabrik. Walaupun eksistensi pemondokan sangat penting, dalam realita di lapangan ditemukan bahwa adanya pemondokan bukanlah suatu keharusan bagi pembinaan keagamaan buruh pabrik. Apalagi kondisi pemondokan yang tidak memenuhi syarat baik dari kesehatan maupun kenyamanan untuk melepas lelah (istirahat). Harus diakui bahwa sebagian besar pondok pesantren, termasuk "embrio" pesantren buruh pabrik tidak terlalu memikirkan kenyamanan dan kesehatan bagi santrinya. Satu kamar berukuran 4 x 6 m bisa dihuni hingga puluhan orang. Tidur di bawah tanpa alas sudah menjadi hal yang lumrah.

Tidak adanya pemondokan bagi santri bisa dipahami karena: *pertama,* tidak ada lahan/finansial untuk membangun, atau *kedua,* kamar memang sudah penuh. Kalau ditelusuri sebenarnya, tidak adanya pemondokan, bagi kalangan pesantren, merupakan hal biasa, sebab sudah dikenal ada jenis santri kalong/dodok yang tidak mukim di pesantren. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kegiatan pesantren senantiasa dapat diikuti oleh para santri, dan santri dapat menerapkan pelajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula keberadaan elemen masjid/musholla di sebuah pesantren, tampaknya dari data riil lapangan, masih bisa ditolerir ketidakberadaannya. Merujuk kepada zaman Nabi, jelas bahwa masjid sebagai pusat pendidikan (penyampaian ilmu) dan sebagainya. Namun, seiring perkembangan zaman, penyampaian ilmu bisa dilakukan di mana saja, misalnya di kelas ataupun di aula, bahkan ditemukan kasus bahwa ada yang melakukan

transmisi ilmu disampaikan di halaman rumah, seperti yang terjadi di majelis taklim Ya Salam, LKK Jama'ah Tauhid dan Persatuan Pemuda Netral Al-Rasyid. Meskipun demikian, ditemukan juga kondisi sebaliknya, yakni masjid/musholla menjadi pusat pembelajaran utama. Kasus PP. Masjid Baitullah merupakan contoh bagaimana pengurus masjid memainkan peran yang signifikan dalam pembinaan mental spiritual buruh yang ada di sekitar terminal Bungurasih, Surabaya. Di sini terlihat jelas bahwa keberadaan masjid merupakan kebutuhan vital.

Adanya paparan di atas bukanlah harga mati, tetapi sebagai wacana baru untuk terus melakukan kajian yang mendalam pada tahap berikutnya guna menentukan elemen-elemen apa saja berikut penjabaran dari masing-masing elemen secara terinci yang perlu menjadi dasar dari pendirian sebuah pesantren buruh pabrik yang ideal.

Bab V
Kehidupan Buruh Pabrik: Masalah dan Pemecahan dalam Kerangka Empiris

A. Realitas Kehidupan Buruh Pabrik

1. Latar Belakang Identitas Pribadi

Latar belakang identitas pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini, antara lain meliputi asal daerah, usia dan jenis kelamin, status masing-masing individu, pendidikan, pengalaman organisasi, keadaan keluarga, dan jangka waktu mereka menjadi pekerja buruh pabrik. Adapun upaya memahami latar belakang identitas pribadi secara komprehensif dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menemukan dan memilih solusi terbaik dan paling kecil risikonya dalam rangka memberikan bantuan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu kompleks dan heterogen yang dialami oleh buruh pabrik itu sendiri.

Dari data yang diperoleh di lapangan, diketahui bahwa mayoritas buruh pabrik yang termasuk dalam wilayah sampel penelitian ini berasal dari daerah Jawa Timur sendiri, terutama Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik. Ada juga yang berasal dari luar keempat daerah ini, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kenyataan ini menyebabkan para buruh tersebut merasa kesulitan untuk menjangkau secara langsung, pulang-pergi, ke lokasi pabrik di mana mereka bekerja, karena begitu jauhnya jarak

antara tempat asal (rumah) mereka dan lokasi pabrik. Kesulitan ini semakin dirasakan oleh buruh bila mereka dihadapkan pada realitas padatnya jam kerja dan ketatnya aturan yang dibuat oleh pabrik itu sendiri. Dengan demikian, alternatif yang bisa dilakukan oleh setiap buruh pabrik tersebut adalah mencari tempat yang terdekat dengan lokasi pabrik, apakah mereka memilih tinggal dengan jalan indekos atau tinggal di pesantren yang dekat dengan tempat mereka bekerja. Kenyataan bahwa mereka harus tinggal di sekitar kawasan pabrik menjadi masalah tersendiri bagi para buruh tersebut, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, dan sebagainya. Yang demikian itu wajar, mengingat setiap orang yang berada di suatu lingkungan baru, senantiasa membutuhkan pengadaptasian diri dalam segala situasi dan kondisi.

Dilihat dari sudut usia dan jenis kelamin, responden yang terjaring dan paling besar adalah dari kelompok usia 21-25 tahun (58,5%). Secara konkret dapat digambarkan bahwa dari 400 responden, sebanyak 234 orang berusia antara 21-25 tahun, sedang 41,5% lainnya menyebar ke dalam kisaran usia 19-40 tahun. Usia 21-25 tahun tergolong usia produktif. Dari segi ekonomi, jenjang usia ini sangat menguntungkan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja, baik dari pihak pekerja sendiri maupun dari pihak pengusaha pabrik. Sementara itu, dari segi jenis kelamin, dari 400 responden tersebut, terdapat 75% laki-laki dan 25% sisanya perempuan. Dari mayoritas laki-laki tersebut, kebanyakan dari mereka belum menikah. Perbedaan yang cukup tajam dari jenis kelamin responden ini, salah satunya disebabkan oleh sikap kaum perempuan pada umumnya yang lebih suka tetap bekerja di desa membantu orang tua daripada bekerja di kota yang dirasa sangat rawan dengan berbagai macam persoalan.

Secara psikologis, usia-usia produktif di atas, yakni 21-25 tahun merupakan masa-masa kritis karena menjadi puncak dari masa pubertas. Salah satu indikasinya adalah semakin kuatnya

keinginan mereka untuk mencintai lawan jenisnya. Di samping itu, timbulnya gejolak psikis yang ingin bebas dan cenderung tidak mau diatur mulai tampak pada diri mereka. Usia tersebut bisa dikatakan masa pancaroba dari pubertas dan remaja menuju masa dewasa, yang tentu saja, sangat rawan terhadap munculnya persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan anak remaja, di antaranya adalah perilaku sosial yang menyimpang. Stabilitas emosi mereka tidak dalam keadaan yang mantap. Akibatnya, kontrol sosial seringkali mereka abaikan. Secara sosial, perilaku menyimpang di atas adalah suatu hal yang sangat memungkinkan sebagai penyebab bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh pabrik. Yang demikian itu logis karena terjadinya kontak sosial di antara mereka yang begitu bebas dan tergantung kemauan mereka sendiri.

Mengenai lamanya mereka bekerja di pabrik juga sangat bervariasi; ada yang baru bekerja sekitar 1-5 tahun, 6-10 tahun, bahkan ada yang sudah mencapai antara 11-15 tahun, walaupun jumlahnya sangat kecil. Dari data yang terjaring diketahui bahwa yang masa bekerjanya berkisar antara 1-5 tahun adalah 326 responden (81,5%), suatu jumlah yang relatif besar, jika dibanding dengan jumlah responden yang hanya 400 orang, sedangkan 6-10 sebanyak 52 orang (13%) dan yang sudah mencapai 11-15 tahun hanya 22 orang (5,5%) saja. Dari data ini diketahui bahwa kebanyakan di antara mereka tidak ingin bekerja selamanya atau dalam jangka waktu yang lama di sebuah pabrik. Bahkan ada di antaranya yang meski baru menjadi buruh pabrik, berkemauan untuk meninggalkan pekerjaan di pabrik jika menemukan pekerjaan di luar pabrik yang lebih menjanjikan bagi masa depannya.

Meski demikian, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar pabrik itu juga tidak mudah dilakukan. Hal tersebut lebih disebabkan oleh keadaan dan kondisi dari masing-masing buruh itu sendiri. Kebanyakan mereka berasal dari lingkungan

keluarga petani dan pekerja kasar yang pada umumnya tergolong sebagai masyarakat kelas bawah yang notabene masyarakat miskin dan tidak berkecukupan secara ekonomi. Di samping itu, faktor pendidikan yang tidak terlalu tinggi, kurangnya *skill* atau keterampilan pada mereka sangat berpengaruh terhadap pekerjaan dan posisi yang didapatkan di tempat mereka bekerja. Yang demikian itu, bisa dibuktikan dari hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa dari 400 responden, ternyata hanya 30 responden saja yang lulusan perguruan tinggi, yakni 7,5% saja dari jumlah yang begiru banyak. Selebihnya, yang berpendidikan dasar sebanyak 50 orang atau 12,5%, sekolah lanjutan pertama berjumlah 70 orang atau 17,5%, dan yang berasal dari sekolah menengah umum sebanyak 250 orang atau 62,5%.

Adapun mengenai tempat di mana mereka mempelajari ilmu agama juga beragam. Dari 400 responden, dapatlah diketahui bahwa yang belajar agama di sekolah umum berjumlah 104 responden (26%), sedang yang di madrasah sebanyak 54 orang (13,5%), di pondok pesantren 36 orang (9%), di rumah sendiri dan orang lain 46 orang (11,5%), dan yang belajar agama di mushalla atau masjid berjumlah 160 orang (40%). Dari data yang diperoleh, ternyata yang menempati urutan pertama adalah belajar agama di mushalla atau masjid, suatu tempat yang tidak formal, kurang terorganisir dengan baik, kurang mendapatkan perhatian oranag tua, materinya tidak tersusun secara baik, ditambah menonjolnya unsur keikhlasan (*lillahi ta'ala*) bagi guru-guru yang mengajar dan sebagainya. Tingkat keikhlasan itu dapat diukur dari keberlangsungan pembinaan yang sangat tergantung pada ustadz atau guru yang secara suka rela mau meluangkan waktu untuk mengajarkan agama pada mereka. Karena itu, wajarlah jika pengetahuan keagamaan mereka relatif rendah. Nah, setelah mereka berada di kota, yakni di lingkungan industri yang sarat dengan berbagai macam persoalan, maka sangatlah tidak memadai ilmu agama yang

diperoleh tersebut dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di kemudian hari. Yang demikian itu, tentu saja, sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk memecahkan segala problem yang mungkin terjadi dan dialami oleh mereka.

2. Motivasi Pemilihan Kerja di Pabrik

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa mayoritas buruh pabrik itu adalah berasal dari keluarga petani, pekerja kasar, berpendidikan rendah, ditambah adanya pengetahuan agama yang minim serta kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Dengan kata lain, mereka tergolong masyarakat yang ekonominya lemah. Maka dari itu, wajarlah jika pemilihan kerja di pabrik itu, bagi mereka lebih banyak didorong faktor ekonomi. Mereka ingin meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Ketika mereka ditanya tentang kepindahannya selalu saja prospek ekonomi perkotaan yang lebih menjanjikan menjadi alasan. Pentingnya pertimbangan-pertimbangan ekonomi dalam pengambilan keputusan itu tampaknya menjadi kenyataan yang universal. Tentu saja bagi masyarakat miskin, berbuat sebaliknya akan mengancam kelangsungan hidup mereka. Dari jumlah 400 orang, hampir 90% di antara mereka yang memilih faktor ekonomi (kemiskinan) sebagai dasar dan alasan mengapa harus kerja di pabrik, yakni sebanyak 370 orang. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis seperti adanya tekanan batin dari keluarga di rumah sehingga mencari kompensasi atau semacam pelarian di kota. Sebagian yang lain ada juga yang bekerja di pabrik untuk semata-mata karena ingin menikmati kehidupan baru yang lebih bebas, maju, dan modern.

Data di atas memberikan gambaran kepada kita, betapa besarnya faktor ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap pola berpikir dan perilaku manusia dalam rangka mengubah kehidupannya agar menjadi lebih baik daripada kehidupan semula. Seiring dengan

proses industrialisasi di kota yang ditandai dengan semakin pesatnya pabrik-pabrik atau proyek-proyek industri, maka terjadi pula arus migrasi atau urbanisasi penduduk pedesaan. Migrasi atau urbanisasi tersebut dilakukan dengan berbondong-bondong sehingga terjadi penumpukan sumber daya manusia pedesaan di kantong-kantong sekitar kawasan industri (perkotaan). Dengan demikian, muncullah kantong-kantong masyarakat pedesaan di kota-kota besar. Di kota inilah masyarakat imigran lapisan bawah umumnya mengejar kesempatan kerja di pabrik-pabrik. Di pabrik-pabrik tersebut, mereka tidak sepenuhnya terserap sebagai tenaga kerja, padahal jumlah mereka yang datang ke sektor-sektor industri semakin lama semakin besar. Hal ini pada akhirnya semakin membebani ketenagakerjaan atau perburuhan di sektor industri, disebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Akibatnya, daya tawar mereka sangat rendah di hadapan pemilik institusi-institusi industrial tersebut.

Selain itu, keinginan mereka untuk bekerja sebagai buruh di perkotaan, juga dipengaruhi oleh anggota kelompok seperti keluarga, komunitas lokal, dan teman sejawat yang mengembangkan pola perilaku yang dimodifikasi setiap waktu sebagai pengalaman yang menentukan dan menggembirakan bagi perbaikan taraf hidupnya. Pada umumnya mereka telah lama berada di perkotaan dan suatu saat pulang ke kampung halamannya kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada keluarga, kerabat dekat, dan teman-teman sekampung. Dengan demikian, mereka sudah mempunyai gambaran dan bayangan tentang keadaan kota dan kehidupan buruh pabrik sebelum mengambil keputusan. Pada saat memutuskan untuk bekerja ke kota, seringkali mereka memperoleh bantuan dari kerabat atau teman sekampung yang sudah mapan di kota.[1]

---

[1] Bandingkan dengan hasil penelitian yang sama yang pernah dilakukan oleh Alan Gilbert & Joseph Gugler: "Para pekerja kerah putih dan kerah biru yang pindah

Model hubungan kekeluargaan seperti itu, biasanya merupakan elemen pokok dalam jalinan kerja seperti ini dan merupakan suatu perilaku yang bisa diterima oleh masyarakat pedesaan pada umumnya. Bahkan, kiriman uang para pekerja buruh pabrik ini seringkali mewarnai kehidupan orang-orang desa dan sering pula dianggap sebagai suatu yang istimewa. Karena hal inilah sehingga banyak yang berasumsi bahwa bekerja sebagai buruh pabrik adalah suatu yang berkonotasi positif. Dari hasil angket diketahui bahwa kebanyakan mereka yang bekerja di pabrik, sebagian uangnya disisihkan untuk membantu keluarganya yang ada di desa.

Memang diakui bahwa tidak selamanya motif uang menjadi motif primer bagi buruh pabrik. Dari angket yang disebarkan kepada responden, ditemukan adanya sebagian buruh pabrik yang mendapatkan bayaran lebih tinggi di tempat baru, namun minta bekerja kembali di tempat lama walaupun ia menerima gaji lebih sedikit. Disinyalir bahwa buruh yang demikian ini lebih menyukai pekerjaan tertentu, meskipun dengan gaji yang tidak terlalu banyak. Karenanya, kebanggaan, kecintaan, interes, dan minat yang besar terhadap pekerjaan menjadi insentif kuat untuk menyukai suatu pekerjaan. Dan pengangguran, dianggap sebagai kerugian atau kenistaan, lagi pula tuna kerja itu memutuskan mata rantai di antara diri sendiri dengan masyarakatnya.

Walaupun demikian, keterpaksaan secara ekonomi, tetap menjadi pemicu utama untuk tetap bisa bekerja di pabrik dan hampir setiap responden menjawab bahwa bekerja sebagai buruh

---

ke Bombay ternyata lebih dari tiga perempat mempunyai satu atau lebih keluarga yang sudah tinggal di kota tersebut. Lebih dari separuh menjadikan hal ini sebagai pertimbangan penting untuk datang ke Bombay. Sembilan dari sepuluh yang tercatat menyatakan bahwa mereka dibantu oleh keluarga atau teman-teman pada saat kedatangan: Kira-kira dua pertiga menerima akomodasi dan makanan gratis dan dua pertiga mereka mengakui dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. Alan Gilbert & Josef Gulger, *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia ke Tiga,* terj. Juanda Anshari (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 63.

pabrik itu adalah untuk bisa tetap hidup dan syukur-syukur jika bisa mengangkat harga diri dan keluarga. Yang demikian itu terjadi, karena adanya beberapa faktor, di antaranya adalah pembangunan pertanian di pedesaan sudah tidak menjanjikan lagi bagi mereka untuk bisa memperbaiki taraf hidupnya, akibat penggunaan teknologi dan akses kredit pertanian yang tidak merata. Selain itu, juga terdapat faktor industrialisasi itu sendiri yang senantiasa diasumsikan dapat memfasilitasi tercapainya kebutuhan hidup dengan cara yang lebih mudah dan cepat, dan secara ekonomi, pendapatan yang mereka peroleh sebagai konsekuensi dari keterlibatan mereka bekerja di sektor industri jauh lebih besar dengan risiko kerugian yang jauh lebih kecil dibanding dengan terlibat dalam aktivitas pertanian yang dikelola di pedesaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa urbanisasi itu terjadi seiring dengan terjadinya pergeseran struktur mata pencaharian penduduk dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa.

Dari keadaan tersebut, persoalan-persoalan yang menimpa kaum pekerja (buruh pabrik) dewasa ini dalam perspektif sosio-ekonomi pada umumnya meliputi beberapa hal. *Pertama,* jumlah jam kerja yang tinggi. *Kedua,* upah yang rendah dibarengi dengan jam kerja dan kedisiplinan yang tinggi. *Ketiga,* kurangnya jaminan keamanan dan keselamatan kerja.

Dalam kaitannya dengan problema buruh pabrik di atas, dapat dikatakan bahwa masalah perburuhan merupakan persoalan yang sangat krusial dan sarat konflik. Kaum buruh tidak jarang menjadi kuda tunggangan untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Buruh ibarat sapi perah yang selalu diperas dan dipacu dengan tuntutan-tuntutan yang tinggi dari pemilik modal dan atau pengambil kebijakan yang berkolaborasi dengan pemilik modal. Persoalan yang mesti dimintakan pertanggungjawaban kepada buruh, dan ini yang selalu menjadi tuntutan buta pemilik modal,

adalah produktivitas, selama buruh masih mampu menjual atau mengeluarkan tenaganya demi produktivitas, apapun caranya.[2]

Yang perlu disadari bersama adalah bahwa persoalan buruh pabrik, sebagaimana data yang diperoleh di atas, ternyata tidak sebatas persoalan ekonomi semata, namun ada persoalan lain yang bersentuhan dengan kondisi psikologis dan mental-spiritual sesuai dengan keberadaannya sebagai manusia dengan segala kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan mendalami persoalan-persoalan buruh seperti dimaksud penelitian ini, upaya-upaya pembahasan mesti dilakukan dengan memerinci masalah-masalah sehari-hari yang mereka alami selama menjadi buruh pabrik, keberadaan mereka di tengah industrialisasi, serta akibat lebih lanjut bagi kehidupan buruh pabrik.

3. Rincian Masalah Sehari-hari

Masalah sehari-hari yang dialami oleh buruh pabrik ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Masalah ekonomi

Mereka pada awalnya beranggapan bahwa dengan bekerja sebagai buruh pabrik, akan terjadi perubahan yang mendasar secara ekonomi. Anggapan ini berbeda sama sekali dengan realitas setelah mereka terlibat langsung dan berstatus sebagai buruh pabrik. Ternyata, perubahan ekonomi yang mereka harapkan ke arah yang lebih baik tidak terlalu menunjukkan grafik yang tinggi.

---

[2] Bandingkan dengan SR. Parker, RK Brown, J. Child dan MA. Smith yang menjelaskan bahwa:".... Pertumbuhan ekonomi seperti halnya dengan "keuntungan maksimum mungkin" telah lama dianggap sebagai suatu nilai utama di dalam suatu sistem sosial dan ekonomi. Suatu tinjauan yang dikemukakan oleh Mishan (1969) dan sejumlah ahli lainnya menyatakan bahwa usaha keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya ternyata sering tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan karyawan (masyarakat) secara seimbang". SR. Parker, RK. Brown, J. Child dan MA. Smith, *Sosiologi Industri*, terj. G. Kartasapoetra (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 33.

Hal itu terjadi, karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagaimana berikut:

Pertama, sebagian besar di antara mereka yang dapat diserap oleh industri berteknologi tinggi hanyalah tenaga-tenaga atau buruh kasar. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan buruh yang rata-rata tamat SLTP dan SLTA sehingga upah atau gaji yang didapatkan relatif rendah, sementara kehidupan di kota cenderung menuntut *cost* (biaya) hidup yang tinggi. Berbicara tentang upah atau gaji, sebenarnya sudah ada ketentuan baku dari pemerintah tentang standar Upah Minimum Regional (UMR). Namun demikian, pihak perusahaan lebih cenderung memenuhi batas minimalnya. Sementara di sisi lain, dalam kondisi krisis semacam ini, berapa pun upah yang diberikan oleh pabrik akibat daya tawar mereka yang lemah mengakibatkan pihak buruh cenderung akan menerima secara apa adanya. Jumlah yang kecil ini jelas akan bertentangan dengan tingkat kebutuhan mereka yang sangat tinggi di tengah ketidakpastian harga kebutuhan pokok.

Dari data yang diperoleh di lapangan, yakni Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik, tampak bahwa upah atau gaji buruh pabrik bervariasi antara Rp100.00,00–Rp300.000,00 dan lebih dari Rp300.000,00 dalam setiap bulannya. Secara konkret dapat dikatakan bahwa dari 400 responden yang menerima upah antara Rp100.00,00–Rp300.000,00 sejumlah 310 orang atau 77,5%, sedang yang sudah mencapai lebih dari Rp300.000,00 hanya 90 orang atau 22,5%. Selanjutnya, rincian data mengenai upah buruh pabrik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Variasi Upah Buruh pabrik

	Kotamadya/ Kabupaten	Besarnya Upah			
		<100.000,00	100.000,00 - 200.000,00	200.000,00 - 300.000,00	>300.000,00
1.	Surabaya	-	4	14	5
2.	Sidoarjo	-	13	25	8
3.	Mojokerto	-	-	5	1
4.	Gresik	-	19	16	-
	Jumlah	0	36	60	14

Kedua, beban hidup mereka bertambah karena tempat tinggal yang dihuni bukanlah milik sendiri, melainkan milik orang lain yang harus disewa atau dikontrak sesuai dengan kesepakatan. Memang, kebutuhan terhadap tempat tinggal yang layak huni dan terjangkau merupakan dambaan bagi setiap buruh pabrik. Namun demikian, karena sangat minimnya gaji atau upah yang mereka terima tiap bulannya, mereka hanya mampu menyewa kamar yang sempit dan cenderung kurang layak. Meski demikian, ada sebagian dari mereka yang kemudian mencari kos-kosan yang agak nyaman, murah tetapi jauh dari lingkungan kerja mereka di pabrik, dengan risiko transportasi yang agak mahal dan kemungkinan keterlambatan masuk kerja tepat waktu. Kos-kosan semacam ini biasanya diperoleh di daerah-daerah pinggiran atau pedesaan yang sudah agak jauh dari sentra kehidupan ekonomi di kota dan pusat industri.

Dari data yang diperoleh, kebanyakan mereka lebih suka memilih kos-kosan yang dekat dengan lokasi pabrik, meskipun tempatnya agak kumuh dan kurang memenuhi standar sanitasi. Sejumlah 330 orang dari 400 responden (82,5%) memiliki kos-kosan yang dekat pabrik, sedangkan yang memilih kos-kosan yang jauh dari lokasi pabrik, tapi mereka dengan kos-kosan bagus sebanyak 70 orang (7,5%) saja.

Ketiga, alat transportasi yang digunakan, pada umumnya, adalah angkutan umum, di mana setiap harinya masing-masing

buruh itu harus menyediakan dana untuk transportasi minimal Rp3000.00 sampai dengan Rp4000.00. Hal ini terjadi bagi mereka yang memang tinggal di kos-kosan yang jauh dari lokasi pabrik dan sulit dijangkau dengan transportasi biasa.

Dari semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, jika dikalkulasi dalam jangka waktu satu bulan, nominalnya sangat besar dan akan terus mengurangi pendapatan para buruh itu sendiri. Akibatnya, walaupun mereka sudah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik, tetap saja mereka hidup dan berstatus ekonomi lemah karena hasil yang diperoleh selalu pas-pasan dan bahkan seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, apalagi untuk menabung demi masa depannya.

Di samping itu, ada kecenderungan bahwa pembangunan industri di suatu kawasan seringkali memicu kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari reaksi para pedagang yang berjualan di sekitar kawasan industri tersebut. Mereka cenderung menaikkan harga barang karena tahu bahwa buruh-buruh pabrik itu sangat membutuhkan barang-barang yang dijual dan lokasinya tidak jauh dari lokasi industri di mana mereka bekerja. Dalam keadaan seperti ini pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari meningkat, sedangkan penghasilan tidak sesuai dengan pengeluaran. Alhasil, kehidupan para pekerja buruh pabrik itu tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun ada kenaikan gaji atau penghasilan.

Untuk mengatasi beberapa persoalan ekonomi tersebut, banyak buruh pabrik yang cenderung menambah jam kerjanya (lembur). Hal ini setidaknya dilatarbelakangi baik oleh tuntutan pengelola pabrik untuk memenuhi kapasitas produksi, juga oleh keinginan buruh pabrik sendiri untuk menambah penghasilannya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk lembur, secara

otomatis jumlah uang yang diterimanya akan lebih besar. Namun demikian, juga berakibat semakin hilangnya kesempatan istirahat, rekreasi, dan sebagainya.

b. Masalah sosial

Persoalan yang berkaitan dengan pergaulan dan hubungan yang dialami oleh buruh pabrik, setidaknya bisa digambarkan melalui pola sebagai berikut. *Pertama,* hubungan sosial buruh yang didasarkan pada kesamaan daerah. *Kedua,* hubungan sosial buruh antar etnis yang satu dengan etnis yang berbeda. *Ketiga,* hubungan antara buruh dengan masyarakat luas, yakni masyarakat kota yang berkebudayaan maju dan modern.

Masyarakat kota, sebelum datangnya industri dan berdirinya pabrik-pabrik besar di lingkungan mereka berada, merupakan bentuk masyarakat yang punya hubungan kekerabatan antara satu sama lain. Hal ini ditandai dengan adanya sikap tolong-menolong dan gotong royong yang sudah menjadi ciri khas dalam setiap kegiatan di antara sesama warga. Namun demikian, dengan hadirnya industri tersebut, lambat laun terjadi perubahan besar dalam corak dan kebudayaan masyarakat.

Masyarakat yang mula-mula relatif tertutup menjadi semakin terbuka. Di kalangan mereka juga terjadi pergeseran mata pencaharian. Mereka yang dahulu hidup sebagai petani, sekarang menjadi buruh kasar di pabrik, pedagang kaki lima dan pekerjaan-pekerjaan informal lainnya. Di samping itu, masyarakat yang semula relatif bercorak komunal menjadi semakin individualistik. Ikatan solidaritas kelompok masyarakat agraris seperti gotong royong, bekerja sama tanpa upah atau tukar menukar tenaga, berubah menjadi masyarakat yang bercorak individualistik yang mendasarkan hubungan antar mereka pada kepentingan ekonomi (material). Ikatan solidaritas sosial yang bercorak komunal pada masyarakat pertanian seringkali didasarkan atas kekerabatan atau

kedekatan tempat tinggal, sedangkan solidaritas sosial pada masyarakat yang bercorak individualistik dalam masyarakat industri didasarkan atas kesamaan tempat kerja dan profesi.

Di samping itu, hadirnya teknologi industri memberikan pengaruh yang kuat terhadap perubahan sistem keluarga sebagai unit sosial. Sebagaimana diketahui bahwa keluarga dalam masyarakat agrikultural atau pertanian tidak hanya merupakan unit biologis saja, akan tetapi juga merupakan unit produksi, di mana anak-anak dan istri merupakan modal sosial yang harus ikut berproduksi dan ikut mencari penghasilan. Sekarang ini, akibat pengaruh industri, anak-anak dan istri tidak lagi menjadi modal ekonomis, tetapi justru menjadi beban tanggungan dan beban ekonomis. Rumah dan keluarga tidak lagi menjadi fokus sentral dari masyarakat modern. Anak-anak, istri dan suami jarang saling bertemu dan berkomunikasi, karena masing-masing mempunyai dunia kesibukan dan interesnya sendiri-sendiri, lebih-lebih sebagai buruh pabrik yang harus tunduk pada aturan yang amat ketat.

Oleh karena itu, perkembangan industri dengan semakin tingginya teknologi produksi massal itu, merongrong keutuhan keluarga. Keluarga yang semula merupakan satu unit yang utuh, kompak, dan intim, kemudian menjadi berantakan. Menjadi otomistis sifatnya, di mana masing-masing anggotanya beroperasi dengan cara, irama, serta tempo yang berbeda, sehingga mereka jarang melakukan kontak secara psikis dan fisik. Hilanglah keutuhan keluarga dan hilang pula intimitas familiarnya. Masyarakat dan kebudayaan manusia menjadi tidak berdaya terhadap pengaruh industri dan kekuasaan teknologi baru, sebab tidak lagi mempunyai landasan dasar berupa nilai-nilai dan norma-norma yang kokoh guna membantali goncangan pembaharuan.

Perubahan kecenderungan masyarakat di atas sangat berpengaruh terhadap pola hubungan, corak, dan kebudayaan buruh

pabrik yang setiap hari mengalami kontak sosial dengan mereka. Di samping itu, secara intern di lingkungan pabrik sendiri, perubahan itu juga cukup besar pengaruhnya dalam membentuk sikap dan perilaku buruh tersebut. Pemberlakuan jam-jam kerja yang tidak saja di pagi hari, namun juga di malam hari, telah mengubah cara hidup, kebiasaan, cara pergaulan dan cara pandang buruh terhadap etika dan lingkungannya. Akibatnya, perubahan tersebut segera diikuti pola oleh perubahan fundamental norma sosial masyarakat.

Perubahan-perubahan yang terjadi ini mendorong mereka mencari saluran-saluran untuk memenuhi kebutuhannya sebagai bagian masyarakat. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini tidak jarang bagi mereka untuk lebih suka mengambil bentuk-bentuk norma baru sebagai bagian dari norma sosialnya.

c. Masalah Moral

Persoalan moral ini muncul dan menjadi ada sebagai akibat dari serentetan masalah yang terjadi sebelumnya. Yang menjadi sorotan terhadap masalah moral ini adalah menyangkut etika dan perilaku buruh pabrik sebagai salah satu bagian dari masyarakat industri. Buruh pabrik yang berstatus sebagai urban dan memasuki lingkungan baru di kawasan industri mengalami proses sosialisasi yang tidak gampang untuk segera beradaptasi, karena interaksi sosial yang baru ini sangat berbeda dengan interaksi sebelumnya, yaitu sebelum mereka menjadi buruh dan memasuki kawasan industri di perkotaan yang sarat dengan berbagai macam bentuk kebudayaan. Lebih-lebih mereka berasal dari pedesaan dengan pendidikan yang relatif rendah, ditambah pengetahuan agama minim, serta rata-rata usia mereka yang tergolong belum dewasa dan sebagainya. Maka, mereka akan mudah terpengaruh dengan kehidupan kota yang demikian kompleks. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 400 responden, ternyata hanya 30

responden (7,5%) saja yang lulusan perguruan tinggi. Selebihnya, yang berpendidikan sekolah dasar sebanyak 50 orang (12,5%), sekolah lanjutan pertama berjumlah 70 orang (17,5%), sedangkan yang berasal dari sekolah menengah umum sebanyak 250 orang (62,5%). Karena itu, banyak di antara mereka yang tidak mampu menyikapi hal-hal yang terjadi dan relatif baru bagi kehidupannya. Rincian data tentang variasi tingkat pendidikan buruh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tingkat Pendidikan Buruh Pabrik

No.	Kotamadya/ Kabupaten	Tingkat Pendidikan			
		SD/ MI	SMP/ MTs	SMU/ MA	PT
1.	Surabaya	3	11	9	1
2.	Sidoarjo	2	11	31	4
3.	Mojokerto	4	1	2	-
4.	Gresik	15	18	2	-
	Jumlah	23	41	44	5

Di samping itu, pemberlakuan jam kerja yang ketat dan tidak permanen, rutinitas kerja yang menjemukan serta kegagalan beradaptasi di lingkungannya, mengakibatkan gejala kekeringan dan keterasingan secara batiniah di kalangan buruh pabrik. Bagi mereka yang tidak mampu mengendalikan keterasingan ini, maka berbagai bentuk penyimpangan moral dan rasa frustasi akan menjadi konsekuensi logisnya. Dalam kondisi yang lebih akut, para buruh sudah tidak lagi mempedulikan rambu-rambu agama dan norma-norma sosial. Bentuk penyimpangan moral ini bisa berupa minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, sabu-sabu, ekstasi, bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan.

Akibat lebih jauh dari pergaulan bebas tersebut, sebagian besar karyawan perempuan dijumpai lebih senang mengeksploitasi

dirinya sebagai objek pelecehan seksual. Mereka lebih senang menonjolkan bagian tubuhnya untuk menjerat dan menarik perhatian lawan jenisnya yang tidak lain adalah kawan sekerjanya sendiri. Bentuk perilaku ini adalah sisi lain dari subjektivitas perempuan dan laki-laki dalam memperlakukan dirinya akibat kegagalan dalam menyesuaikan diri di lingkungannya.

Permasalahan di atas lebih jelas dapat diketahui melalui opini responden dalam hal kebebasan seks di masyarakat. Sepertiga lebih atau sebanyak 150 orang (37,5%) responden menyatakan bahwa kebebasan seks itu bertentangan dengan ajaran agama dan kehidupan moral masyarakat, namun secara pribadi mereka sulit menghindarkan diri dari perilaku seks bebas tersebut. Selanjutnya, hampir sepertiga yang lain sejumlah 124 orang (31%) menyatakan tidak tahu. Hanya sebanyak 66 orang atau 16,5% saja yang menyatakan secara tegas bahwa kebebasan seks adalah bertentangan dengan agama dan merupakan dosa besar yang harus dihindari. Adapun 15% lainnya, yakni 60 orang, menyatakan bahwa kebebasan seks adalah suatu yang wajar di lingkungan masyarakat modern. Artinya, secara langsung responden menyetujui kebebasan seks tersebut.

Persoalan moral yang ditandai dengan kebebasan seks dan prilaku sosial yang menyimpang tersebut merupakan cermin betapa beratnya hidup bermasyarakat di lingkungan industri dan berbuat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini terjadi karena dipicu oleh ketidakberdayaan secara ekonomi, kegagalan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana mereka berada, tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang rendah.

d. Masalah Psikis

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa sebagian besar buruh pabrik yang berasal dari desa berasumsi bahwa keberangkatan mereka ke kota dan bisa bekerja di pabrik adalah

sebuah kesempatan emas untuk mengadu nasib yang tidak bisa dimiliki oleh setiap orang desa. Terlebih di saat krisis ekonomi seperti sekarang ini, mencari pekerjaan pengganti/alternatif begitu sulit. Di samping itu, mereka akan malu jika belakangan ternyata mereka mengalami kegagalan di tempat kerja dan harus kembali ke desa dengan tangan hampa. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mencegah keputusan PHK pabrik atas dirinya. Oleh karena itu, bekerja di pabrik dengan upah yang rendah adalah lebih baik daripada menganggur di rumah atau menjadi pembantu rumah tangga yang dipandang tidak bergengsi di kalangan generasi muda. Sementara itu, tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan penghasilan sangat mendesak, karena mereka sudah hidup di kawasan perkotaan atau industri.

Dengan demikian, sikap ketergantungan buruh dengan pabrik adalah adanya unsur keterpaksaan dalam bekerja. Bahkan ada kesan seolah-olah mereka memaksakan diri untuk bekerja dengan risiko apapun, yang penting dapat bekerja dan dapat bertahan hidup di kota. Sementara itu, keterpaksaan mengabdi pada dunia kerja dapat menimbulkan sikap apatis terhadap nilai-nilai kehidupan yang lain, terutama moralitas keagamaan, dengan berbagai konsekuensinya.

Bertolak dari beberapa persoalan di atas, selanjutnya dapat dipahami bahwa faktor emosi atau perasaan sangat besar peranannya dalam menentukan sikap para buruh pabrik sendiri. Data di lapangan membuktikan, pada umumnya mereka itu tidak banyak mengeluh tentang kondisi kerja, betapapun buruknya. Jika para buruh itu banyak mengeluh, pada umumnya bukan disebabkan oleh kondisi fisik yang benar-benar buruk dalam perusahaan, akan tetapi disebabkan oleh perasaan mereka tentang suasana yang ada di lingkungan pabrik tersebut. Bahkan mereka mempunyai semboyan:"yang penting bukan apa yang diperbuat oleh pimpinan atau manajer, akan tetapi cara melakukannya". Dalam

hal ini, bisa kita maklumi bahwa pemberian motivasi, penghargaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan faktor psikologis menjadi penting di samping faktor kebutuhan materi para buruh tersebut. Karena yang demikian itu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku serta cara pandang para buruh itu terhadap lingkungan di mana mereka bekerja.

Di samping persoalan di atas, masalah lain yang selalu menghantui buruh pabrik adalah rasa takut, cemas, dan gelisah. Mereka takut jika honor yang mereka terima setiap minggu atau bulan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka juga cemas jika tidak bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung, sementara keluarga yang ditinggalkan selalu menanti bantuannya, lebih-lebih jika ia sebagai penopang ekonomi keluarga. Mereka juga gelisah jika apa yang telah diinginkannya—baik menyangkut masalah materi ataupun nonmateri, misalnya rasa cinta, rasa perlindungan, dan sebagainya—tidak pernah terwujud atau terus menerus menjadi buruh pabrik, di samping mereka menganggap tidak jelas status masa depannya.

Ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan tersebut, jika dibiarkan begitu saja lambat laun akan menimbulkan gejala psikis yang tidak diinginkan, misalnya gangguan emosional, neurosa, stres, depresi, psikosomatis dan lain-lain. Bahkan hal itu bisa mengakibatkan berbagai macam gejala negatif lainnya seperti dendam, iri, cemburu, pedih hati, apatis, putus asa, dan lain-lain. Semua ini tidak saja membuat para buruh pabrik menjadi tidak bahagia dan *nervous*, akan tetapi juga sering menimbulkan perilaku menyimpang yang tidak hanya merugikan diri pekerja buruh pabrik sendiri, melainkan juga semua pihak yang terkait dalam lingkungan industri.

Begitu juga adanya *penyakit absensiisme* misalnya, (absen tidak masuk kerja bukan disebabkan oleh sakit fisik) yang

menimbulkan kerugian material besar pada pihak perusahaan atau pabrik, sebagian besar disebabkan oleh gangguan-gangguan emosional dan rasa tidak bahagia di pabrik atau perusahaan tersebut. Oleh karena itulah, akibat tidak terselesaikannya krisis batin mereka ini, sering menjadi pemicu bagi munculnya gejala patologis lainnya (penyakit sosial), moral maupun kerawanan-kerawanan lainnya.

Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian dari buruh pabrik, jika mempunyai persoalan yang sulit dipecahkan, seringkali mencari jalan pintas, misalnya mencopet, merampok, serta melakukan tindakan-tindakan menyimpang lainnya, dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, meskipun jumlahnya relatif sedikit.

Hal ini bisa dilihat dari hasil angket yang terjaring tentang sikap responden dalam menyelesaikan masalah-masalah (ekonomi, sosial, moral psikis, dan relegius) yang dihadapinya. Dari 400 responden, 178 orang atau 44,5% menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah selalu bermusyawarah atau berkonsultasi dengan teman sejawat. Sebanyak 204 orang atau 51 % minta bantuan orang yang usianya lebih tua/lebih dewasa dan berpengalaman, sedangkan 18 orang sisanya atau 4,5% menjawab cuek saja dan mencari jalan pintas. Walaupun jumlahnya sangat kecil, kiranya patut diwaspadai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Masalah Religius

Terjadinya migrasi dari desa ke kota, ternyata membawa perubahan yang sangat berarti bagi buruh pabrik. Kehadirannya ke lokasi industri menimbulkan pergeseran mata pencaharian yang semula sebagai petani, sekarang menjadi buruh di pabrik. Proses sosialisasi di antara mereka menyebabkan pertemuan antaretnik, budaya, dan agama. Akibatnya, mereka yang sebelumnya masih

relatif homogen dalam etnik dan agama, kini menjadi heterogen atau plural dalam suku, budaya, dan agama. Begitu juga sistem sosial yang dulunya relatif tertutup menjadi semakin terbuka.

Bertolak dari kenyataan sebagaimana digambarkan di atas, dalam kehidupan beragama, buruh juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain dikarenakan jam kerja di pabrik, terutama pabrik-pabrik besar yang berlangsung selama 24 jam terus-menerus dengan sistem *shifting* (bergiliran). Kerja *shift* di pabrik-pabrik besar pada umumnya dibagi 3, dengan ketentuan masing-masing selama 8 jam. Bagi orang Islam, hal ini mempengaruhi pelaksanaan ibadah shalat, dari berjamaah di masjid-masjid atau mushalla di lingkungan tempat tinggalnya menjadi berpindah ke pabrik. Masalah ini akan mengurangi frekuensi kontak sosial dengan warga selingkungannya. Di lingkungan pabrik, kehidupan beragama khususnya pelaksanaan ibadah keagamaan sangat bergantung kepada pemilik atau pimpinan pabrik. Ada sebagian pabrik yang memperhatikan pelaksanaan ibadah karyawan, dan ada pula pabrik-pabrik yang tidak memperhatikan pelaksanaan ibadah karyawannya.

Bagi pemilik atau pimpinan pabrik yang memperhatikan ibadah karyawan pada jam kerja pabrik, mereka mengusahakan tempat ibadah dan waktu ibadah, seperti masjid atau mushalla. Bahkan ada pula pabrik-pabrik yang mengusahakan penceramah agama untuk para karyawan yang didatangkan dari luar dengan fasilitas pabrik. Pada pabrik yang menyediakan fasilitas pembinaan keagamaan, kehidupan agama karyawan dapat terpelihara dan bahkan dapat ditingkatkan. Namun, pada pabrik yang tidak menyediakan fasilitas dan waktu ibadah, seringkali kenyataan itu menjadi kendala bagi karyawan untuk melaksanakan ibadah agamanya. Dalam keadaan seperti itu kehidupan agama karyawan semakin merosot.

Sebagai akibat dari kurang diperhatikannya masalah-masalah keagamaan terutama yang menyangkut pribadi dan kebutuhan rohani para karyawan buruh pabrik ini, sering menimbulkan kegoncangan batin, iklim sosial yang kurang aman, dan ada kecenderungan untuk bertindak menyimpang dari aturan yang dibuat oleh pabrik. Ketaatan mereka terhadap aturan-aturan itu hanyalah bersifat semu dalam arti tidak tulus dan bahkan jauh dari nilai ikhlas. Apa yang dilakukannya selalu dihitung dan dipertimbangkan untung-ruginya secara matematis. Oleh karena itu, jika dalam situasi dan kondisi tertentu mereka merasa telah berbuat maksimal, kemudian tidak mendapatkan imbalan yang setimpal, maka mudah sekali mereka menuntut baik secara individu maupun secara massal dan kolektif yang kemudian lebih dikenal dengan demonstrasi para buruh terhadap pimpinan perusahaan di mana mereka bekerja.

Memang disadari bahwa persoalan religius di atas adalah persoalan yang tergolong abstrak dalam arti pengaruhnya tidak bisa dilihat langsung dan sangat subjektif. Meskipun demikian, bisa dibuktikan bahwa bagi pabrik yang mampu menciptakan suasana religius bagi para karyawannya, mereka rajin menjalankan ibadah shalat tepat waktu sesuai dengan aturan pabrik, ternyata mampu memberikan kontribusi meningkatkan produktivitas kerja, ketenangan batin, dan sekuritas emosional pada para buruh yang akan bekerja dalam iklim sosial yang aman, dan juga bisa memupuk moralitas, serta memberikan kepercayaan diri. Jadi, pada peristiwa semacam ini shalat yang dilakukan tepat waktu di lingkungan pabrik yang demikian padatnya, berfungsi secara positif bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa kepercayaan atau keyakinan beragama dari buruh tersebut bisa menambah solidaritas sosial dan menumbuhkan efektifitas kerja.

Dari data di lapangan diketahui bahwa antara pabrik yang memberikan perhatian terhadap masalah keagamaan para buruh

dengan yang tidak, terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan itu ditandai dengan sering munculnya gejolak demonstrasi dan tuntutan kepada pihak pabrik yang kurang memperhatikan kebutuhan rohani (keagamaan) atas perlakuan yang dirasa tidak seimbang dengan aktivitas kerja yang mereka lakukan. Di samping itu, seringnya mogok kerja dan produktivitas kerja menurun juga disebabkan adanya kegersangan secara rohani dan tidak adanya pembinaan mental secara kontinyu. Padahal mereka menyadari sepenuhnya bahwa banyak persoalan-persoalan hidup, ternyata tidak selalu bisa dipecahkan dengan akal semata. Sedang bagi pabrik yang memberikan perhatian penuh terhadap berbagai aktivitas keagamaan para buruh, relatif stabil, dan berjalan lancar. Kalaulah timbul masalah, tentu tidak separah pabrik yang kurang memperhatikan aktivitas keagamaan karyawannya.

B. Embrio Pesantren Buruh Pabrik: Signifikansi dan Relevansi

1. Dasar, Tujuan, dan Kurikulum Pendidikan

Pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik telah dilakukan oleh berbagai kalangan, misalnya pondok pesantren, perusahaan, dan majelis-majelis taklim yang dikelola masyarakat di sekitar pabrik. Pondok pesantren yang memiliki perhatian terhadap pembinaan keagamaan buruh pabrik, misalnya *Al-Asy'ari* dan *Al-Istiqomah* (Surabaya), *Masjid Baitullah* (Sidoarjo), dan *Al-Karimy* (Mojokerto). Sedangkan pengelolaan kegiatan keagamaan yang dilakukan di perusahaan dengan fasilitas dari pimpinan, seperti tampak pada perusahaan Ajinomoto di Mojokerto. Kegiatan keagamaan di perusahaan Ajinomoto dikelola oleh Ikatan Warga Muslim, yang anggotanya terdiri atas karyawan perusahaan yang beragama Islam. Sementara itu, majelis-majelis taklim yang memiliki perhatian terhadap pembinaan keagamaan buruh pabrik dilakukan, misalnya oleh Lembaga Kajian Keislaman

(LKK) *Jama'ah Tauhid* dan Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid* (PPNA). Kedua majelis taklim tersebut berada di daerah Menganti, Gresik. Adanya ragam pengelolaan kegiatan keagamaan itu tentu saja melahirkan filosofi yang berbeda dalam hal latar belakang diadakannya aktivitas pendidikan keagamaan, tujuan, dan kurikulum yang diterapkan.

Pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik yang dilakukan pondok pesantren umumnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor misalnya: agama, sosiologis, dan ekonomi. Faktor agama yang dimaksud di sini adalah keinginan para pengasuh pondok pesantren untuk menanamkan nilai-nilai moral-agama terhadap buruh pabrik. Para kiai merasa prihatin dengan religiusitas buruh pabrik, baik dalam hal pengetahuan maupun pengamalannya. Dalam konteks inilah para kiai berkepentingan menyebarkan dakwah Islam kepada buruh pabrik. Berkaitan dengan faktor agama ini dapat dicontohkan kehadiran Pondok Pesantren *Al-Istiqomah,* yang berada di Kendangsari, sebuah daerah yang dekat dengan areal perindustrian di Rungkut, Surabaya. Pondok Pesantren *Al-Istiqomah* sebelumnya merupakan kamar kos-kosan yang disewakan kepada buruh pabrik. Pemilik kos-kosan tersebut setiap bulannya dapat memperoleh pendapatan sekitar 1,5 juta rupiah. Perihal berubahnya status kos-kosan menjadi pondok pesantren, bermula dari keinginan keluarga, yang kebetulan anaknya baru datang dari pesantren *Bahrul Ulum* (Tambak Beras, Jombang), untuk menyebarkan ilmu agama Islam. Tentu saja, keinginan mengubah status kamar-kamar kos-kosan menjadi pondok pesantren tidak menguntungkan secara ekonomis. Bahkan sebagian tetangga menganggap hal itu sebagai tindakan yang keliru, karena dengan perubahan status tersebut keuntungan yang diperoleh rutin setiap bulan menjadi hilang. Tetapi karena didorong keinginan menyebarkan Islam kepada buruh pabrik, maka pertimbangan ekonomi itu diabaikan.

Sementara faktor sosiologis yang juga mendasari diadakannya pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik, terkait dengan meluasnya kebiasaan negatif yang dilakukan buruh pabrik seperti minum-minuman keras dan narkoba. Kebiasaan negatif buruh pabrik itu tentu saja tidak lepas dari latar belakang pendidikan yang minim dan tidak adanya upaya pembinaan moral-agama. Di samping kedua faktor tersebut, ternyata ada alasan-alasan ekonomis yang mendasari pembinaan keagamaan bagi buruh pabrik. Kenyataan seperti itu ditemukan melalui wawancara dengan pengasuh pondok pesantren *al-Asy'ari*. Menurutnya, pengelolaan yang benar terhadap buruh yang mau menjadi santri, di samping bernilai ibadah juga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi. Pertimbangan ekonomi itu tampaknya tidak dapat dilepaskan dari pola kehidupan masyarakat di Surabaya, khususnya yang berada di sekitar pabrik, banyak di antaranya mengandalkan tambahan penghasilan dari hasil menyewakan rumah-rumah kontrakan/kos-kosan. Berkaitan dengan kenyataan tersebut, pengasuh pondok pesantren *al-Asy'ari* mengatakan:

> Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa hidup di kota besar seperti Surabaya, yang kata orang merupakan kota metropolitan kedua setelah Jakarta, memanglah sangat mahal sekali. Apalagi dengan kehadiran industri di daerah ini, membuat masyarakat sekitar berpikir bagaimana caranya mendapatkan keuntungan. Maka sebagian memanfaatkan peluang ini dengan membangun penginapan seperti kos-kosan di atas sebagian tanah yang dimilikinya. Dengan demikian masyarakat akan memperoleh keuntungan ganda, yakni dapat bekerja di pabrik dan keuntungan dari hasil sewa rumah. Dan, berkaitan dengan adanya peluang tersebut, maka pondok pesantren ini diwujudkan untuk dijadikan alternatif buruh pabrik yang mau tinggal di sini.

Tampaknya, keberadaan pondok pesantren dapat dijadikan alternatif bagi buruh pabrik untuk mukim di pondok yang pengeluarannya dapat dipastikan jauh lebih murah dibanding jika tinggal di rumah kontrakan (kos-kosan). Bagi pengelola pondok pesantren, kesediaan buruh pabrik mukim di pondok sekaligus

menjadi santri akan memungkinkan untuk membuka usaha-usaha komersial, seperti warung dan toko. Jika misalnya, warung dan toko itu dapat dikelola pondok pesantren, maka setidaknya keuntungan yang diperoleh dari usaha itu dapat digunakan menambah biaya operasional pondok.

Seperti halnya pondok pesantren, beberapa alasan yang mendasari diadakannya majelis-majelis taklim yang sebagian besar anggotanya adalah buruh pabrik, di antaranya bermula dari keprihatinan masyarakat terhadap kebiasaan buruh pabrik dan pemuda di kampung banyak yang terlibat minum-minuman keras, narkoba, dan persaingan antar kelompok (geng) yang acap kali melakukan tawuran. Kenyataan tersebut tentu saja dapat meresahkan masyarakat yang menginginkan kehidupan tenang dan damai. Keberadaan Lembaga Kajian Keislaman (LKK) *Jama'ah Tauhid* dan Persatuan Pemuda Netral *al-Rasyid* (Gresik), tidak dapat dilepaskan dari situasi tersebut. Kedua majelis taklim itu bertekad mengembalikan kehidupan pemuda dan buruh pabrik pada pola hidup yang agamis, seperti motto masyarakat Gresik, yang berbunyi; "Gresik berhias iman".

Sementara itu, pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik juga dilakukan di perusahaan dengan bantuan fasilitas dari pimpinan perusahaan, seperti yang dilakukan perusahaan Ajinomoto di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan keagamaan di perusahaan ini dikelola oleh Ikatan Warga Muslim, yang jumlah anggotanya berjumlah sekitar 900 orang. Meski tidak semua anggota Ikatan Warga Muslim dapat mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan, tetapi mereka umumnya memiliki komitmen untuk mensukseskan kegiatan tersebut dengan jalan membayar iuran bulanan yang besarnya tidak ditentukan (sukarela). Kegiatan keagamaan di perusahaan Ajinomoto bermula dari keinginan karyawan muslim untuk memperoleh tambahan pengetahuan agama, sehingga ada keseimbangan antara kesibukan

kerja dan ketenangan batin dengan melakukan kegiatan keagamaan secara benar. Keinginan tersebut segera terwujud setelah dibentuknya Ikatan Warga Muslim sejak tahun 1991, yang antara lain bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan. Dengan demikian, sejak saat itulah kegiatan keagamaan di perusahaan mulai ada, dan tahap demi tahap aktivitas tersebut berkembang hingga sekarang.

Mengenai kurikulum pendidikan yang diterapkan, baik di pondok pesantren, perusahaan, dan majelis-majelis taklim, sangat beragam. Bagi santri buruh pabrik di pondok pesantren, diajarkan materi pelajaran yang diambilkan dari kitab-kitab yang bersifat elementer, seperti; *Jalalayn* (tafsir), *Ta'lim al-Muta'alim, Dzurratun al-Nasihin, Irsyadul 'Ibad* (akhlak), *Fath al-Qarib* dan *Safinah al-Najah* (fiqh), *Bulugh al-Maram* (hadits), *Jurumiyah* (nahwu), dan lain-lain. Khusus bagi santri pemula diberi kesempatan belajar membaca al-Qur'an dengan metode iqra'. Di samping materi pelajaran agama, santri juga diberi kesempatan belajar ekstra-kurikuler seperti seni baca al-Qur'an (*qira'ah*), *khatmul Qur'an, istighasah, diba', khithobah,* dan *hadrah.* Fenomena cukup menarik ditemukan ketika pengasuh pondok pesantren juga mengajarkan pelajaran keahlian itu diberikan sesuai dengan keinginan santri, seperti menjahit, mengetik, dan komputer, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren *Al-Istiqomah.* Menurut pengasuh pondok, pelajaran keahlian itu diberikan sesuai dengan permintaan santri, dan untuk kepentingan ini santri bersedia menanggung biaya operasionalnya.

Secara lebih detail, kurikulum yang diterapkan pada masing-masing pondok pesantren dapat dilihat dari jadwal pelajaran dan jenis kitab yang diajarkan. Dari pelajaran yang diberikan di masing-masing pondok pesantren, kiranya dapat dikatakan bahwa pelajaran yang diajarkan memang diarahkan untuk pembinaan akhlak (moral). Asumsi tersebut setidaknya mendapat pem-

benaran dari kitab-kitab yang diajarkan seperti tampak pada tabel berikut:

Jenis Kitab yang Diajarkan Pondok Pesantren Al-Asy'ari

No.	Nama Kitab	Jenis Kitab
1.	Ta'lim Muta'alim	Akhlak
2.	Dzurrotun Nasihin	Akhlak
3.	Irsyadul 'Ibad	Akhlak
4.	Qurrotul 'Uyun	Akhlak
5.	Maslahul 'Abid	Akhlak
6.	Matan Zubad	Akhlak
7.	Akhlaqul Banin	Akhlak
8.	Fathul Qarib	Fiqh
9.	Safinatun Najah	Fiqh
10.	Sulam Taufiq	Fiqh
11.	Mukhtarul Ahadith	Hadith
12.	Jurumiyah	Nahwu/Sharaf

Dari beberapa jenis kitab yang diajarkan di pondok pesantren al-Asy'ari, tampak bahwa jenis kitab akhlak begitu mendominasi. Kenyataan tersebut tentu bukan sesuatu yang tanpa disengaja, tetapi memang kurikulum yang ditawarkan benar-benar ditujukan untuk membentuk mental dan akhlak buruh pabrik sehingga dapat menjadi orang yang berkepribadian baik. Dengan keahlian yang dimiliki ustadz-ustadz yang mengajarkan kitab-kitab tersebut, dan didukung sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem pembelajaran yang bersifat klasikal, maka tujuan yang diinginkan pengelola pondok pesantren dapat tercapai.

Sementara itu, kegiatan keagamaan di perusahaan, seperti di Ajinomoto, tidak menggunakan kurikulum pendidikan tertentu, melainkan diatur berdasarkan tema-tema yang dianggap relevan dan aktual. Misalnya, pada jenis kegiatan mengaji al-Qur'an, yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, materi yang diajarkan

meliputi; *tajwid, makhraj, tarjamah,* dan seni baca al-Qur'an. Sedangkan untuk kegiatan pengajian bulanan, pengelola hanya menentukan tema-tema secara garis besar, seperti tauhid, akhlak, dan ibadah. Mengenai rincian dari tema-tema tersebut, pengelola menyerahkan sepenuhnya kepada ustadz yang dihadirkan.

Berbeda dengan kegiatan yang dikelola di perusahaan, kegiat-an-kegiatan keagamaan yang dikelola majelis-majelis taklim, seperti Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid* dan Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid,* menggunakan kurikulum yang agak sama dengan pondok pesantren. Pada Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid,* yang berada di Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, mengarahkan kurikulum pendidikannya untuk mengkaji masalah ketauhidan (*ushul al-din*). Kelompok majelis taklim ini berorientasi sebagai gerakan tarekat yang memiliki tujuan penyucian batin bagi jama'ahnya. Karenanya, tidak mengherankan jika kitab-kitab yang diajarkan diambilkan dari berbagai sumber sebagaimana banyak dipakai kelompok-kelompok tarekat. Kitab-kitab yang diajarkan pada majelis taklim ini, di antaranya seperti; *Ushul Ma'rifah* (karya KH. Faqih Kholil, mursyid sebuah tarekat di Pasuruan), *Hidayah Ummah* (karya KH. Hasan Husain, alim terkemuka dari Pasuruan yang lama mukim di Makah), *al-Hikam* (karya Ibn Atha'illah), *Minhaj al-Saniyyah* (karya Syaikh Abu Ishaq Ibrahim), *Qathr al-Ghaith* (karya Sayyid Utsman bin Abdullah), dan *Ihya 'Ulumuddin* (karya Imam Al-Ghazali).

Salah satu kegiatan Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid,* dikenal dengan nama *Jam'iyah 'Ataqah,* biasa-nya dilaksanakan sebulan sekali, yakni setiap Minggu Legi. Secara literal, arti 'ataqah adalah pembebasan, kemerdekaan. Kegiatan *'Ataqah* dilakukan secara massal, diikuti seluruh anggota jama'ah dengan membaca lafal *la ilaha illa Allah* sebanyak 70.000 kali. Ajaran ini berdasarkan tradisi tarekat yang dilakukan oleh mursyid

dari Pasuruan, yakni KH. Faqih Kholil dan KH. Hasan Husain. Susunan acara *'Ataqah* adalah; pembukaan, pembacaan ayat-ayat al-Qur'an (dilakukan salah seorang anggota), sambutan dari peserta, kajian keislaman oleh pemimpin jama'ah (Ustadz Tamanni Nasrullah), acara inti 'Ataqah, dan do'a penutup. Dari rangkaian acara tersebut, jama'ah diharapkan dapat melakukan *fana'* (mengosongkan) dirinya dari akhlak tercela sehingga kesucian diri dapat terwujud.

Kelompok majelis taklim Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid,* yang berada di daerah yang sama dengan Kelompok Kajian Keagamaan *Jama'ah Tauhid,* mengembangkan kurikulum pendidikan yang lebih berbobot. Materi yang diajarkan berkisar pada pelajaran al-Qur'an, praktik ibadah, fiqh, akhlak, bahasa Arab, dan amalan tarekat. Materi tersebut diajarkan kepada santri yang dikelompokkan menjadi; santri laki-laki dan santri perempuan. Anggota jama'ah diajarkan ilmu syari'at dan tasawuf sekaligus. Di bidang syari'at, diajarkan kitab *Nashaih al-'Ibad,* sedangkan amalan tarekat yang diajarkan adalah *Shalawat Fatih,* karangan al-Tijani, tokoh terkenal tarekat al-Tijani.

2. Unsur Pendukung Kegiatan Keagamaan

Unsur-unsur pendukung kegiatan keagamaan amat beragam, mulai dari; ustadz, kitab agama, ruang belajar, masjid/mushalla, kantor, aula, papan tulis/*white board,* kamar santri (pondokan), dan lain-lain. Kelengkapan sarana pendukung kegiatan keagamaan salah satunya ditentukan oleh besar kecilnya jumlah santri. Bagi pesantren yang memiliki jumlah santri relatif besar, hampir dapat dipastikan sarana pendukungnya baik. Salah satu contohnya adalah Pesantren *Al-Asy'ari,* yang memiliki 10 *asatidz* (guru), masjid, ruangan belajar, pondokan (dibagi menjadi dua blok perempuan dan laki-laki), papan tulis, balai pertemuan, kantin, dan sarana MCK. Sebagian dana untuk pembangunan sarana yang ada

diambilkan dari hasil iuran santri. Demikian halnya dengan Pondok Pesantren *Al-Istiqomah* yang juga memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan keagamaan. Aktivitas keagamaan dilakukan dengan menggunakan ruangan belajar (3 ruang), masjid, aula, papan tulis, dan kitab yang telah disediakan.

Sarana pendukung kegiatan keagamaan dalam keadaan yang lebih lengkap dapat ditemukan di pesantren *Masjid Baitullah,* yang berlokasi di Bungurasih Timur, dekat pintu keluar bus antar kota terminal Bungurasih. Pondok pesantren tersebut telah memiliki kelas *diniyah* yang dilaksanakan pada sore dan malam hari. Seluruh kegiatan keagamaan dilakukan dengan sistem klasikal, memanfaatkan sarana yang telah ada, misalnya lokal (16 lokal) dan masjid, dengan perincian; 7 lokal untuk kegiatan diniyah, 2 lokal untuk perkantoran, 4 lokal untuk ruang perpustakaan dan komputer, dan 3 lokal untuk disewakan. Tujuh lokal yang digunakan untuk kegiatan diniyah dibagi menjadi dua kelas; 3 kelas *i'dad* (persiapan) dan 4 kelas diniyah sesuai tingkatan. Unsur penunjang yang lain adalah ustadz yang berjumlah 9 orang (6 laki-laki dan 3 perempuan), yang semuanya disediakan tempat tinggal di lokasi pesantren. Semua kebutuhan tenaga pengajar, mulai dari makan, pondokan, honor, dan keperluan sehari-hari, disediakan pengasuh pondok, yakni Bapak H. Muhadi dan keluarga besar Ibu Hj. Mansur. Dengan sarana yang demikian memadai, maka pendidikan agama di pesantren tersebut berlangsung dengan baik.

Sementara itu, sarana penunjang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di perusahaan, seperti yang dilakukan perkumpulan Ikatan Warga Muslim di pabrik Ajinomoto, umumnya memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pimpinan perusahaan. Berbagai jenis kegiatan keagamaan di perusahaan tersebut dipusatkan di masjid *Baitur Rahim*, yang dibangun perusahaan sejak tahun 1991. Sarana pendukung lainnya adalah *white-board*, bangku, buku *Iqra'* (6 jilid), al-Qur'an, dan aula yang secara khusus disediakan

perusahaan untuk kegiatan pengajian bulanan. Di samping itu, perusahaan juga memberikan bantuan pendanaan yang besarnya ditentukan berdasarkan permintaan yang diajukan ketua Ikatan Warga Muslim. Berdasarkan kebiasaan, perusahaan setiap bulan memberikan bantuan untuk kegiatan keagamaan sebesar Rp1,5 juta. Bantuan pendanaan yang diberikan secara rutin itu belum termasuk gaji bagi empat orang ustadz yang juga ditanggung perusahaan, yang besarnya masing-masing Rp150.000,00 per bulan. Selain mendapat bantuan dana, anggota Ikatan Warga Muslim juga membayar iuran bulanan yang besarnya tidak ditentukan (sukarela). Dari iuran bulanan anggota diperoleh sedikitnya Rp400.000 setiap bulan. Dengan sarana pendukung yang ada serta bantuan pendanaan yang diberikan perusahaan dan iuran anggota, maka kegiatan keagamaan yang dikelola Ikatan Warga Muslim perusahaan Ajinomoto dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Aktivitas Pendidikan Sehari-hari

Kegiatan pendidikan agama buruh pabrik yang dikelola pesantren, perusahaan, dan majelis-majelis taklim didesain berdasarkan waktu-waktu luang yang dimiliki buruh pabrik. Bagi buruh pabrik yang memiliki *shift* malam, diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan agama pada siang/sore hari, demikian halnya yang mendapat giliran *shift* siang, wajib mengikuti kegiatan pada malam hari. Perbedaan *shift* kerja memang menjadi problem bagi pengelola kegiatan agama baik yang dilakukan pesantren, perusahaan, maupun majelis-majelis taklim. Salah satu contohnya adalah kegiatan agama yang dikelola Ikatan Warga Muslim di perusahaan Ajinomoto. Di sini, kegiatan kegamaan rutin seperti belajar al-Qur'an, dilaksanakan pada pukul 11.00-12.00 setiap hari Senin dan Kamis. Kegiatan tersebut jelas tidak dapat diikuti buruh pabrik yang memiliki shift malam, karena pada siang hari mereka umumnya istirahat di rumahnya masing-masing yang terkadang

jauh dari lokasi pabrik. Kenyataan tersebut tampaknya menjadi kendala tersendiri bagi pengelola, sehingga kegiatan pendidikan agama di perusahaan belum dapat dimanfaatkan anggota Ikatan Warga Muslim secara maksimal. Untuk diketahui, dari 900 anggota Ikatan Warga Muslim, hanya sekitar 100-200 orang saja yang dapat mengikuti kegiatan pendidikan agama, dan selebihnya tidak dapat aktif karena persoalan *shift* kerja, jarak kos-kosan yang jauh, dan kesadaran yang masih kurang.

Di samping kegiatan belajar al-Qur'an, kegiatan pendidikan agama yang juga dikelola Ikatan Warga Muslim adalah pengajian rutin bulanan, khatmul Qur'an, istighasah, dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Kegiatan keagamaan di perusahaan Ajinomoto akan mengalami peningkatan frekuensinya selama bulan Ramadhan. Selain kegiatan-kegiatan rutin, seperti yang telah disebutkan, Ikatan Warga Muslim juga mengadakan kegiatan yang dinamakan dengan "Dhuhur Bersama" yang diisi dengan pengajian agama. Pada kesempatan tersebut, ustadz akan memberikan penjelasan seputar masalah akidah, akhlak, dan ibadah, yang selanjutnya disertai dialog terhadap permasalahan yang dianggap masih membutuhkan penjelasan lanjutan.

Sementara itu, kegiatan pendidikan agama bagi buruh pabrik yang dikelola pesantren, umumnya diadakan pada malam hari. Waktu malam hari dipilih untuk kegiatan pendidikan agama, karena mayoritas santri buruh pabrik bekerja pada siang hari. Materi pelajaran yang dikaji sangat bervariatif, meliputi akhlak, fiqh, al-Qur'an, Hadits, bahasa Arab, tauhid, dan bidang keterampilan, seperti menjahit, komputer, dan mengetik. Di samping itu terdapat pelajaran ekstra kurikuler seperti; diba', seni baca al-Qur'an, istighatsah, hadrah, dan khitobah (latihan khutbah). Materi-materi pelajaran tersebut biasanya disusun berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, dan santri buruh pabrik tinggal mengikuti kegiatan yang diadakan.

Aktivitas pendidikan agama yang berlangsung di pesantren, biasanya dimulai ba'da jama'ah shalat Isya'. Beberapa pesantren, seperti Al-Asy'ari, Al-Istiqomah, masjid Baitullah, dan Al-Karimy, menetapkan waktu belajar bagi buruh pabrik yang memiliki *shift* siang, pada setiap malam hari, sekitar pukul 19.30-22.00 WIB. Setelah itu mereka dianjurkan belajar mandiri atau kelompok sebelum akhirnya istirahat hingga datang waktu Shubuh. Waktu ba'da Shubuh, santri juga diwajibkan belajar mengaji al-Qur'an hingga pukul 05.30 WIB. Selanjutya mereka mulai bersiap-siap berangkat bekerja ke pabrik. Sementara itu bagi santri yang memiliki *shift* malam, mendapat kesempatan belajar agama pada waktu sore hari, ba'da shalat ashar. Jumlah santri buruh pabrik yang mendapatkan *shift* malam memang relatif kecil, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di pesantren yang umumnya pada malam hari. Di samping itu, mereka merasa tidak nyaman jika istirahat di pesantren pada siang hari setelah pada malam harinya bekerja.

Corak pendidikan agama bagi buruh pabrik, tampak agak berbeda sebagaimana yang dilakukan oleh majelis taklim Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid* dan Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid.* Kedua majelis taklim tersebut mengarahkan program kegiatan pendidikan agama seperti halnya kelompok-kelompok tarekat. Corak tarekat tampak pada materi pelajaran dan sistem pembelajaran yang diterapkan kedua majelis taklim tersebut. Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) *Jama'ah Tauhid* mempraktikkan sistem *bai'ah* (pengambilan sumpah setia) pada setiap anggota jama'ah yang dilakukan oleh KH. Syamsul Ma'arif, seorang *mursyid* dari desa Ngebet, Cerme, Gresik. Sementara majelis taklim Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid* secara khusus mempraktikkan tarekat Tijani dengan membaca shalawat fatih.

Sebagai gambaran, aktivitas keagamaan yang dilakukan Persatuan Pemuda Netral *Al-Rasyid,* tampak pada jadwal berikut:

Jadwal Kegiatan Pendidikan Agama di Lingkungan

No.	Hari	Materi Pengajian	
		Santri Laki-laki	Santri Perempuan
1.	Jum'at malam	Al-Qur'an dan praktek salat	-
2.	Sabtu malam	-	Tajwid, Al-Qur'an dan Tauhid
3.	Minggu malam	-	Sharaf, I'lal, dan Fiqh
4.	Senin malam	Fiqh (Kitab Sullam al-Taufiq)	-
5.	Selasa malam	-	Bahasa Arab, Akhlak
6.	Rabu malam	Nasaih al-'Ibad	-
7.	Kamis malam	Tarekat (shalawat Fatih)	-

C. Pesantren Buruh Pabrik sebagai Alternatif

Keberadaan "embrio" pesantren buruh pabrik di areal perindustrian di keempat wilayah penelitian: Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik mempunyai arti yang signifikan tidak hanya bagi masyarakat "asli" di sekitar pabrik, tetapi juga bagi para pendatang yang menjadi buruh pabrik. Kalau dicermati bahwa keberadaan "embrio" pesantren buruh pabrik tidak lepas dari kondisi keprihatinan dari orang yang sangat *concern* terhadap realitas kehidupan di wilayah perindustrian. Proses industrialisasi yang begitu gencar digalakkan oleh pemerintah dengan berdalih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menyediakan lapangan kerja baru, ternyata tidak diimbangi dengan proses pembinaan dalam hal yang berkaitan dengan masalah mental spiritual. Pemilik modal jelas hanya menganut prinsip ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jalan "mengeksploitasi" buruh pabrik yang tidak mempunyai *bargain position* cukup tinggi. Pemilik modal hanya tahu urusan dengan bagaimana buruh datang tepat pada waktunya, bekerja dengan keras, dan membayar mereka tiap akhir minggu atau bulan sesuai dengan kontrak kerjanya. Pemilik modal, tampaknya tidak mau peduli tentang apakah cukup gaji yang diterima buruh pabrik, misalnya untuk mengontrak kamar yang layak (*convenience*) untuk melepas letih habis bekerja, gizi makanan yang memadai,

atau sandang, bahkan tidak cukup peduli dengan mental spiritual buruh pabriknya.

Kondisi ini ditunjang oleh latar belakang keagamaan yang kurang kuat dan jauh dari pengawasan orang tua yang mengakibatkan—sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya—banyak buruh pabrik yang tidak tahu harus berbuat apa dalam hidupnya. Banyak dari mereka yang merasa bahwa mereka tak lebih hanya sekadar robot pemilik modal. Mereka kehilangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan mental spiritualitas juga tercerabut dari kehidupannya. Akibatnya banyak di antara mereka yang terjerumus ke dalam perbuatan asusila, misalnya mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, dan seks bebas.

Melihat situasi yang demikian, orang-orang yang memiliki ilmu agama yang cukup tinggi dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan di sekitar areal perindustrian mencoba—pada awal mulanya—untuk mengadakan pengajian tidak hanya bagi buruh pabrik tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Lambat laun, kegiatan keagamaan bertambah besar dan akhirnya banyak yang mendirikan pondok pesantren.

Keberadaan pondok pesantren di areal perindustrian mempunyai arti yang strategis sebagai wahana pembinaan mental spiritual yang sudah terkikis dari pribadi-pribadi buruh pabrik. Dari perspektif pengelola pesantren, aktivitas yang diadakan di pesantren merupakan tanggung jawab dari pengelola (kiai) dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif santri buruh pabrik, berdirinya pesantren di sekitar areal perindustrian mempunyai peran dalam membantu mereka dalam memecahkan persoalan sehari-hari yang dihadapinya, misalnya persoalan ekonomi, sosial, psikis, mental, dan religiusitas.

1. Pemecahan Masalah Ekonomi

Persoalan ekonomi merupakan persoalan klasik sekaligus krusial bagi para pemiliki modal dan buruh pabrik, dua kelompok yang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Pemilik modal ingin buruh pabrik sebisa mungkin dieksploitasi dengan imbalan upah yang semurah-murahnya. Sebaliknya, buruh pabrik menuntut upah yang seimbang dengan jam kerja dan tenaga yang dikeluarkan. Meskipun terjadi tarik menarik kepentingan, *bargain position* buruh pabrik selalu lemah dan kalah, sehingga masih banyak ditemui buruh pabrik yang menerima upah di bawah UMR yang ditetapkan pemerintah.

Keberadaan buruh untuk bekerja di pabrik dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Sebagaimana disebutkan di bab sebelumnya bahwa latar belakang ekonomi orang tua buruh pabrik yang pas-pasan menuntut mereka harus meninggalkan desa untuk bekerja di kota/pinggiran kota. "Iming-iming" atau tawaran bahwa menjadi buruh pabrik akan mendapatkan upah yang menjanjikan merupakan rangsangan untuk segera melakukan urbanisasi. Di samping persoalan di atas, persoalan gengsi juga tidak bisa dilepaskan. Masyarakat secara umum juga merasa lebih mempunyai status yang lebih tinggi dibanding menjadi buruh tani di pedesaan, atau bahkan hanya sebatas pengangguran.

Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah, sebenarnya hanya cukup untuk memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) buruh pabrik, apalagi buruh pabrik, yang karena terpaksa, harus bekerja dan menerima upah di bawah standar. Melihat perbandingan antara *income* dari upah yang diterima dengan *living cost* yang harus dikeluarkan oleh buruh pabrik ditambah dengan persoalan-persoalan sosial dan mental spiritual yang juga terkikis, maka kehidupan buruh pabrik sangatlah terpuruk. Hadirnya "embrio" pesantren buruh pabrik merupakan

oase di tengah keterpurukan ekonomi dan mental spiritual. Pendirian "embrio" pesantren buruh pabrik dari aspek ekonomi sangatlah menolong santrinya yang juga buruh pabrik di daerah sekitarnya. Dengan tersedianya fasilitas pemondokan dengan uang infaq atau sedekah yang sangat murah dibanding tinggal di kamar kos-kosan, santri dapat dengan tenang istirahat. Uang infaq atau sedekah yang dibayarkan oleh santri, termasuk santri buruh pabrik sekitar Rp5.000,00-Rp10.000,00 per bulannya. Nilai nominal yang dibayarkan tersebut 1/6 bahkan 1/10 dari uang sewa kamar kos-kosan.

Di samping menyediakan fasilitas pemondokan, ditemukan beberapa pesantren yang memberikan jasa katering dengan harga yang sangat murah dibanding harga makanan di luar. Ada pesantren yang menyediakan jasa katering sekali, namun ada juga yang menyediakan jasa tersebut dua kali sehari. Tidak ada "embrio" pesantren buruh pabrik yang menyediakan jasa katering tiga kali sehari. Hal ini disebabkan ketika buruh pabrik bekerja, mereka tidak mungkin pulang hanya sekadar makan siang atau makan malam di pesantren. Mereka bisa, secara bebas, makan di sekitar areal mereka bekerja. Tabel berikut menjelaskan secara jelas perbandingan "tarif" tinggal di "embrio" pesantren buruh pabrik dan di kos-kosan, berikut perbandingan harga makanan yang disediakan pesantren di luar.

Pengeluaran Buruh Pabrik yang Tinggal di Pondok Pesantren dan di Luar Pondok Pesantren

Embrio Pesantren Buruh Pabrik		Di Luar Pondok Pesantren	
Infaq Pemondokan	**1 x Makan**	**Sewa Kamar**	**1 x Makan**
Rp.5.000-Rp. 10.000	Rp.600-Rp.750	Rp.30.000-Rp.50.000	Rp.1000-Rp.1500

Di samping pengeluaran di atas, bagi buruh pabrik yang tinggal di luar pesantren ada kemungkinan juga mengeluarkan dana ekstra di luar dua kebutuhan di atas. Hal ini disebabkan godaan

teman, dengan berbagai dalih, misalnya solidaritas sesama teman, keluar untuk jalan-jalan, terutama malam Minggu, dan ke tempat-tempat hiburan yang cukup banyak tersedia di daerah perkotaan. Hal ini cukup kontras dengan buruh pabrik yang tinggal di "embrio" pesantren buruh pabrik. Meskipun ada "rihlah" atau bepergian yang terjadwal, adanya jadwal belajar yang cukup panjang ditambah kewajiban-kewajiban lainnya di pondok, sangatlah kecil bagi mereka untuk "keluyuran". Dengan demikian, kecil kemungkinannya bagi buruh pabrik untuk *spend money* terkait hal-hal tersebut di atas.

Melihat perbandingan di atas, jelas bahwa buruh pabrik yang tinggal di pesantren bisa menghemat uang gaji bulanannya jauh lebih besar dibanding mereka yang tinggal di luar pondok. Hal ini berimbas pada sisa uang gaji yang dapat ditabung dan sekaligus yang dapat dikirimkan kepada keluarga.

Meskipun tinggal di "embrio" pesantren buruh pabrik, secara ekonomis, mempunyai arti yang signifikan, akan tetapi itu bukan menjadi tujuan utama bagi santri buruh pabrik untuk tinggal di pesantren. Ada faktor-faktor lain yang lebih utama yang menjadi pertimbangan, misalnya keinginan memperdalam agama, untuk tinggal di "embrio" pesantren buruh pabrik.

2. Pemecahan Masalah Sosial

Keberadaan industrialisasi, langsung atau tidak langsung, mempunyai dampak sosial bagi masyarakat di kawasan yang secara kebetulan di-"gusur" menjadi areal perindustrian (pabrik) maupun bagi pendatang. Ekspansi lahan perindustrian mengarah pada areal-areal pinggiran kota yang dulunya tergolong masih *isolated areas* dengan kekhasan budaya pedesaan yang saling bahu-membahu (gotong royong) dalam mengerjakan sesuatu, tolong-menolong dengan dilandasi rasa keikhlasan, toleransi tinggi dan tradisi keagamaan yang masih kuat, misalnya yasinan dan

tahlilan tiap hari Kamis dan Jum'at, membaca shalawat diba', perayaan hari-hari besar umat Islam dan sebagainya.

Keberadaan industri, secara perlahan mengubah *the established culture*. Penduduk setempat yang mulanya sangat *helpful* dan tenggang rasa sesama tetangga, misalnya lahan kosong yang dimiliki bisa dimanfaatkan oleh tetangga yang kurang berada untuk ditanami atau digunakan untuk keperluan ekonomi yang lain tanpa dipungut biaya. Akibat industrialisasi, masyarakat yang mempunyai lahan kosong cenderung untuk memanfaatkan lahan kosongnya untuk dijadikan kos-kosan untuk disewakan kepada pendatang. Mereka, pada akhirnya, sangat berorientasi pada persoalan ekonomi; bagaimana mereka memanfaatkan lahan yang dimilikinya untuk dijadikan tempat kos-kosan. Dulu sebelum pabrik-pabrik besar berdiri, antar masyarakat di areal tersebut saling gotong royong membangun rumah warga setempat tanpa harus membayar, tetapi dengan adanya industrialisasi, gotong royong mulai hilang dan semuanya diganti dengan nominal uang. Persoalannya, mereka yang membangun rumah, tujuan utamanya adalah komersialisasi rumah yang dibangun tersebut untuk kos-kosan atau usaha bisnis lainnya (misalnya warung), sehingga masyarakat lainnya memperhitungkan juga unsur bisnisnya ketika akan membantu.

Persoalan lainnya yang muncul adalah ketika sesama penduduk setempat yang mempunyai kamar-kamar yang siap dikontrakkan, mereka bersaing satu sama lain, bahkan tidak menutup kemungkinan saling menjelekkan agar pendatang (buruh pabrik) mengontrak kamar yang dimilikinya. Inilah penyebab renggangnya hubungan antartetangga di masyarakat tersebut. Bahkan agar kamarnya laku dikontrak terkadang mereka juga tidak peduli, apakah kamar-kamar dalam rumah yang dikontrakkan tersebut dihuni laki-laki dan perempuan. Yang penting bagi mereka, kamar-kamar tersebut terkontrakkan dan dapat memberi

income tiap bulan bagi pemiliknya. Kondisi terakhir ini juga punya andil yang cukup besar dalam menimbulkan persoalan-persoalan antarburuh pabrik dan antarburuh pabrik dengan masyarakat sekitar (penduduk asli), misalnya pergaulan bebas di antara mereka, minum-minuman keras dan tidak menutup kemungkinan—seperti yang pernah terjadi—yakni perkelahian antarmereka.

Akumulatif persoalan yang ada sebagaimana tersebut di atas mengarah pada sikap hidup yang lebih bersifat individualistik. Masing-masing orang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Akhirnya perkumpulan yang dulunya sering dilakukan melalui kegiatan yasinan atau tahlilan maupun acara-acara keagamaan berangsur-angsur redup. Kalaupun ada hanya segelintir orang, itupun yang sudah berusia lanjut dan masih aktif untuk mengikutinya, sedang anak-anak muda sudah meninggalkannya.

Keberadaan "embrio" pesantren buruh pabrik mencoba mengembalikan budaya asli dan mempertemukan budaya-budaya yang dibawa kaum pendatang dengan budaya yang ada di kalangan masyarakat sekitar di mana pesantren itu berdiri. Keberadaan Pesantren Al-Istiqomah misalnya, mempunyai peran yang sangat penting di kawasan Kendangsari, Rungkut. Masyarakat setempat berikut para buruh pabrik pendatang sudah lama tidak mengadakan gotong royong dan atau mengadakan acara-acara keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama.

Keberadaan "embrio" pesantren buruh pabrik mengembalikan tradisi yang sudah pernah berkembang. Tradisi mereka bergotong royong pun kembali lagi. Terbukti pengembangan pondok sepenuhnya ditunjang oleh masyarakat sekitar meskipun pengasuh pesantren tersebut tidak pernah mengajukan permohonan bantuan kepada masyarakat sekitar. Bangunan *hall,* misalnya, yang direncanakan tiga lantai, tahap demi tahap berjalan. Masyarakat sekitar, berikut buruh pabrik baik yang tinggal

di "embrio" pesantren maupun yang tinggal di sekitar pondok menyadari bahwa keberadaan pondok mempunyai arti yang sangat penting dan karena itu perlu di-*support*. Tidak hanya masyarakat dan santri buruh pabrik yang mau bahu membahu menyokong "embrio" pesantren, pabrik di mana santri "embrio" pesantren buruh pabrik bekerja, dengan kesadaran yang tinggi mereka juga turut membantu pengembangan pondok. Latar belakang partisipasi pondok untuk membantu pesantren adalah buruh pabrik yang tinggal di"embrio" pesantren mendapat acungan jempol dari pemiliki modal bahwa mereka pekerja ulet dan jujur.

Tidak cuma putera-puteri masyarakat sekitar yang mendapat pelajaran mengaji dan pelajaran agama dari pengasuh "embrio" pesantren buruh pabrik yang ustadznya kebanyakan terdiri dari buruh pabrik yang sudah lama mondok di sana sehingga mereka mengenal huruf-huruf Arab dan bisa membaca Al-Qur'an, orang tua mereka pun meminta waktu khusus untuk belajar mengaji sekaligus belajar ilmu agama melalui pengajian rutin yang diadakan.

Nilai positif yang diberikan santri "embrio" pesantren buruh pabrik maupun masyarakat sekitar di Kabupaten Gresik adalah mampu mengubah pandangan buruh pabrik yang inginnya hura-hura dengan kawan sejawatnya dengan memakai narkoba dan menenggak minuman keras menjadi seorang santri yang taat dalam menjalankan perintah agama. Masyarakat sekitar merasa bersyukur dengan berdirinya "embrio" pesantren buruh pabrik, karena sejak berdirinya pesantren tersebut, tingkat kriminalitas di daerah tersebut berangsur-angsur surut.

3. Pemecahan Masalah Psikis

Harus diakui bahwa keberadaan industrialisasi mempunyai dampak psikologis tidak hanya bagi masyarakat sekitar pabrik,

tetapi juga bagi buruh pabrik. Dari segi masyarakat sekitar, keberadaan pabrik setidaknya akan menimbulkan rasa takut akan dehumanisasi yang dapat mencabut tradisi dan budaya serta nilai-nilai spiritual yang sudah ada. Kebiasaan bersama-sama dalam suasana kekeluargaan dan toleransi yang tinggi antara warga negara berubah menjadi individualistik. Masyarakat, pada akhirnya, banyak merasakan kesepian dan kesendirian, karena semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing, bahkan tak jarang dijumpai mereka sudah tidak peduli sesama tetangga.

Ketakutan dan kegelisahan juga menghinggapi kaum tua dan remaja penduduk asli dalam hal perekrutan tenaga kerja pabrik. Dalam kondisi persaingan yang kompetitif untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak jarang tenaga kerja yang dibutuhkan banyak didatangkan dari luar, padahal tenaga kerja yang produktif di sekitar areal perindustrian tersebut cukup banyak. Hal ini dikarenakan proses rekruitmen tenaga kerja yang disyaratkan oleh pabrik kebanyakan tidak bisa dipenuhi oleh penduduk setempat, tetapi dipenuhi oleh para pendatang. Kondisi ini bisa menimbulkan kecemburuan masyarakat asli tidak hanya kepada buruh yang diterima, tetapi juga pada pabrik itu sendiri yang berakhir pada permusuhan yang diwujudkan dengan pencurian, pengrusakan atau bahkan mendemo pabrik dengan permintaan agar masyarakat asli diberi jatah untuk diterima di sana.

Kondisi psikis yang sudah demikian kompleks, ditambah dengan pendatang yang membawa hal-hal baru di wilayah pabrik. Bertemunya mereka, apalagi rata-rata berusia muda yang haus akan hiburan, dan ditunjang tersedianya sarana prasarana untuk melampiaskan jiwa mudanya tanpa pengawasan yang ketat, baik dari orang tua maupun masyarakat sekitar, tidak menutup kemungkinan mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kondisi ini dapat pula mengakibatkan rasa tidak aman pada masyarakat sekitar, terutama bagi putera-puteri mereka yang masih kecil.

Bagi buruh pabrik, persoalan-persoalan di pabrik banyak menimbulkan persoalan-persoalan psikis. Persoalan kedisiplinan, misalnya, sering dipakai pihak pabrik sebagai alat untuk menakuti buruh pabrik. Yang sering menjadi persoalan adalah waktu istirahat yang "kurang" di siang hari. Persoalannya bukan pada durasi waktu, melainkan dalam waktu sekitar 30 menit-1 jam, dengan jumlah buruh pabrik yang ribuan jumlahnya, mereka terkadang harus berebutan untuk makan siang dan sering terjadi kendala untuk melakukan ibadah shalat dzuhur karena mushalla yang ada sangat kecil. Buruh pabrik merasa tidak tenang dan dihantui perasaan was-was, sebab kalau terlambat mereka bisa dipecat karena tidak disiplin. Belum lagi persoalan lain yang dihadapi buruh pabrik, misalnya kontrak kerja yang belum jelas berikut statusnya di pabrik, pelecehan seksual (bagi buruh pabrik perempuan) dan jumlah upah yang relatif kecil dan sebagainya. Kesemuanya itu menambah beban psikologis buruh pabrik dalam kehidupan kesehariannya.

"Embrio" pesantren buruh pabrik yang didirikan di areal perindustrian sedikit banyak mampu menetralisir persoalan-persoalan psikis yang dihadapi buruh pabrik. Rasa kecemasan masyarakat akan tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh mereka sedikit banyak tereliminir karena "embrio" pesantren keberadaannya masih dipandang oleh semua komponen masyarakat yang ada di sekelilingnya sebagai *the sacred place,* sehingga mereka malu untuk melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Kalaupun mereka masih melakukan, mereka akan melakukan di daerah yang jauh dari wilayah tersebut.

Melihat materi yang diajarkan di "embrio" pesantren buruh pabrik sebagaimana dielaborasi pada bab sebelumnya, lebih banyak mengarah pada perbaikan akhlak atau mental, di samping materi-materi yang menyangkut masalah fiqh (hukum Islam) ataupun

materi tauhid (teologi). Hal ini tentunya disadari oleh pengasuh bahwa "kesehatan" mental merupakan persoalan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu buruh pabrik. Dengan bekal materi-materi tersebut di atas, diharapkan santri buruh pabrik siap menghadirkan sosok buruh pabrik teladan sekaligus "tahan banting" dalam menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapinya.

4. Pemecahan Masalah Moral

Selain menimbulkan persoalan-persoalan sebagaimana disebut di atas, industrialisasi memberikan dampak pula pada dekadensi moral. Pendatang secara umum berasal dari pedesaan yang masih lugu dan polos. Kehidupan desa yang penuh tata nilai menjadi landasan dalam pergaulan dan masyarakat. Kondisi tersebut, bisa jadi berubah sebaliknya. Kehidupan di kota yang individualistik diperparah dengan gaji buruh yang sangat minim dengan tuntutan-tuntutan dari keinginan buruh yang relatif berusia muda dan tuntutan pemilik modal yang terkadang berlebihan merupakan di antara penyebab terjadinya dekadensi moral di kalangan buruh pabrik.

Murahnya gaji yang diterima oleh buruh pabrik menyebabkan mereka harus menyiasati sedemikian rupa agar tetap bertahan hidup di kota. Tempat kos-kosan yang penting bagi mereka adalah murah walaupun tidak *convenience,* misalnya dihuni dengan beberapa teman sepabrik. Kumpulan buruh pabrik yang relatif masih remaja dengan jumlah yang sangat besar di suatu masalah perindustrian bisa mengarah ke hal-hal negatif kalau tanpa ada yang membimbing. Mereka merasa bebas dari kungkungan nilai-nilai yang selama tinggal di desa sangat dan harus dipatuhi. Rasa ingin tahu terhadap hal-hal baru di kota, merasa tidak enak diajak teman, dan lepas atau jauh dari pengawasan menyebabkan mereka bebas melakukan apa saja. Dari sinilah timbul persoalan-persoalan moral, misalnya minum-minuman keras (mabuk-mabukan),

bermain uang (judi), mengonsumsi narkoba, dan hidup bebas dengan lawan jenis.

Kondisi ini akan bertolak belakang dengan kehidupan buruh pabrik yang tinggal di "embrio" pesantren buruh pabrik. Pengawasan yang ketat dari pengelola dalam mengawasi tingkah laku buruh pabrik baik di dalam pondok maupun di luar pondok (tempat kerja) merupakan instrumen yang cukup ampuh dalam membimbing santri buruh pabrik agar senantiasa di jalan yang benar (*on the right track*). Dalam kasus Pondok *Al-Istiqomah,* tidak jarang pengelola menunjuk "spionase" dalam mengontrol tingkah laku buruh pabrik ketika di luar pesantren. Hubungan laki-laki dan perempuan juga diatur sedemikian rupa, sehingga kasus hubungan bebas antara santri laki-laki dan perempuan tidak terjadi. Kalaupun ada kontak antara santri buruh laki-laki dengan santri buruh perempuan, kiai segera memanggil keduanya. Mereka ditanya sejauh mana keseriusan hubungan keduanya. Apabila dipandang *ba'ah* (berkelayakan, mampu), maka kiai segera mengesahkan hubungan keduanya.

Dalam kasus majelis taklim Jama'ah Tauhid, Menganti, Gresik, latar belakang pendirian majelis taklim ini adalah di samping memberi pengajaran agama di kalangan masyarakat yang masih minus, yang lebih utama dalam rangka mengatasi sekaligus mengobati buruh pabrik yang terjerumus ke dalam narkoba dan minum-minuman keras. Dalam proses penyembuhan santri yang terlibat narkoba, kiai membai'at calon santri untuk tidak terlibat lagi ke persoalan-persoalan di atas sehingga dalam beberapa bulan santri yang ikut dalam majelis taklim tersebut sudah bisa meninggalkan kebiasaan buruknya dan mereka merasakan kedamaian batin. Dari gambaran di atas, jelas bahwa keberadaan "embrio" pesantren buruh pabrik sangat dibutuhkan di areal perindustrian dalam rangka membina dan mengarahkan buruh pabrik ke arah kehidupan yang benar.

5. Pemecahan Masalah Religius

Persoalan religius merupakan masalah krusial dalam kehidupan umat manusia. Keagamaan seseorang merupakan benteng terakhir dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Namun, sejauh mana tingkat religiusitas seseorang akan tergantung sejauh mana dia memahami ajaran-ajaran agama. Dalam konteks "embrio" pesantren buruh pabrik, kaitannya dengan buruh pabrik, keadaan "embrio" pesantren buruh pabrik secara umum dilatarbelakangi oleh keprihatinan seseorang kiai atau ustadz terhadap pola kehidupan masyarakat sekitar termasuk buruh pabrik. Mereka, dalam pandangan kiai atau ustadz, sangat minim agamanya, sehingga tidak tahu mana yang harus dikerjakan dan mana yang dilarang. Adapun ketertarikan santri untuk tinggal di "embrio" pesantren buruh pabrik, setidaknya ada dua hal. *Pertama,* santri berniat untuk menuntut ilmu di pesantren. Kiai menyuruh santrinya untuk bekerja di pabrik dengan harapan santri tidak menggantungkan lagi biaya hidupnya pada orang tuanya. Di sini ditanamkan oleh kiai bahwa santri harus bisa mandiri, dan apabila ada kelebihan rezeki dari upah yang diterimanya, mereka diminta untuk menabung dan sebagian dikirim pada keluarganya. *Kedua,* santri yang memang sudah bekerja di pabrik ingin tinggal di "embrio" pesantren buruh pabrik untuk belajar ilmu agama.

Dalam aspek religius, keberadaan pesantren sangat penting sebagai pusat pembelajaran agama. Bagi masyarakat sekitar, keberadaan pesantren sangat vital dalam membekali putera-puterinya dengan agama. Meskipun, "embrio" pesantren buruh pabrik sebagian besar dihuni dan diperuntukkan untuk buruh pabrik, dalam realitasnya pesantren tidak bisa menolak keinginan masyarakat sekitar untuk belajar agama. Pada sore hari, secara umum, "embrio" pesantren buruh pabrik membuka pengajian al-Qur'an bagi anak-anak.pada malam hari selepas shalat Maghrib, pengajian dikhususkan bagi bapak-bapak dan atau ibu-ibu yang

tinggal di sekitarnya. Baru setelah shalat Isya, pembelajaran bagi santri buruh pabrik dimulai sampai sekitar pukul 10 malam. Kegiatan tersebut akan dimulai lagi setelah shalat Shubuh sampai sekitar pukul 6 pagi.

Materi yang diberikan dalam proses pembelajaran berkisar pada tiga materi utama, yakni tauhid (teologi), fiqh (hukum Islam), dan akhlak. Dengan ketiga materi ini diharapkan bahwa santri buruh pabrik mengatasi persoalan-persoalan keagamaan baik di lingkungan pabrik maupun di luar. Perlu dipaparkan juga, sebagian kecil dari santri "embrio" pesantren buruh pabrik menginginkan menjadi kiai. Mereka ingin menuntaskan belajarnya dan kembali ke kampung halamannya untuk mengajar, sedang menjadi buruh pabrik hanyalah alat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya selama belajar di "embrio" pesantren buruh pabrik.

Meskipun dampak positif dari keberadaan buruh pabrik tidak diragukan, namun ada kendala-kendala kecil yang dihadapi "embrio" pesantren buruh pabrik. Buruh pabrik yang tinggal di "embrio" pesantren buruh pabrik tidak bisa tinggal lagi di pondok apabila mereka sudah menikah. Mereka tetap diizinkan mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh pondok, tetapi mereka harus tinggal di luar pondok. Selain itu, karena penerapan kerja di pabrik banyak menggunakan *shift*, banyak santri yang kebetulan berbarengan dengan *shift*-nya, terpaksa tidak bisa mengikuti pelajaran.

Bab VI
Sikap dan Pandangan Berbagai Kalangan Terhadap Rancangan Pesantren Buruh Pabrik

A. Sikap dan Pandangan Buruh Pabrik

Sikap dan pandangan pekerja terhadap rancangan pesantren buruh pabrik ini sangat diperlukan, mengingat mereka merupakan salah satu komponen penting yang ada dalam pesantren tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pesantren buruh pabrik dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran Islami yang santrinya terdiri dari buruh pabrik. Pesantren jenis ini berangkat dari proses evolusi yang panjang akibat pergeseran nilai yang berkembang di tengah lingkungan industri.

Pada awal berdirinya, "embrio" pesantren buruh pabrik memang dirancang sedemikian rupa untuk keperluan pendidikan agama bagi santri murni. Proses pembelajaran yang berlangsung di pesantren ini pada awalnya berjalan secara konvensional, dalam arti memenuhi elemen dasar untuk disebut sebagai pesantren konvensional. Namun dalam proses selanjutnya, pesantren ini mengalami perubahan yang perlahan seiring dengan perubahan zaman. Perubahan pesantren konvensional menuju pesantren industri ini diakibatkan rendahnya tingkat resistensi yang dimiliki oleh pesantren tersebut dalam menghadapi derasnya arus perubahan yang terjadi, khususnya perkembangan industri modern.

Adapun terkait dengan gambaran dan bentuk pesantren buruh pabrik masa depan, setidaknya ada beberapa komponen yang perlu dimintakan pendapat kepada buruh, pengelola pabrik, ormas Islam, dan pakar pendidikan, yakni tentang fasilitas, kurikulum, metode, dan waktu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, pimpinan pesantren serta lokasi pesantren industri itu sendiri, sehingga tercipta sebuah konstruk model pesantren industri yang ideal.

Karyawan buruh pabrik yang dimintai pandangan mengenai rancangan pesantren industri ini, meliputi karyawan yang tinggal di luar pondok pesantren (kos-kosan). Ketika mereka ditanya tentang kemungkinan hadirnya pesantren industri ini, diperoleh data bahwa baik karyawan buruh pabrik yang tinggal di pesantren maupun yang berada di luar pesantren ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan, yakni dari 200 responden sebanyak 182 orang (91%) menyatakan setuju berdirinya pesantren industri, yang seluruh santrinya adalah karyawan buruh pabrik, dan hanya 18 orang saja yang menyatakan kurang setuju.

Di antara 200 responden tersebut, salah seorang karyawan (Budi Utomo) yang menyatakan setuju mengatakan bahwa:

> "Jika ide pesantren industri ini benar-benar terwujud dan menjadi kenyataan, maka akan sangat membantu teman-teman karyawan buruh, khususnya yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah, misalnya shalat lima waktu. Di samping itu sesekali waktu pimpinan pabrik mengusahakan pembinaan mental spriritual dengan mendatangkan ustadz atau penceramah dari luar, dengan begitu kita bisa menambah ilmu agama dan kehidupan keagamaan kita dapat terpelihara bahkan bisa ditingkatkan."[1]

Adapun bagi mereka yang kurang setuju, mereka merasa khawatir apabila keberadaan pesantren ini justru akan mengganggu aktivitas kerja di pabrik dan tersitanya waktu istirahat

[1] Wawancara tanggal 27 April 2002

akibat banyaknya aktivitas keagamaan di pesantren. Kekhawatiran ini dapat dimaklumi mengingat mereka masih berasumsi bahwa keberadaan pesantren industri ini tiak ada bedanya dengan pesantren konvensional pada umumnya. Yang demikian ini dapat dilihat dari penuturan Bambang Edi (bukan nama sebenarnya):

> "Saya dan teman-teman lainnya tidak menetap di pondok pesantren dan lebih suka memilih di kos-kosan, karena kos-kosan lebih bebas, tidak terikat segala macam peraturan dan tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan lain serta dapat beristirahat dengan tenang sehingga bisa bekerja lebih fresh dan tidak terlalu capek."[2]

1. Keadaan Santri

a. Usia Santri

Dalam kaitannya dengan usia minimal santri yang diperbolehkan menempati pesantren industri ini, diperoleh data bahwa mayoritas responden menghendaki minimal berusia 15 tahun. Secara rinci bisa diketahui sebagai berikut; dari 200 responden yang dimintai pendapat tentang usia minimal tersebut diperoleh keterangan : 106 orang atau 53% menyatakan 15 tahun, 54 orang atau 27% menjawab 17 tahun, sedangkan sisanya 18 orang atau 9% menghendaki usia minimal yang menempati pesantren industri ini adalah usia 20 tahun.

Selanjutnya, terkait dengan batas maksimal santri yang bertempat tinggal di pesantren industri tersebut, rata-rata tidak menghendaki adanya pembatasan usia, dari 200 responden yang dimintai keterangan, 97 orang atau 48,5% menjawab sebaiknya tidak ada batasan usia. Alasan mereka menyatakan demikian ini, karena pada prinsipnya agama tidak membatasi seseorang untuk menuntut ilmu, bahkan dalam sebuah hadits dikatakan bahwa *tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat (kubur).*

---

[2] Wawancara tanggal 27 April 2002

Hanya 26 orang atau 13% saja yang membatasi sampai usia 30 tahun. Hal ini mengingat usia-usia seperti itu adalah usia di mana seseorang sudah saatnya memasuki dunia rumah tangga, sehingga akan mengurangi ke-*ajeg*-an (istiqamah), karena itu jika mereka tetap diperbolehkan di pondok dikhawatirkan bisa mengganggu konsentrasi yang lain dalam belajar. Sementara yang lain yakni 77 orang atau 38,5% menyatakan bahwa boleh tidaknya para santri bertempat tinggal itu ukurannya bukan usia, melainkan dibatasi dengan perkawinan, dalam arti jika mereka telah menikah maka tidak lagi diperkenankan di pondok. Karena kesibukan orang yang sudah berumah tangga dengan yang belum sangat berbeda.

b. Jenis Santri

Pada umumnya, sebagaimana yang terjadi pada pesantren konvensional, tidak ada klasifikasi mengenai jenis santri, baik yang belajar di lembaga pendidikan formal atau nonformal, bahkan santri pekerja sekalipun asalkan bisa mengikuti kegiatan dan segala aturan yang berlaku di pesantren, mereka bisa diterima dan boleh menjadi santri. Dalam kaitannya dengan jenis santri yang akan mondok di pesantren industri ini, terdapat dua kategori, yakni *pertama,* menghendaki santri khusus yang berstatus sebagai pekerja (karyawan), sedang yang bukan karyawan tidak patut bertempat tinggal di pesantren industri. Mereka yang menyatakan demikian sebanyak 90 orang (45%) dari 200 responden. Alasannya adalah karena sejak semula munculnya gagasan tentang pesantren industri ini memang bertujuan untuk meringankan beban para buruh pabrik, selain untuk meningkatkan ketahanan mental spiritual buruh itu sendiri. Atas dasar ini, maka jangan sampai ada seorang karyawan yang tidak tertampung di pesantren industri, disebabkan banyaknya minat para santri selain karyawan yang ingin mondok di pesantren industri tersebut. Sedang sebanyak 110 orang (55%) menyatakan tidak setuju jika santri yang boleh bertempat tinggal di pesantren industri itu, khusus bagi mereka

yang berstatus sebagai pekerja (karyawan). Karena sebagaimana pesantren pada umumnya, pesantren industri juga tidak bisa melepaskan diri dengan tidak melibatkan masyarakat sekitar pondok. Oleh sebab itu, telah menjadi keniscayaan bagi pesantren untuk menerima santri dari berbagai jenis dan karakter di mana pesantren itu berada.

c. Lama Santri Menetap di Pesantren

Dari 200 responden yang dimintai keterangan tentang perlu tidaknya batasan waktu belajar di pesantren ini, sebanyak 144 orang (72%) menyatakan perlunya pembatasan, meskipun jenjang waktu yang diinginkan berbeda-beda. Data di lapangan menunjukkan bahwa 30 orang (15%) menentukan maksimal belajar di pesantren 2 tahun, sebanyak 65 orang (32,5%) membatasi maksimal 4 tahun, sedang 49 orang (24,5%) menghendaki maksimal 5 tahun. Adapun selebihnya, yakni 56 orang (28%) menyatakan tidak perlu pembatasan waktu belajar.

Bagi mereka yang menyatakan setuju adanya pembatasan waktu belajar tersebut, mereka beralasan bahwa beberapa kemudahan, baik yang berkaitan dengan tersedianya fasilitas maupun berbagai aktivitas keagamaan yang diberikan pihak pesantren industri kepada karyawan buruh itu, harus bisa dinikmati oleh seluruh karyawan yang berkeinginan untuk mondok di pesantren tersebut tanpa pandang bulu dengan mengedepankan aspek kebersamaan dan pemerataan. Hal ini sangat mungkin terjadi, manakala diatur secara bergantian (giliran) dengan pembatasan waktu belajar, berpegangan pada prinsip belajar seumur hidup dan tidak mengenal adanya pembatasan usia.

2. Lokasi dan Jarak Pesantren dengan Daerah Industri

Terkait dengan lokasi di mana pesantren industri ini harus berada, apakah sebaiknya berada di dalam areal perindustrian

atau agak jauh dari tempat kerja, tapi lebih dekat dengan perkampungan penduduk. Dalam hal ini diperoleh data bahwa dari 200 responden yang ada, 114 (57%) menghendaki pesantren industri tersebut dibangun dalam areal perindustrian. Yang demikian itu karena di samping bisa menghemat biaya transportasi, juga tidak tergesa-gesa (tergopoh-gopoh) datang ke tempat kerja, jika dibandingkan dengan lokasi yang jauh dari tempat kerja. Hal ini mengingat adanya kesibukan lain berupa berbagai macam aktivitas keagamaan yang wajib diikuti di pesantren industri tersebut.

Sedangkan sisanya, yakni 86 orang (43 %) menyatakan lebih senang, jika berdirinya pesantren itu berada di lokasi yang agak jauh dari tempat kerja dan lebih dekat dengan perkampungan penduduk setempat. Dengan pertimbangan bahwa keberadaan sebuah pesantren industri pada mulanya adalah mengemban misi dakwah dan meningkatkan pembinaan mental spiritual para karyawan buruh itu sendiri. Jika hal ini terjadi di dalam area industri, maka akan mengandung konsekuensi; akan terganggu dengan berbagai aktivitas kerja di pabrik dan jika tidak hati-hati, maka berakibat fatal, yakni program pendidikan dan pembinaan yang direncanakan oleh pihak pesantren tidak akan berhasil, disebabkan kurang adanya konsentrasi baik dari pihak pengelola maupun para santri itu sendiri.

Selanjutnya, terkait dengan jarak jauhnya dengan lokasi areal industri, mayoritas menghendaki tidak lebih dari 5 km, dengan pertimbangan untuk menghemat biaya transportasi dan tidak terlalu mengganggu aktivitas kerja pabrik.

3. Fasilitas: Sarana dan Prasarana Pesantren Industri

Sebagaimana diketahui bahwa sebuah institusi pendidikan Islam layak dan patut disebut dengan pesantren manakala mempunyai lima elemen dasar; kiai, santri, kitab kuning, pe-

mondokan, dan masjid atau mushalla. Dalam kaitannya dengan pesantren industri ini, ternyata kehadiran masjid ini masih dianggap relevan dan menjadi pusat kegiatan pembelajaran. Data di lapangan menunjukkan bahwa 200 responden, 145 orang (75,5%) menghendaki adanya masjid di pesantren industri. Sedangkan 55 orang saja (27,5%) yang menyatakan kehadiran masjid bukanlah suatu keharusan, karena segala aktivitas pembelajaran dan ibadah bisa dilakukan di suatu tempat yang bukan dalam bentuk masjid (aula).

Dalam kaitannya dengan keberadaan masjid ini, salah seorang buruh pabrik bernama Eko Susilo menyatakan bahwa:

> "Seperti yang terjadi saat ini, saya dan teman-teman merasa kesulitan dalam melaksanakan shalat fardlu. Meskipun sudah disediakan tempat shalat tapi sangat sempit dan berjubel, sehingga kita semua harus antrian menunggu, sementara waktu istirahat sangat singkat. Kadang-kadang belum sempat shalat waktu istirahat sudah habis. Jadi, andaikata di pabrik kami ini ada masjidnya, tentu hal yang demikian ini tidak akan terjadi."[3]

Dengan demikian, kita bisa memperoleh pemahaman bahwa pada tingkat tertentu, ternyata kaum buruh juga sangat membutuhkan proses pembinaan agama (di antaranya bisa melaksanakan shalat lima waktu dengan khusyu'). Tapi pada perkembangan selanjutnya bisa saja terjadi bahwa masjid tidak hanya sebagai sebuah tempat shalat semata, tetapi juga sebagai tempat pembinaan mental lainnya.

Fasilitas lain yang harus ada di pesantren industri menurut karyawan buruh, terdiri dari: kondisi kamar yang memadai, ruang belajar mengajar yang nyaman dan mereka juga menuntut adanya fasilitas penunjang yang lain, seperti poliklinik, sarana informasi, telekomunikasi, kantin, dan lain sebagainya. Di antara ketiga jenis

[3] Wawancara tanggal 3 Mei 2002

fasilitas tersebut, mayoritas buruh pabrik yakni 79 orang (39,5%) menginginkan tersedianya kamar tempat istirahat yang memadai dan layak. Sedang 75 orang (37,5%) menghendaki adanya ruang belajar yang nyaman dan 46 orang (23%) menuntut adanya fasilitas penunjang sebagaimana tersebut di atas.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa mereka yang menghendaki kantin yang menyediakan kebutuhan makan sehari-hari yang harganya lebih murah jika dibanding dengan makanan yang dijual di warung-warung pada umumnya. Adapun harga sekali makan yang dikehendaki berkisar Rp1.500,00-Rp2.000,00.

Dari data tersebut, kiranya bisa dipahami bahwa para karyawan buruh mendambakan kenyamanan dan membutuhkan istirahat yang cukup untuk melepas lelah dan kepenatan setelah disibukkan dengan kegiatan sehari-hari di pabrik. Di samping itu, mereka sebenarnya juga berusaha mendapatkan bimbingan pengetahuan melalui pesantren buruh pabrik dengan kegiatan belajar mengajar yang diberikan di pesantren tersebut. Kondisi demikian bisa dibuktikan dengan jawaban dan tanggapan mereka yang masih menginginkan ruang belajar mengajar yang kondusif dan dirancang khusus bagi karyawan buruh pabrik. Menyadari akan keberadaannya sebagai karyawan buruh, yang notabene selalu terikat dengan segala macam aturan dan aktivitas mereka di pabrik, maka kehadiran pesantren industri ini dituntut untuk bisa menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, seperti; pelayanan kesehatan, informasi baik cetak maupun elektronik (televisi, tape recorder), wartel, dan sebagainya. Semua ini untuk mengejar ketertinggalan mereka yang terkait dengan informasi dan perkembangan masalah-masalah kekinian.

Dalam hal ini, seorang karyawan buruh yang bernama Pangestu, ketika ditanya tentang fasilitas-fasilitas tersebut dia mengatakan:

> "Sebenarnya bagi saya dan InsyaAllah teman-teman lainnya juga menginginkan bagaimana dengan muculnya pesantren industri ini nanti bisa membantu menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang bagus dan murah, seperti kamar yang bersih serta fasilitasfasilitas lain yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan sehingga bisa menambah ilmu dan pengetahuan, di samping bekerja mendapatkan rizqi."

Selanjutnya, ketika para buruh dimintai keterangan untuk memilih ukuran kamar yang ideal, kebanyakan mereka, yakni 131 orang (65,5%) menghendaki kamar yang berukuran 3x4 m. Sedangkan yang memilih ukuran 3x3 m sebanyak 69 orang (34,5%). Dari ukuran kamar tersebut rata-rata mereka menghendaki untuk diisi empat orang saja dan juga dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur yang layak, ventilasi yang cukup, dan tersedianya lemari pakaian. Yang demikian itu bisa dimaklumi, karena bagi mereka bayangan tentang pesantren industri adalah suatu pesantren yang dirancang khusus untuk karyawan buruh yang sudah letih dan sibuk dengan kegiatan-kegiatan di pabrik. Harapan mereka selanjutnya adalah ingin memanfaatkan kehadiran pesantren tersebut dengan sebaik-baiknya.

Di samping sarana dan prasarana di atas, para buruh juga mengharapkan tersedianya kantin (warung) khusus yang dikelola oleh pondok. Kantin ini menyediakan berbagai macam makanan baik kecil (ringan) maupun lainnya dengan harga yang relatif lebih murah dibanding dengan kantin yang berada di luar pondok, asalkan pihak pengelola tidak sampai rugi. Keberadaan kantin ini dimaksudkan, di satu sisi bisa menjadi sumber dana pesantren dan di pihak lain cukup membantu bagi kemudahan para santri untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Selain kantin tersebut, para buruh juga mendambakan adanya toko (kios) yang dikelola pondok semacam koperasi, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, sikat gigi, handuk, shampoo dan lain sebagainya.

Semua fasilitas sebagaimana yang telah dikehendaki dalam kaitannya dengan pesantren industri di atas, merupakan ke-

lengkapan sarana pendukung kegiatan yang berlangsung di pesantren tersebut. Adapun tentang jumlah kuantitatif sarana dan prasarana yang harus tersedia, sangat tergantung oleh besar kecilnya jumlah santri. Bagi pesantren yang memiliki jumlah santri besar, hampir bisa dipastikan fasilitas yang ada harus seimbang dengan besarnya jumlah tersebut.

Perlengkapan sarana lainnya seperti mesin ketik, komputer, ruang perpustakaaan, dan perlengkapan sejenis tampaknya tidak terlalu mereka harapkan. Dari 200 responden yang dimintai keterangan diperoleh data; hanya 58 orang, yakni 29% saja yang menghendaki adanya peralatan-peralatan tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 142 orang atau 71% menyatakan tidak terlalu peduli tentang ada atau tidaknya alat kelengkapan semacam komputer atau sejenisnya. Hal ini, jika dikaitkan dengan keinginan mereka semula bahwa kehadiran pesantren industri ini diharapkan bisa membantu dan mendukung mereka untuk kelancaran kegiatan-kegiatan di pabrik, maka kelengkapan sarana seperti komputer, perpustakaan dan lain sebagainya dirasa malah menambah beban kesibukan yang mereka lakukan sehari-hari. Yang demikian itu bisa dimaklumi, karena mereka masih belum tahu dan juga belum bisa memanfaatkan peralatan tadi serta mungkin tidak ada kaitan langsung dengan kegiatan mereka di pabrik. Selama mereka bekerja di pabrik, tidak ada kegiatan yang menggunakan peralatan elektronik tersebut, yang ada hanyalah pekerjaan kasar yang mengandalkan kekuatan fisik semata. Namun, jika mereka sudah mengenal dan bisa menggunakannya, maka akan menerima dan termotivasi untuk mempelajarinya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan bermodalkan keterampilan yang telah mereka peroleh di pesantren melalui peralatan tadi.

Hal ini terbukti, ketika mereka ditanya tentang keterampilan apa yang diminati dan diinginkan selama berada di pesantren industri ini, rata-rata mereka menjawab keterampilan menjahit,

yakni 82 orang (41%), tata boga 60 orang (30%) dan komputer hanya 58 orang (29%). Dengan demikian, bisa dipahami bahwa sebenarnya mereka masih menginginkan kesibukan lain yang ada kaitannya dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan selama bisa dilakukan dan tidak mengganggu aktivitas mereka sebagai buruh. Oleh sebab itu, kehadiran pesantren industri ini sangat mereka dambakan, di samping menyediakan tempat hunian yang layak dan tempat istirahat yang nyaman juga sebagai tempat untuk menambah pengetahuan (agama-umum) dan keterampialn.

4. Elemen Kepemimpinan Pesantren: Kiai atau Ustadz

Keberadaan kiai/ustadz di dunia pesantren termsuk pula pesantren industri ini masih sangat dominan, dalam arti sebuah lembaga tak patut disebut pesantren, tanpa adanya kiai/ustadz. Bahkan diyakini, semua aktivitas di pesantren tak bisa berjalan dengan baik, manakala tidak didukung oleh kiai/ustadz. Hal ini terbukti bahwa ketika karyawan buruh ini ditanya tentang siapakah seharusnya yang patut memimpin pesantren industri ini, yakni kiai/ustadz atau orang biasa, maka diperoleh data, 146 orang (73%) menjawab harus dipimpin oleh kiai/ustadz, dan hanya 54 orang (27%) saja yang menghendaki dipimpin orang biasa yang punya komitmen terhadap pengembangan pendidikan melalui pesantren. Yang demikian ini dimaklumi, karena kehadiran kiai/ustadz ini sangat dibutuhkan dan dimaklumi sebagai salah satu faktor yang paling dominan bagi berlangsungnya kegiatan keagamaan di pesantren, tanpa kiai diyakini semua kegiatan yang ada tak mungkin bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Adapun kriteria kiai yang mereka idolakan dalam memimpin pesantren industri ini adalah harus seorang sarjana baik S-1, S-2, maupun S-3. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 200 responden, sebanyak 101 (50,5%) menyatakan demikian. Sedangkan 99 orang (49,5%) menjawab tidak harus sarjana, tapi minimal

harus pernah menghabiskan waktunya mondok di pesantren konvensional. Latar pendidikan yang dimiliki oleh kiai, setidaknya, bisa memberikan bekal yang cukup dalam hal memberikan wawasan kepada para santri, di samping memberikan ketrampilan-ketrampilan lainnya guna meningkatkan sumber daya manusia santrinya. Meskipun demikian, para kiai tampaknya cenderung untuk mengajarkan kitab kuning yang sudah pernah dipelajari ketika mereka mondok. Hal ini bisa dipahami dalam konteks transmisi keilmuan di pesantren oleh seorang kiai kepada santri. Adanya transmisi keilmuan harus didahului dengan "syahadah/ ijazah", yakni santri memperoleh izin dari gurunya untuk mengajarkan suatu kitab/ilmu kepada orang lain. Hal inilah, sebagaimana yang terjadi di pondok konvensional, yang menyebabkan kiai pesantren buruh pabrik cenderung mengajarkan apa-apa yang sudah pernah diajarkan dan diizinkan oleh gurunya saja.

5. Kurikulum Pesantren Industri dan Alokasi Waktu Pembelajaran

Dalam kaitannya dengan kurikulum pesantren industri ini, setidaknya bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok: *Pertama;* ilmu keagamaan murni, dalam arti tidak diajarkan ilmu-ilmu umum seperti ekonomi, matematika, hukum, dan lain-lain. *Kedua*; gabungan antara agama dan umum tadi. *Ketiga*; agama dan ketrampilan praktis. Setelah dimintai tanggapannya tentang ketiga kategori ilmu tersebut, pada umumnya para buruh menghendaki terealisasinya program pembinaan mental spiritiual dengan memberikan materi-materi keagamaan (fiqh, akhlak, dan tasawuf atau ketauhidan) dan keterampilan (menjahit, tata boga, dan komputer), yakni dari 200 responden terdapat 110 (55%) memilih kelompok ketiga, yaitu agama dan keterampilan. Sedang 25 orang (12,5%) menghendaki ilmu agama murni, dan 65 (32,5%) masih menginginkan perpaduan antara ilmu agama dan umum. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa kehadiran pesantren industri ini,

di samping diharapkan mampu memberikan motivasi bagi peningkatan mental spiritual karyawan buruh, juga bisa memberikan bekal keterampilan demi menopang karier yang sedang mereka tekuni dan juga untuk memperbaiki serta mempersiapkan hari esok yang lebih baik dari yang mereka lakukan saat ini.

Selanjutnya, terkait dengan materi ilmu agama tersebut, masihkah perlu diajarkan dalam bentuk kajian kitab kuning sebagaimana yang terdapat pada pesantren konvensional. Dari 200 responden yang dimintai keterangan. 150 (75%) masih menganggap perlu, dengan pertimbangan bahwa salah satu ciri khas sebuah pesantren adalah adanya pengajaran kitab kuning. Sedang lainnya, yakni sebanyak 50 orang (25%) menganggap tidak perlu, dengan alasan bahwa input santri yang belajar di pesantren industri adalah mayoritas belum punya *basic* yang cukup terkait dengan ilmu alat (nahwu dan sharaf). Dengan demikian, akan menyulitkan para santri dalam memahami teks-teks yang berbahasa Arab.

Adapun mengenai alokasi waktu dan kapan seharusnya materi tersebut dajarkan, diketahui bahwa mayoritas responden menghendaki diajarkan malam hari, yakni 177 orang (88,5%). Sedangkan yang menghendaki pagi dan siang, sebanyak 23 orang (11,5%) saja. Selanjutnya tentang jumlah jam, rata-rata mereka menjawab dua jam saja cukup untuk keseluruhan materi pelajaran dalam setiap pertemuan, yakni sebanyak 121 orang (61%). Sedangkan yang menghendaki jangka waktu tiga jam sebanyak 23 orang (11%), dan yang menghendaki 4 jam sebanyak 56 (28%).

Dengan demikian bisa dipahami bahwa masalah kehidupan buruh pabrik dengan segala suka dan dukanya adalah persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sudah sedemikian rupa kecenderungannya mengiringi era industrialisasi. Kesadaran itu kemudian diwujudkan dengan menawarkan formulasi pemecahan secara riil masalah yang berdimensi psikologis, ekonomis,

sosiologis, dan religius yang diwujudkan melalui pendekatan edukatif-religius yang diwujudkan melalui aktivitas pembinaan, moral-keagamaan yang terindikasikan dalam sebuah lembaga pesantren. Pesantren ini memosisikan diri sebagai jembatan penghubung antara kepentingan buruh sebagai pekerja dan sebagai santri dengan tidak menimbulkan persoalan baru di kalangan yang lebih luas (baca: dunia industri). Hal itu dibuktikan dengan tampilannya yang fleksibel disesuaikan dengan kesempatan, tenaga, dan kebutuhan santri dalam pengertian seluas-luasnya.

6. Metode Pembelajaran

Semua jenis materi yang tercakup dalam kurikulum pesantren industri ini hendaknya disampaikan dengan menarik, dalam arti tidak monoton sebagaimana yang terjadi di pesantren konvensional, di mana seorang kiai atau ustadz sangat aktif dan sepihak, sementara para santrinya sangat pasif dan hanya melakukan kegiatan mencatat dan merekam apa yang sedang diucapkan kiainya secara terus-menerus dari hari ke hari.

Dalam kaitannya dengan metode pembelajaran di pesantren industri ini, didapatkan data bahwa dari 200 responden 191 orang (95,5%) menghendaki adanya perubahan metode mengajar, dalam arti tidak sama dengan pesantren konvensional. Konkretnya, para santri diupayakan turut aktif dalam proses belajar mengajar. Setelah kiai atau ustadz selesai menjelaskan satu persoalan, dibuka dialog interaktif dengan para santri tentang beberapa kasus yang dialami oleh mereka, selanjutnya kiai atau ustadz tersebut menjelaskannya sesuai kajian saat itu atau mengembangkannya dengan kajian kitab-kitab lain dan seterusnya. Yang demikian itu, seperti penuturan seorang buruh yang bernama Emil Hamdani:

> "Sebagai karyawan buruh, kami akui selalu mempunyai masalah-masalah yang sering tidak mampu kami pecahkan sendiri, baik menyangkut persoalan pribadi maupun persoalan lain yang terjadi di

pabrik, dan dengan mengikuti pengajian itu kami mengharapkan bisa membantu memecahkan masalah-masalah tadi. Jika memungkinkan untuk kami sampaikan di forum pengajian dengan bapak kiai maka akan kami sampaikan, jika tidak, maka akan kami konsultasikan secara khusus dengan beliau."[4]

7. Penegakan Aturan

Selanjutnya tentang penegakan aturan, hendaknya pesantren industri ini secara mendasar melakukan klasifikasi sesuai dengan jenis aturannya. Terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan jam belajar dan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin, pesantren jenis ini melakukan penegakan secara fleksibel dan tidak seketat sebagaimana di pesantren "konvensional". Namun demikian, terhadap aturan yang berkaitan dengan moralitas dan atau kewajiban keagamaan secara individual, pesantren jenis ini tetap melakukan penegakan secara ketat. Persoalan moralitas tersebut di antaranya berkaitan dengan praktik-praktik *mo limo*: maling (mencuri), *madon* (melacur), minum (minum-minuman keras), *madat* (candu), dan main (judi). Adapun terkait dengan hukuman apa yang seharusnya diberikan, mayoritas, yakni 179 orang (89,5%) menghendaki hukuman yang bersifat mendidik dan hanya 21 orang saja (10,5%) yang menghendaki hukuman fisik, jika pelanggaran yang dilakukannya tersebut masuk kategori ringan, seperti tidak aktif mengikuti pelajaran, tidak shalat berjama'ah dan sebagainya. Akan tetapi, jika pelanggaran yang dilakukan itu berhubungan dengan moralitas dengan melakukan *molimo,* seluruhnya menghendaki dikeluarkan dari pesantren.

8. Sistem Keamanan

Sistem keamanan merupakan salah satu elemen paling penting dalam kaitannya dengan kehadiran pesantren buruh pabrik

[4] Wawancara tanggal 3 Mei 2002

ini, sebab ketenangan dan kenyamanan tidak mungkin bisa diperoleh melainkan terwujudnya sistem keamanan yang mapan dan terjamin. Ketika 200 orang buruh ditanya tentang sistem keamanan yang memadai di pesantren industri ini, 147 orang (73,5%) menjawab hendaknya dilakukan oleh pihak pesantren sendiri yang melibatkan santri. Sedang lainnya, yakni 53 orang (26,5%) menginginkan dikelola secara profesional dengan mengangkat dan menggaji satpam. Keinginan mayoritas ini bisa dipahami sendiri dengan alasan; para santri merasa bahwa pesantren adalah rumahnya sendiri dan bisa menekan biaya bulanan. Mustahil kiranya keamanan itu akan terwujud, sementara santri sendiri melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, seorang karyawan buruh bernama Eko Susanto mengatakan:

> "Kami lebih senang dilibatkan sebagai penjaga malam secara bergiliran dengan teman-teman lainnya, daripada menyerahkan kepada orang lain (baca: satpam). Karena menurut kami, dengan menggaji satpam itu biayanya pasti diambilkan dari *syahriyyah* (uang bulanan) dan secara otomatis biaya yang harus kami keluarkan pun bertambah. Selama kami mampu lebih baik dilakukan sendiri."[5]

B. Sikap dan Pandangan Pengelola Areal Industri

1. PT. SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut)

PT. SIER berdiri sejak 1974 dan mulai efektif pada 1977 dengan mengelola kawasan industri di daerah Rungkut. Saat ini membawahi sekitar 350 perusahaan dengan jumlah karyawan sekitar 100.000 orang. PT. SIER telah menyediakan fasilitas umum, di antaranya masjid, lapangan olah raga, dan sebagainya. Berkaitan dengan masalah pembinaan buruh pabrik, menurut Agung Prasetyo (Kabag Umum), PT. SIER tidak terlibat secara

---

[5] Wawancara tanggal 3 Mei 2002

langsung. Meski demikian, dengan tersedianya fasilitas umum, khususnya masjid, diharapkan dapat membantu meningkatkan pembinaan mental spiritual buruh pabrik yang ada di sekitarnya melalui beberapa kegiatan, antara lain PHBI (peringatan hari besar Islam), pengajian rutin, pendalaman baca tulis al-Qur'an, dan sebagainya. Pengelolaan masjid dan segala aktivitas keagamaan tersebut selanjutnya diserahkan pada masyarakat sekitar, dengan tetap mengajak PT. SIER untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Selanjutnya, pendapat PT. SIER tentang rencana pendirian pesantren industri ini, ternyata sangat setuju, tetapi dalam pengelolaannya tidak hanya melibatkan PT. SIER semata, juga pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya serta pemerintah daerah.

2. Ngoro Industri Persada (NIP)

NIP merupakan perusahaan swasta murni yang dikelola Darmala, berdiri sejak tahun 1991. NIP mengelola 60 perusahaan di wilayah industri Ngoro, Mojosari, Mojokerto yang melibatkan kurang lebih 3.600 karyawan. Dari jumlah karyawan tersebut menurut kebijakan perusahaan, 40% di antara mereka diambilkan dari penduduk sekitar. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar perusahaan dan pemerintah setempat. Meski demikian, proses rekrutmen karyawan tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya dan profesionalitas. Hanya saja, karyawan yang diambil dari wilayah sekitar tetap memperoleh prioritas dari perusahaan.

Terkait dengan hadirnya pesantren buruh pabrik ini, Bapak Soerojo (Kepala Bagian Personalia) mengatakan bahwa pembinaan keagamaan perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Khusus pembinaan keagamaan di NIP, dipusatkan di masjid "al-Mubarak", masjid yang disediakan perusahaan. Pembinaan keagamaan diwujudkan dalam bentuk pemberian fasilitas untuk

pengajian dalam rangka PHBI dan khatib Jum'at. Semua pembinaan keagamaan dilakukan pada waktu siang hari (11.30-13.00 WIB). Dalam wujud yang berbeda, pembinaan keagamaan NIP dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masjid-masjid yang ada di sekitar perusahaan serta pemberian bantuan finansial untuk pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan di masjid-masjid tersebut. Dalam melaksanakan pembinaan keagamaan NIP dibantu berbagai pihak, di antaranya; MWC NU Mojosari, GP Ansor serta pihak Darmala sendiri. Dalam hal ini, pihak Darmala biasanya diposisikan sebagai bendahara. NIP setuju dengan keberadaan pesantren buruh pabrik, karena dianggap bernilai positif baik bagi pihak perusahaan sendiri, karyawan, dan masyarakat sekitarnya.

C. Sikap dan Pandangan Kalangan Birokrat, Ormas Islam, dan Pakar Pendidikan

1. Kalangan Birokrat

Kalangan birokrat yang bisa dimintai keterangan terkait dengan permasalahan penelitian ini diwakili oleh Kasi pengurus Depag Wilayah Jawa Timur yang bernama Drs. Ahmad Suyuthi, Ms. Baginya, pesantren buruh pabrik ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, mengingat visi dan misi yang diembannya begitu mulia, tampaknya keberadaan pesantren industri ini adalah suatu hal yang tidak boleh ditunda terlalu lama, dalam artian bisa diwujudkan dengan segera. Tentu, yang demikian itu perlu adanya kerja sama berbagai instansi yang terkait, misalnya Departemen Agama, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perumnas, pihak pengelola pabrik dan sebagainya. Menurutnya, jika semua instansi yang terkait tersebut saling bahu-membahu dan punya kesamaan visi dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa ini, khususnya bagi para karyawan buruh pabrik, maka gagasan

tentang pesantren industri ini tidak mustahil akan menjadi suatu kenyataan.

Menurutnya, saat ini sedang dikembangkan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang sasarannya adalah masyarakat luas yang tidak mampu dan tidak punya kesempatan memasuki pendidikan jalur formal (sekolah), termasuk sebagian peserta didiknya adalah para karyawan buruh pabrik dengan tujuan untuk memberantas buta huruf. Sistem pengajaran yang dikembangkan dalam PLS tersebut, menggunakan sistem kelompok belajar (kejar), yang terdiri dari kejar paket A, kejar paket B dan kejar paket C. Selanjutnya, bagi mereka yang telah menyelesaikan paket A1 sampai dengan A20, maka mereka dianggap setara dengan tamatan sekolah dasar (SD), begitu juga untuk paket B1 sampai dengan B20 mereka dianggap setara dengan lulusan SLTP dan bagi mereka yang telah menyelesaikan paket C1 sampai dengan C20, sama dengan SLTA.

Sebenarnya, sistem belajar melalui kejar paket A, B, dan C tersebut sangat bagus, hanya menurutnya, masih terdapat kekurangan dan ini justru merupakan persoalan yang sangat urgen bagi masa depan peserta didik itu sendiri, yakni tidak diajarkan materi agama dalam sistem kejar tersebut. Dengan demikian, ada sesuatu yang terabaikan dalam penyusunan materi pengajarannya. Bertitik tolak pada kenyataan di atas, maka kehadiran pesantren buruh pabrik ini menjadi sebuah solusi alternatif yang bagus. Dalam arti, di satu sisi turut mensukseskan program pemberantasan buta huruf melalui materi pengajaran umum, di sisi lain memberikan materi agama untuk bekal bagi kehidupan di akhirat kelak. Selain itu, mengingat umumnya para buruh berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keterampilan yang memadai, maka dalam pesantren industri itu nanti sebaiknya diajarkan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan santri buruh.

Mengenai materi agama yang diajarkan, sebaiknya jangan terlalu tinggi, yang terpenting adalah bagaimana mereka secepatnya bisa membaca dan menulis al-Qur'an dengan baik, bisa melakukan shalat dengan sempurna lengkap dengan bacaannya, bagaimana mereka bisa mengerti tentang cara mengeluarkan zakat dan sebagainya. Jadi, hendaknya kurikulum yang diberikan di pesantren industri ini mengarah pada amaliah-amaliah praktis dan mudah dilaksanakan.

Terkait dengan alokasi waktu belajar, aturan yang ditegakkan seharusnya disesuaikan dengan jam kerja para buruh itu sendiri, dan aturan yang dibuat jangan ketat dan membebani mereka. Kalau di antara mereka ada yang melanggar, hukuman yang diberikan tidak bersifat fisik, tapi lebih mengedepankan asas edukatif. Semua ini adalah demi keberhasilan program yang telah disusun di pesantren industri tersebut. Lebih jauh dari ini semua, sebaiknya dalam penyusunan kurikulum para santri ikut dilibatkan, agar mereka lebih termotivasi untuk lebih giat belajar sesuai dengan pilhan yang telah disepakati. Begitu pula dalam pembuatan segala peraturan dan penyusunan jadwal belajar, akan lebih efektif, manakala mereka juga disertakan.

Berdasarkan sistem belajar yang dikembangkan melalui PLS dengan kejar paket tersebut, maka strategi belajar yang cocok untuk diterapkan di pesantren industri ini adalah dengan sistem modul (pola belajar mandiri). Artinya, para santri sudah mempunyai buku-buku paket yang bisa dipelajari kapan saja dan di mana saja sehingga mereka tidak selalu menggantungkan sepenuhnya dengan guru atau pembina. Pertemuan dengan guru tersebut, disesuaikan dan disepakati bersama menurut kebutuhan.

Adapun mengenai kebutuhan biaya atau ongkos yang harus ditanggung oleh santri, sebaiknya tidak terlalu memberatkan mereka (tidak mahal). Karena, misi pesantren industri ini, selain memberikan pembinaan mental spiritual, juga untuk mening-

katkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan gagasan ini, di samping memberikan pembinaan mental spiritual, juga meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan gagasan ini sudah menjadi keharusan adanya kerja sama antara berbagai instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

2. Ormas Islam (Muhammadiyah dan NU)

Tokoh Muhammadiyah yang dimintai pandangan mengenai pesantren buruh pabrik adalah Drs. H. Najib Hamid, sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ia aktif berdakwah di berbagai kota di Jawa Timur, pernah nyantri di Pondok Modern Muhammadiyah Paciran Lamongan dan Pondok Pesantren Manarul 'Ilmi yang diasuh oleh KH. Mu'ammal Hamidy, Lc. Sebagai orang yang lama belajar dan hidup di pesantren, ia mengetahui betul dunia pesantren dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Berkaitan dengan kemungkinan (keberadaan) pesantren buruh pabrik, ia memberikan beberapa pandangan dan harapan.

Bagi Bapak Najib Hamid, pesantren buruh pabrik dapat dianggap sebagai fenomena baru. Sebab, selama ini masyarakat hanya mengenal pesantren konvensional dan pesantren modern. Menurutnya, pesantren konvensional adalah pesantren yang menitikberatkan pada ajaran ilmu-ilmu agama yang bersumberkan kitab-kitab klasik (kitab kuning), sementara pesantren modern di samping mengajarkan ilmu-ilmu agama juga mengajarkan ilmu-ilmu rasional, olah raga, dan ketrampilan lainnya. Nah, berkaitan dengan pesantren buruh pabrik, pesantren yang santri/santriwatinya berprofesi sebagai buruh pabrik/pekerja, Bapak Najib Hamid menganggap sebagai hal yang baru. Meski relatif baru, namun demikian keberadaannya harus tetap didukung. Dukungan tersebut dianggap penting mengingat, selama ini masih banyak komunitas umat Islam belum tersentuh dakwah Islam. Dalam

kaitan dengan ini, buruh pabrik/pekerja industri dapat dianggap sebagai salah satu sasaran dakwah yang belum banyak digarap. Apalagi, selama ini ada anggapan bahwa perusahaan belum memberikan fasilitas bimbingan mental agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar norma masyarakat, dan ajaran agama. Belum lagi, mereka kebanyakan merupakan orang urban dengan ragam latar belakang dan pendidikan rendah. Mereka jelas mengalami kekagetan ketika bersentuhan dengan budaya metropolis.

Untuk tahap awal model pesantren buruh pabrik tidak jauh berbeda dengan pesantren pada umumnya, misalnya dipimpin oleh seorang pengasuh (kiai), dibina oleh guru-guru, dilengkapi sarana ibadah (masjid/mushalla), tempat belajar, MCK, kantin, dan tempat olah raga. Hal yang penting diperhatikan adalah jenis pelajaran yang diajarkan. Menurut Najib Hamid, materi yang diajarkan di pesantren ini haruslah pelajaran dasar agama, seperti tauhid, cara beribadah, mengaji al-Qur'an, dan akhlak. Hal ini penting, mengingat pesantren berhadapan dengan jenis santri yang tidak hanya belajar, melainkan juga bekerja. Bahkan bisa jadi, pilihan tinggal di pesantren itu didasarkan pada pertimbangan ekonomis (hidup hemat). Maka pesantren juga harus mempertimbangkan alasan ini. Artinya, sebisa mungkin biaya hidup di pesantren juga harus murah; tidak lebih mahal dari kos-kosan.

Ketika ditanya mengenai model ideal pesantren buruh pabrik, Najib Hamid mengatakan bahwa hal itu bersifat pengembangan. Misalnya, pilihan lokasi pesantren yang harus dekat dengan tempat kerja, mengadakan kerja sama dengan pihak perusahaan dan pemerintah, penambahan pelajaran-pelajaran yang sifatnya menunjang keahlian santri/santriwati di dunia kerja, serta penambahan sarana dan prasarana. Kerja sama dengan pihak perusahaan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pihak pesantren. Sebab, bisa jadi perusahaan memberikan fasilitas yang memadai terhadap pesantren.

Menurutnya, kurikulum pelajaran pesantren buruh pabrik ada dua: agama dan keterampilan. Pelajaran-pelajaran agama tetap menjadi kurikulum pokok, sebab namanya juga pesantren, maka harus mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kitab-kitab yang diajarkan harus yang sederhana dan mudah dicerna oleh buruh pabrik. Jenis kitab yang diajarkan adalah tauhid, ibadah, dan akhlak. Sedangkan pelajaran keterampilan sifatnya hanya penunjang, dan ini sangat terkait dengan kebutuhan santri /santriwati. Di sinilah pengasuh/ pimpinan pesantren harus berembug dengan santri/santriwati mengenai pilihan pelajaran keterampilan, misalnya, mengetik, komputer, menjahit, memasak, mesin, permebelan, dan lain-lain.

Mengenai metode pembelajaran, menurutnya, harus disesuaikan dengan keadaan santri/santriwati. Misalnya, menggunakan metode pembelajaran orang dewasa dengan memberikan banyak kesempatan kepada mereka untuk aktif, dengan menggunakan bahasa pengantar yang mudah dicerna, dan untuk pelajaran ketrampilan tentu saja harus lebih banyak menekankan pada praktik. Mengenai waktu belajar, harus disesuaikan dengan kesempatan santri/santriwati. Dalam hal ini pengasuh/pimpinan pesantren harus memperhatikan waktu kerja (*shift*) buruh pabrik. Artinya, bagi mereka yang kerja pagi, maka waktu belajarnya adalah malam, sementara mereka yang kerja malam, waktu kerjanya adalah pagi hari.

Selanjutnya, tokoh NU yang dimintai pendapatnya tentang pesantren ini adalah Bapak KH. Moch. Imam Chambali (Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa "Al-Jihad" Surabaya). Di samping sebagai pengasuh pondok pesantren, ia juga seorang mubaligh kondang di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya. Ia juga membina berbagai majelis taklim, mulai dari masyarakat biasa hingga kalangan perkantoran (birokrat) di Surabaya.

Bapak Imam Chambali menyambut baik, bahkan akan turut membantu (terlibat langsung) dalam pembinaan keagamaan jika diperlukan. Dalam hal ini, ia menyarankan dibentuknya kelompok *istighasah* bagi karyawan buruh, dan diisi dengan ceramah agama sebelum *istighasah* dimulai. Ini dimaksudkan untuk membina mental spiritual mereka. Karena tanpa pendekatan semacam dzikir bersama dan semacamnya, rasanya sulit menggapai ketenangan batin sebagaimana diharapkan oleh setiap orang.

Sebagaimana pendapat Najib di atas, Imam Chambali juga setuju kalau pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang dibantu oleh dewan guru. Dalam arti, seorang tokoh kiai yang tidak terlibat dalam politik praktis dan bisnis untuk sepenuhnya berkonsentrasi pada pembinaan spiritual buruh. Sebab, jika kiai yang ditokohkan terlibat dalam kegiatan politik dan bisnis, maka akan mempengaruhi keikhlasannya dan mengurangi kewibawaannya. Dengan kata lain, ia harus mampu menjadi tokoh spiritual di kalangan buruh dengan mengedepankan prinsip ikhlas dan tawakkal.

Mengenai materi yang diajarkan, meliputi kajian hukum Islam (fiqh), pembinaan akhlak dan ketauhidan. Jika memungkinkan bisa ditambah keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan para karyawan itu sendiri, seperti menjahit, kursus potong rambut, tata rias pengantin, dan sebagainya. Semua jenis materi yang diajarkan tersebut, sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi buruh itu sendiri, yakni diatur sedemikian rupa agar tidak berbenturan dengan waktu kerja di pabrik.

3. Pakar Pendidikan

Pakar pendidikan yang dimintai keterangan tentang pesantren ini adalah Arief Furqon, Direktur Binperta Islam Depag RI, mantan Pembantu Rektor I IAIN Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya, pesantren buruh merupakan lembaga pendidikan Islam sejenis pesantren yang bertujuan memberikan bimbingan keagamaan

kepada buruh yang terletak di kawasan industri. Jadi, ia menggabungkan unsur-unsur pesantren tradisional dengan nilai-nilai industri.

Adapun terkait dengan model pembinaan buruh pabrik yang efektif, haruslah mampu menjembatani atau mengakomodasi dua realitas yang berbeda: realitas keagamaan dan realitas industri. Karena itu, kehadiran pesantren ini harus bersifat komprehensif, tidak saja menyangkut persoalan-persoalan keagamaan atau ilmu ukhrawi, tetapi juga mengakomodasi perkembangan mutakhir dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsekuensinya, kurikulum yang diajarkannya harus bersifat komprehensif, meliputi dua sisi keilmuan yang selama ini dianggap dualistik, yakni ilmu agama dan ilmu umum, bila perlu ditambah dengan keterampilan. Dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan di pesantren buruh ini, kegiatan yang harus ditonjolkan adalah bukan saja kegiatan yang berorientasi pada latihan ritual-spiritual semata, melainkan juga kegiatan yang bertujuan meningkatkan etos kerja dan keterampilan santri buruh.

Tidak seperti pesantren tradisional pada umumnya yang mengandalkan pendekatan *sorogan* dan *wetonan*, metode pembelajaran dalam pesantren buruh pabrik ini bersifat dialogis dengan cara membuka kesempatan tanya-jawab seluas-luasnya kepada santri buruh. Hal ini disebabkan santri buruh lebih banyak didominasi oleh santri dewasa, bahkan sudah berumah tangga. Sebagai sebuah pesantren yang berusaha menggabungkan ilmu umum dengan ilmu agama, maka harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung penggabungan itu. Misalnya, ruang praktik (workshop), pelayanan teknologi dan informasi seperti internet, pelayanan kesehatan yang memadai, laboratorium bahasa, dan sebagainya.

Bab VII
Konstruksi Model Pesantren Buruh Pabrik

A. Tujuan Pendirian dan Pendidikan Pesantren Buruh Pabrik (Industri)

Selama ini belum ditemukan dari beberapa embrio pesantren buruh pabrik tujuan dari pembentukan dan pendidikan dalam bentuk tertulis. Tujuan pembentukan dan pendidikan di embrio pesantren buruh pabrik pada umumnya mempunyai titik tekan yang sama, meskipun pola pembinaannya yang berbeda. Embrio pesantren buruh pabrik bertujuan memberikan pengetahuan agama sekaligus sebagai kontrol sosial pada masyarakat, khususnya buruh pabrik, sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang diakibatkan oleh modernisasi.

Kasus berdirinya majelis taklim Ya Salam misalnya, dilatari oleh kondisi buruh pabrik yang memakai rok mini, pergaulan tidak islami (bebas), dan kejenuhan mereka dalam melakukan rutinitas sehari-hari di pabrik. Kondisi inilah yang menggugah hati pendiri, Ustadz Salam, untuk merangkul mereka dalam wadah majelis taklim dengan berbagai aktivitas keagamaan.

Demikian juga berdirinya Lembaga Kajian Keislaman (LKK) Jama'ah Tauhid oleh Tamani Nasrullah. Motif pendirian LKK ini berangkat dari kondisi masyarakat sekitar yang memprihatinkan. Banyak anak yang *notabene* anak buruh pabrik di sekitar lingkungan

rumahnya yang terjerumus dalam perbuatan negatif, seperti pesta minuman keras dan narkoba. Melalui *riyadhah* dan amalan yang diajarkan, para buruh dan masyarakat sekitar yang rata-rata tergolong awam pengetahuan agama mendapat gemblengan batin sehingga mereka dapat melepaskan diri dari jeratan barang haram.

Embrio berdirinya pesantren buruh pabrik di Pondok Al-Istiqomah dan Kalijaga, sedikit berbeda dari kedua contoh di atas. Orang tua Ustadz Muflih, pendiri Pondok Al-Istiqomah, rela mengorbankan areal tanah yang ditempati bangunan kos-kosan untuk diubah menjadi pesantren guna memberikan kesempatan pada puteranya untuk menyebarkan ilmu yang telah didalaminya di Pesantren Tambak Beras, Jombang. Meskipun tujuan semula dikhususkan untuk pesantren konvensional, pada akhirnya banyak santrinya yang berstatus sebagai buruh pabrik, sehingga tujuannya pun sedikit berubah, yaitu memberikan bekal kepada santri untuk tidak terimbas akibat negatif industrialisasi dan tetap konsisten memegang agama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Demikian juga pendirian Pesantren Kalijaga. Kurangnya institusi pendidikan agama di daerah Simomulyo, Surabaya dan banyaknya industri berskala besar yang mulai berdiri di sekitarnya, menggugah hati K.H. Muchsin Nurhadi untuk mengadakan pengajian rutin di mushalla, yang selanjutnya dengan mendapat dukungan warga setempat, akhirnya dikembangkanlah menjadi Pesantren Kalijaga. Tujuan pendirian pesantren ini adalah untuk menjaga kemurnian lingkungan sekitar dari kontaminasi budaya industri yang terkesan mengesampingkan pentingnya ilmu agama.

Pengelola Pesantren Al-Asy'ari (Sidoarjo) juga menyatakan bahwa tujuan pendirian pesantrennya adalah mencegah para santri terkena "polusi" yang tidak sehat dari lingkungan yang tidak Islami. Banyaknya industri dan urbanisasi menimbulkan ekses-ekses negatif yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat

yang tinggal di daerah tersebut. Upaya mencegah masyarakat, khususnya santri, dari kehidupan yang tidak islami menjadi prioritas utama Pesantren Al-Asy'ari.

Hal-hal yang mencegah dari keterpengaruhan santri (buruh pabrik) dan masyarakat pada umumnya dari ekses-ekses negatif akibat modernisasi dan industrialisasi mendominasi tujuan utama pendirian pesantren dan aktivitas keagamaan di keempat wilayah objek penelitian ini. Hasil wawancara dengan para pengelola (kiai/ustadz) pesantren buruh pabrik, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pendirian dan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian santri yang Islami, yaitu buruh pabrik yang mempunyai kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral (*akhlak al-karimah*) sebagai pedoman perilaku sehari-hari.

Dalam perkembangannya, tujuan utama pesantren yang lebih terfokus pada pembinaan mental spiritual dikembangkan pada aspek *skill* (keterampilan) melalui kegiatan ekstra kurikuler. Paling tidak ditemukan beberapa pesantren yang memberikan keterampilan tambahan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM santri. Di Pesantren Al-Istiqomah, santri diajarkan berbagai keterampilan seperti kursus mengetik, komputer, dan menjahit. Penambahan keterampilan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat kebutuhan yang perlu dimiliki oleh santri yang *notabene* buruh pabrik. Dengan keterampilan yang dimiliki, santri bisa mendapat promosi di tempat kerjanya, atau mencari posisi yang lebih baik di perusahaan lain. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa rata-rata santri di embrio pesantren buruh pabrik menjadi buruh kelas bawah. Hal ini juga tidak terlepas dari rendahnya ijazah dan keterampilan yang dimiliki. Tambahan keterampilan yang dimiliki dapat meningkatkan nilai tawar (*bargain position*) buruh pabrik terhadap perusahaan. Atau dalam kondisi yang krusial di mana

santri buruh pabrik di-PHK, maka santri bisa berwiraswasta dengan keterampilan yang dimilikinya.

Di Pesantren Al-Istiqomah, keterampilan menjahit setidaknya mempunyai dampak positif. Seragam santri Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) di Pesantren Al-Istiqomah semuanya dikerjakan oleh para santri, sehingga selain membantu orangtua santri TPQ dalam menekan harga beli seragam, santri yang mengerjakan "order" tersebut juga mendapatkan tambahan upah, selain uang gaji dari tempat mereka bekerja.

Maka perlu dirumuskan kembali tujuan pembentukan dan pendidikan pesantren, khususnya pesantren buruh pabrik. Dari hasil kajian pustaka dan lapangan dapat dirumuskan bahwa tujuan pendirian pesantren buruh pabrik yang ideal, setidaknya mencakup tiga aspek, yaitu pembinaan mental spiritual (pengetahuan agama), peningkatan pengetahuan umum, dan pemberian keterampilan tambahan bagi santri. Aspek yang pertama tetap menjadi tujuan utama (prioritas utama). Hal ini sudah menjadi *khittah* dari sejak berdirinya pesantren di Indonesia, bahwa pesantren merupakan institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu agama untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan santri sehari-hari. Aspek yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan umum sangat penting diberikan karena adanya suatu fakta bahwa banyak buruh pabrik yang belum menuntaskan pendidikan formalnya, baik tingkat dasar (SD/MI dan SMP/MTs) maupun tingkat lanjut (SMU/MA). Demikian juga dengan pemberian keterampilan sebagai upaya peningkatan profesionalitas santri buruh pabrik dipandang signifikan. Dengan menekankan peningkatan ketiga aspek sebagai tujuan, pesantren buruh pabrik diharapkan dapat mencetak manusia yang sempurna, yang siap menghadapi segala perubahan yang diakibatkan oleh industrialisasi dan modernisasi.

B. Elemen Inti Pesantren Buruh Pabrik

Bangunan model pesantren buruh pabrik yang ideal selayaknya dibuat dengan berpijak pada hasil penelitian sebelumnya dan berdasar pada sikap dan pandangan buruh pabrik, pengelola areal perindustrian, birokrat dan pakar pesantren buruh pabrik. Sebagai tahap awal, terlebih dahulu dipaparkan elemen dasar pembentukan sebuah pesantren yang masih dikategorisasikan sebagai embrio pesantren buruh pabrik. Pemaparan tersebut ditunjang dengan hasil curah pendapat dari para birokrat dan ahli, sebagai bahan komperasi guna merumuskan konstruksi model yang final.

Menurut Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya *Tradisi Pesantren*, ada lima elemen dasar pembentukan sebuah pesantren, yaitu kiai, santri, kitab kuning, pemondokan, dan masjid/mushalla. Bahkan ia menyatakan bahwa jika salah satu dari lima elemen tidak dipenuhi, institusi tersebut belum bisa disebut pondok pesantren. Tentu saja syarat yang diajukan oleh Dhofier mungkin cocok untuk pesantren konvensional. Hal ini karena realitas di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan oleh embrio pesantren buruh pabrik. Elemen-elemen yang ada di pesantren buruh pabrik cukup variatif; tidak semua embrio pesantren buruh pabrik dapat memenuhi lima elemen tersebut.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, syarat yang diajukan Dhofier tidak cocok lagi dengan melihat perubahan-perubahan di segala bidang, termasuk perkembangan pesantren yang terimbas juga oleh industrialisasi. Kondisi kesempatan kerja, waktu, sarana prasarana, dan sebagainya "mendesak" institusi pendidikan tertua di Indonesia ini untuk menyesuaikan dengan industrialisasi yang tidak dapat lagi dielakkan. Meskipun demikian, embrio pesantren buruh pabrik berikut elemen yang melekat pada dirinya dapat dikategorikan sebagai pesantren dengan mengacu pada pendapat Kafrawi, yang mengklasifikasikan pesantren dalam empat kategori.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, Kafrawi membagi pesantren menjadi empat kategori: *pertama,* pesantren sederhana yang hanya memiliki masjid dan kiai; *kedua,* elemen yang dimiliki sebagaimana pesantren sederhana ditambah dengan elemen pemondokan bagi santri; *ketiga,* pesantren yang memiliki elemen sebagaimana yang dimiliki oleh kategori kedua ditambah dengan elemen madrasah; dan *keempat,* pesantren yang memiliki elemen kiai, masjid, pemondokan, madrasah, dan ditunjang oleh elemen unit-unit keterampilan, seperti peternakan, pertanian, kerajinan, koperasi, sarana olahraga, dan lain-lain. Dengan demikian, elemen yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan yang disebut pesantren cukup fleksibel. Dengan kata lain, syarat yang diajukan Dhofier bisa tidak berlaku dengan melihat perkembangan pesantren, khususnya pesantren buruh pabrik saat ini.

Sebelum membahas elemen-elemen yang perlu dimiliki pesantren buruh pabrik yang ideal, tabel berikut ini dapat menggambarkan elemen-elemen yang ada di embrio pesantren buruh pabrik:

Nama Pesantren	Kiai	Santri	Kitab Kuning	Pemon-dokan	Masjid
A. Alih Fungsi Pesantren Konvensional					
1. Al-Mubarok I	✓	✓	✓	✓	✓
2. Al-Asy'ari	✓	✓	✓	✓	✓
3. Al-Mubarok II	✓	✓	✓	✓	✓
4. Al-Karimi	✓	✓	✓	✓	✓
5. Nurudh Dholam	✓	✓	✓	✓	-
6. Sunan Kalijaga	✓	✓	✓	✓	-
B. Alih Fungsi Kos-Kosan					
Al-Istiqomah	✓	✓	✓	✓	-
C. Masjid/Mushalla Pusat Kegiatan					
Masjid Baitullah	✓	✓	-	-	✓
D. Pembinaan Keagamaan di Pabrik					
PT. Ajinomoto	✓	✓	-	-	✓
E. Majelis Taklim					
1. Jama'ah Tauhid	✓	✓	-	✓	✓
2. PPNA Al-Rasyid	✓	✓	-	-	-
3. Ya Salam	✓	✓	✓	-	-

Berikut penulis paparkan masing-masing elemen yang ada di masing-masing embrio pesantren buruh pabrik yang selanjutnya dipakai pijakan untuk membuat model pesantren buruh pabrik.

1. Kiai

Kiai merupakan elemen tepenting dalam konteks pendirian pesantren. Keberadaan pesantren selalu diawali oleh seseorang yang peduli untuk menyebarkan agama kepada masyatakat sekitar. Proses transmisi keilmuan (pengajian) dari orang tersebut kepada masyarakat sekitar yang biasanya melibatkan jumlah masyarakat yang kecil pada awalnya, lambat laun semakin besar dan menarik masyarakat luar untuk ikut mengaji. Forum pengajian yang biasanya dilaksanakan secara informal lambat laun dengan mengingat jumlah santri yang semakin banyak akhirnya diformalkan menjadi sebuah institusi pendidikan yang bercirikan Islam yang kemudian disebut pesantren.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tidak satu pun pesantren yang tidak memiliki kiai. Keberadaan dan fungsi kiai di embrio pesantren buruh pabrik sebagai *key figure* sama dengan keberadaan dan fungsi kiai di pesantren konvensional. Sebagai kiai atau ustadz dari embrio pesantren buruh pabrik, mereka juga dihormati dan disegani sebagaimana kiai di pesantren konvensional, walaupun usia mereka rata-rata terbilang masih muda.

Latar belakang pendidikan kiai atau ustadz yang memimpin embrio pesantren buruh pabrik cukup variatif. Secara umum, mereka lulusan pondok pesantren konvensional seperti Tambak Beras, Tebuireng, dan sebagainya. Selain itu, sebagian besar mereka juga mengenyam pendidikan lembaga formal seperti Madrasah Aliyah dan atau Institut Agama Islam, baik negeri maupun swasta. Kondisi objektif latar belakang pendidikan para kiai embrio pesantren buruh pabrik sebenarnya sangat cocok dengan harapan para buruh pabrik tentang siapa dan latar belakang

pendidikan yang perlu dimiliki oleh pemimpin pesantren buruh pabrik ke depan. Menurut mereka, sebagaimana disebut dalam bab sebelumnya, pesantren buruh pabrik yang akan dibangun hendaknya dipimpin oleh seorang kiai/ustadz yang memiliki perpaduan latar belakang pendidikan pesantren konvensional dan pendidikan formal, khususnya pendidikan tingkat tinggi.

Harapan mereka bisa dipahami karena dengan perpaduan itu, setidaknya dapat memberikan ilmu dan wawasan yang luas sebagai bekal santri untuk menjalani hidup ke depan. Selain itu, semakin luas pengetahuan yang dimiliki kiai, pesantren buruh pabrik akan tetap bisa "berkawan" dengan perkembangan industri yang demikian pesat. Ini berarti bahwa pesantren akan selalu menerima segala pembaruan dan inovasi, baik berbentuk pengetahuan maupun *skill,* terlebih hal tersebut memang dibutuhkan oleh para santri buruh pabrik, tanpa meninggalkan fungsi pesantren sebagai filter atau bahkan bisa memberikan *added value* yang bersifat religius terhadap pembaruan atau inovasi.

Dengan perpaduan pendidikan pesantren konvensional dengan pendidikan tinggi formal yang dimiliki seorang kiai pesantren buruh pabrik, maka transmisi keilmuan yang begitu "disakralkan" di dunia pesantren konvensional bisa dieliminir dengan keterbukaan sebagaimana yang diajarkan di perguruan tinggi (Islam).

2. Santri

Embrio pesantren buruh pabrik di areal perindustrian juga mempunyai salah satu elemen dasar, yakni santri yang statusnya juga seorang pekerja di pabrik atau perusahaan. Tertariknya mereka untuk menjad santri dari sebuah pesantren buruh pabrik tidak terlepas dari beberapa alasan, misalnya mereka memang merasa 'haus' terhadap pengetahuan agama; merasa kehidupannya monoton bagaikan mesin yang menggiring pada kondisi resah dan

"kesepian"; merasa dengan memasuki dunia pesantren, persoalan yang dihadapinya segera mendapatkan jalan keluar.

Harus diakui bahwa secara umum pesantren yang berdiri di sekitar wilayah perindustrian pada awalnya diorientasikan pada pengajaran ilmu agama khusus untuk santri murni. Namun, sejalan dengan perkembangan areal perindustrian yang begitu pesat, berikut dampak negatif yang meliputinya, akhirnya pesantren tersebut menerima juga santri yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Latar belakang pendidikan buruh pabrik dan tingkat usia yang cukup beragam juga merupakan sebuah fenomena yang harus diterima oleh embrio pesantren buruh pabrik. Persoalannya adalah apakah mereka diharuskan mengikuti materi pengajaran yang sudah ditetapkan pesantren tersebut, atau mereka harus dibagi menjadi beberapa kelas atau kelompok belajar sesuai dengan usia atau kapasitas pengetahuan yang telah dimilikinya.

Dari pengalaman embrio pesantren buruh pabrik yang menjadi fokus penelitian ini, beberapa pondok mempunyai bentuk klasikal yang terdiri dari beberapa tingkat, namun ada juga yang model pengajian umum, atau model pengajian al-Qur'an. Santri diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan apabila waktu belajar bertepatan dengan waktu bekerja, maka santri diizinkan untuk tidak mengikuti pelajaran dengan syarat dia belajar dari santri pekerja lainnya di lain waktu.

Dilihat dari usia, santri yang belajar di embrio pesantren buruh pabrik rata-rata berusia antara 17-30 tahun dengan status *single* (belum menikah). Pesantren juga tidak membatasi waktu belajar bagi santri selama ia mau belajar dan belum menikah. Kalau sudah menikah, mereka masih diperbolehkan menjadi santri, tetapi harus tinggal di luar pondok, sebab pesantren tidak menyediakan pemondokan bagi mereka yang sudah berkeluarga.

Dipilihnya batasan usia ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi lapangan bahwa buruh yang dibutuhkan oleh suatu pabrik, biasanya berkisar usia 17 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA. Namun, untuk pesantren buruh pabrik model tidak mensyaratkan batasan minimal pendidikan calon santri. Demikian juga dengan batasan maksimal, pesantren model tidak membatasi usia maksimal sehingga kesempatan bagi buruh pabrik terbuka luas.

Dengan demikian, pesantren buruh pabrik ideal, sebagaimana pesantren konvensional, juga mempunyai (dua) jenis santri, yaitu santri mukim, santri yang tinggal di pemondokan pesantren; dan santri *kalong/nduduk*, yaitu santri yang belajar di pondok, tetapi bertempat tinggal di luar pesantren. Adanya klasifikasi jenis santri kedua, yakni jenis santri *kalong/nduduk* merupakan antisipasi kapasitas pemondokan di pesantren buruh pabrik ideal dengan jumlah santri pekerja yang ada, dan sebagai upaya merangkul mereka yang ingin belajar, tetapi telah berkeluarga/menikah.

3. Kitab Kuning

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa pembelajaran di embrio pesantren buruh pabrik terfokus pada pengajaran al-Qur'an, fiqh, tauhid, dan akhlak (tasawuf). Diajarkannya pengajaran al-Qur'an hampir di semua jenis pesantren ini, dapat dimaklumi mengingat buruh pabrik dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan rata-rata dari sekolah umum, masih lemah dalam membaca al-Qur'an. Pengajaran membaca al-Qur'an sendiri merupakan dasar dari keseluruhan pembelajaran di institusi pendidikan Islam, termasuk pesantren. Setelah menguasai cara baca al-Qur'an, santri bisa melanjutkan pembelajarannya pada kitab-kitab kuning.

Kitab kuning yang diajarkan berkaitan dengan masalah fiqh, tauhid, dan akhlak. Kitab kuning yang berintikan pengajaran fiqh mendapat porsi terbesar, hal ini berkaitan dengan *fiqh oriented* yang umumnya dikembangkan di pesantren-pesantren di Indonesia,

termasuk di embrio pesantren buruh pabrik. Bisa dimaklumi, karena pengajaran fiqh yang berisikan masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya dapat dijadikan pedoman bagi buruh pabrik dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Demikian pula kitab kuning yang berkaitan dengan tauhid dan akhlak. Sedang kitab kuning yang berkaitan dengan tafsir dan hadits tidak begitu banyak diajarkan.

Pengajaran kitab ini tentunya sangat tepat jika tujuan pembelajaran mencetak santri yang akan menjadi ulama. Namun, tanpa mengurangi makna pentingnya pengajaran kitab kuning, idealnya pengajaran kitab kuning bisa dikembangkan, untuk tidak mengatakan dihapuskan, dengan pengajaran "kitab putih" atau terjemahan dari kitab kuning tersebut. Model demikian akan bisa mengefektifkan dan mengefisienkan waktu belajar santri.

4. Pemondokan

Pemondokan bagi embrio pesantren buruh pabrik bukanlah sesuatu yang sangat krusial. Bagi santri *kalong,* mereka bisa belajar tanpa harus tinggal di pesantren. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa pemondokan bagi santri buruh pabrik cukup memprihatinkan. Selain masalah kebersihan dan ventilasi udara, ruangan yang terbilang tidak besar dihuni untuk beberapa bahkan puluhan santri, sehingga buruh pabrik yang bekerja dan belajar di pesantren sedikit banyak tidak bisa istrahat dengan baik. Pandangan sebagian buruh pabrik menginginkan bahwa kamar pondok yang ideal adalah ukuran 3x4 m dengan penghuni sekitar 2-4 santri. Harapan buruh pabrik ini bisa dimaklumi, karena dengan ruang yang agak luas dan tidak begitu sesak, mereka nyaman beristrahat dan pada akhirnya juga bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan produktivitasnya, baik untuk bekerja maupun belajar di pesantren.

5. Masjid/Mushalla

Untuk mengonstruk pesantren buruh model yang ideal di areal perindustrian, keberadaan masjid merupakan keniscayaan, karena dari hasil wawancara dengan para pengelola, secara umum mereka menyediakan fasilitas umum, termasuk di dalamnya masjid. Tidak adanya masjid di beberapa embrio pesantren buruh pabrik bukan berarti mereka tidak menginginkan berdirinya masjid, tetapi terkendala oleh lahan dan dana yang tidak tersedia. Dengan demikian, masjid di pesantren bisa difungsikan sebagai tempat pembelajaran dan sebagai sarana menjalankan ibadah.

C. Elemen Penunjang Pesantren Buruh Pabrik

Elemen penunjang dari kelima aspek dasar sebuah pesantren seperti sarana kesehatan atau klinik, sarana olahraga, kantin, ruang kerja praktik, pelayanan informasi (wartel), koperasi juga perlu mendapat perhatian. Keberadaan sarana kesehatan atau klinik di pesantren buruh pabrik tidak diperuntukkan hanya bagi santri buruh pabrik yang menghuni pesantren, tetapi bagi seluruh buruh pabrik yang bekerja di areal perindustrian bahkan terbuka luas bagi masyarakat di sekitarnya. Keberadaan klinik didasari oleh sebuah kebutuhan bahwa sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja atau buruh pabrik sakit, maka klinik sudah bisa memberikan pertolongan pertama sehingga buruh pabrik, khususnya santri dapat selalu dijaga aspek keselamatan ataupun kesehatannya.

Keberadaan sarana olahraga juga penting dalam menjaga stamina dan kesehatan buruh pabrik. Badan lelah selepas kerja perlu diimbangi olahraga yang cukup. Tersedianya sarana olahraga, yang biasanya disediakan oleh pengelola areal perindustrian, merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan santri atau buruh pabrik pada umumnya untuk membuat fisik mereka *fresh* kembali sehingga bisa optimal dalam bekerja.

Kantin juga fasilitas yang perlu disediakan. Tersedianya kantin paling tidak, *pertama,* buruh pabrik tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk memasak; *kedua,* komposisi makanan dengan kadar gizi yang dibutuhkan bagi seorang buruh pabrik sudah dapat diperhitungkan; *ketiga,* kebersihan pondok dapat terpelihara. Kantin bagi santri buruh pabrik harus kompetitif, artinya tanpa mengurangi kualitas, kantin dapat memberikan harga yang relatif murah dibanding dengan harga di luar.

Ruang kerja praktik mempunyai arti yang signifikan. Keberadaannya merupakan sarana bagi santri buruh pabrik untuk meningkatkan kualitas dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tugas kerja. Apa yang dipraktikkan, tentunya perlu dilaksanakan *need assessment* kebutuhan santri buruh pabrik, sehingga keterampilan yang sudah terjadwal dalam kurikulum dapat memberikan nilai tambah bagi buruh pabrik. Demikian juga dengan sarana prasarana lainnya, seperti koperasi dan wartel, juga perlu dipertimbangkan keberadaannya, untuk memberikan layanan yang memadai kepada santri buruh pabrik dan karyawan buruh pabrik pada umumnya.

D. Fisibilitas Pendirian Pesantren Buruh Pabrik

1. Pembangunan Pondok Pesantren Buruh Pabrik

Pembangunan pondok pesantren yang dikhususkan bagi buruh pabrik sangat memungkinkan untuk direalisasikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, di antaranya pengelola areal perindustrian, seperti pengelola PT. SIER dan Ngoro Industri Persada (NIP), Dinas Permukiman Wilayah Jawa Timur, Perumnas Regional VI Timur, dan Jamsostek.

Menurut pengelola areal perindustrian, pendirian pesantren buruh pabrik sangat signifikan. Kabag Umum PT. SIER mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak keberatan bahkan mendukung

didirikannya pondok pesantren buruh pabrik di areal perindustrian. Dukungan itu dilatarbelakangi oleh, dalam pandangannya, kenyataan bahwa banyak buruh pabrik jarang bahkan tidak pernah mendapatkan sentuhan keagamaan sehingga pola perilaku mereka terkadang di luar kontrol. Kondisi ini juga yang melatarbelakangi PT. SIER melakukan pembinaan terhadap buruh pabrik, meskipun dalam lingkup yang sangat terbatas. Disediakannya masjid di lingkungan areal industri, memang diarahkan pada pembinaan mental spiritual buruh pabrik melalui khutbah Jum'at, PHBI, dan pendalaman baca-tulis al-Qur'an. Dalam konteks pembinaan keagamaan, PT. SIER baru sebatas hal tersebut di atas dan itu pun hanya diikuti buruh pabrik dengan jumlah yang terbatas.

Pola pembinaan keagamaan juga dilakukan oleh PT. NIP di Mojokerto. Pembinaan keagamaan dipusatkan di Masjid al-Mubarok. Kegiatannya berupa shalat Jum'at dan pengajian dalam rangka PHBI. Selain itu, pihak Darmala juga membantu secara finansial untuk pembiayaan keagamaan yang dilakukan oleh masjid-masjid di sekitar areal perindustrian.

Rencana pendirian pesantren di areal perindustrian mendapat respons yang positif dari Agung Prasetyo maupun dari pihak Darmala yang diwakili oleh Soerojo, Kepala Bagian Personalia. Keduanya mengatakan bahwa mereka sebagai pengelola perindustrian sebenarnya siap membantu, khususnya dalam hal penyediaan lahan. Meskipun demikian, mereka menekankan perlunya keterlibatan semua pabrik dalam menunjang eksistensi pesantren buruh pabrik, sekaligus perlunya koordinasi yang intens dengan berbagai pihak tentang pola dan mekanisme dalam pendirian dan pengelolaannya.

Pihak Perumnas Regional VI Jawa Timur juga menyambut baik rencana pembangunan model pesantren buruh pabrik di areal industri. Tanggapan positif tersebut disampaikan oleh Gede Ary,

Kepala Bagian Perencanaan Perumnas Regional VI Jawa Timur. Menurutnya, pembangunan asrama bagi buruh pabrik telah dilakukan pihak Perumnas bekerja sama dengan Pemerintahan Kota (Pemkot Surabaya), salah satunya berwujud rumah susun (rusun) di Warung Gunung. Oleh Perumnas, rusun yang dibangun ini disebut "Rusunawa" (Rumah Susun Sederhana Sewa). Rusun ini merupakan patungan (*share*) pihak Perumnas dengan Pemkot. Pihak Pemkot Surabaya menyediakan lahan, sementara Perumnas membangun rusun. Dalam hal pengelolaan rusun, seperti di Waru Gunung, diadakan kesepakatan (MoU) antara pihak Pemkot Surabaya dan Perumnas Regional VI. Karena kebutuhan rusun masih sangat besar, maka dalam waktu dekat juga akan dibangun Rusun di daerah Siwalankerto. Menurut pengamatan Bagian Perencanaan Perumnas Regional VI, kebutuhan masyarakat terhadap rusun masih sangat besar, khususnya bagi kaum urban, masyarakat pinggiran kota (sub-urban), dan masyarakat yang tinggal di perkampungan padat penduduk (rural).

Khusus di Waru Gunung, Gede Ary menyatakan bahwa ide awal pendirian rusun memang diperuntukkan bagi karyawan buruh pabrik, atau mereka yang sering disebut dengan "bulok" (bujang lokal). Hal ini karena daerah sekitar Waru Gunung merupakan wilayah industri yang banyak mempekerjakan buruh dari berbagai daerah. Kenyataannya, akibat krisis moneter 1997-1998, beberapa pabrik melakukan rasionalisasi karyawan. Mereka terpaksa mem-PHK karyawannya dengan alasan efisiensi. Pemecatan buruh pabrik sebagai akibat krisis moneter tidak diantisipasi oleh pengelola Rusun Waru Gunung, sehingga pada saat Rusun Waru Gunung siap dihuni, banyak blok yang masih kosong. Akibatnya, pengelola Rusun Waru Gunung mengambil kebijakan untuk menawarkan kamar-kamar yang ada kepada khalayak umum. Akhirnya, hingga kini penghuni Rusun Waru Gunung sangat beragam, meski sebagian besar di antaranya adalah buruh pabrik.

Tanggapan positif juga datang dari Dinas Permukiman Jawa Timur. Priyo Darmawan, Kepala Dinas Permukiman Jawa Timur, menyatakan bahwa untuk mewujudkan pesantren buruh pabrik dapat dilakukan kerja sama antara pihak Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan perusahaan. Misalnya, pihak pemerintah kota menyediakan lahan, pihak perusahaan menyediakan pendanaan, dan Pemda Tk. I membantu mencarikan *developer* dan pengadaan lingkungan, seperti pengadaan air bersih, *paving*, masjid, taman, dan saluran air.

Menurut Priyo, sebenarnya pihak swasta (perusahaan) dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah Tk. I Jawa Timur jika menginginkan pembangunan perumahan bagi pekerja dengan harga yang terjangkau. Sebab, di lingkungan Dinas Permukiman Jawa Timur terdapat program yang disebut dengan TP3 (Tabungan Pembangunan Perumahan untuk Pekerja). Mekanismenya dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan Dinas Permukiman Jawa Timur. Jadi, misalnya, jika ada perusahaan yang memiliki lahan yang cocok digunakan untuk *settlement* buruh pabrik, dipersilakan mengajukan pemohonan agar dibangunkan asrama yang layak huni kepada pemerintah daerah. Berdasarkan permohonan itu, pihak pemerintah daerah akan menentukan *developer* yang siap membangun asrama yang diminta berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan bersama. Selanjutnya, pihak pemerintah daerah melalui dinas permukiman akan memberikan bantuan barupa pengadaan lingkungan yang dibutuhkan. Berkaitan dengan pendanaan dan pengelolaan asrama, dapat dibuat MoU antara pihak perusahaan dan Pemda.

Rusunawa Waru Gunung, contohnya, bisa menawarkan sewa rumah dengan harga relatif murah. Untuk ukuran rusun tipe 21 (3 m x 7 m) yang telah dilengkapi dengan fasilitas air bersih (PDAM), listrik (450 Watt), saluran gas, tempat tidur susun (2 kasur), dan fasilitas umum (seperti ruangan serba guna, jalan, saluran pem-

buangan, dan parkir) biaya sewanya berkisar antara Rp30.000,- s/d Rp54.000,- per bulan. Secara rinci biaya sewa per unit adalah Rp54.000,- (lantai I), Rp48.000,- (lantai II), Rp42.000,- (lantai III), Rp36.000,- (lantai IV), dan Rp30.000,- (lantai V). Ketentuan yang diberlakukan pihak pengelola adalah bahwa khusus lantai I dipergunakan untuk usaha, sedangkan lantai II s/d V untuk hunian (tempat tinggal).

Pengelolaan Rusun Waru Gunung dilakukan pihak Pemerintah Kota dan Perumnas Regional VI Jawa Timur. Sebagai manajer ditunjuk Sugiyono yang mewakili pihak Perumnas, sedangkan pelaksana pengelolaan Rusun dilakukan pemerintah kota yang mempekerjakan 5 orang karyawan. Untuk ukuran Rusun Waru Gunung, tenaga operasional dari Pemkot yang berjumlah 5 orang tersebut dirasakan amat kurang, karena mereka harus mengontrol 10 blok Rusun (5 twin block) dengan rincian pada masing-masing blok terdapat 60 unit (48 unit hunian, 12 unit untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial). Untuk membantu pengamanan dan penanganan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas inisiatif warga, maka dibentuk kesatuan warga setiap tingkat blok (semacam RT/RW). Dalam hal pengembalian biaya pembangunan Rusun yang telah dikeluarkan oleh pihak Perumnas, disepakati bahwa 32% dari penerimaan per bulan pada tiga tahun pertama untuk Perumnas, sedangkan sisanya untuk pihak Pemkot. *Share* penerimaan sewa per bulan antara Perumnas dan Pemkot pada tahun berikutnya akan naik hingga angka 54% untuk Perumnas dan sisanya untuk Pemkot.

Yang belum dilakukan oleh pihak pengelola penghuni Rusun Waru Gunung adalah pembinaan di bidang mental-spiritual (keagamaan dan pendidikan). Selama ini, warga dalam melaksanakan ritual keagamaan hanya memanfaatkan ruangan serba guna di masing-masing blok. Jadi di Rusun Waru Gunung ini belum terdapat fasilitas masjid ataupun gereja untuk beribadah. Kegiatan

keagamaan ini murni atas inisiatif warga. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sentuhan pembinaan keagamaan bagi mereka yang tinggal di rusun mutlak diperlukan.

Berkaitan dengan usaha membangun asrama (pesantren) khusus buruh pabrik, Sugiyono menyambut positif. Menurutnya, realisasi pembangunan pesantren buruh pabrik dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi, seperti Pemkot, Perumnas, dan perusahaan. Di tingkat operasional, kerja sama ketiga instansi tersebut, misalnya, dapat dibagi; lahan disediakan perusahaan, Pemkot membantu pendanaan, dan Perumnas bagian pembangunan gedung. Selanjutnya, jika pembangunan asrama pesantren telah selesai, maka dapat dibicarakan pengelolaannya dalam suatu MoU yang melibatkan ketiganya. Atau, jika pengadaan asrama buruh pabrik itu tidak melibatkan perusahaan, bisa saja perusahaan mem*booking* setiap blok yang dikhususkan bagi karyawan perusahaannya. Jika hal ini yang terjadi, maka persoalan pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik bisa saja dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten.

2. Tipe Pemondokan dan Harga Sewa

Tipe pemondokan ala rumah susun untuk daerah Surabaya dan sekitarnya mengacu pada peraturan daerah yang mengharuskan diterapkannya sistem vertikal (susun). Sedang di daerah Mojokerto, sistem perumahan secara horizontal untuk buruh pabrik masih memungkinkan karena luas dan murahnya harga lahan. Kasus di Waru Gunung, rumah susun yang dibangun menggunakan tipe 21 (3 m x 7 m), yang diperuntukkan untuk satu keluarga dengan jumlah anggota sekitar 4 orang yang terdiri dari 1 orang ayah, 1 orang ibu, dan 2 orang anak. Dengan sewa rumah sebagaimana disebut di atas, maka harga sewa yang ditawarkan cukup murah untuk wilayah Surabaya. Meskipun demikian, konsep Rusunawa Waru Gunung jika diterapkan untuk bujangan (santri

buruh pabrik) idealnya tetap dihuni oleh 4 orang. Dengan demikian, kalau idealnya dihuni 4 orang, maka harga sewa bagi masing-masing santri sekitar Rp7.500–Rp13.500 per bulan, belum termasuk listrik. Kalaupun listrik dimasukkan, maka tiap santri buruh pabrik hanya menambah sekitar Rp2.500–Rp5.000. Harga ini dibandingkan dengan sewa kos-kosan di rumah penduduk, sangat kompetitif bahkan dapat dikatakan sangat murah. Harga yang ditawarkan Rusunawa Waru Gunung merupakan harga lama yang masih tetap dipertahankan sampai saat ini walaupun tidak menutup kemungkinan juga akan naik.

Sebagai perbandingan, dalam waktu dekat ini, akan dibangun rumah susun di Siwalankerto. Pembangunan ini bisa dijadikan contoh untuk membangun pemondokan ala rumah susun di kawasan area perindustrian yang dikhususkan bagi buruh pabrik. Pembangunan rusun merupakan sinergi berbagai instansi, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Permukiman Jawa Timur, dan Perumnas. Dana pembangunan yang diperkirakan Rp14 milyar, 10 milyar didanai oleh Perumnas dengan sistem sewa.

Rusun yang dibangun terdiri dari tujuh tipe dengan jumlah 93 unit. Rinciannya, tipe A seluas 28 m² sebanyak 13 unit di lantai 1,2,3,4. Tipe B seluas 24 m² (48 unit) di lantai 1,2,3, dan 4. Tipe C seluas 36 m² (19 unit) di lantai 1,2,3, dan 4. Tipe D seluas 28 m² (1 unit) dilantai 4. Tipe E seluas 24 m² (4 unit) di lantai 4. Tipe F seluas 30 m² (6 unit) di lantai 4, dan tipe G seluas 18 m² (2 unit) di lantai 4. Pejabat Perumnas menyatakan bahwa lama sewa ada beberapa alternatif: 15 tahun, 20, 25, dan 30 tahun. Dari alternatif itu, yang paling ideal adalah 20 tahun dan 25 tahun.

Dicontohkan biaya sewa tipe G untuk jangka waktu 25 tahun hanya Rp97.200 per bulan. Sedangkan untuk 20 tahun sebesar Rp134.550 per bulan. Dan kalau masa waktu sewa 30 tahun maka rumah tipe G itu cuma Rp72.900 per bulan. Juga dijelaskan biaya sewa di lantai I lebih mahal daripada lantai 2,3, dan 4. Semakin

tinggi lantai yang disewa, biaya sewa lebih murah. Sedangkan tipe B, sewa untuk lantai 1 sebesar Rp221.400 per bulan, lantai 2 Rp215.400, lantai 3 Rp203.400, lantai 4 Rp191.400, dan lantai 5 Rp179.400 per bulan.

Melihat harga di atas, maka sewa untuk masing-masing santri jika dihuni sekitar 4 sampai 6 orang, per kamarnya sesuai ukuran masing-masing berharga sekitar Rp25.000–Rp30.000. Harga ini pun masih cukup kompetitif dibanding harga kos-kosan pada umumnya. Dengan demikian, tipe yang cukup ideal untuk 4 orang santri per kamarnya adalah tipe 18 atau 21, yang mempunyai harga berkisar Rp25.000–Rp30.000 per santri (orang).

Dari pengamatan di atas, pemondokan pekerja di pesantren buruh pabrik akan terbagai menjadi tiga bagian: pemondokan bagi santri yang berkeluarga, pemondokan santri puteri, dan pemondokan santri putera (lihat lampiran III). Adapun pemondokan yang dibangun adalah tipe 15 dan tipe 21. Tipe 15 dikhususkan bagi santri pekerja yang berkeluarga, sedangkan tipe 12 bagi santri yang membujang. Dipilihnya ukuran tipe yang lebih kecil untuk santri pekerja yang berkeluarga dengan asumsi bahwa harga sewa akan lebih murah. Sedangkan bagi pekerja yang membujang dengan merujuk harga Rusunawa tipe 21 di Surabaya dengan asumsi per kamar dihuni 4 sampai 5 santri pekerja, maka harga sewa masih tetap kompetitif dibandingkan dengan sewa di luar pesantren buruh pabrik.

Bangunan asrama diatur sedemikian rupa, sebagaimana dalam lampiran III, dengan maksud agar tidak terjadi percampuran santri laki-laki dan perempuan serta santri bekerja yang berkeluarga. Model yang ditawarkan terdiri dari dua asrama puteri, dua asrama putera, dan satu asrama puteri yang berkeluarga. Dengan demikian, santri yang sudah berkeluarga masih diberi kesempatan untuk tinggal di lingkungan pesantren.

3. Kelengkapan Sarana Prasarana

Sudah seharusnya pesantren buruh pabrik mempunyai sarana prasarana yang memadai. Sarana olahraga di kawasan pesantren di areal perindustrian sebenarnya sudah disediakan oleh pengelola areal perindustrian. Selain itu, penyediaan sarana kesehatan atau klinik juga bisa direalisasikan dengan bekerja sama dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sarana pembelajaran khususnya kelas bisa direncanakan keberadaannya ketika berbagai pihak merencanakan desain rusun yang akan dibangun. Sedangkan bengkel kerja sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas santri buruh pabrik dalam bidang keterampilan bisa diadakan dengan melibatkan instansi balai latihan tenaga kerja Departemen Tenaga Kerja. Selain itu, pesantren juga menyediakan fasilitas kantin, wartel, dan tempat bermain anak-anak.

4. Kurikulum Pesantren Buruh Pabrik

Pesantren buruh pabrik yang akan dibangun diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni kelas persiapan dan kelas pesantren. Dalam kelas persiapan, fokus pelajaran diarahkan pada kemampuan membaca al-Qur'an. Kelas ini diperuntukkan bagi calon santri yang belum mempunyai *basic* kuat untuk membaca al-Qur'an dengan tujuan agar mereka dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar. Kelas persiapan ini membutuhkan waktu kurang lebih satu semester (6 bulan) dengan memakai buku Iqra'. Buku Iqra' yang terdiri dari 6 (enam jilid) diharapkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu tersebut. Adapun waktu pelaksanakan proses belajar mengajar disesuaikan dengan waktu luang buruh pabrik di luar *shift* bekerja di pabrik. Waktu pembelajaran yang akan diterapkan bisa dilaksanakan di waktu pagi sekitar pukul 08.00–10.00 atau selepas shalat Isya, yakni antara pukul 19.00–21.00. Pasca kelas persiapan ini, santri sudah mempunyai bekal yang cukup untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi, yakni kelas pesantren.

Selanjutnya untuk program (kelas) pesantren, rancangan kurikulum yang diajukan mengacu pada kemampuan santri. Dipilihnya pelajaran akidah, fiqh, akhlak, hadits, dan tafsir merupakan pengetahuan agama yang memang menjadi dasar pengetahuan untuk menjadi sosok muslim yang baik. Di samping itu, pemilihan pelajaran tersebut memang diharapkan sebagaimana tercermin dari angket kepada responden. Pelajaran umum dan keterampilan sengaja belum ditentukan, namun waktu untuk pembelajaran sudah dialokasikan. Penentuan pelajaran umum dan keterampilan akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebutuhan santri. Rancangan kurikulum yang diterapkan di pesantren buruh pabrik dapat dilihat dalam lampiran.

Waktu pembelajaran di jenjang pesantren juga mengikuti level dasar (persiapan), yaitu antara pukul 08.00–10.00 atau pukul 19.00–21.00. Dengan pilihan waktu belajar tersebut diharapkan santri pekerja dapat mengikuti pelajaran dan tidak terganggu oleh *shift* di pabrik.

Adapun kurikulum yang diterapkan berkisar pada keinginan santri pekerja sebagaimana termaktub pada bab berikutnya. Dalam bidang agama, mata pelajaran yang diajarkan meliputi fiqh, akidah, tafsir, hadits, ilmu alat. Sedang ilmu umum akan disesuaikan dengan kebutuhan santri pekerja di mana mereka bekerja. Demikian pula dengan keterampilan yang diajarkan juga mengikuti kebutuhan santri pekerja. Adapun level pesantren dibagi menjadi delapan semester dengan rincian sebagaimana termaktub dalam lampiran II.

Di samping kurikulum di atas, perlu juga diadakan kejar paket A, B atau C sebagai upaya penuntasan program wajib belajar bagi santri buruh pabrik yang belum menamatkan sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjut pertama (SMP) dan atas (SMU). Program ini bisa dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pendidikan Luar

Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan. Tenaga tutor yang diambil dari unsur ustadz atau dari kalangan buruh sendiri akan mendapatkan pelatihan secara khusus dari PLS Dinas yang kemudian akan diterjunkan langsung dalam proses pembelajaran di pesantren. Adapun alokasi waktu bisa memanfaatkan waktu materi umum atau keterampilan. Dengan demikian, seorang buruh pabrik tidak hanya mendapatkan bekal ilmu pengetahuan agama yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam kehidupannya, tetapi dilengkapi dengan pengetahuan umum dan keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Di samping beberapa kegiatan tersebut di atas, santri buruh pabrik perlu juga dibiasakan untuk melakukan shalat berjama'ah dan tahajjud bersama-sama di malam hari. Kegiatan malam tersebut, sebagaimana di pesantren konvensional, harus menjadi keharusan karena dampak positif bagi buruh pabrik sangat besar. Penelitian program doktoral M. Sholeh tentang "Pengaruh Shalat Tahajjud terhadap Kesehatan Ditinjau dari Ilmu Kedokteran" menunjukkan bahwa orang yang melakukan shalat tahajjud akan memberikan dampak yang positif, baik dari aspek mental spiritual dalam mendekatkan diri kepada Allah sekaligus sebagai benteng dalam menghadapi godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif. Shalat tahajjud juga bisa memberikan efek yang sangat positif bagi kesehatan. Dengan berbagai kegiatan tersebut di atas diharapkan santri buruh pabrik dapat tampil sebagai manusia yang sempurna (*insan kamil*).

Bab VIII
Analisis Penelitian

A. Gambaran Ringkas Data Lapangan

Sesuai realitas data lapangan, "kehidupan buruh pabrik" merupakan fokus awal seluruh perhatian, aktivitas dan hasil temuan penelitian ini. Gambaran tentang kehidupan di daerah asal sebelum pergi ke kota, bagaimana proses yang mereka alami ketika mencari dan melamar pekerjaan ke sebuah pabrik atau perusahaan tertentu, suka duka dalam menjalani kewajiban kerja sehari-hari, tingkat upah dan kesejahteraan yang mereka dapatkan, pola tingkah laku dan pergaulan dengan kawan dan lingkungan sekitar, sesuatu yang menyenangkan dan memprihatinkan dalam menjalani semua kenyataan hidup dan lain sebagainya, adalah rentetan fakta empiris yang menjadi titik mula studi ini untuk lebih lanjut digali dan dirumuskan aneka permasalahan yang mereka hadapi dan rasakan sehari-hari.

Dengan menempatkan kehidupan buruh pabrik dalam perspektif pendidikan Islam, rangkaian aktivitas penelitian ini pada akhirnya menemukan 5 (lima) kategori permasalahan penting, yang kemudian diidentifikasi bersifat: *psikis, ekonomis, sosial, moral, dan religius.* Masalah psikis, antara lain muncul dalam wujud keterpaksaan yang dialami buruh pabrik, mulai dari pertama kali pergi ke kota karena sulitnya kehidupan di desa, ketika memperoleh tempat kerja seadanya berhubung tidak ada pilihan

lain, ketika menjalani aturan dan disiplin kerja yang sedemikian ketat, dan sebagainya. Masalah ekonomis terjadi, karena walaupun upah yang mereka dapatkan lebih banyak dibanding jika bekerja di desa, cenderung kurang atau bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan mengingat tingginya biaya kehidupan di kota. Masalah sosial misalnya ditandai oleh kesan tentang posisi mereka sebagai "*anak pabrikan*" yang mengandung konotasi rendah di masyarakat. Persoalan moral seringkali dipandang dan berakibat cukup serius, mengingat suasana pergaulan yang demikian bebas di kalangan sesama pekerja laki-laki maupun perempuan, di samping makin longgarnya norma-norma kehidupan di sekitar mereka. Persoalan religius juga tidak kalah pentingnya, seperti untuk dapat menunaikan shalat dengan tertib dan khusyu' misalnya, seringkali harus disertai usaha sedemikian rupa di tengah lingkungan dan aktivitas kerja sehari-hari.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penelitian ini menemukan beberapa jenis lembaga atau kegiatan pembinaan keagamaan yang kemudian diidentifikasi sebagai embrio atau cikal bakal rekayasa model ideal *pesantren buruh pabrik* di masa depan. Institusi dan atau aktivitas pembinaan keagamaan tersebut adalah "pesantren konvensional" yang beralih fungsi sebagai tempat tinggal dan belajar keagamaan buruh pabrik, rumah kos-kosan yang dikelola secara Islami, pemanfaatan masjid atau mushalla di sekitar kawasan industri untuk pembinaan keagamaan, penyelenggaraan pembinaan keagamaan di lingkungan pabrik, serta keikutsertaan buruh dalam aktivitas keagamaan rutin di masyarakat tempat mereka tinggal sehari-hari. Harus diakui, tidak semua atau bahkan belum banyak jumlah buruh pabrik yang terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan kegamaan tersebut. Namun demikian, bagi penelitian ini, keterlibatan seperti itu sangat penting, karena dalam batas tertentu dapat menampilkan suasana religius dalam kehidupan buruh pabrik sehari-hari, dan sekaligus menjadi alternatif solusi permasalahan yang dihadapi.

Sedemikian bervariasinya model kelembagaan dan atau kegiatan pembinaan keagamaan di kalangan buruh pabrik, maka demikian pula halnya dalam hal unsur-unsur atau elemen yang menjadi pendukungnya. Buruh pabrik sebagai santri atau sebaliknya santri yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik, adalah elemen utamanya. Menyusul pihak kiai, ustadz, staf administrasi, dan tenaga pengelola lainnya. Adanya kurikulum dan metode pembinaan, didukung oleh sarana dan prasarana tertentu, dan yang tidak kalah pentingnya adalah suasana kehidupan dan lingkungan sehari-hari yang senapas dengan tujuan pembinaan keagamaan tersebut dan idealitas ajaran Islam pada umumnya. Aktivitas pembinaan keagamaan dilaksanakan secara fleksibel, di sela-sela kesibukan para santri yang sekaligus pekerja industri, dengan materi pembinaan yang bersifat praktis, mencakup bidang akidah, ibadah, dan akhlak, sebagai upaya memperkokoh landasan religius dan moralitas buruh pabrik di tengah-tengah kehidupan urban yang cenderung semakin keras, banyak masalah dan godaan.

Kehadiran pesantren buruh pabrik, sesuai dengan asumsi awal penelitian ini, ternyata memang berperan sebagai alternatif jalur pemecahan masalah kehidupan yang dihadapi oleh kalangan pekerja industri. Masalah psikis seperti tersimpul dalam "serba keterpaksaan" di kalangan mereka, dalam batas tertentu dapat disublimasi melalui penanaman nilai-nilai keislaman, bahwa setiap jerih payah dan pengorbanan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesungguhnya merupakan ibadah yang berpahala besar, asal saja didasari oleh niat yang ikhlas, kejujuran, dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Dengan memegang tata nilai kehidupan seperti ini, secara kejiwaan dapat mengurangi beban perasaan tertekan dan kecewa, untuk kemudian mengarah pada munculnya semangat kokoh dalam menghadapi realitas kehidupan yang memang tidak ringan.

Masalah ekonomis, misalnya dalam wujud ketidakseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari di kota, dapat dieliminasi dengan relatif lebih murahnya biaya hidup di lingkungan pesantren jika dibanding sewa kos. Sementara, melalui kebiasaan hidup tertib dan sederhana, dan sebaliknya menghindari kecenderungan berhura-hura (mubazir), mereka bisa menabung dan mengirimkan sebagian penghasilan ke rumah, misalnya untuk membantu ekonomi keluarga atau membiayai saudaranya yang masih sekolah. Data lapangan semacam ini cukup penting dan menarik untuk dicermati, mengingat banyak di kalangan buruh pabrik pada umumnya, yang begitu mudah menghabiskan hasil kerja untuk hal-hal yang kurang berguna, dan bahkan dapat menghancurkan masa depan mereka, seperti berjudi dan mabuk-mabukan.

Masalah sosial, seperti munculnya kesan status mereka sebagai "anak pabrikan" dengan konotasi kurang baik atau cenderung merendahkan, bisa diminimalisir mengingat pada diri mereka itu juga tersandang predikat lain sebagai "santri." Bagaimana pun juga, santri adalah murid, pelajar atau siswa yang sedang menuntut ilmu pengetahuan di sebuah institusi atau aktivitas pendidikan tertentu, sehingga menimbulkan konotasi positif sebagai orang yang tengah melakukan sesuatu untuk meraih masa depan. Kesan lainnya adalah bahwa buruh pabrik yang tinggal di pesantren, biasanya cenderung berperilaku jujur ("alim").

Dalam hal moralitas, mereka memang cenderung rentan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran norma, baik susila maupun agama. Namun, melalui pembinaan dan penciptaan suasana kehidupan Islami sedemikian rupa di lingkungan "pesantren", akhirnya menghasilkan kumpulan sosok pribadi yang memiliki kesadaran dan sekaligus kemampuan mengendalikan diri dalam setiap langkah hidup mereka, sesuai dengan kemuliaan ajaran agama. Realita munculnya kelompok pekerja perempuan

yang berkerudung atau memakai jilbab di lingkungan industri sehari-hari, di satu sisi dapat dipandang sebagai gejala baru yang cukup menarik, dan sekaligus menandakan betapa sesungguhnya telah terjadi proses religiusitas atmosfer kehidupan di lingkungan pabrik, dengan berbagai efek positif yang ditimbulkan olehnya.

Dalam masalah agama, misalnya ditemukan sebuah ungkapan cukup populer dan sekaligus menjadi bagian integral dari materi bimbingan keagamaan di kalangan buruh pabrik, bahwa "bekerja merupakan ibadah dalam rangka mencari nafkah, bila ada lebihnya dikumpulkan untuk pergi ke Makah." Di sini, agama diposisikan sebagai sumber motivasi, agar seseorang bekerja dengan penuh kesungguhan, mengingat hasil pekerjaan itu pada akhirnya juga sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan seseorang agar secara tuntas dapat menjalankan agama dengan baik. Pemecahan masalah agama, dengan demikian, bukan semata-mata ditujukan ke arah pembinaan ibadah mahdhah di kalangan santri pekerja, melainkan juga bagaimana mereka memahami ajaran Islam secara lengkap dan berimbang, demi pencapaian kebahagiaan hidup yang hakiki, dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, mengingat peran penting pesantren buruh pabrik sebagai alternatif pemecahan masalah kehidupan di kalangan pekerja industri, maka dipandang perlu adanya langkah perbaikan, pengembangan, dan penciptaan model ideal ke depan, agar peran yang dimainkannya kelak menjadi semakin maksimal. Arah penciptaan model pesantren buruh pabrik tersebut adalah bagaimana melengkapi dan menyempurnakan tujuan, materi, metode, sarana, dan prasarana pembinaan santri yang sekaligus pekerja itu, yang awalnya semata-mata terfokus pada bidang keagamaan menuju sasaran yang lebih luas dan komprehensif, mencakup peningkatan wawasan pengetahuan umum dan sekaligus penguasaan berbagai bidang keterampilan, sebagai upaya pemberdayaan dalam arti seluas-luasnya.

B. Refleksi Ciri Khusus Pesantren Buruh Pabrik

Untuk menempatkan hasil studi ini dalam setting dan kerangka pengembangan ilmu-ilmu sosial keagamaan di Indonesia, langkah pertama yang perlu ditempuh adalah bagaimana melakukan identifikasi atas temuan-temuan inti di lapangan, sehingga menjadi jelas keterkaitan dan posisinya dalam khazanah informasi keilmuan. Atas dasar fakta riil di lapangan, hasil analisis dan refleksi teoretisnya secara mendalam, studi ini menemukan sejumlah ciri khusus dari kehadiran "pesantren buruh pabrik" sebagai berikut.

1. Orisinalitas dalam Hal Institusi dan Fungsi

Apa yang dikenal sebagai "pesantren", dalam pengertian institusi pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional, dengan mengutamakan aktivitas pengajaran kitab-kitab klasik berbahasa Arab,[1] juga perkembangan dan pengembangannya lebih lanjut sehingga ada yang kemudian melengkapi diri dengan madrasah, sekolah, pelatihan keterampilan, bahkan perguruan tinggi baik agama maupun umum, adalah sesuatu yang telah sedemikian terpahami keberadaannya oleh kalangan luas masyarakat negeri ini. Kesan dan konotasinya yang cukup menonjol, betapa pun sudah mengalami pembaharuan di sana-sini, tetap saja terpusat atau minimal tidak meninggalkan elemen-elemen pendukung aslinya, seperti ketokohan seorang kiai, keberadaan sekumpulan santri yang sedang mempelajari agama, tersedianya *bilik-bilik pemondokan*, terselenggaranya *pengajian kitab kuning*, dan dilengkapinya rumah ibadah baik masjid atau mushalla.[2] Gambaran sebuah pesantren dengan asosiasi pemahaman seperti

[1] Tentang "pesantren" sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia, lihat, H.A.R.Gibb & J.H.Kramers, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J.Brill, 1965), 460-462.

[2] Lebih lanjut, lihat, Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 44.

itu, kiranya sudah lumrah dan tidak ada sesuatu yang sama sekali baru.

Akan tetapi, yang namanya "pesantren buruh pabrik" atau dapat juga disebut sebagai "pesantren industri", boleh jadi masih terasa asing kedengarannya, mengingat belum akrab digunakan dalam jagad keilmuan dan wacana sosial keagamaan di Indonesia. Perpaduan istilah *pesantren* di satu pihak dan *industri* atau *buruh pabrik* pada pihak lain, bisa jadi pada tahap awalnya juga menimbulkan "keanehan". Oleh karena, seperti yang sudah mapan terpahami selama ini, kata "pesantren" cenderung dikonotasikan sebagai peninggalan tradisi pendidikan kaum muslimin masa lalu yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan, dan menggambarkan suasana kehidupan abad pertengahan;[3] sebaliknya kata "industri" atau "buruh pabrik" justru mengaromakan wajah dunia modern yang digerakkan oleh peradaban sekuler Barat, dan dalam banyak hal cenderung melahirkan corak kehidupan yang terbebaskan dari wilayah agama.[4]

Dengan adanya sesuatu yang terasa asing dan aneh itulah, maka kehadiran "pesantren buruh pabrik" yang menjadi salah satu fokus perhatian studi ini, satu segi mendapatkan pijakan rasionalitas untuk menyatakannya sebagai *temuan orisinal*, dengan kemungkinan sumbangannya guna memperkaya khazanah keilmuan sosial keagamaan di Indonesia. Kalaulah orisinalitas tersebut bukan terletak pada etimologi "pesantren" dan "buruh pabrik", mengingat keduanya masing-masing secara terpisah merupakan kosakata lama yang sudah cukup terkenal di masyarakat, namun dari segi terminologi "pesantren buruh pabrik" sebagai institusi Pendidikan Islam dengan fungsi edukatif-

---

[3] Lihat, Snouck Hurgronje, *Islam Hindia Belanda,* alih bahasa S. Gunawan, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, cet. II, 1983), 32.

[4] Lihat, Peter L. Berger. *The Sacred Canopy,* (New York: An Anchor Book, 1990), 129.

sosiologis-keislaman yang sedemikian khas dan baru muncul belakangan ini, lagi-lagi semakin menjernihkan posisi dan predikat *orisinal*-nya.

Dan memang, ketika lembaga pendidikan Islam menampilkan wujud aktivitas dalam bentuk pengajian kitab secara murni di pesantren misalnya, atau kegiatan belajar-mengajar secara formal di madrasah, bahkan penyelenggaraan sekolah umum dengan berbagai jenis dan jenjang yang ada dari tingkat dasar atau malah taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, sesungguhnya adalah gejala dan realitas biasa yang sudah cukup dimaklumi adanya. Akan tetapi, pada saat kegiatan tersebut menjelma dalam wujud pembinaan keagamaan di sebuah lingkungan yang tertata dan dalam atmosfer keislaman sedemikian rupa, sementara kalangan santrinya sekaligus juga berstatus sebagai buruh pabrik, di mana kehidupan sehari-hari mereka bergerak di atas prinsip "belajar sambil bekerja" atau sebaliknya "bekerja sambil belajar", maka jelas adanya sesuatu yang baru, dan di situlah letak orisinalitas institusi dan fungsi pesantren buruh pabrik sebagai dimaksud.

2. Fleksibilitas Lembaga Pesantren

Menempatkan orisinalitas pesantren buruh pabrik, dengan membatasinya semata pada aspek institusi dan fungsi, satu segi dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi lahirnya analisis untuk membangun refleksi keilmuan berikutnya, yakni penjelasan tentang fleksibilitas institusi pesantren. Dalam kaitan ini, munculnya realitas pesantren buruh pabrik, dapat dipandang sebagai bagian dari sederet bukti empiris, betapa jenis lembaga dan aktivitas pendidikan Islam yang sering diberi predikat "tradisional" ini,[5] memiliki tingkat kelincahan dan kelenturan sedemikian

---

[5] Tentang predikat "tradisional" yang sering dilabelkan pada pesantren di Indonesia, lihat, Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam: Studi tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional,* (Surabaya, Al-Ikhlas, 1993), hlm. 100-109.

rupa, dalam arti mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, termasuk perubahan apa pun yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Bagaimana tidak, di celah-celah dunia industri yang terkenal *keras,* berorientasi *kebendaan* dan cenderung *sekuler,* ternyata lembaga pesantren dapat masuk dan berhasil mengembangkan aktivitas pembinaan keagamaan di kalangan para *santri* yang sekaligus berstatus sebagai *buruh pabrik* itu. Sulit terbayangkan pelaksanaannya, jika saja peran tersebut diserahkan, misalnya kepada lembaga pendidikan formal seperti *madrasah* dan *sekolah,* yang memiliki program berjenjang sedemikian ketat, dengan sejumlah persyaratan dan aturan yang diberlakukan kepada segenap murid atau siswanya.[6] Padahal yang namanya *buruh* atau *pekerja,* apalagi di sektor industri yang memiliki tingkat kedisiplinan sedemikian tinggi, jelas tidak dapat begitu saja ditinggalkan dengan semaunya, walau untuk kepentingan belajar sekalipun. Dalam konteks lembaga pendidikan formal, pilihan bagi mereka yang sehari-hari berkedudukan sebagai pekerja semacam itu adalah: semata-mata belajar sesuai dengan aturan yang ada, atau memilih bekerja dan keluar dari madrasah atau sekolah yang bersangkutan.

Fleksibilitas atau kelenturan pesantren buruh pabrik, antara lain ditandai oleh pengembangan kreativitas internal lainnya, seperti ketika menyusun rancangan dan program pembinaan terhadap kalangan pekerja industri, dilakukan melalui pertimbangan rasional atas prinsip "keluwesan", seperti dengan cara mengatur jadwal kegiatan sedemikian rupa, misalnya bagi mereka yang bekerja penuh di siang hari, aktivitas pembinaan dilakukan

---

[6] Kritik terhadap kekakuan sistem dan kegagalan pendidikan formal persekolahan, khususnya jika dihubungkan dengan realitas kebutuhan dunia kerja di zaman modern dewasa ini, lihat, H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 15-17

pada malam hari, sementara mereka yang menjalani *shift* kerja malam hari, aktivitas pembinaan dilakukan pada siang hari. Intinya, ada kesadaran penuh tentang posisi dan kesibukan sehari-hari yang dialami oleh kalangan *santri-pekerja*, dalam keseimbangan sedemikian rupa dengan kesadaran yang sama atas pentingnya mereka terlibat dalam kegiatan pembinaan di lingkungan dan atau melalui aktivitas kepesantrenan.

Prinsip "memanfaatkan waktu luang", tampaknya merupakan indikator penting bagi wujud fleksibilitas kehadiran pesantren buruh pabrik di tengah-tengah kesibukan dunia industri sebagai dimaksud. Waktu senggang di hari Ahad (Minggu) atau hari-hari libur pendek yang lain, manakala para santri-pekerja tidak pulang kampung atau menggunakannya untuk keperluan lain yang cukup urgen, pihak penyelenggara pesantren pun memanfaatkannya sedemikian rupa, misalnya untuk pengajian secara aksidental, pendalaman kemampuan baca al-Qur'an, pelatihan keterampilan berpidato, dan sebagainya. Dalam hal materi dan metode pembinaan yang dipilih dan diterapkan, semuanya didasarkan atas prinsip "keluwesan", dan sebaliknya menghindari sedapat mungkin unsur "pemaksaan" oleh pihak pengelola pesantren dan "keterpaksaan" pada diri para santri-pekerja. Termasuk kategori fleksibel, ketika suatu program dirancang dengan mengingat relevansinya yang sedemikian besar bagi kepentingan para santri-pekerja di satu pihak, dan kemampuan untuk mempelajari dan menguasainya secara baik di celah-celah kesibukan kerja mereka sehari-hari pada pihak yang lain.

3. Prinsip Bekerja Sambil Belajar

Kehadiran buruh pabrik di tengah-tengah dunia industri, jelas secara umum bertujuan untuk *bekerja* guna mencari nafkah bagi kehidupannya. Karena itulah, wajar kiranya jika perhatian tertuju ke arah *pekerjaan*. Apa yang diperjuangkan dengan penuh

pengorbanan, mulai dari keberangkatan mereka ke kota, upaya mencari perusahaan yang kebetulan menerima tenaga baru, bersungguh-sungguh dalam memenuhi kewajiban sebagai pekerja dan lain-lain, semuanya merupakan konsekuensi logis dari keinginan sepenuh hati untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang cukup, guna memenuhi kebutuhan hidup yang dicita-citakan. Sehubungan itulah, penyelenggara pesantren buruh pabrik memahami sepenuhnya, bahwa santri binaan mereka bukanlah orang-orang muda yang datang ke situ semata-mata untuk maksud belajar, melainkan didasari oleh niat dan keinginan sedemikian rupa untuk memanfaatkan sela-sela waktu yang ada, guna menambah atau memperdalam ilmu dan amaliah keagamaan, sebagai pelengkap dan penyeimbang kesibukan sehari-hari, agar dengan demikian memperoleh keuntungan bagi kehidupan duniawi dan sekaligus ukhrawi.[7]

Prinsip *bekerja sambil belajar*, agaknya merupakan ungkapan yang tepat untuk merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi di kalangan para santri-pekerja itu, ketika mereka berduyun-duyun pergi serta dengan tekun bekerja di pabrik pada suatu saat, dan mengikuti aktivitas pembinaan di lingkungan pesantren pada saat yang lain. Menempatkan prinsip *bekerja* di rangkaian awal ungkapan tersebut, antara lain didasari oleh niat dan tujuan semula kalangan buruh pabrik itu, adalah untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan mereka. Bekerja untuk mencari nafkah, otomatis merupakan prinsip utama dan pertama. Setelah memperoleh dan terasa mapan bekerja di pabrik atau perusahaan tertentu, timbullah keinginan untuk memanfaatkan sela-sela waktu luang yang ada guna mengikuti kegiatan *belajar* di bawah bimbingan pesantren.

---

[7] Salah satu prinsip ajaran Islam, adalah keharusan umatnya untuk mengupayakan dan menjaga keseimbangan hidup, antara urusan dunia di satu pihak dan urusan akhirat pada pihak lain. Lebih lanjut, lihat Md.Ali Alhamidy, *Jalan Hidup Muslim*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hlm. 115.

Dalam kaitan ini, alur logikanya adalah: bekerja dahulu, dan begitu mendapat kepastian nafkah darinya, muncul keinginan untuk menggunakan sebagian guna kepentingan belajar.

Namun demikian, ada juga kemungkinan sebaliknya, di mana keinginan awal memang untuk belajar atau menuntut ilmu, khususnya di lingkungan pesantren. Tetapi karena hambatan biaya, maka dicarilah jalan keluar dengan mencari kerja di pabrik atau perusahaan. Hasil kerja itu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus mendukung pendanaan bagi kepentingan belajar sebagai dimaksud. Dalam kemungkinan kategori semacam ini, yang terjadi sesungguhnya adalah sedemikian besar motivasi dan keinginan santri-pekerja untuk mempelajari ilmu dan amaliah keagamaan, dengan cara membiayai diri sendiri. Melalui penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja itulah, sesuatu yang dicita-citakan akhirnya terpenuhi.

Prinsip *bekerja sambil belajar,* atau sebaliknya *belajar sambil bekerja,* keduanya dimungkinkan, mengingat dalam perspektif ajaran Islam yang menjadi rujukan dunia pesantren, baik kegiatan "bekerja" maupun "belajar" sama-sama didasarkan, bernilai dan bertujuan *ibadah.* Bekerja untuk memperoleh nafkah kehidupan adalah perbuatan ibadah, demikian halnya belajar guna meningkatkan kualitas ilmu dan amaliah keagamaan. Sama-sama bernilai sebagai aktivitas ibadah, oleh karena itu keduanya memiliki keterkaitan sedemikian erat, bahkan dapat ditukar-balik rangkaian kata-kata atau ungkapannya. Idealitas keterkaitan di antara keduanya adalah: dengan bekerja di pabrik atau perusahaan, kalangan orang-orang muda itu bisa memanfaatkan sebagian hasilnya untuk kepentingan belajar di pesantren; sementara, dengan memanfaatkan sela-sela waktu untuk belajar di pesantren, diharapkan dapat menunjang kualitas dan keberhasilan kerja mereka di pabrik atau perusahaan.

4. Prinsip Belajar Sepanjang Hayat

Dalam perspektif pendidikan Islam, kesadaran seseorang untuk belajar pada saat tergolong usia dewasa dan sudah terjun ke dunia kerja seperti yang dilakukan oleh kalangan santri-pekerja itu, termasuk bagian dari perwujudan prinsip "belajar sepanjang hayat", suatu langkah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Efek positif dari kesadaran tersebut adalah, keselarasannya dengan tuntutan dunia modern, yang meniscayakan manusia untuk senantiasa menambah pengetahuan dan memperluas wawasan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas dan prestasi kehidupannya. Upaya meningkatkan kualitas dan prestasi kehidupan sebagai dimaksud, bukan saja terkait dengan kepentingan duniawi yang disadari berjangka pendek, melainkan sekaligus dan lebih dari itu juga untuk tujuan ukhrawi yang rentang waktunya tidak berakhir, alias bersifat kekal dan abadi.

Menurut konsep pendidikan, dan otomatis juga ajaran Islam, kewajiban belajar atau menuntut ilmu, rentang waktunya adalah mulai dari *buaian* sampai ke *liang lahat* (*minal mahdi ilal lahdi*). Hayat atau kehidupan, kalaulah tidak begitu tepat untuk dinisbatkan permulaannya dari awal eksistensi manusia di masa *bayi*, ketika masih dibuai atau di bawah ayunan sang ibu, sesungguhnyalah Islam lebih dari itu telah mengharuskan setiap muda-mudi atau calon pasangan suami-isteri, untuk memilih dan menentukan bakal jodoh masing-masing berdasarkan kriteria tertentu yang secara teoretis dan kebiasaan empiris dapat menjamin terciptanya kehidupan rumah tangga yang tenteram, saling mencintai, dan dirahmati Allah (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Ketika seseorang berada dalam proses pencarian jodoh atau calon pasangan hidupnya, jelas pada saat itu belum terjadi kelahiran seorang bayi, bahkan awal kehidupannya di dalam kandungan sekalipun. Jika saat pemilihan jodoh, sekaligus juga dipahami sebagai awal keharusan calon mempelai untuk mempersiapkan prakondisi bagi

masa depan putera-puteri mereka di kemudian hari, yang karena itu sering dipandang sebagai titik mula terjadinya aktivitas *pendidikan* bagi calon anak manusia (atau dengan kata lain *kewajiban belajar*), maka konsekuensi logisnya adalah, bahwa prinsip *belajar sepanjang hayat* memperoleh legalitas konsep dan realisasi atau pelaksanaannya yang sedemikian tuntas dalam pandangan ajaran dan pendidikan Islam.

Dalam kaitan prinsip *belajar sepanjang hayat*, kesadaran dan langkah kalangan santri-pekerja untuk melibatkan diri pada aktivitas pesantren di sela-sela kesibukan mereka bekerja di pabrik atau perusahaan, satu segi dapat dipandang sebagai wujud kepedulian mereka untuk melibatkan diri pada aktivitas pesantren di sela-sela kesibukan mereka bekerja di pabrik atau perusahaan, satu segi dapat dipandang sebagai wujud kepedulian mereka untuk memanfaatkan waktu di tengah rentang kehidupan (hayat), sehingga terjadi peningkatan kualitas kehidupan (hayat) itu sendiri dalam makna yang seluas-luasnya. Kehadiran institusi dan atau aktivitas pembinaan keagamaan seperti yang dilakukan oleh kalangan pesantren buruh pabrik, sehubungan itu, amatlah penting. Tanpa adanya lembaga dan atau kegiatan pembinaan keagamaan sebagai dimaksud, maka seperti halnya yang terjadi pada mayoritas kawan mereka sesama buruh pabrik, kecenderungan umumnya adalah menjalani kehidupan secara rutin dari rumah kos ke perusahaan, mulai dari bangun tidur, sarapan pagi, berangkat kerja, pulang, istirahat, makan, nonton televisi, jalan-jalan, atau mencari hiburan yang lain, dan akhirnya tidur kembali di malam hari. Tidak terlihat adanya kegiatan yang secara jelas terkait atau lebih khusus bernilai pendidikan dan pembinaan terhadap yang bersangkutan, sehingga menjadi sulit untuk menempatkan kelompok ini sebagai kumpulan individu yang sedang mengamalkan prinsip belajar sepanjang hayat.

5. Rekapitulasi Pesantren Masa Lalu

Identifikasi "pesantren buruh pabrik" sebagai orisinal dalam hal *institusi* dan aktualisasi *fungsinya* di lingkungan masyarakat industri, tidaklah dimaksudkan bahwa kehadirannya sama sekali terlepas dari akar sosio-historis masa lalu, khususnya dalam konteks perjalanan dan pasang surut dunia *pesantren* yang sedemikian panjang di kawasan Nusantara. Oleh karena, dengan adanya kecenderungan untuk menempatkan jalan historis pesantren sebagai identik dan bagian tak terpisahkan dari pasang surut sejarah kaum muslimin di negeri ini,[8] maka salah satunya akan sampai pada gambaran tentang realitas lembaga pendidikan agama Islam "tradisional" tersebut yang kebanyakan berlokasi di pedesaan, dan karena itu erat keberadaannya dengan pola dan suasana hidup masyarakat pertanian.[9] Keterkaitan sebagai dimaksud, antara lain tercermin dari keterlibatan sementara kalangan santri, misalnya dalam ikut menggarap atau mengerjakan sawah-ladang, baik milik kiai, para haji atau orang-orang kaya setempat, maupun milik anggota masyarakat pada umumnya.

Adakalanya, keterlibatan santri dalam kerja pertanian seprti itu, semata-mata didasari oleh niat pengabdian secara ikhlas, misalnya kepada kiai dan keluarganya, sebagai imbalan timbal-balik dari ketulusan mereka dalam mengajarkan dan membimbing keagamaan di pesantren; tetapi ada pula yang dilakukan dengan sadar dan sengaja, untuk mendapatkan upah atau penghasilan tertentu, baik dalam bentuk uang maupun barang (natura seperti padi atau beras), yang dengan begitu menjadi terpenuhilah bekal

---

[8] Lihat Zamakhsyari Dhofier, "Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia," dalam *Majalah Prisma*, No.3,Februari, 1986, hlm. 23.

[9] Gambaran masa lalu dunia pesantren yang sedemikian erat keterkaitannya dengan wajah dan suasana kehidupan masyarakat tani di pedesaan, antara lain bisa dilihat, Sudjoko Prasodjo,dkk, *Profil Pesantren,* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 18. Juga, Fachry Ali & Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru,* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 35.

dan kebutuhan hidup sehari-hari selama menjalani kegiatan belajar di pesantren. Apa yang dilakukan oleh kalangan santri, dengan pola kehidupan di dunia pesantren masa lalu semacam itu, sesungguhnya juga mengandung arti dan masuk ke dalam simpul ungkapan "bekerja sambil belajar" atau sebaliknya "belajar sambil bekerja" sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu.

Maka berarti, kalau ada santri yang sehari-harinya mencari nafkah kehidupan sendiri, sementara masih sempat memanfaatkan sebagian waktunya untuk kegiatan belajar; atau sebaliknya berangkat dengan niat dan tujuan untuk belajar, namun mengingat ketiadaan biaya, lalu ditempuh melalui jalan sambil bekerja, sebenarnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru, khususnya bila dicermati dari masa lalu dunia pesantren di negeri ini. Hanya objek atau jenis pekerjaannya saja yang berbeda: dari bidang pertanian, mungkin pernah juga bergeser ke bidang perdagangan, dan di zaman modern ini ada kecenderungan–minimal untuk sebagian—beralih sedemikian rupa ke bidang industri. Teori *rekapitulasi* sejarah kehidupan umat Islam di negeri ini, khususnya menyangkut hubungan pesantren dengan gerak perubahan masyarakat di sekitarnya, barangkali relevan untuk dipinjam guna memahami hal-ihwal yang terjadi sesungguhnya.

Dengan merujuk betapa *pesantren buruh pabrik* yang ada dewasa ini memiliki akar historis masa lalu, khususnya dilihat dari kehadiran santri di atas prinsip "belajar sambil bekerja" atau sebaliknya "bekerja sambil belajar" sebagaimana dikemukakan terdahulu, akhirnya sampai pada lingkup pemahaman lebih lanjut tentang *fleksibilitas* atau *kelenturan* jenis lembaga pendidikan Islam tersebut dalam beradaptasi dengan aneka macam situasi dan perubahan sosial yang terjadi hingga di zaman modern sekarang ini. Jika di awal dan menyertai pertumbuhan *pesantren konvensional,* ada santri yang belajar sambil bekerja di sektor pertanian, tidaklah mengherankan jika dewasa ini muncul *pesan*

tren industri yang santrinya belajar sambil bekerja di pabrik atau perusahaan. Dalam setiap perubahan zaman dan keadaan yang terjadi di negeri ini, tampaknya lembaga pesantren mampu melakukan penyesuaian diri sedemikian rupa, sehingga berhasil mempertahankan atau bahkan mengembangkan eksistensinya di tengah kehidupan masyarakat dari masa ke masa.

C. Pesantren Buruh Pabrik dalam Perspektif Pendidikan Islam

Selaras dengan munculnya beberapa prinsip kependidikan baru, sebagai bagian penting dari pengembangan sumber daya manusia di era global seperti *pendidikan untuk semua, menuntut ilmu sepanjang hayat, mengawalkan permulaan waktu belajar dan mengakhirkan penyudahannya, belajar untuk hidup, dan belajar tanpa batas,*[10] kehadiran pesantren buruh pabrik, kiranya memiliki signifikansi tersendiri. Pemahaman ini, antara lain didasarkan pada kenyataan, betapa banyak kalangan pekerja yang terjun ke dunia industri dengan membawa permasalahan masa lalu di bidang pendidikan. Sebagaimana diketahui, mayoritas tenaga kerja di negeri ini kualifikasi pendidikan mereka tergolong rendah, sebagian besar karena kesulitan biaya. Dengan bekerja di pabrik, maka permasalahan ekonomi menjadi relatif terpecahkan, dan mengarah ke langkah positif manakala sebagian daripadanya dimanfaatkan untuk kembali menuntut ilmu pengetahuan yang dahulu pernah terputus karena faktor biaya.

Dalam perspektif pendidikan Islam, muncul dan berkembangnya pesantren buruh pabrik, secara khusus merupakan *langkah terobosan* dan sekaligus *jembatan baru* yang besar artinya, seperti

[10] Tentang dinamika prinsip kependidikan yang terus mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, lihat, Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Suatu Teori Pendidikan* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1987), hlm. i.

bagi pengembangan sumber daya insani, peningkatan kualitas kehidupan, pencegahan tindak kemaksiatan, dan respons konstruktif terhadap hari depan. Bagaimana memaknai keterkaitan pesantren buruh pabrik dengan dunia pendidikan Islam, atau lebih tegasnya menempatkan sudut pandang pendidikan Islam dalam memahami secara mendalam kehadiran pesantren buruh pabrik di kawasan industri modern dewasa ini, khususnya dalam lingkup beberapa peran tersebut di atas, secara berurutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Insani

Salah satu tugas dan fungsi pendidikan Islam yang utama adalah bagaimana mengembangkan potensi dasar manusia (*fitrah*) yang dibawa sejak lahir, agar tumbuh dan mencapai kesempurnaannya secara maksimal, sebagai pribadi muslim yang paripurna, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam, jelas memerlukan proses dan usaha sedemikian untuk mencapainya. Harus dilakukan secara bertahap, cermat, dan penuh kesungguhan. Dalam perspektif inilah, ada titik relevansinya bagi sementara pendapat yang menyatakan, bahwa pendidikan Islam adalah terjemahan dari kata *tarbiyah* dalam bahasa Arab, yang diartikan sebagai perbuatan mendidik, mengasuh, dan menumbuhkan potensi manusia.[11]

Kata *al-Tarbiyah al-Islamiyah* (pendidikan Islam), berasal dari akar kata *rabba, yurabbi, tarbiyah,* yang cakupan makna aslinya sangat luas; mengingat secara etimologi ada keterkaitan, misalnya dengan ungkapan *al-hamdu lillahi rabbi al-'alamin,*

---

[11] Aliah Scheifer, "The Role of Moslem Mother in Education in Contemporary Society," dalam, *Muslim Education Quarterly,* Vol.V, No.2 (United Kingdom: The Islamic Academy, 1988), hlm. 34. Juga Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam,* alih bahasa Haidar Bagir, penyunting Jalaludin Rahmat, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 75.

segala puji bagi Allah, *Tuhan* semesta alam.[12] Di situ, kata *Rabb* (*Rabbi*) diartikan dengan *Tuhan*. Padahal keberadaan dalam konteks semesta alam ini, sungguh memiliki peran yang sangat besar, luas, bahkan tak terbatas. Dalam kaitan manusia, jelas peran tersebut bukan terbatas pada perbuatan mendidik, mengasuh, dan menumbuhkan potensinya; melainkan juga melindungi, mengatur, membimbing, melimpahkan kasih sayang, menyediakan fasilitas kehidupan, dan lain sebagainya.

Dengan cakupan makna yang sedemikian luas, pendidikan Islam (al-*Tarbiyah al-Islamiyah*), secara teoretis memiliki konsep pengembangan sumber daya insani yamg sangat komprehensif. Dalam konteks institusi dan aktivitas edukatif di pesantren buruh pabrik, terapan konsep teoretis semacam ini, antara lain terlihat dari munculnya kesadaran di kalangan santri-pekerja untuk senantiasa belajar dan mengembangkan diri di sela-sela kesibukan rutin sehari-hari, sementara kalangan ustadz atau pengelola pesantren berusaha mengajar dan membimbing mereka secara bijaksana dengan langkah serta perlakuan yang sebaik-baiknya. Pelaksanaan konsep *tarbiyah* di lingkungan lembaga dan kegiatan edukatif pesantren buruh pabrik, arahnya bukanlah sekedar bagaimana mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi sekaligus juga membimbing santri-pekerja agar hidup di atas jalan kebenaran, bersifat jujur, giat bekerja, bersikap hemat, rajin menabung dan semacamnya, sehingga diharapkan berujung pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusia dalam arti yang selas-luasnya.

Di tengah citra kalangan buruh yang seringkali cukup memprihatinkan, seperti tergambar dari posisi mereka yang cenderung terjepit antara tuntutan *produktivitas kerja* di satu pihak, dan *ancaman kecelakaan* di pihak lain,[13] maka pengembangan potensi

---

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain Asy-Syarifain li Thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, 1983), hlm. 5.

dan sumber daya mereka, sebagai upaya keluar dari permasalahan yang senantiasa menjerat, dan selanjutnya berfungsi untuk bekal menyongsong hari depan yang lebih baik, merupakan langkah rasional sekaligus manusiawi. Oleh karena, soal produktivitas kerja dan sekaligus kemampuan menghindari kecelakaan di pabrik atau perusahaan misalnya, sebagaimana diketahui, berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kecermatan seseorang dalam menjalani profesi tersebut sehari-hari, yang bila dilacak akan sampai ujungnya pada kualitas sumber daya yang bersangkutan. Langkah yang ditempuh oleh pesantren buruh pabrik, dalam banyak hal memang terkait dengan upaya pengembangan sumber daya insani sebagai dimaksud.

2. Peningkatan Kualitas Kehidupan

Apa yang tergambar dari profil kehidupan buruh pabrik, dengan keharusan bekerja keras di satu pihak dan tingkat penghasilan yang kurang memadai pada pihak lain, sesungguhnya merupakan sesuatu yang acapkali cukup memprihatinkan. Akan tetapi, kalau dicermati secara mendalam, di saat mereka tinggal di desa atau daerah asal pun, juga sudah menghadapi banyak masalah, seperti begitu sulitnya mencari pekerjaan, prasarana kehidupan yang kurang layak apalagi memadai, gejala umum dekadensi moral di kalangan remaja dan sebagainya. Begitu sampai di kota dan memperoleh pekerjaan di sebuah kawasan industri, kualitas kehidupan buruh itu pun, menurut sementara pendapat justru mengalami kemerosotan, antara lain disebabkan oleh menonjolnya paradigma kapitalistik yang cenderung mengabaikan kebutuhan psikis dan humanitas mereka dalam kehidupan sehari-hari.[14]

[13] Razif, "Pengalaman Kelas Buruh dan Industri Manufaktur di Indonesia," dalam, Aris Wibawa, *Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik,* (Yogyakarta: Fisipol Universitas Atmajaya & Lapera Pustaka Utama, 1998), hlm. 22-23.

[14] Lihat, Seyyed Hossein Nasr, *Islam and The Plight of Modern Man,* (London: Longman, 1975), hlm. 77.

Terjadinya gejala dan proses dehumanisasi di kalangan buruh pabrik, antara lain ditandai oleh tercerabutnya kehidupan mereka dari akar-akar tradisi budaya semula, dan lebih dari itu juga terkikisnya nilai-nilai spiritual. Menurut bahasa psikoanalisis, kehidupan dunia industri yang bersifat mekanistis itu, cenderung melahirkan sosok manusia mesin, atau dalam istilah teknisnya disebut sebagai *homo mechanicus, aotomaton man,* dan *homo consumens.*[15] Dalam ketidakberdayaan secara intelektual dan ekonomi, kalangan buruh pabrik tergiring untuk mengikuti irama kehidupan industri, di mana tanpa disadari telah mengidentikkan aktivitas rutin mereka sehari-hari dengan proses memproduksi sesuatu, yang prinsipnya adalah bagaimana dapat memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hitungan matematis kebendaan yang begitu dominan, menyebabkan derajat kemanusiaan mereka bergerak meluncur, menjadi tidak lebih sekedar barang.[16]

Dalam perspektif pendidikan Islam, kualitas kehidupan manusia diukur dari sejauh mana kesadaran, kesempatan, dan kemampuan yang bersangkutan dalam menegakkan prinsip-prinsip agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.[17] Jadi, lingkup kriterianya mencakup segala aspek kemanusiaan yang hakiki secara *berimbang,* antara kebutuhan lahir dan batin, fisik-material dan sekaligus mental-spiritual, pemenuhan hajat kesejahteraan duniawi di satu pihak dan kebahagiaan ukhrawi pada pihak lain. Manusia wajib berikhtiar untuk mencapai kualitas hidup di dunia secara maksimal, tetapi jangan sampai membuat dirinya terlena, hanyut tanpa kendali, dan akhirnya terperosok ke jurang kesengsaraan yang justru bersifat kekal dan abadi. Menurut ajaran Islam,

---

[15] Erich Fromm, *The Heart of Man: Its Genius of God and Evil,* (New York: Harper & Row, 1964), hlm. 57-59.

[16] *Ibid.,* hlm. 57.

[17] Md. Ali Alhamidy, *Jalan Hidup Muslim,* hlm. 5-7.

dunia ibarat kebun untuk menanam kebaikan dan prestasi kehidupan, yang bakal dinikmati hasilnya kelak di akhirat.

Dicapainya kesadaran dan keberhasilan seseorang dalam memahami dan mengamalkan tata nilai yang menjunjung tinggi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan sebagai kriteria meningkatnya kualitas kehidupan, jelas memberikan indikasi betapa kehadiran pesantren buruh pabrik membawa visi dan misi sedemikian rupa, khususnya dalam membangun dan menjaga keseimbangan hakikat dan makna hidup ini dalam arti yang sesungguhnya. Prinsip atau tata nilai agama, adalah pondasi dan tiang penyangga utamanya. Agama, dalam hal ini ajaran Islam, sangat mendorong penggunaan akal dalam mencapai prestasi kehidupan, menghormati hak hidup dan kehalusan budi manusia, melindungi harta benda selama diperoleh dengan cara dan dimanfaatkan untuk tujuan yang benar, dan menjaga kelestarian umat manusia di bumi ini melalui pengaturan tata cara berkeluarga yang sebaik-baiknya.

Dengan demikian, kehadiran pesantren buruh pabrik berfungsi ibarat sebuah jembatan penghubung, antara kehidupan dunia industri yang cenderung bersifat materialistis dan kering dari atmosfir spiritual di satu pihak, dan dunia keagamaan "*tradisional*" yang dalam banyak kasus cenderung miskin kebendaan nemun kaya akan sentuhan ruhaniah dan religius di pihak yang lain. Kemungkinan dunia industri dapat mengantarkan pelakunya untuk merengkuh kenikmatan duniawi, setidaknya yang tampak sekilas di permukaan, memang benar demikian adanya. Akan tetapi, perjalanan hidup manusia tidaklah selesai dan laik diukur hanya semata-mata atas dasar keberhasilan duniawi. Kehidupan akhirat yang jauh lebih panjang rentang waktunya, malah bersifat kekal abadi, tidak rasional kiranya jika diabaikan begitu saja, tanpa kesadaran untuk mempersiapkan bekal, sebagai kesinambungan dan bagian integral dari langkah dan perjuangan hidup di dunia.

Peningkatan kualitas kehidupan buruh pabrik, atau seluruh pelaku dunia industri pada umumnya, dengan demikian, mestilah diukur dan ditempatkan secara proporsional dari sudut pandang, bagaimana dan sejauhmana mereka berhasil mencapai prestasi profesional beserta akibat positifnya bagi kesejahteraan duniawi di satu pihak, dan bagaimana, serta sejauhmana keberhasilan tersebut dipadu dan dirangkai sedemikian rupa dengan kesadaran dan upaya mengharmoniskannya dengan ilmu dan amaliah keagamaan, sebagai pemberi sinar dan jalan terang mengenai hakikat sesungguhnya kehidupan ini pada pihak yang lain. Kehadiran buruh pabrik untuk bekerja di kawasan industri sebagai upaya mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang mereka alami sebelumnya, merupakan langkah awal untuk membangun kualitas kehidupan. Kesadaran untuk memilih tinggal dan memanfaatkan sebagian waktunya guna belajar di lingkungan pesantren, antara lain dalam rangka mengembangkan keterampilan profesi, adalah tahap ikhtiar berikutnya. Dan apa yang mereka lakukan untuk menyeimbangkan kesemuanya itu dengan pendalaman ilmu dan amaliah keagamaan, adalah proses akhir dari rangkaian upaya peningkatan kualitas kehidupan sebagai dimaksud dalam arti yang seluas-luasnya.

3. Pencegahan Tindak Kemaksiatan

Masyarakat industri yang dalam banyak kasus bersifat sekuler,[18] cenderung menemukan lahan subur untuk berkembang ke arah yang sifatnya mendesak atmosfer kehidupan sakral, dan sekaligus mempersempit, serta melemahkan ruang gerak agama.[19] Dari kecenderungan terciptanya kondisi seperti itulah, realitas

[18] Lihat, Hermawan Sulistio, *Palu Arit di Ladang Tebu,* (Jakarta: KPG, 2000), hlm. 11.

[19] Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama,* terjemah Abdul Muis Naharong, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 60.

umum kehidupan di lingkungan dunia industri, kalangan pekerja atau kaum buruh pada khususnya, sering ditemukan mengalami deviasi perilaku sehari-hari, seperti mabuk-mabukan dengan minuman keras atau obat terlarang, bermain judi, dan penyimpangan seksual.[20] Kemungkinan muncul dan membudayanya tingkah laku menyimpang, atau dalam bahasa agama disebut "tindak kemaksiatan" di kalangan mereka yang berprofesi dan hidup di lingkungan seperti itu, agaknya merupakan sesuatu yang sudah dianggap lumrah dan memang begitulah kebiasaan yang terjadi di mana-mana.

Atas dasar itulah, rencana atau upaya membangun pabrik, perusahaan atau lebih-lebih kawasan industri baru, cenderung diasosiasikan dengan bakal muncul dan menjamurnya berbagai jenis kemaksiatan di daerah tersebut, seperti diskotik, bar atau kelab malam, panti pijat, prostitusi, lokalisasi perjudian, dan warung-warung penjual minuman keras. Hampir-hampir selalu mengesankan adanya korelasi positif antara pembukaan, pengembangan dan kemajuan dunia industri di satu pihak, dengan muncul, tersebar, dan semakin merajalelanya perilaku maksiat di kalangan warganya pada pihak lain. Seolah-olah, kemaksiatan adalah syarat penting, tak terhindarkan, bahkan mutlak adanya bagi daerah atau wilayah manapun yang hendak menjadikan dirinya sebagai kawasan industri. Atau dengan kata lain, tanpa disediakannya sarana, pelaku, dan sentra-sentra kemaksiatan sedemikian rupa, industrialisasi tidak akan muncul di suatu kawasan, berkembang, dan mengalami kemajuan.

Sementara, entah secara kebetulan atau boleh jadi sudah tersurat dalam rencana Tuhan, daerah-daerah yang secara geografis maupun ekologis cocok untuk membuka dan mengembangkan

[20] Lihat, A. Hamid, *Agama dan Industrialisasi: Hubungan Pendidikan Islam dan Prilaku Seksual Pekerja Industri,* laporan hasil penelitian, (Surabaya: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, IAIN Sunan Ampel, 1996), hlm. 68.

kawasan industri, khususnya di persada Nusantara ini, banyak di antaranya justru berpenduduk mayoritas muslim yang taat atau dalam formulasi lain tergolong kategori *santri*.[21] Bisa disebutkan, misalnya kawasan Batam di Riau, Pulo Gadung dan Tanjung Priok di Jakarta, kawasan Rungkut dan Tandes Surabaya, kawasan Buduran di Sidoarjo, Rembang di Pasuruan, Ngoro di Mojokerto, Kebomas di Gresik, kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) pada umumnya, atau lebih khusus lagi Pulau Madura yang ketika studi ini dilakukan juga tengah dirancang sebagai kawasan industri baru, semua daerah tersebut sejak masa lalu atau asal mulanya dihuni oleh kaum muslimin yang mayoritas tergolong santri atau taat beragama.

Begitu terjadi proses industrialisasi, dalam banyak hal, atau bahkan segala sesuatunya mengalami perubahan. Bukan terbatas pada timbulnya akselerasi kemajuan dan naiknya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama yang memang sejak mula ingin dicapai, melainkan bersamaan dengan itu juga terjadi kemerosotan moral, yang secara mencolok ditandai oleh bermunculan dan maraknya tindak kemaksiatan di masing-masing kawasan tersebut. Kecurigaan, keengganan, dan malah kebencian kalangan santri, lebih-lebih para tokoh dan ulamanya, terhadap munculnya sentra-sentra pengembangan industri di negeri ini, sesungguhnya bukan karena anti kemajuan, melainkan didasari oleh kesan, pengetahuan dan fakta empiris yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri, betapa kehidupan masyarakat yang sehari-harinya terlibat dalam aktivitas keduniaan di bidang industri, memang kenyataan banyak di antara mereka terlibat dalam kemaksiatan sebagai dimaksud.

---

[21] Sementara definisi menyatakan, santri adalah orang Islam yang memeluk agamanya dengan penuh kesungguhan, taat menjalankan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Coorporation in Islamic Studies (INIS), 1988), hlm. 5-8.

Dalam perspektif pendidikan Islam, yang namanya "perbuatan maksiat" apapun wujudnya, jelas merupakan sesuatu yang harus dicegah, dihindari, dan sedapat mungkin ditempuh jalan secara bijak untuk mengikisnya dari panggung kehidupan ini. Oleh karena, sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an, surat asy-Syams ayat 8, Allah mengilhamkan kepada setiap diri manusia dua pilihan jalan hidup sekaligus, yaitu *kefasikan* dan *ketaqwaan.*[22] Melalui dua pilihan tersebut, berarti ada *kebebasan* dan sekaligus *keadilan* bagi siapa pun untuk menentukan dan menempuh jalan hidup, apakah ingin menuju ke arah *surga,* atau sebaliknya memang sudah mantap sedemikian rupa untuk menjadi penghuni *neraka.* Adalah sesuai dengan prinsip kebebasan dan keadilan, jika seseorang berjuang keras dalam hidup ini untuk senantiasa menjadi hamba yang *bertaqwa,* dan karena itu memperoleh balasan surga kelak di akhirat. Begitu pula sebaliknya, prinsip kebebasan dan keadilan pastilah berkata, merupakan konsekuensi logis untuk mendapat hukuman neraka bagi siapapun yang membiarkan diri bergelimang dalam *kefasikan, kemaksiatan,* dan *perbuatan dosa.*

Kaidah *amar ma'ruf nahi munkar,* atau lengkapnya *al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar,* artinya mengajak dan mendorong ke arah perbuatan baik dan sebaliknya mencegah atau melarang perbuatan jelek, memang begitu sentral posisinya dalam ajaran Islam, dan secara otomatis juga institusi dan aktivitas pendidikannya. Pada lingkup pesantren buruh pabrik, adalah perbuatan *ma'ruf* dan mengarah terwujudnya *ketaqwaan,* ketika seorang kiai atau para ustadz membimbing kalangan santri-pekerja untuk senantiasa memperkokoh iman, memperluas ilmu pengetahuan, dan menjadikan diri mereka terampil dalam melakukan amal kerja sesuai dengan profesi yang digeluti sehari-hari. Sementara, upaya menuju ke arah tersebut akan terhambat atau

---

[22] Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 1064.

bahkan gagal, manakala tindak kemaksiatan dan kemungkaran tetap berkembang merajalela. Atas dasar itulah, diperlukan upaya penguatan trilogi *iman, ilmu, dan amal,* melalui pemupukan di bidang *akidah,* pembiasaan sedemikian rupa dalam hal *ibadah,* dan pembudayaan hidup di atas prinsip *akhlaqul karimah.*

Selaras dengan apa yang *tersurat,* dan boleh jadi juga yang sesungguhnya *tersirat* atau dikehendaki oleh isyarat ayat suci al-Qur'an tersebut, bahwa di situ penempatan kata kefasikan (*fujur*) terletak dalam posisi di muka atau lebih dulu daripada kata ketaqwaan (*taqwa*). Tidak ada yang tanpa makna dan tujuan, dari apa dan bagaimana sesuatu termaktub dan disusun tata letak redaksinya sedemikian rupa dalam kitab suci al-Qur'an. Sehubungan itu, kefasikan (*fujur*) terletak di bagian awal, dan baru disusul ketaqwaan (*taqwa*) sesudahnya, oleh karena menurut realitas empirik yang gampang sekali dilihat pada kenyataan sehari-hari, bahwa kecenderungan anak manusia untuk berprilaku jelek dan bila dibiarkan tanpa kontrol atau bimbingan akan menjadi pribadi yang jahat, dalam praktik lebih besar dari kemungkinan alternatifnya untuk berusaha menjadi orang baik dan terpuji, yang hidupnya bermanfaat bagi kepentingan agama, masyarakat, dan bangsa.

Atau dalam formulasi lain, untuk menjadi orang jelek atau bahkan jahat yang segenap rentang hidupnya dipenuhi oleh tindak kemaksiatan dan kefasikan, biasanya tidak memerlukan energi khusus, upaya terencana, dan pembiayaan yang disiapkan sedemikian rupa. Tidak pernah terdengar yang namanya kursus atau sekolah kejahatan. Begitu seseorang membiarkan diri atau terjerumus ke lembah kejelekan, seperti melalui pergaulan tanpa dirancang dan sengaja dengan orang-orang jahat, maka begitu mudah baginya untuk kemudian menjadi penjahat pula. Sementara itu, untuk menjadi orang baik, katakanlah yang beriman, berilmu dan beramal saleh dalam perjalanan hidupnya, jelas memerlukan

proses, usaha dan perjuangan, yang seringkali disertai oleh banyak pengorbanan. Di sinilah letak rasionalitas-teoretis dan sekaligus realitas-empirisnya, mengapa istilah kefasikan ditempatkan dalam posisi lebih dahulu dari istilah ketaqwaan sebagaimana tercantum dalam ayat tersebut di atas.

Kehadiran aktivitas pendidikan Islam, yang dalam kaitan ini diwakili oleh pesantren buruh pabrik, boleh dikatakan mengemban peran sebagai pihak yang berdiri antara dua kemungkinan berkembangnya potensi dasar manusia: apakah cenderung ke arah *fujur*, di mana kemaksiatan atau kefasikan inklusif ke dalamnya; atau kebalikan dari itu bergerak ke arah *taqwa*, termasuk bagaimana menyelamatkan santri-pekerja dari tindak kemaksiatan, melalui pengokohan *iman, ilmu, dan amal saleh* yang diselaraskan dengan implementasi prinsip akidah Islamiyah, pembiasaan ibadah menurut ketentuan yang ada, dan upaya menghias diri dengan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif tata nilai pendidikan Islam, makna kehadiran pesantren buruh pabrik dengan tugas sebagai institusi pencegah tindak kemaksiatan di kalangan santri-pekerja, di samping mengarah pada tercapainya "*kesucian diri*" yang berkonotasi kepentingan akhirat, sekaligus juga diharapkan berefek positif terhadap upaya penciptaan di kalangan kondisi psiko-fisik yang memungkinkan dicapainya peningkatan kualitas profesional mereka dalam kerja industri sehari-hari. Arah tujuan yang terakhir ini dimungkinkan, mengingat perbuatan maksiat seperti pergi ke tempat-tempat hiburan malam, apalagi disertai mabuk-mabukan akibat minuman keras atau obat terlarang, seringkali menyebabkan seseorang pada saat bekerja dihinggapi kelelahan luar biasa, mengantuk yang tidak tertahankan, rasa mual ingin muntah dan sejenisnya, yang semua itu dapat mengganggu atau bahkan membahayakan keselamatan yang bersangkutan, misalnya ketika sedang mengoperasikan mesin industri.

4. Respons Konstruktif terhadap Hari Depan

Munculnya pesantren buruh pabrik di berbagai kawasan industri dewasa ini, satu segi dapat dimaknai sebagai bentuk respons konstruktif dunia pendidikan Islam terhadap hari depan *perkembangan internalnya* di satu pihak, dan sekaligus merupakan wujud inovasi kreatif guna lebih memapankan *peran eksternalnya* bagi kesejahteraan masyarakat secara hakiki pada pihak yang lain. Kedua bentuk respons konstruktif tersebut, antara satu dengan lainnya saling berkaitan. Pengembangan internal dunia pendidikan Islam melalui kehadiran pesantren buruh pabrik, adalah keniscayaan yang sedemikian penting artinya bagi eksistensi lembaga itu di masa depan. Sementara, keberadaan suatu institusi dan aktivitas pendidikan di tengah realitas kehidupan pada akhirnya diukur dari apa dan sejauh mana sumbangan yang berhasil diberikan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang sebenar-benarnya.

Nilai konstruktif pesantren buruh pabrik bagi pengembangan internal dunia pendidikan Islam, khususnya di Indonesia, secara umum terlihat dari peran strategis yang dimainkannya dalam ikut mencari jalan keluar dari berbagai krisis atau persoalan serius yang dihadapi,[23] misalnya oleh kalangan pesantren konvensional, madrasah dengan seluruh jenis dan jenjangnya, lembaga pendidikan umum milik organisasi keagamaan, dan sekian bentuk institusi serta aktivitas pendidikan Islam baik yang bersifat *in* atau *non-formal,* seperti yang berjalan di lingkungan keluarga, majelis taklim di masyarakat, dan lain sebagainya. Menurut sementara

---

[23] Sungguhpun dalam banyak hal, dunia pendidikan Islam telah mengalami kemajuan dibanding keadaannya pada masa lalu, namun persoalan yang dihadapinya masih atau bahkan semakin banyak, lebih-lebih di zaman modern dewasa ini. Lebih lanjut, lihat, Syed Sajjad Husain & Syed Ali Ashraf, *Krisis Pendidikan Islam,* alih bahasa dan penyunting, Rahmani Astuti, (Bandung : Risalah, 1986), hlm. 3-4.

hasil analisis,[24] beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam, dalam posisinya selaku subsistem dan bagian integral dari realitas pendidikan di Indonesia, antara lain meliputi: kecenderungan menempatkannya dalam lingkup terpisah dari aspek kehidupan yang lain, seolah ada tembok pemisah antara sekolah dengan masyarakat, corak kurikulum yang menitikberatkan dimensi pengetahuan dan kecerdasan, arah pembentukan jiwa priyayi yang kerjanya di belakang meja, kegiatan belajar dibatasi oleh dinding kelas dan halaman sekolah, masih kuatnya dualisme antara pendidikan umum dan agama, sistem evaluasi yang terfokus pada kemampuan intelektual, menghasilkan lulusan yang serba canggung sehingga menimbulkan pengangguran, dan kesempatan serta keberuntungan cenderung berpihak kepada mereka yang mampu secara ekonomi maupun sosial.

Keterpisahan dunia pendidikan formal dengan aspek kehidupan yang lain, terlihat misalnya dari struktur bangunan fisik suatu madrasah atau sekolah, di samping pola hidup dan tata perilaku sehari-hari di kalangan warga penghuninya, yang mengesankan fungsi tunggalnya sebagai tempat persemaian generasi elite masa depan, sementara realitas kecenderungan masyarakat menghendaki terintegrasikannya semua itu dengan apa yang ada pada mereka, agar tercipta suasana kondusif bagi kemungkinan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain, demi kemajuan bersama di masa depan. Begitu lepasnya keterkaitan antara dunia sekolah dengan masyarakat, sehingga yang namanya "partisipasi bersama" dalam penyelenggaraan pendidikan, kecuali pada kasus sekolah atau madrasah swasta, sejauh ini sangatlah minim.[25]

---

[24] Fuad Armsyari, "Keharmonisan Lingkungan Sebagai Determinan Keberhasilan Pembangunan Bidang Pendidikan: Suatu Analisis Dari Pandangan Islam," dalam, Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam IAIN Sunan Ampel, *Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam,* (Surabaya: Indah Offset, 1986), hlm. 51-52.

[25] Lihat, H.A.R.Tilaar, *Manajemen Pendidikan,* hlm. 13.

Timbulnya kesan begitu kuat, seolah-olah ada tembok atau dinding pemisah antara dunia sekolah di satu pihak, dengan denyut kehidupan riil di tengah masyarakat pada pihak lain, telah menjadi sebab munculnya berbagai konsekuensi yang kurang menguntungkan, di mana masing-masing cenderung berjalan sendiri, tanpa saling berhubungan, apalagi menunjukkan kepedulian satu terhadap lainnya. Kalaulah terjadi hubungan, paling-paling terbatas pada kalangan tokoh masyarakat atau pejabat tertentu, dalam fungsi misalnya sebagai ketua badan penyantun sekolah, atau memang harus berbuat sesuai ketentuan untuk mengurusi bidang-bidang khusus dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan, karena memang didasari alasan dan motivasi tugas.

Sebagai akibat dan konsekuensi logis dari keterpisahan dan adanya tembok pembatas semacam itu, maka dalam hal kurikulum dunia sekolah pun, substansi materinya cenderung kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik kelak sesudah lulus dan terjun ke masyarakat. Apa yang diajarkan kepada mereka seperti biologi, matematika, dan ilmu pengetahuan sosial, dalam banyak kasus kurang mendukung atau bahkan tidak berkaitan sama sekali, ketika akhirnya memasuki dunia kerja yang relatif membuka kesempatan dewasa ini, misalnya di pabrik atau perusahaan, menjadi wiraswasta mandiri, dan lain sebagainya. Kalau pada ujungnya seseorang harus bergulat dengan, katakanlah *angkat-junjung* karung di pabrik, menjajakan dagangan di sebuah gerobak kecil, apalagi sekadar mengandalkan otot untuk mengayuh becak, lalu apa hubungan antara yang dahulu dipelajari dan keperluan praktisnya untuk mencapai keberhasilan dalam pekerjaan yang dijalani sekarang.

Dunia pendidikan formal di Indonesia, hingga masa studi ini dilakukan, masih cenderung berorientasi pada terbentuknya *output* peserta didik yang kurang atau bahkan tidak bersifat mandiri. Terkait dengan corak kurikulum yang pada umumnya diberlakukan, begitu seseorang lulus dari sekolah atau bahkan perguruan

tinggi, bayangannya adalah melamar dan diterima untuk bekerja di sebuah kantor, duduk manis di belakang meja, dan mendapat sebutan atau minimal kesan sebagai priyayi. Padahal jelas, formasi kerja yang sifatnya instan seperti itu, dalam kenyataan hanya sedikit dan akan semakin langka, mengingat kecenderungan terjadinya perampingan birokrasi di mana-mana, sesuai tuntutan globalisasi yang mengharuskan segala kerja dan urusan diselesaikan menurut prinsip efektivitas dan efisiensi. Timbullah kesenjangan, ketidakberdayaan mencari jalan keluar, dan akhirnya kekecewaan banyak orang yang terlibat dalam aktivitas persekolahan itu sendiri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan prakarsa dan keberanian sebegitu rupa, untuk "mendobrak" tembok pembatas antara dunia pendidikan formal di satu pihak, dan realitas kehidupan dengan berbagai aspeknya di tengah masyarakat pada pihak lain. Keberadaan ruang kelas dan halaman sekolah, tidak boleh dipandang sebagai keharusan bagi peserta didik untuk selalu berkutat di dalamnya, melainkan dimulailah upaya membiasakan mereka untuk belajar, mencoba, berlatih, dan mempraktikkan segala sesuatu yang tengah atau telah dipelajari dalam *setting* kehidupan yang sebenarnya. Konsep pendidikan sistem ganda (PSG), kiranya menjadi salah satu alternatif jalan keluar. Tekun belajar di lingkungan komplek sekolah memang penting, tetapi memahami penerapan ilmu misalnya di sawah, pasar, kantor, pabrik dan sejenisnya, juga tidak kalah pentingnya.

Dalam perspektif demikian itulah, kehadiran pesantren buruh pabrik memiliki peran konstruktif, bukan saja dalam wujud fungsi riilnya sekarang sebagai sentra pengajaran, pelatihan, bimbingan, dan keteladanan bagi kalangan santri-pekerja, yang berarti telah menampilkan konsep "pendidikan" dalam pengertian dan aplikasinya yang luas, menyangkut pengembangan teori keilmuan dan realisasi praktik amaliahnya di tengah kehidupan; melainkan sekaligus juga membuka alternatif ke depan tentang bagaimana

mengaktualisasikan konsep pendidikan sistem ganda sebagaimana yang dimaksud dalam bentuk idealnya yang benar-benar mendekati kesempurnaan. Maksudnya, kehadiran pesantren buruh pabrik dimungkinkan kelak akan menjadi "jembatan penghubung" yang teoretis *oriented* di satu pihak, dan dunia industri sebagai medan pengalaman lapangan yang berorientasi praktis di pihak lain.

Oleh karena, kenyataan tetap saja menunjukkan, bahwa realisasi konsep pendidikan sistem ganda, yang salah satu program unggulannya adalah menempatkan peserta didik untuk dalam jangka waktu tertentu melakukan praktik atau magang, katakanlah di kantor atau perusahaan, masih sering mengalami hambatan, di mana tidak setiap sekolah memiliki keberanian dan kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan mitra praktik yang diinginkannya, sementara itu tidak setiap kantor atau perusahaan bersedia dan siap menerima kehadiran murid-murid yang hendak kerja magang di tempatnya. Melalui upaya pengembangan model ideal pesantren buruh pabrik di masa depan, misalnya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang cukup memadai di sebuah lahan khusus yang disiapkan sedemikian rupa pada setiap hendak membangun kawasan industri, disertai manajemen pengelolaan secara profesional, kiranya merupakan alternatif dan terobosan baru dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

Idealitas model pesantren buruh pabrik seperti dimaksud, jika akhirnya benar-benar dapat diwujudkan, betapa pun akan tetap menampilkan wajah dan sifat aslinya sebagai institusi pendidikan dalam pengertian yang luas. Sementara, penempatan lokasinya di kawasan industri, sekaligus akan mempermudah penataannya sedemikian rupa, sehingga benar-benar merefleksikan atmosfer kehidupan industrial, sedapat mungkin seperti apa adanya. Kalaulah tetap sulit untuk dapat memboyong, katakanlah seluruh murid sekolah untuk tinggal di kompleks pesantren buruh pabrik tersebut selama atau dalam rangka kerja praktik mereka,

paling kurang dapat dimintai bantuannya sebagai tempat transit sementara atau sewaktu-waktu, sehingga tetap saja mampu berperan untuk *memperpendek jarak,* antara dunia pendidikan formal di satu pihak dan dunia kerja riil di lapangan pada pihak yang lain.

Dengan memaknai kehadiran pesantren buruh pabrik melalui sisi kreativitas-inovatifnya sebagaimana tergambar di atas, kiranya akan bermanfaat bagi pengembangan dan masa depan dunia pendidikan pada umumnya, internal pendidikan Islam khususnya. Dalam perspektif internal pendidikan Islam, hal sedemikian itu sungguh amat berarti. Oleh karena, lebih dari kesan lemahnya peran yang mampu dimainkan dunia pendidikan secara umum, internal pendidikan Islam justru dibebani lagi oleh citra historis sosiologisnya yang kurang menguntungkan selama ini, seolah merupakan "sisa peninggalan masa lalu" yang cukup jauh, dengan sejumlah indikator ketidakberdayaannya yang seringkali memang sulit terbantahkan. Melalui kemungkinan terobosan yang dapat dimainkan oleh pesantren buruh pabrik seperti itu, diharapkan bakal semakin terbukalah pintu-pintu baru yang dapat dilalui dalam rangka mengembangkan peran konstruktif dunia pendidikan Islam pada masa yang akan datang.

D. Dialog Islam dan Modernisasi

Kehadiran *pesantren buruh pabrik* di kawasan industri dewasa ini, secara makro dapat dimaknai sebagai wujud *dialog* antara *Islam* sebagai agama yang berakar pada masa lalu yang cukup jauh di suatu pihak, dengan *modernisasi* yang merupakan produk dan simbol kemajuan manusia di zaman mutakhir dewasa ini pada pihak yang lain. Gambaran tentang bagaimana terjadinya proses dialog, lika-liku, serta produk akhir yang dihasilkannya, sungguh menarik untuk dicermati. Mengingat di samping kemungkinan terjalinnya hubungan yang bersifat saling memahami, menerima dan memberi antara Islam dengan modernisasi; tidak

jarang pertemuan keduanya juga menimbulkan kecurigaan dan salah paham, ketegangan, dan bahkan pertentangan. Dengan munculnya apa yang dalam studi ini disebut sebagai "pesantren buruh pabrik", terbukalah kesempatan untuk melihat dan mengamati secara mendalam, bagaimana sebenarnya proses dan produk dialog sebagai dimaksud. Lebih jelasnya, hendak dirinci uraiannya sebagai berikut:

1. Titik Awal Memasuki Dialog

Pertemuan yang melahirkan hubungan dialogis antara Islam dengan modernisasi dalam wujud kehadiran pesantren buruh pabrik, paling awal dapat dilacak dari perpaduan dan terjalinnya dua kata: *pesantren* dan *buruh pabrik*. Istilah *pesantren,* atau sering juga disebut *pondok pesantren,*[26] sejauh ini cenderung dikonotasikan sebagai institusi pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai dan corak tradisionalitasnya seperti banyak berlokasi di pedesaan, dikelola sedemikian rupa dengan mempertahankan tradisi masa lalu secara turun-temurun, dan berorientasi kepada pengajaran ilmu-ilmu keagamaan, khususnya yang terhimpun dalam "kitab kuning". Sementara, *buruh pabrik* menggambarkan profesi kerja dunia modern di perkotaan, dengan tata kehidupan dan pola budaya yang dalam banyak hal kontras atau malah bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh dunia pesantren.

Namun begitulah kenyataannya, dua kosakata yang secara historis-kultural berasal dari masing-masing entitas yang berbeda itu, akhirnya menemukan wadah "perkawanan" di tengah kesibukan dunia industri, ketika zaman sudah menjadi sedemikian modern dewasa ini. Istilah "pesantren buruh pabrik", akhirnya muncul atau sengaja ditampilkan ke permukaan, mengingat begitulah

[26] Tentang penggunaan istilah pesantren dan atau pondok pesantren, lebih jauh lihat, Sudjoko Prasodjo, dkk, *Profil Pesantren,* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 16.

kalangan yang terlibat dalam institusi edukatif-keislaman itu cenderung mengidentifikasi diri, atas dasar kenyataan dilakukannya aktivitas pembinaan keagamaan bagi *para santri-pekerja.* Digunakannya istilah "pesantren", yang secara etimologi berasal dari *pe-santri-an,* yakni tempat berkumpulnya sekelompok santri,[27] karena memang di situ ada sekumpulan orang dengan posisi selaku murid atau peserta didik yang melakukan aktivitas belajar agama Islam.[28] Kenyataannya, sekumpulan orang itu adalah mereka yang sekaligus berkedudukan sebagai *buruh* pada sektor industri di lingkungan pabrik atau perusahaan tertentu. Karenanya, istilah "*buruh pabrik*" dipakai, dalam rangka memberi sifat atau ciri khusus bagi kehadiran institusi dan aktivitas edukatif-religius tersebut, sehingga menjadi jelas identitasnya di tengah sekian jenis lembaga pesantren yang ada di negeri ini.

Apakah setiap kelompok orang yang berkumpul dalam rangka mempelajari agama Islam, bisa disebut "santri" dan tempat belajarnya dinamakan "pesantren"? Dari sinilah, titik awal terjadinya dialog mulai tampak; dengan kemungkinan munculnya variasi pendapat antara yang menolak dan menyetujuinya. Bagi kalangan yang cenderung menolak penggunaan istilah dan pemahaman semacam itu, barangkali didasari alasan, bahwa selain istilah *santri toh* masih ada sebutan lain, misalnya *siswa* atau *murid,* yang juga biasa dipergunakan untuk menamai mereka yang tengah belajar di lembaga pendidikan Islam. Mengingat, kalau sekadar orang berkumpul guna mempelajari ilmu agama Islam, bisa jadi belum layak disebut sebagai santri, karena untuk sampai ke predikat itu

---

[27] Arti *pesantren* sebagai tempat berkumpulnya para santri untuk belajar agama Islam, lihat, Manfred-Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial,* (Jakarta:P3M, 1986), hlm. 16.

[28] Dalam konotasi edukatif-keislaman, santri adalah sebutan khusus untuk murid-murid sekolah agama-Islam. Lihat, Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda,* alih bahasa S. Gunawan, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), hlm. 25.

diperlukan syarat, yakni sudah melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan penuh ketaatan. Padahal, mereka yang sedang belajar semacam itu, logikanya pastilah masih dalam proses menuju ke arah sana; jadi belum sampai dan mencapai kategori santri dengan konotasi sebagai dimaksud.

Selaras dengan penetapan kriteria tersebut, maka istilah "pesantren"–menurut kelompok ini–hanya dipergunakan secara khusus untuk menyebut institusi pendidikan Islam yang dikelola secara "tradisional", dengan elemen pendukung terdiri dari: kiai dibantu oleh para stafnya, sejumlah santri yang tengah mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, kamar-kamar pemondokan untuk tempat tinggal mereka, rumah ibadah baik masjid ataupun mushalla, dan pengajaran kitab kuning yang merupakan ciri khasnya,[29] sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Gambaran riil perwajahan dalam konotasi pengertian seperti ini, misalnya adalah Pesantren Tebuireng di Jawa Timur dan Pesantren Krapyak di Yogyakarta. Pesantren Gontor, Ponorogo, yang cukup besar dan amat terkenal itu pun, kenyataannya mengidentifikasi diri dengan sebutan "pesantren modern", karena memang ada ciri khas yang membedakannya dengan pesantren "tradisional" dan atau "konvensional" yang jauh lebih banyak jumlahnya di negeri ini. Apakah dalam makna dan pengertian seperti itu, pesantren buruh pabrik memenuhi syarat-syarat dan kriteria sebagai dimaksud?

Sebaliknya, bagi orang yang setuju penggunaan istilah "pesantren buruh pabrik", boleh jadi akan bertolak dan memegangi pengertian "santri" dalam konteks edukatif-religius, sebagai orang yang tengah mempelajari ilmu dan amaliah keagamaan di sebuah institusi dan aktivitas pendidikan Islam dengan ciri-ciri seperti tersebut di atas, tetapi minus keharusan penuh untuk menjadikan "kitab kuning" sebagai materi utama pengajarannya. Dalam kono-

[29] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren,* hlm. 44.

tasi pengertian seperti ini, gambaran fisik dan atmosfer kehidupan sehari-hari di lingkungan "pesantren buruh pabrik" seperti dimaksud, memang tidak secara mutlak persis sama dengan apa yang biasa terjadi dan terasakan di lingkungan "pesantren konvensional". Di samping tetap kelihatan unsur-unsur kesamaannya, ada juga nuansa perbedaan pada segi tertentu, sebagai manifestasi dan konsekuensi logis terjadinya dinamika internal dunia pesantren, sesuai dengan realitas perubahan zaman dan keadaan.

Kemungkinan dipergunakannya istilah "pesantren buruh pabrik" dalam konotasi pengertian semacam itu, di sisi lain juga dapat dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga "pesantren" pada umumnya, yakni berusaha membentuk peserta didik dan masyarakat luas agar menjadi pemeluk agama Islam yang berkategori "santri", dan bukan sekedar "muslim" dalam pengakuan dan catatan formal belaka. Padahal jelas, yang namanya peserta didik ataupun anggota masyarakat itu ada di mana-mana, hidup dalam lingkup zaman dan keadaan yang berbeda-beda. Dengan menerima kenyataan munculnya jenis "pesantren buruh pabrik" dewasa ini, berarti ada kearifan dan kelenturan dunia pesantren itu sendiri, untuk senantiasa mengemban tugas mulianya di tengah kehidupan yang terus berubah.

2. Dialog Psikologis

Perjumpaan antara dunia *pesantren* dengan kehidupan *buruh pabrik,* atau *Islam* dengan *modernisasi* dalam format semacam itu, bukanlah terjadi dan melahirkan jalinan begitu saja secara tiba-tiba. Melainkan, pada awal mula gerakan modernisasi lewat jalur industri digulirkan oleh pihak pemerintah, pernah terjadi "keterkejutan" sedemikian rupa di kalangan institusi keislaman dan sejumlah tokoh kaum muslimin, yang diekspresikan dalam bentuk kritik tajam dan bahkan perlawanan terhadapnya. Program industrialisasi selaku motor penggerak modernisasi, ketika itu

dipandang sebagai "ancaman" terhadap eksistensi agama dalam arti yang seluas-luasnya.[30] Sejumlah kasus, seperti dalam wujud terisolasi dan kemudian bubarnya *pesantren tradisional* yang kebetulan berlokasi di sekitar kawasan industri baru, sering ditunjuk sebagai bukti nyata betapa ancaman tersebut memang ada, dan meninggalkan bekas kekecewaan, dendam, kebencian, dan kepedihan di kalangan pihak-pihak yang menjadi pendukungnya.

Bagi sementara kalangan institusi dan tokoh keagamaan, hadirnya proyek-proyek industri besar akan menimbulkan gangguan serius terhadap akidah, ibadah, dan akhlak masyarakat, generasi muda kaum muslimin pada khususnya. Dari keteguhan iman kepada Tuhan yang direalisasikan misalnya dalam bentuk ketekunan ibadah di masjid atau mushalla, kebiasaan mengaji al-Qur'an dan mempelajari ilmu agama di rumah-rumah, di pesantren atau madrasah, dan penerapan akhlaqul karimah dalam pergaulan hidup sehari-hari, akhirnya bergeser ke fokus kesenangan duniawi secara berlebihan dan sulit dikendalikan, seperti kecederungan berlomba-lomba mengejar harta, menggunakannya untuk kepentingan maksiat, disertai munculnya aneka hiburan malam, tempat perjudian, lokalisasi pelacuran, warung-warung penjual minuman keras, yang biasanya diikuti oleh maraknya tindak kriminalitas.[31]

---

[30] Gambaran betapa khawatir dan cemasnya umat beragama, khususnya di kalangan pimpinan institusi keislaman dan para tokoh kaum muslimin, terhadap dampak negatif industrialisasi sebagai bagian penting dari program modernisasi di Indonesia ketika pertama kali digulirkan oleh pemerintah, lihat, A. Mukti Ali, *Pelbagai Persoalan Islam di Indonesia Dewasa ini,* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1971), hlm. 5.

[31] Dalam sebuah analisis keilmuan, ada sementara ahli yang sampai pada kesimpulan, bahwa industrialsme dapat melahirkan bahaya, antara lain dalam wujud *potensialities for evil,* akar masalah bagi munculnya segala benih kejahatan. Lihat, Barry Smart, *Modern Conditions: Postmodern Controversies,* (London: Routledge, 1992), hlm. 28.

Semua itu terjadi, karena industrialisasi berasal dari peradaban Barat yang dikenal berpandangan sekuler, tidak peduli atau malah banyak di kalangan pelakunya yang acuh atau bahkan menolak agama dan berbagai ikatan tradisi yang menyertainya.[32] Sementara pihak-pihak yang pertama kali membawa, memasukkan ke Indonesia, dan menerapkannya dalam program modernisasi ekonomi berskala besar, juga orang-orang yang dikenal tidak begitu akrab dengan pola kehidupan religius dan kecenderungan mayoritas kaum santri di negeri ini, seperti konglomerat Cina, kalangan teknokrat sekuler, pelaku bisnis kelompok abangan, dan lain sebagainya.[33] Di lain pihak, kaum santri sendiri jarang memiliki kemampuan ilmu maupun teknis untuk bergabung dalam pengelolaan industri tersebut, mengingat latar belakang sejarah dan proses pendidikan yang tidak menguntungkan bagi mereka, jauh sejak masa penjajahan dahulu sampai ketika program industrialisasi mulai gencar dilaksanakan.[34]

Padahal sesuai dengan fakta historis dan juga kesadaran umum yang tumbuh di masyarakat, andil dan jasa umat Islam termasuk kalangan ulama dan para santri dalam perjuangan kemerdekaan di negeri ini, sangatlah besar.[35] Bahkan karena begitu gigih menentang penjajahan, akhirnya terjadi proses "uzlah" di kalangan kiai dan lembaga pesantren, dengan kepergian mereka

---

[32] Lihat, Kenneth Thomson, "Religion, Values, and Ideology," dalam, Stuart Hall, et.al (eds.), *Modernity: An Introduction to Modern Societies,* (Cambridge: Blackwell Publisher Inc, 1996), hlm. 398.

[33] Dalam realitas sosiologis di Indonesia, perbedaan paham, tata kehidupan dan persaingan antara kaum *santri* dengan *abangan* dan juga kalangan *nasionalis sekuler,* adalah fakta yang memang demikian adanya dari masa ke masa. Lihat, antara lain, Abdurrachman, *Kepemimpinan Dalam Administrasi Pembangunan di Jawa Timur,* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1982), hlm. 40-41.

[34] Lihat, Nurcholish Madjid, dkk, *Aspirasi Umat Islam,* (Jakarta: Leppenas (Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional, 1983), hlm. 3.

[35] A. Mukti Ali, *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia,* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Nida, 1971), hlm. 18-19.

untuk menyingkir ke wilayah pedesaan, ada kalanya sampai ke pelosok nun jauh dari kota atau pusat kekuasaan, sebagai wujud oposisi dan sikap patriotis yang tidak mengenal kompromi.[36] Tetapi karena justru sedemikian konsisten memegang prinsip, tidak mau berkolaborasi dengan penjajah dan kaki tangannya itulah, di kemudian hari mengalami kondisi yang cukup fatal dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga akhirnya tersingkir dari orbit kehidupan modern, antara lain sebagaimana tercermin dari ketidakmampuan mereka untuk ikut terlibat dalam pengelolaan industri tersebut.

Bagaimana pun juga, efek psikisnya yang sangat mendalam adalah timbulnya perasaan kecewa, marah, sakit hati, dan benci di kalangan kaum santri ketika itu. Di depan mereka hadir tantangan industrialisasi yang diketahui bakal mengganggu dan malah memporak-porandakan eksistensi agama dengan nilai-nilai sakral dan tradisi religiusnya yang dipegang teguh oleh masyarakat. Industrialisasi itu berasal dari peradaban masyarakat sekuler yang dahulu pernah datang dan menduduki negeri ini sebagai penjajah. Pembawa dan yang pertama kali memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi berskala besar, juga bukan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan secara akidah dan pola kehidupan budaya dengan kaum muslimin. Justru sebaliknya, banyak kalangan non-Islam, kelompok sekuler atau *priayi abangan,* yang jika dilacak masa lalu historis mereka, boleh jadi adalah keturunan orang-orang yang mempunyai kedekatan hubungan dan pernah diuntungkan oleh kaum penjajah. Wajarlah kiranya, jika perasaan kesal, marah, dan sakit hati, pernah menyelimuti kehidupan kaum muslimin di negeri ini menyertai hadirnya program industrialisasi.

Namun demikian, ada masanya benturan semacam ini terjadi dan menyeruak ke permukaan, kemudian mengalami proses

---

[36] Fachry Ali & Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam di Indonesia Masa Orde Baru,* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 35.

secara alami sedemikian rupa, untuk mencapai "*suasana netral*" melalui tahap-tahap penyesuaian diri sedemikian rupa, sampai pada suatu ketika masing-masing pihak mulai sadar dan melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan untuk saling mengisi, guna mencapai tujuan lebih besar yang sama-sama diinginkan. Begitulah yang terjadi, berderet kamar hunian di "pesantren konvensional" yang pernah bubar dan ditinggalkan oleh para santrinya itu, akhirnya dialihfungsikan sebagai bilik kos-kosan bagi kalangan buruh pabrik yang sengaja mencari tempat tinggal dengan suasana dan atmosfer kehidupan Islami, sambil mempelajari ilmu dan amaliah keagamaan di sela kesibukan kerja sehari-hari.

Dalam perkembangan selanjutnya, ada sementara tokoh agama yang tertarik untuk membangun kamar-kamar sewaan atau semacam kompleks indekos, yang pengelolaannya mirip sebuah pesantren. Pemanfaatan masjid atau mushalla sekitar untuk tujuan pembinaan keagamaan di kalangan pekerja, juga merupakan alternatif yang muncul berikutnya. Pihak perusahaan pun, ada sementara yang sadar, memandang penting, dan kemudian menyelenggarakan aktivitas pembinaan keagamaan untuk para karyawannya. Di luar semua itu, masih tersedia kemungkinan lain bagi siapa pun untuk memperoleh pengembangan ilmu dan amaliah yang baik, misalnya dengan keterlibatan mereka dalam jam'iyah keagamaan yang diselenggarakan secara rutin di tengah kehidupan masyarakat sekitar kawasan industri. Dari model dialog kreatif yang disertai ketegangan dan tarik-ulur secara dinamis semacam itulah, akhirnya terjadi bentuk perkawanan dan jalinan fungsi antarperadaban, dalam hal ini *Islam* dan *Barat,* yang direpresentasikan melalui pesantren buruh pabrik.

3. Dialog Edukatif

Bisa dikatakan, pesantren buruh pabrik yang muncul dan eksis dewasa ini, sebenarnya merupakan hasil dari "dialog" secara

dinamis dan kreatif antara *dunia pesantren konvensional* di satu pihak dan *dunia industri* pada pihak yang lain. Pertemuan dua sosok tradisi yang latar belakang historis dan realitas sosiologisnya jauh berbeda atau bahkan kontras itu, terjadi melalui tahap-tahap pematangan diri sedemikian rupa, dengan berpijak atas prinsip kesediaan untuk saling *memahami, menerima,* dan *memberi* antara satu dan yang lain. Sebagai tradisi baru, baik dalam perspektif dunia pesantren yang sarat muatan spiritual-religius maupun dunia industri yang rasional-sekuler, ia hadir atau dihadirkan oleh dan di tengah realitas zaman modern lewat proses yang bersifat *dialektif, akomodatif,* tetapi juga *kritis.*[37]

Kesediaan untuk saling memahami, menerima, dan memberi dalam sebuah pergumulan yang bersifat dialektif, akomodatif, dan kritis itu, terlihat misalnya ketika pesantren buruh pabrik akhirnya berhasil merumuskan *tujuan, sistem kelembagaan, kurikulum, metode, sarana, teknik evaluasi,* dan *penataan lingkungan se*sedemikian rupa, yang di satu pihak merupakan *akomodasi* nilai-nilai kehidupan kaum santri untuk disesuaikan dengan realitas kepentingan kerja buruh pabrik, tetapi di lain pihak juga terus membuka kemungkinan terjadinya dialog kritis dalam wujud tarik-menarik dan saling mempengaruhi antara keduanya lewat sebuah format dialektika sosio-edukatif-religius yang bergerak secara dinamis dari waktu ke waktu.

Suatu ketika, kurang lebih pada tahun tujuh puluhan di abad ke-22, dunia pesantren "konvensional" di sekitar kawasan industri baru harus bersedia menerima kenyataan, di mana para santri yang semula tekun duduk bersila di serambi masjid mengitari sang kiai dalam sebuah pengajaran "kitab kuning", ternyata mengalami degradasi sedemikian rupa dan akhirnya bubar, satu per satu

---

[37] Pembahasan tentang bagaimana suatu atau beberapa tradisi bermetamorfosis menjadi sebuah "tradisi baru", lihat misalnya, Edward Shils, *Tradition,* (Chicago: The University of Chicago, 1981).

pulang ke rumah atau pindah ke pesantren lain yang belum "tercemar" oleh pola kehidupan masyarakat "pabrikan" yang cenderung tidak peduli terhadap nilai-nilai keagamaan. Kenyataan pahit tersebut, rupanya tidak berjalan terus-menerus. Oleh karena, pada sekitar tahun sembilan puluhan di abad yang sama, sudah mulai terlihat kecenderungan baru di kalangan sementara masyarakat industri negeri ini, akan munculnya sebuah kesadaran dan penilaian, betapa tata kehidupan religius yang indah dan syahdu di masa lalu, terasa begitu penting untuk digapai dan disemaikan kembali, sebagai pengimbang atmosfer modernisasi dengan berbagai dampak negatifnya yang sering menjengkelkan, namun sudah terlanjur menjadi kenyataan.

Maka, lahirlah gagasan dan aktualisasinya dalam wujud institusi dan aktivitas pembinaan keagamaan, khususnya bagi kalangan buruh pabrik. Dalam kaitan ini, ada semacam "arus balik" dari kegandrungan terhadap janji-janji dan bayangan indah modernisasi yang ternyata tidak seluruhnya membahagiakan, untuk kembali merindukan nikmatnya di bawah sentuhan tradisionalitas nilai-nilai keagamaan, dengan sejumlah manfaatnya yang justru semakin terasakan.[38] Akhirnya, melalui institusi dan aktivitas pesantren buruh pabrik tersebut, dunia industri pun secara bertahap mengalami religiusisasi atau proses "pengagamaan" yang ditandai, misalnya oleh penyelenggaraan ibadah Jum'at di masjid umum atau mushalla khusus yang disediakan pihak perusahaan, di samping kesempatan shalat wajib lima waktu, puasa Ramadhan, dan peringatan hari-hari besar Islam yang secara relatif mulai diperhatikan.

Dialog edukatif sebagai dimaksud, antara lain tersimpul dalam wujud kesediaan dan lebih dari itu juga keteguhan hati pihak penge-

[38] Tentang pergumulan kaum muslimin Indonesia di awal proses modernisasi, lihat antara lain, Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Leppenas, 1981), hlm. 49-50.

lola pesantren buruh pabrik, untuk menetapkan tujuan pendidikan bagi kalangan santri-pekerja, dengan memposisikannya di tengah-tengah antara *idealitas maksimal* yang sebaiknya diupayakan dan *realitas minimal* yang kenyataannya bisa diwujudkan. Atau dalam formulasi lain, walau tetap menghormati betapa idealnya jika para santri-pekerja itu mencapai penguasaan maksimal tentang ilmu-ilmu keislaman, apalagi yang bersumberkan langsung dari "kitab kuning" seperti yang biasa terjadi di lingkungan pesantren "tradisional", namun dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada, maka dianggap cukuplah jika melalui bimbingan itu, mereka akhirnya menjadi pemeluk Islam yang baik, taat menjalankan ajaran agama di tengah kesibukan kerja sehari-hari.

Juga merupakan hasil dialog sebagai dimaksud, ketika muncul aspirasi sedemikian rupa, agar pengembangan pesantren buruh pabrik ke depan, selain tetap memegang teguh nilai-nilai dasar keislaman secara tradisional juga perlu dilengkapi dengan program pendidikan dan pelatihan santri-pekerja dalam hal perluasan pengetahuan secara umum, di samping penguasaan keterampilan teknik yang relevan dan mendukung keberhasilan mereka dalam menjalani profesi kerja sehari-hari. Keinginan semacam ini, sekaligus merupakan *kritik* atau *koreksi* terhadap dunia pesantren tradisional, yang cenderung konservatif, isolasionis, kurang produktif, dan tidak peka terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.[39] Dengan mendasari kemunculannya pada kreativitas internal dan sekaligus kritik eksternal, baik kepada dunia industri-modern yang dinilainya cenderung sekuler atau memberontak pada agama,[40] maupun kepada dunia pesantren tradisional yang

---

[39] Kritik terhadap pesantren tradisional, lebih jauh, lihat, Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 112.

[40] Kehadiran modernisasi dengan aspek ikutannya sebagai "pemberontak militan" terhadap agama, bisa dilihat, Fazlur Rahman Ansari, *Islam dan Peradaban Barat Modern,* alih bahasa Asmara Hadi Usman, penyunting Anwar Rasyidi, (Bandung: Risalah, 1986), hlm. 32.

belum sepenuhnya terhindar dari segi-segi kelemahan tersebut di atas, maka jadilah sosok pesantren buruh pabrik dalam penampilan riilnya seperti yang ada sekarang ini.

Sebagai konsekuensi logis dari produk dialog yang minimal untuk sementara telah mewarnai ciri khas dan identitas kemunculannya, maka kehadiran pesantren buruh pabrik seolah membawa pesan agar dunia industri modern menyadari, bahwa hakikat kehidupan yang sejatinya tidaklah cukup dengan semata-mata disikapi oleh kesibukan rutin di tengah derunya mesin produksi, melainkan harus diselaraskan secara berimbang dengan kesadaran pelakunya bahwa nun jauh di sana masih ada kehidupan lain yang lebih kekal-abadi, dan karenanya diperlukan bekal persiapan secara proporsional. Sementara, terhadap kaum santri yang masih lengket dengan tradisionalitasnya juga diperlukan pemahaman akan pentingnya memposisikan diri secara arif dan bijaksana di tengah realitas kemajuan zaman dewasa ini. Begitulah pendidikan afektif yang teramat mendalam, dengan sasaran finalnya tidak lain adalah kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun kelak di akhirat.

4. Dialog Kultural

Ungkapan cukup populer bahwa dunia pesantren merupakan *subkultur* di celah-celah keumuman budaya komunitas negeri ini, sesungguhnya menyiratkan pengertian betapa kehadiran institusi tersebut memiliki ciri khusus yang berbeda atau minimal dapat dibedakan dari realitas tata kehidupan di sekitarnya.[41] Tetapi dengan begitu, sekaligus juga memungkinkan terjadinya dialog kultural, proses saling mempengaruhi di antara keduanya, yang berujung pada pembentukan tata nilai atau bahkan sebuah kultur baru yang

[41] Uraian lebih mendetail, lihat, Abdurrahman Wahid, "Pesantren Sebagai Subkultur," dalam Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan,* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 39-60.

disepakati dan selanjutnya eksis di tengah masyarakat.[42] Demikianlah, apa yang sesungguhnya terjadi dan melatar belakangi munculnya institusi dan aktivitas pembinaan keagamaan untuk kalangan pekerja di kawasan industri, yang dalam studi ini disebut sebagai pesantren buruh pabrik.

Barangkali dengan tujuan mewujudkan idealitas budaya yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, dunia pesantren tradisional sebagaimana yang biasa terlihat selama ini, cenderung menampilkan diri dalam sebuah komunitas edukatif-religius sedemikian rupa, di mana pihak kiai, para ustadz dan kalangan santri mengenakan busana khas, misalnya berbaju lengan panjang, berkain sarung, dan selalu menutup kepala dengan songkok, kopiah, atau sorban. Boleh dikatakan, *sarung* dan *kopiah* merupakan identitas budaya pakaian yang sangat menonjol di lingkungan pesantren, khususnya yang termasuk kategori "tradisional." Sementara, kehidupan dunia industri yang mengususng nilai-nilai kemodernan, cenderung melihat apa yang tergambar di atas sebagai tradisi masa lalu yang sudah ketinggalan zaman.

Tanpa jembatan dialogis yang dapat menciptakan netralitas pemahaman di antara keduanya, mungkin saja yang terjadi adalah saling mengejek, mencela, merendahkan atau bahkan menghina. Apa yang di masa lalu sering dicibirkan dengan sinis, bahwa kalangan santri adalah "*kaum sarungan*", dengan konotasi negatif sebagai kelompok orang kolot, tidak berilmu alias bodoh, dan selalu menentang setiap ide dan langkah modernisasi, sesungguhnya merupakan bukti adanya benturan kultural sebagai dimaksud. Tidak kalah sengitnya, kalangan santri pun mempunyai penilaian yang buruk dan kemudian menuduh balik mereka yang *sok modern* semacam itu sebagai hamba dan pengikut paham kafir, pencari

---

[42] *Ibid.*, hlm. 40.

kepuasan duniawi tanpa batas, pengabdi kepentingan perut, orang sesat dan menyesatkan.

Dalam perspektif kaum santri dan sekaligus masyarakat industri modern, kehadiran pesantren buruh pabrik, dalam banyak kasus dapat mencairkan kebekuan dialogis tersebut, misalnya dalam wujud munculnya pemahaman sedemikian rupa, bahwa soal busana sebenarnya menyangkut selera atau pilihan seseorang, yang penting selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip "*menutup aurat*" menurut konsep dan ketentuan ajaran Islam. Terapannya dalam tata kehidupan sehari-hari di kalangan santri-pekerja terlihat sedemikian luwes, sesuai keperluan, tempat, dan keadaan, apakah ketika sedang berada di lingkungan pesantren dengan segala aktivitas rutin yang dijalaninya, ataukah pada saat melaksanakan kewajiban kerja di pabrik atau perusahaan.

Ketika sedang belajar, melaksanakan shalat, dan istirahat santai di pesantren, kain sarung adalah pilihan rasional, karena memiliki unsur kelonggaran, tidak terasa ketat di badan, mudah digunakan, dan gampang pula merawat atau mencucinya. Akan tetapi pada saat menjalani kesibukan sehari-hari di pabrik, maka celana panjanglah yang lebih cocok untuk dikenakan, karena selaras dengan etika kerja yang dikenal selama ini, memenuhi unsur kelincahan, tidak mengganggu dan membahayakan pemakainya. Bayangkan, kalau memaksakan bekerja di pabrik dengan mengenakan sarung, jelas akan terlihat kurang praktis, tidak gesit dalam bertindak, bisa menjerat pemakainya, tersangkut ke mesin produksi, atau lebih dari itu dapat juga menjadi penyebab kemungkinan terjadinya kebakaran.

Karenanya tidak ada keharusan sedemikian ketat, bahwa santri-pekerja mesti selalu berkain sarung, berbaju lengan panjang, dan berpeci atau berkopiah. Malah bukan sekedar dalam hal berbusana semcam itu, yang sengaja diatur secara fleksibel

sebegitu rupa, melainkan bisa saja mereka pulang ke pesantren dengan membawa peralatan kerja tertentu seperti obeng, kunci, dan gunting, asal penempatannya tidak sampai mengganggu, sesuai dengan kapasitas ruangan atau kamar yang tersedia. Dari fleksibilitas semacam inilah, ciri khas pesantren buruh pabrik akhirnya menjadi tampak jelas, yakni cenderung mengakomodasikan idealitas serta citarasa kultural dunia santri di satu pihak, dan kepentingan praktis dunia kerja di lingkungan pabrik atau perusahaan pada pihak yang lain.

Tata kehidupan kultural di pesantren buruh pabrik, juga tercermin dari ketatnya jadwal kegiatan santri-pekerja sehari-hari, baik dalam rangka menjalani kewajiban belajar di lingkungan pesantren, maupun memenuhi keharusan dan beban kerja di perusahaan, yang kesemuanya itu jelas menuntut sikap cermat dan penuh kedisiplinan. Sebuah kultur modern yang dijiwai oleh prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan waktu dan tenaga guna mencapai tujuan tertentu, kelihatannya telah ikut mewarnai kehadiran lembaga tersebut. Kecenderungan semacam itu berbeda misalnya, jika dibanding dengan kebiasaan yang berlaku di sementara pesantren konvensional, lebih-lebih yang hanya menyelenggarakan pengajaran "kitab kuning" dengan metode *wekton* dan atau *bandongan*[43] sedemikian longgarnya aturan bagi santri, untuk mengikutinya atau tetap tinggal di kamar pemondokan karena memang tidak diabsen, maka kecenderungan yang terjadi adalah: mereka bebas dalam hal belajar dan sekaligus juga bebas untuk tidak belajar.

Keharusan untuk bersikap disiplin di kalangan santri-pekerja, misalnya terlihat dari kebiasaan untuk selalu bangun pagi menjelang subuh, kemudian shalat berjama'ah, makan pagi, memper-

---

[43] Tentang metode pengajaran seperti *sorogan, wekton* dan *bandongan* di lingkungan pesantren tradisional lihat, Sudjoko Prasodjo, hlm. 6-7.

siapkan diri ke tempat kerja, berangkat ke pabrik, dan baru pulang di sore atau bahkan malam hari. Sehabis shalat 'Ashar, istirahat sejenak, shalat magrib, mengikuti kegiatan belajar, shalat Isya', kemudian tidur sampai menjelang subuh berikutnya. Bagi yang menjalani *shift* kerja malam hari, kehati-hatian dan sikap disiplin justru perlu ditingkatkan, mengingat ada kalanya harus berangkat ke pabrik di tengah malam, sehingga jika tidak waspada bisa saja terjangkit rasa mengantuk kemudian tertidur dan akhirnya gagal memenuhi tugas kerjanya. Belum lagi, di sela-sela kesibukan tersebut, mereka harus pula mengurus berbagai keperluan hidup sehari-hari.

Jika kebiasaan cermat dan penuh disiplin itu dipahami sebagai pengaruh kultur industri-modern, maka sebaliknya ada pula tata budaya santri yang masuk dan ikut mewarnai atmosfer kehidupan di tempat kerja mereka. Dalam kaitan ini, kecenderungan sementara pengelola pabrik untuk berlaku toleran, dengan mengizinkan dan bahkan ada yang mendorong kalangan buruh perempuan untuk mengenakan *penutup kepala, kerudung* atau *jilbab* ketika mereka bekerja, adalah gejala cukup menarik dalam konteks dinamika hubungan kultural antara dunia pesantren dengan industri dan antara Islam dengan modernisasi. Oleh karena, busana muslimah seperti mengenakan jilbab, apalagi di kalangan pekerja industri, jelas merupakan tradisi baru yang justru muncul di tengah proses modernisasi negeri ini.

Diberikannya kesempatan bagi pekerja perempuan untuk mengenakan jilbab ketika sedang bekerja, ternyata didasari oleh beberapa alasan. Di antaranya, kesopanan dalam berbusana dipahami berkorelasi positif dengan keteguhan, kejujuran, kerapian, dan kedisiplinan pihak pemakainya. Dengan berpakaian semacam itu, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya godaan laki-laki dan kemungkinan perilaku

menyimpang pada umumnya, sehingga konsentrasi terhadap pekerjaan menjadi terfokus, dan akhirnya melahirkan produktivitas maksimal. Tetapi ada pula yang berangkat dari niat baik untuk menghormati keyakinan seseorang, sekaligus mengembangkan tenggang rasa budaya, sebagai faktor penting bagi terjalinnya saling pengertian, terbentuknya kesadaran untuk menjaga dan melindungi satu sama lain, yang kesemuanya itu akan bermuara pada terciptanya keamanan dan keselamatan bersama.

E. Pemaknaan Sosio-Religius

Dalam konteks ilmu-ilmu sosial keagamaan, kehadiran pesantren buruh pabrik dan kemungkinan pengembangannya di masa depan, mempunyai titik relevansi sedemikian rupa untuk menambah dan terus memperkaya informasi, dalam wujud pernyataan teoretis yang dibangun atas dasar temuan dan realitas empiris. Persoalan mendasar yang menjadi pintu masuk untuk sampai ke maksud tersebut, dalam kaitan ini adalah hubungan antara *pesantren* dengan *industrialisasi* dan antara *Islam* dengan *modernisasi.* Melalui pemaparan secara kritis tentang segi-segi kelemahan industrialisasi dan modernisasi, pemaknaan sosio-religius ini diarahkan untuk mengungkap nilai-nilai konstruktif yang dapat disumbangkan oleh institusi keagamaan tertentu, dalam hal ini pesantren buruh pabrik, guna mencapai alternatif jalan pemecahannya.

Menurut Henry Fratt, industrialisasi bisa didefinisikan sebagai suatu proses perkembangan teknologi oleh penggunaan ilmu pengetahuan terapan, ditandai dengan ekspansi produksi secara besar-besaran melalui pemanfaatan tenaga permesinan, untuk tujuan pasar yang luas bagi barang produsen maupun konsumen, dengan bantuan angkutan kerja yang terspesialisasikan secara jelas, di mana kesemuanya itu disertai oleh gerak urbanisasi

yang terus meningkat.[44] Sesuai dinamika dan sifat internalnya, industrialisasi terkait erat dengan perubahan sosial di suatu masyarakat, yakni pergeseran tata hidup komunitas pelakunya: dari bercorak *gemeinschaft* ke arah *gesselchaft*, dari hubungan natural keluarga desa bergerak ke arah hubungan artifisial kehidupan kota, dari kontak organis antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kehangatan menjadi terisolasi sedemikian rupa dalam semangat kompetisi untuk meraih sebanyak mungkin keuntungan pribadi.[45] Beserta perubahan di bidang ekonomi lewat industrialisasi, terjadi pula pergeseran yang demikian kompleks dalam hal tata kehidupan masyarakat, seperti tentang kelompok sosial, mobilitas penduduk, urbanisasi ke kota, status pekerjaan dan keahlian pekerja, kebiasaan dalam konsumsi barang, konflik antarkelas atau kelompok sosial, perubahan kedudukan perempuan, melemahnya tradisi setempat, dan rusaknya kebiasaan serta moralitas masyarakat.[46]

Seperti yang kita saksikan dewasa ini, industrialisasi yang berhimpit arah dan tujuan dengan modernisasi, telah melakukan penetrasi ke hampir seluruh aspek kehidupan manusia: fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Dengan kata lain, modernisasi telah menjadi revolusi kemanusiaan, dengan jaringan yang amat luas jangkauannya dan begitu mempengaruhi kehidupan manusia sejagad.[47] Sementara modernisasi merupakan perpanjangan dan perluasan konsep-konsep kehidupan dalam wujud

---

[44] Henry Fratt, et.al, *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, (Totowa, New Jersey, 1970), hlm. 155.

[45] Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, penyunting, Agus Edi Santoso, (Bandung: Penerbit Mizan, 1987), hlm. 141.

[46] *Ibid.*, hlm. 140.

[47] Lihat, antara lain Fachry Ali, "Fisi Politik dan Intelektual Umat Islam Indonesia Dalam Proses Modernisasi," dalam Muslih Usa & Aden Wijdan SZ, *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1997), hlm. 147.

rekonstruksi pengalaman masyarakat Barat, yang selama ini dikenal berpandangan hidup sekuler dan berorientasi keduniaan semata. Oleh dan berkat dukungan kekuatan-kekuatan teknologi, ekonomi, politik, dan teutama militer, konsep tersebut akhirnya tersebar luas, tercangkokkan sedemikian rupa, dan akhirnya menghimpit perkembangan tata hidup serta kebudayaan masyarakat non-Barat.[48]

Meskipun secara umum proses industrialisasi dipandang bernilai positif bagi kesejahteraan lahiriah manusia, akan tetapi belakangan ini mulai timbul sikap kritis, meragukan, mencela, atau bahkan mengutuk gerakan tersebut sebagai penyebab merajalelanya sikap hidup materialistis, individualistis, dan hedonistis, terjadinya polusi lingkungan, eksploitasi sentimen perasaan rendah dan amoral, semakin dahsyatnya peperangan dengan senjata pemusnah massal, dan lain sebagainya. Memang dalam kenyataannya, industrialisasi dan modernisasi cenderung mengandung ekses negatif, di samping segi-segi positifnya. Ekses tersebut muncul, akibat dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan sosok manusia "tanpa perasaan", mengingkari realitas perseorangan (*depersonalization*), mendegradasikan harkat kemanusiaan (*dehumanization*), dan pada akhirnya menimbulkan keterasingan (*alienation*) seseorang di tengah-tengah lingkungannya sendiri.[49]

Terhadap nasib kehidupan kalangan pekerja, dunia industri modern sebenarnya juga memiliki banyak kelemahan. Oleh karena, dengan adanya manajemen administrasi yang sedemikian ketat, kerutinan kerja yang membosankan, memposisikan manusia sekedar sebagai instrumen produksi, membuatnya berada dalam kedudukan ibarat komponen mesin industri sendiri, tanpa pilihan dan alternatif lain, yang berarti telah kehilangan diri sendiri. Jika

[48] Henry Fratt, et.al, *Dictionary of Sociology*, hlm. 155.

[49] Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 124.

kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, maka tidak berarti apa-apa. Ia digunakan atau dibuang, semata berdasarkan fungsi kerja yang dapat dilakukannya, sedang kemanusiaannya secara intrinsik tidak menjadi hitungan. Di sinilah, akhirnya timbul pertanyaan tentang makna hidup dan kehidupan yang sesungguhnya.

Untuk memperoleh pemecahan yang tepat, maka agamalah jawabannya. Karena, menurut Abdurrahman Wahid, agama memiliki sasaran ideal bagi kehidupan manusia, sasaran yang mana dibentuk oleh pandangan dunia dan etos pengabdian yang berkembang dalam hidup keagamaan para penganutnya. Keyakinan agama memberikan bekas yang seringkali amat mendalam, sehingga mampu memgontrol dan memberi arah terhadap perilaku seseorang, untuk senantiasa berpegang teguh padanya di tengah kehidupan yang terkadang sulit dan terus mengalami perubahan.[50] Keyakinan agama, pada gilirannya melahirkan institusi keagamaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan penganutnya. Lembaga itu menciptakan dalam dirinya mekanisme untuk menangani berbagai masalah kehidupan dari sudut pandang keagamaan, misalnya dengan menyusun program peningkatan kualitas umat di bidang pendidikan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya.[51]

Seorang filosof dan sekaligus negarawan Perancis, Andre Malaux, pernah meramalkan bahwa tahun dua ribuan ke atas merupakan abad agama. Manusia tidak bakal *survive* ketika itu, apabila nilai-nilai agama tidak diaktualisasikan kembali dalam setiap langkah kehidupan. Dalam banyak kawasan dunia belakangan ini, terlihat jelas bahwa intensitas keberagamaan masyarakat semakin tinggi. Gejala tersebut, antara lain merupakan reaksi terhadap

[50] Lihat, Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan,* hlm. 6.

[51] Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan,* hlm. 124.

paham *materialisme* yang eksklusif dari sebagian besar ideologi sekuler yang bersaing pada abad ke-20 yang lalu. Kecenderungan semacam itu, sekaligus juga merupakan reaksi balik dari berkembangnya *developmentalisme*,[52] yang ternyata tidak sepenuhnya berhasil membahagiakan umat manusia dalam arti yang luas dan seutuhnya.

Dengan semakin menguatnya gairah keagamaan akhir-akhir ini, sementara gerak industrialisasi dan modernisasi pun sulit atau bahkan mustahil dihentikan, akhirnya mendorong upaya di kalangan sementara pihak untuk menelaah kembali, apa yang pernah dihasilkan oleh para ahli terdahulu ketika menggali dan merumuskan segi-segi keterkaitan di antara keduanya, seperti yang dilakukan oleh Max Weber dalam studinya tentang etika Protestan. Hasil studi tersebut, intinya adalah sebuah tesis yang menyatakan adanya hubungan antara keberagamaan Protestan (khususnya aliran Calvin) dengan semangat modernisasi, atau tepatnya kebangkitan kapitalisme modern. Menurut Weber, kapitalisme merupakan imbangan sosial bagi teologi Calvinis, yang dimulai dari memahami *calling* (takdir) bukan sebagai keadaan di mana seseorang telah ditentukan nasibnya sedemikian rupa oleh Tuhan yang adalah berdosa untuk melawannya, melainkan suatu panggilan keagamaan dalam wujud kesibukan dan usaha yang dipilih sendiri oleh seseorang dan diperjuangkan sekuat tenaga disertai penuh rasa tanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Bagi teologi Calvinis, kegiatan usaha ekonomi tidak dipandang sebagai merusak jiwa atau keimanan seseorang, justru sebaliknya mengandung dimensi kesucian. Ketamakan dan keserakahan duniawi, kalau *toh* ada segi bahayanya terhadap kebersihan rohani, namun tidaklah begitu berat jika dibanding dengan sikap bermalas-malasan. Menurut paham ini, mengejar kekayaan ekonomi disertai sifat

---

[52] Lihat, Soedjatmoko, "Masa Depan Manusia: Antara Transendensi dan Histori," dalam, *Majalah Panji Masyarakat*, No.543, Jakarta: edisi 21 Juni, 1987, hlm. 45.

rajin, hemat, sabar dan bijaksana, selain menghasilkan paspor menuju kemakmuran duniawi, juga sekaligus merupakan cita-cita luhur keagamaan.[53]

Benarkah tesis semacam itu, bahwa agama mempunyai keterikatan atau bahkan menjadi sumber pendorong kemajuan, termasuk di era modern sekarang? Jawab ringkasnya adalah, seperti halnya menarik kesimpulan tentang posisi agama sebagai penghalang modernisasi, ternyata sejauh ini belum memperoleh dukungan ilmiah yang kuat; sebaliknya generalisasi yang menyatakan peran agama tertentu dalam mendorong lahirnya kapitalisme modern, juga terlalu optimis atau malah cenderung berlebihan. Dengan menyadari perlunya sikap kehati-hatian, barangkali yang lebih realistis adalah suatu pemahaman mengenai terjadinya *hubungan dinamis* antara keberagaman tertentu dengan munculnya daya dorong modernisasi. Pemahaman semacam itu pun selaiknyalah terus-menerus dikaji ulang, melalui pengamatan mendalam dan penarikan kesimpulan *per kasus*, dan tidak begitu saja merumuskannya sebagai generalisasi.

Bagaimana halnya dengan Islam? Menurut Asghar Ali Engineer, telah menjadi perdebatan dalam kaitan ini. Ada sementara yang berpendapat, tanpa memberikan bukti yang kuat, bahwa Islam lebih banyak menghambat daripada mendukung industrialisasi dan modernisasi. Alasannya, dalam kasus di kalangan umat Islam tertentu pernah ditemukan bukti, bagaimana hambatan tersebut memang sungguh terjadi. Akan tetapi, demikian Engineer, tidaklah logis jika ada satu atau beberapa kasus, kemudian dengan serta-merta dijadikan dasar untuk menarik generalisasi, bahwa itulah sikap islam dan kaum muslimin pada umumnya.[54] Di lain

---

[53] Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan,* 143-144.

[54] Lihat, Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teori Pembebasan,* terj. Agung Prihantoro, penyunting Nas'ud, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 118.

pihak, ada pula yang berpendapat, atas dasar kenyataan tentang relevansi nilai-nilai Islam dengan modernisme, kiranya cukup alasan untuk mengajukan harapan, bahwa kaum muslimin tidak saja dapat menyertai perjalanan abad kemajuan dewasa ini, tetapi lebih dari itu justru akan memberi sembangan positif terhadapnya.[55]

Menurut Ernest Gellner, dari sekian banyak karakter ajaran Islam yang memudahkan kaum muslimin menyertai kehidupan modern, adalah bahwa varian murni utama Islam selalu bersifat egalitarian dan bersemangat keilmuan, sedangkan varian yang mengenal sistem hirarkis seperti kalangan sufi, selamanya cenderung berada di pinggiran. Lebih jauh ia menyatakan, dalam Islam, dan hanya dalam Islam, keterlibatannya pada gerak modernisasi di satu pihak, dan peneguhan kembali identitas lama umat di lain pihak, dapat dilakukan dalam satu bahasa dan perangkat simbol-simbol yang sama. Dunia Islam memang gagal menerobos zaman dan mempelopori umat manusia ketika memasuki abad modern, akan tetapi karena watak dasar Islam itu sendiri yang memiliki sedemikian banyak titik relevansi dengan nilai-nilai kemajuan, maka kaum muslimin yang mungkin justru paling besar memperoleh manfaat dari modernisasi.[56]

Masih menurut Ernest Gellner, tradisi agung Islam yang dimilikinya sejak masa lalu tetap bisa dimodernkan, tanpa perlu memberikan banyak konsesi terhadap pihak pengembang modernisme, mengingat kesinambungan sedemikian rupa melalui berbagai dialog intelektual di kalangan pelopor umat sepanjang sejarahnya. Di antara sejumlah agama yang ada, Islam adalah satu-satunya yang mampu tanpa banyak gangguan doktrinal menerima

---

[55] Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan,* 71-72.

[56] Lihat, Ernest Gellner, *Muslim Society,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 5.

kehadiran abad modern.[57] Gellner, bahkan sampai menyatakan, berkenaan dengan historis Eropa Barat, keadaan justru akan jauh lebih memuaskan seandainya orang-orang muslim dahulu mendapatkan kemenangan dan berhasil mengislamkan semua daratan tersebut.[58] Barangkali, dengan begitu akan terjadi persandingan yang indah antara Islam dan modernisasi.

Sedemikian banyak pernyataan teoretis tentang hubungan Islam dan industrialisasi, antara agama dengan modernisasi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah, bagaimana realitas hubungan tersebut menampilkan diri secara riil di tengah kehidupan kaum muslimin, lebih-lebih pada era modern sekarang? Dalam kaitan ini, kehadiran *pesantren buruh pabrik,* dengan orisinalitasnya sebagai institusi sosio-edukatif-religius, yang mempertemukan antara *Islam masa lalu* dengan *modernitas zaman sekarang*, kiranya merupakan contoh kasus yang amat menarik untuk dikaji secara mendalam, bagaimana dan sejauhmana ia mampu dan berhasil melakukan peran strategis guna membangun *idealitas kehidupan di masa depan.*

Jika dihubungkan dengan pemikiran Al-Jabiri, sebagaimana terhimpun dalam teori "Post Tradisionalisme Islam", kehadiran pesantren buruh pabrik dapat dijelaskan sebagai wujud *pergulatan* antara nilai-nilai religius masa lalu yang terwadahi dan dibungkus oleh tradisi keislaman yang dipegang teguh kalangan santri negeri ini di satu pihak, dengan tuntutan hidup masyarakat era modern yang semakin membutuhkan jasa dan sangat dipengaruhi oleh dunia industrialisasi di pihak lain, sebagai upaya mencari dan merumuskan pijakan yang kokoh, guna membangun kehidupan baru, yang diyakini sebagai ideal di masa

---

[57] *Ibid.,* hlm. 66.

[58] Nurcholish Madjid, *Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan,* hlm. 71-72.

depan.[59] Simpul pemahaman seperti ini, didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan empiris secara cermat di lapangan, kemudian dilakukan refleksi atau perenungan logis dan sistematis, untuk merumuskan makna teoretis yang terkandung di dalamnya.

Jika hendak dituturkan dalam sebuah alur pikir yang agak rinci, maka fokus permasalahannya tetap saja kembali pada hubungan *Islam* dengan *modernitas*. Dalam kaitan ini, Islam diposisikan sebagai pihak yang tengah menghadapi tantangan, mengingat dengan bergulirnya industrialisasi, yang terjadi adalah munculnya kesadaran tentang betapa penting program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mayoritas-nya kaum muslimin; tetapi bersamaan itu, ia pun tidak rela jika dengan industrialisasi, sekaligus juga menimbulkan kehancuran agama dan moral, baik di kalangan mereka yang langsung berperan sebagai pelaku seperti kaum pekerja, maupun pada masyarakat sekitar atau bahkan mencakup lingkungan yang lebih luas. Jadi persoalannya adalah, bagaimana Islam tetap eksis di tengah derap industrialisasi modern, dan sebaliknya program industri modern tidak menimbulkan malapetaka dalam hal religiusitas dan moralitas masyarakat, kaum muslimin pada khususnya.

Dalam perspektif teori "Post-tradisionalisme Islam", proses industrialisasi yang sedang bergerak cepat sekarang ini, sesungguh-nya mengandung dan menimbulkan banyak masalah, di samping segi manfaatnya. Permasalahan itu hanya mungkin diatasi secara tuntas, manakala ada upaya untuk menghadirkan kembali nilai-nilai dan tradisi Islam masa lalu yang benar-benar masih orisinal, belum terkontaminasi oleh dampak negatif industrialisasi sebagai-mana yang kini tengah berjalan, sebagai upaya meletakkan dasar

---

[59] Muhammad Abid Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam,* terj. Ahmad Baso, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2000), hlm. 195-196.

berpijak yang kokoh, untuk membangun idealitas masa depan yang lebih baik. Jadi, orisinalitas nilai-nilai dan tradisi Islam masa lalu itu dihadirkan kembali ke panggung sejarah kehidupan masa kini, bukan sekedar dalam fungsinya sebagai alat untuk memberikan kritik terhadap berbagai penyimpangan tata kehidupan yang ada karena pengaruh modernitas, melainkan sekaligus juga sebagai peletak pondasi yang kokoh unuk membangun batu loncatan guna merancang idealitas masa depan sesuai apa yang dicita-citakan oleh ajaran Islam.[60]

Melacak alur pikir logis tentang posisinya semacam itu, maka kehadiran "pesantren buruh pabrik," dapat diibaratkan perannya sebagai pembangun sebuah jembatan guna merintis *"jalan tengah"* dalam penyelesaian berbagai masalah yang ditimbulkan oleh hubungan Islam dengan modernitas. Dinyatakan demikian, mengingat *konseptualisasi* rancangan edukatif-religius dan *aktualisasinya* dalam pembinaan santri-pekerja, boleh dikata keseluruhannya didasarkan atas pertimbangan yang cermat dan hati-hati, dengan maksud untuk mendapatkan hasil serta manfaat yang sebesar-besarnya, tanpa mengakibatkan tersinggung, melukai, atau merugikan pihak-pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan institusi dan aktivitas pendidikan Islam itu. Mengajak manusia ke jalan Tuhan dengan cara bijaksana (*bi al-hikmah*), kelihatannya menjadi pegangan, sekaligus merupakan salah satu makna penting dari apa yang dimaksud sebagai prinsip *"jalan tengah"* tersebut.

Di atas prinsip "jalan tengah" itulah, pesantren buruh pabrik menempatkan kesadaran tentang segi-segi kelebihan sekaligus kekurangan yang ada pada dirinya, sebagai sesuatu yang penting untuk dipahami oleh semua pihak, baik yang terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari di lembaga pesantren tersebut,

---

[60] *Ibid.*, hlm. 196-197.

maupun kalangan luar yang sekedar memiliki kepentingan dengannya secara umum dan bersifat aksidental. Sebagai konsekuensi logis, kehadirannya tidak disertai pretensi untuk mengidentifikasikan diri secara penuh dengan "pesantren konvensional" yang dikenal selama ini, karena menyadari terdapatnya unsur-unsur perbedaan, seperti ketidakmungkinannya untuk menjadikan "kitab kuning" berfungsi mutlak sebagai sumber pengajaran keislaman di kalangan santri pekerja, mengingat berbagai keterbatasan yang ada. Tetapi justru karena itulah, dunia industri atau kaum buruh pada khususnya berani mendekat, tertarik, masuk, dan siap menjadi santrinya.

Pemaknaan lebih lanjut dari prinsip "jalan tengah," misalnya adalah pada saat kehadiran pesantren buruh pabrik mengambil peran sebagai penghubung masa kini dengan masa lalu dan sekaligus masa depan, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan itu merupakan langkah "tawassul", dalam arti usaha membangun hubungan dan menyambung kembali realitas kehidupan kaum muslimin di zaman ini dengan mengoreksi dan mengkritisinya berdasarkan nilai-nilai dan tradisi Islam masa lalu, sebagai pijakan ideologis dan sekaligus teoretis untuk merancang idealitas kehidupan di masa depan. Ketika institusi tersebut berupaya membuka dan menempuh jalan tengah dalam menyelesaikan berbagai kepentingan yang berbeda, dapatlah dinamakan peran itu sebagai kegiatan *"tawassuth"*, artinya berlaku arif-bijaksana dalam seluruh langkah yang ditempuhnya guna mencapai tujuan. Sementara, tidak dilakukan kesemuanya itu, kecuali di atas prinsip *"tawazzun"*, yakni mengusahakan terwujudnya keseimbangan hidup manusia dalam arti yang seluas-luasnya, tercakup misalnya: fisik-mental, material-spiritual, lahir-batin, individual-kolektif, dan dunia-akhirat.

Kehadiran pesantren buruh pabrik, dengan demikian mengemban tiga peran sekaligus: *tawassul, tawassuth,* dan *tawazzun.* Peran *tawassul* (membangun hubungan) dengan

orisinalitas masa lalu dan idealitas masa depan, adalah yang paling awal dilakukan, sebagai modal dan bekal yang amat berharga untuk sampai pada *tawassuth* (*menempuh jalan tengah*), kiranya tepat untuk diposisikan sebagai *kunci* atau *sentral* dari kedua sisi kanan-kirinya yang lain, yakni *tawassul* (*membangun hubungan baik*) dan *tawazzun* (menjaga keseimbangan hidup). Alur logikanya, dengan menempuh jalan tengah (*tawassuth*), maka segala langkah yang dilakukan oleh pesantren buruh pabrik, diharapkan berhasil maksimal sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Untuk sampai ke arah dan mencapai kemampuan tersebut, diperlukan langkah membangun hubungan baik (*tawassul*) dengan masa lalu, guna mencapai idealitas masa depan. Melalui keseimbangan hidup yang selalu terjaga (*tawazzun*), semuanya akan berlangsung mulus sesuai ajaran Islam.

Dalam realitasnya, aktualisasi konsep "jalan tengah" tersebut di lapangan, cukup memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan institusi dan aktivitas pesantren buruh pabrik. Oleh karena, seluruh hal yang terkait dengan perwujudan konsep tersebut, sesungguhnya menyangkut dan berhubungan sedemikian rupa dengan kebutuhan amat mendasar pada masing-masing pihak sebagai dimaksud. Menurut Abraham Maslow, adalah penting atau bahkan mutlak bagi setiap orang memperoleh jaminan bagi terpenuhinya kebutuhan dasar untuk dapat menjalani kehidupan di dunia ini secara wajar, yakni kebutuhan makan dan minum guna mempertahankan hidup (*physiological needs*), kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan untuk dihargai sebagaimana mestinya (*esteem needs*), dan kebutuhan aktualisasi diri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada (*self actualization needs*).[61]

[61] Abraham J. Maslow, *Motivation and Personality*, (New York: Van Nostrand Reinhold, 1970), hlm. 52. Juga terdapat dalam, David M. Wulff, *Psycology of Religion*, (New York: John Wilwy & Sons, 1991), hlm. 603.

Bagaimanapun juga, soal makan dan minum, keselamatan dan keamanan, setia-kawan dan cinta, dihargai selayaknya manusia, dan aktualisasi diri di tengah kehidupan, adalah sederet kebutuhan yang bersifat mendasar dan berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun juga. Yang namanya santri-pekerja, para ustadz, kiai, pegawai kantor, pengawas produksi, kepala tata usaha, pemilik pabrik, dan warga masyarakat pada umumnya, tidak akan tenang apalagi sukses dalam menjalani pengabdian, tugas, profesi, keahlian, dan kehidupan dalam pengertian luas, kecuali terpenuhi lebih dahulu sejumlah aspek kebutuhan dasar tersebut. Pihak santri-pekerja misalnya, hanya mungkin berhasil melakukan tugas-kewajiban di pabrik dengan baik, manakala sarapan pagi sebelum berangkat, ada jaminan selamat ketika bekerja, perasaannya tidak hancur oleh kegagalan cinta, mendapat penghargaan yang wajar atas pekerjaannya, dan terbuka harapan untuk meningkatkan karier guna mencapai harkat kehidupan yang terus semakin membaik.

Dengan menerapkan prinsip "jalan tengah" secara tuntas, baik di lingkungan pesantren maupun di tempat kerja, seseorang akan berhasil menjadi santri yang baik, sekaligus pekerja berprestasi, dan karenanya berhak mendapatkan semua aspek kebutuhan dasar tersebut sebagaimana mestinya. Begitu pula sebaliknya, dengan terpenuhi sejumlah aspek kebutuhan dasar yang memang sangat atau bahkan mutlak diperlukan, barulah memungkinkan seseorang untuk menjadi santri yang baik, sekaligus pekerja berprestasi, yang karena itulah kembali manfaatnya untuk mendukung kemampuan yang bersangkutan dalam mengaktualkan prinsip "jalan tengah" baik di lingkungan pesantren maupun tempat kerjanya. Begitulah secara melingkar dan terus-menerus, bagaimana prinsip "jalan tengah" itu diwujudkan oleh mereka yang terlibat dalam aktivitas dan institusi pesantren buruh pabrik.

Selanjutnya, tanpa mengurangi pentingnya sejumlah aspek yang lain, kebutuhan dasar kelima atau yang terakhir, yakni

aktualisasi diri (*self actualization needs*), sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena, munculnya sejumlah kritik tajam terhadap industrialisasi modern,[62] salah satunya dilatarbelakangi oleh kegagalan atau ketidakpeduliannya terhadap kebutuhan dasar manusia khususnya bidang *aktualisasi diri*. Bagi kelompok ini, dengan kecenderungan ditempatkan atau sengaja menempatkan posisinya sebagai *the liberated territory*, wilayah yang terbebaskan dari nilai-nilai spiritualitas,[63] dunia industri modern diyakini telah menimbulkan banyak masalah kemanusiaan, seperti menjadikan kaum buruh pada khususnya sebagai hamba mesin (*homo mechanicus*) sebagaimana diintrodusir oleh Erich Fromm,[64] atau sebagai makhluk satu dimensi (*one dimensional man*) menurut istilah Herbert Marcuse.[65]

Sedemikian banyak kalangan yang merasa prihatin dan menyesalkan kehadiran industrialisasi modern dengan berbagai dampak negatifnya, sebagaimana beberapa di antaranya telah dijelaskan terdahulu, akhirnya ada sementara pihak yang mengusulkan segera berakhirnya zaman yang penuh derita kemanusiaan ini, antara lain dengan merombak atau menata kembali paradigma kehidupan manusia, sehingga lahirlah gagasan baru mengenai apa yang kemudian disebut sebagai "masyarakat pascaindustri". Dengan menitikberatkan pentingnya mengangkat kembali martabat kemanusiaan yang telah sedemikian merosot atau bahkan hancur di celah-celah deru mesin pabrik, maka salah seorang penggagasnya, Daniel Bell, merumuskan sosok masyarakat pascaindustri, antara lain ditandai oleh adanya upaya

---

[62] Lihat, misalnya, Y.B. Mangunwijaya (ed.), *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 13-14.

[63] Peter L.Berger, hlm. 130.

[64] Erich Fromm, hlm. 58.

[65] Lihat, Herbert Marcuse, *One Dimensional Man: The Ideology of Industrial Society*, (Great Britain: Sphere books Ltd, 1969), hlm 37.

peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus-menerus, untuk menciptakan pekerja profesional di bidangnya melalui kegiatan pendidikan dan training. Masyarakat semacam ini, oleh Bell disebut sebagai "*a game between persons*", permainan indah orang perorang, yang intinya mengedepankan peningkatan kualitas hidup manusia dalam arti luas, seperti terpenuhinya jaminan kesehatan, keselamatan kerja, perbaikan pendidikan, tersedianya sarana rekreasi, dan penyaluran bakat serta jiwa seni. Termasuk dalam kaitan itu, adalah munculnya kesadaran baru tentang pentingnya menata kehidupan yang ramah dan manusiawi, tidak lagi dikotori oleh sikap egois dan individualistis yang merupakan produk dunia industri modern sebelumnya.[66]

Menurut Bell, mengedepankan idealitas *masyarakat pasca-industri* semacam itu, walaupun masih dalam bentuk konstruk teoretisnya sangat penting dilakukan, karena dapat berfungsi sebagai abstraksi yang memungkinkan bagi munculnya bentuk-bentuk khusus dalam gejala perubahan sosial di seputar dan sepanjang poros industrialisasi. Lebih jauh ia menegaskan, bahwa terma tersebut paling tidak mengandung sebuah "fiksi", yakni bangunan logika dari apa yang mungkin atau bisa ada (*could be*), yang dengannya realitas sosial bisa diperbandingkan, agar dengan demikian seseorang dapat melihat apa yang sesungguhnya mempengaruhi sebuah perubahan di masyarakat itu dari arah dan sudut pandang tertentu.[67] Penggunaan terma tersebut secara konsisten oleh Bell dan yang lain, mengindikasikan bahwa "konstruk teoretis masyarakat pascaindustri" telah menjadi bagian dari, dan sekaligus dianggap sebagai, realitas sosial.

Konstruk teoretis masyarakat pascaindustri sebagaimana yang dikemukakan oleh Bell dan kawan-kawan tersebut, memberi-

---

[66] Barry Smart, *Loc.cit.*

[67] Daniel Bell, *The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*, (New York: Basic Books, 1973), hlm. 14.

kan ruang gerak lebih luas bagi turut bermainnya elemen-elemen kemanusiaan di dunia industrialisasi, dan kehidupan masyarakat secara umum. Perwujudannya, antara lain, adalah dengan memosisikan manusia sebagai "subjek teknologi", dan bukan lagi sekadar "obyek" seperti dalam paradigma sebelumnya. Dengan menempatkan manusia sebagai *subjek* dan bukan lagi sekadar *obyek,* maka dimensi kemanusiaannya menjadi tampil dan teraktualisasikan secara utuh ke permukaan. Pengembangan dunia industri, dengan demikian, mestilah sejalan dan berbanding lurus dengan pengedepanan "dimensi kemanusiaan" di kalangan subjek atau pelakunya, sehingga tercipta masyarakat ideal sedemikian rupa, dalam kesempurnaan struktur kepribadian setiap warganya, tidak mengalami keterbelahan (*split personality*) akibat dimensi kemanusiannya terampas oleh realitas kerja industri yang bersifat mekanis, tidak manusiawi, dan sekuler. Menurut paradigma ini, kebermaknaan pelaku industri terletak pada diapresiasinya nilai-nilai kemanusiaan dalam posisi tidak lebih rendah dari perangkat dan aktivitas industri itu sendiri. Sejalan dengan idealitas kehidupan manusia semacam itulah, Bell merekomendasikan terwujudnya "masyarakat industri baru" yang sadar dan siap kembali kepada "nilai-nilai agama", sebagai solusi potensial atas masalah kemanusiaan yang diakibatkan oleh krisis modernitas.[68]

Sampai di sini jelas kiranya, betapa kehadiran "pesantren buruh pabrik" dengan segala bentuk aktivitas pembinaan "santri-pekerja" yang selama ini dilakukan, pada kenyataannya memang telah melahirkan efek positif bagi upaya menjadikan atau menarik kembali dunia industri ke idealitas orbit dan atmosfer kehidupan yang dikehendaki, khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas kaum muslimin. Dan sebaliknya, dengan kehadiran

[68] Daniel Bell, *The Cultural Contractions of Capitalism,* (New York: Basic Books, 1976), hlm. 29.

pesantren buruh pabrik itu pulalah, dunia pesantren atau Islam pada umumnya, telah menemukan dan berhasil mengembangkan lahan garap baru, tidak lagi terbatas dan memenjarakan diri pada lingkup tradisionalitasnya masa lalu, melainkan pergi jauh ke sana, merambah ke berbagai penjuru medan kehidupan manusia di zaman modern yang terus mengglobal dewasa ini, sehingga dimungkinkan bakal semakin dekatlah keberhasilan risalahnya, *rahmatan lil 'alamin*, sebagai pembawa dan penebar rahmat bagi sekalian alam.

Bab IX
Penutup

Pesantren buruh pabrik dalam penelitian ini, wujudnya bukanlah sosok institusi pendidikan Islam yang sudah sedemikian mapan, memiliki akar pendukung yang kokoh dan di masyarakat, khususnya dunia industri; melainkan sebuah idealitas ke depan, yang dibangun atas dasar realitas serpihan elemen pendukung sebagaimana tersimpul pada lima model pembinaan moral-keagamaan di kalangan buruh pabrik. Kelima model tersebut adalah "embrio" pesantren buruh pabrik hasil alih fungsi pesantren konvensional, pesantren hasil alih fungsi kos-kosan, masjid/mushala sebagai sentra pembinaan moral-keagamaan, pembinaan mental-keagamaan oleh pihak pabrik sendiri, dan majelis taklim bagi buruh oleh sejumlah orang Islam.

Walaupun secara kuantitatif jumlah buruh pabrik yang terlibat dalam kelima model aktivitas pembinaan moral-keagamaan tersebut belum sebanding dengan angka keseluruhan mereka yang tinggal di berbagai kawasan industri, dari sudut pandang ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan, kenyataan tersebut dapat menimbulkan implikasi pemahaman sosiologis cukup menarik. Implikasi pemahaman itu berwujud dialog dan penyesuaian diri secara kreatif antara dunia industri yang selama ini dikenal cenderung sekuler di satu pihak dan dunia pesantren yang sangat lengket dengan simbol atau tradisi keislaman di pihak lain. Dalam konteks ini, terjadi semacam "perkawanan baru" di antara keduanya yang memungkinkan masing-masing bersedia

memberi dan menerima sesuatu dari pihak lain. Dunia industri memberi kesempatan kepada pesantren untuk ambil bagian dalam pembinaan moral-keagamaan kalangan buruh dengan catatan bersedia menerima kenyataan tentang orientasi kerja dan kesibukan mereka sehari-hari di pabrik. Sebaliknya, dunia pesantren memberi peluang kepada pelaku industri untuk mengembangkan usahanya di kawasan yang masyarakatnya terkenal religius dengan mesti diiringi pemahaman dan toleransi bahwa karyawan-karyawati itu adalah manusia seutuhnya dengan sifat-sifat dan tuntutan kemanusiaannya, termasuk bidang moral-keagamaan, dan bukan sekadar sebagai faktor produksi.

Dialog kreatif dalam rangka penyesuaian diri dan perkawanan tersebut, dari sudut pandang pendidikan Islam, melahirkan implikasi empiris tentang konsep "menuntut ilmu sepanjang hayat" atau dalam bahasa agama "*minal mahdi ilal lahdi*". Konsep itu terapan konkretnya tersimpul dalam ungkapan "bekerja sambil belajar". Jika dihubungkan dengan tradisi masa lalu dunia pesantren yang diwarnai oleh perilaku "*ngawulo*" santri kepada kiai atau aktivitas mengaji sambil bekerja di sawah-ladang milik orang-orang kaya, maka apa yang terjadi pada embrio pesantren buruh pabrik, sebagaimana yang menjadi fokus perhatian studi ini, sesungguhnya bukanlah kejadian baru. Hanya bedanya, pada pesantren masa lalu wujud aktivitasnya berupa belajar di pesantren sambil bekerja di sawah, dan pada pesantren buruh pabrik berupa bekerja di pabrik sambil belajar di pesantren. Dari pemahaman terakhir ini, dapat pula ditarik kesimpulan lain, bahwa dibanding dunia sekolah yang bersifat kaku dan belakangan sering dihujat orang, pesantren yang fleksibel dan bersifat nonformal justru memiliki daya tahan yang tinggi berkat kelenturannya dalam berinteraksi dengan perubahan zaman.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya ditandai dengan kemajuan di bidang industrialisasi, telah

menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kehidupan buruh pabrik. Aspek positif dari kemajuan industrialisasi di antaranya tampak pada semakin luasnya kesempatan kerja bagi buruh pabrik. Sementara itu, sisi negatif dari kemajuan industrialisasi setidaknya dapat diamati dari perubahan sikap dan perilaku sebagian buruh pabrik yang semakin jauh dari ajaran agama dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Aspek moralitas sebagian buruh pabrik yang dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma-norma yang berkembang di masyarakat, misalnya kebiasaan minum-minuman keras, tawuran massal, judi, narkoba, dan demonstrasi-demonstrasi yang akhir-akhir ini cenderung anarkis. Keterlibatan buruh pabrik pada kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan (SD-SMA), minimnya pengetahuan agama yang dimiliki buruh pabrik, kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal (kos-kosan), dan ketidaksiapan buruh pabrik untuk beradaptasi dengan budaya kota yang metropolitan (*cultural shock*). Adanya realitas persoalan yang dihadapi buruh pabrik tersebut, setidaknya perlu dicarikan jalan keluar agar mereka dapat hidup secara wajar dengan tetap bekerja di perusahaan dan tidak terjerumus dalam kehidupan yang jauh dari ajaran agama dan norma-norma yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa di perusahaan-perusahaan dan di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi pabrik yang menjadi pusat tempat tinggal buruh pabrik, ditemukan ragam aktivitas pendidikan agama. Berbagai pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik ternyata telah dilakukan oleh beberapa kalangan, seperti pondok pesantren, majelis taklim, dan perusahaan sendiri. Beberapa pondok pesantren yang telah menampung buruh pabrik sebagai santrinya, antara lain al-Asy'ari, Al-Istiqomah (Surabaya), Masjid Baitullah (Sidoarjo), dan al-Karimy (Mojokerto). Sementara itu,

majelis-majelis taklim yang mengadakan pembinaan keagamaan terhadap buruh-buruh pabrik adalah Lembaga Kajian Keagamaan (LKK) Jama'ah Tauhid dan Persatuan Pemuda Netral al-Rasyid, di Gresik. Sedangkan pembinaan keagamaan yang dilakukan di perusahaan diprakarsai oleh perusahaan Ajinomoto, yang dikelola oleh keluarga besar Ikatan Warga Muslim yang anggotanya terdiri dari karyawan yang beragama Islam di perusahaan tersebut. Perbedaan penanganan pembinaan keagamaan yang dilakukan terhadap buruh pabrik, tentu saja melahirkan ragam sistem pembelajaran dan kurikulum yang ditawarkan. Sistem pembelajaran di pondok umumnya menggunakan metode sorogan dan wetonan.

Sedangkan untuk mempermudah pembelajaran di kelas, para santri buruh pabrik telah dikelompokkan berdasarkan tingkatan masing-masing. Sementara itu, mengenai kurikulum yang diterapkan, maka hampir semua "embrio" pesantren buruh pabrik menawarkan kurikulum pendidikan yang telah umum dipraktikkan di pondok-pondok pesantren tradisional, misalnya mempelajari al-Qur'an, kitab kuning, dan bahasa Arab. Selain pelajaran-pelajaran dasar, di pesantren juga diajarkan ekstrakurikuler seperti membaca Diba' (sejarah Nabi yang ditulis dalam syair Arab), *khitabah* (berpidato), *istighatsah*, serta pelajaran-pelajaran yang disesuaikan dengan keahlian santri, misalnya mengetik, menjahit, dan komputer. Yang agak spesifik dari pelajaran membaca kitab yang ditawarkan adalah bahwa umumnya pesantren memilih jenis kitab yang mengajarkan materi akhlak dan tasawuf. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar santri buruh pabrik dapat memperbaiki perilakunya sehingga dapat menjadi orang yang berkepribadian baik.

Berbeda dengan sistem pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan di pesantren pada umumnya, pembinaan keagamaan yang dilakukan majelis taklim dan perusahaan, sifatnya tidak mem-

praktikkan pembelajaran dan kurikulum tertentu. Dalam kasus majelis taklim Lembaga Kajian Keagamaan Jama'ah Tauhid dan Persatuan Pemuda Netral al-Rasyid, para santri diajari membaca al-Qur'an, bahasa Arab, membaca kitab kuning, dan mengamalkan amalan-amalan tarekat. Pelajaran-pelajaran di kedua majelis taklim tersebut didesain untuk penanaman akidah Islam dan akhlak yang luhur. Sedangkan pada pembinaan keagamaan buruh pabrik yang dilakukan di perusahaan Ajinomoto, selain diajarkan membaca al-Qur'an, santri buruh pabrik juga diajarkan dasar-dasar Islam yang didesain melalui pengajian rutin bulanan, *Khatm al-Qur'an,* dan peringatan hari besar Islam.

Kehadiran pembinaan keagamaan yang dilakukan "embrio" pesantren buruh pabrik, perusahaan, dan majelis taklim, manfaatnya sangat dirasakan tidak saja oleh buruh pabrik, tetapi juga oleh masyarakat sekitar dan perusahaan. Keberadaan institusi pendidikan agama tersebut, bagi buruh pabrik dirasakan manfaatnya bersifat multifungsi. Misalnya, "embrio" pesantren buruh pabrik yang ada di sekitar lokasi perusahaan, di samping dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang agama serta ketenangan lahir batin, juga bermanfaat secara ekonomis. Bagi buruh pabrik, dengan belajar dan tinggal di "embrio" pesantren sambil bekerja di pabrik, akan dapat melakukan penghematan pengeluaran. Dengan demikian, sebagian dari penghasilan yang diperoleh di tempat kerja dapat ditabungkan dan sebagian dikirim ke daerah asal untuk membantu kehidupan keluarga di kampung halaman. Demikian halnya dengan buruh pabrik yang mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh perusahaan dan majlis taklim, manfaat yang dapat dirasakan adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman agama sehingga dapat menjalankan seluruh ajaran agama secara benar. Di samping itu, buruh pabrik juga dapat memfilter dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin dapat merusak kepribadiannya.

Bagi masyarakat sekitar, pembinaan keagamaan terhadap buruh pabrik setidaknya dapat turut menentramkan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, sebelum institusi-institusi pendidikan agama itu ada, kehidupan sehari-hari buruh pabrik sangat mengkhawatirkan. Sedangkan bagi perusahaan, keberadaan institusi pendidikan agama yang secara khusus menangani buruh pabrik, telah dirasakan manfaatnya. Fenomena tersebut dapat diamati dari pengakuan dari perusahaan Sampoerna dan Abadi bahwa buruh pabrik yang mondok di "embrio" Pesantren Al-Istiqomah mempunyai etos kerja yang tinggi dan sangat disiplin.

Sementara itu, dalam konteks realitas hubungan antara pabrik dan buruh, penelitian ini menemukan data bahwa Islam menekankan pentingnya dua prinsip dasar dalam hubungan tersebut: relasi tersebut mesti ditegakkan dengan cara yang legal serta dengan dasar kerelaan (ketidakterpaksaan) antara kedua belah pihak. Operasionalisasi dari kedua prinsip tersebut berupa pencabutan setiap praktik perampasan hak dan eksploitasi satu pihak atas yang lain serta penegakan terhadap kesepakatan atau kontrak kerja di antara kedua pihak, tegasnya, dalam konteks hubungan pabrik dan buruh ini, Islam secara prinsipil tetap memainkan kontribusinya sebagai ideologi pembebasan, dan bukan ideologi penindasan yang menyuburkan praktik-praktik eksploitasi dan perampasan hak oleh yang satu kepada yang lain.

Dalam kaitannya dengan hubungan pabrik dan buruh, pesantren buruh pabrik meneguhkan posisinya dengan sejumlah kontribusi positif. Untuk konteks kepentingan pabrik, pesantren buruh berkontribusi menjaga stabilitas diri kaum buruh dalam kerangka menegakkan hak dan kewajiban mereka secara seimbang dalam konteks kerja di pabrik sehingga pada gilirannya meningkatkan cara dan mentalitas kerja mereka. Adapun untuk konteks kepentingan kaum buruh, pesantren buruh pabrik memiliki sumbangan dalam memperkuat *bargaining position* mereka di

hadapan pabrik akibat kapasitas kuasa sosial yang dimiliki pesantren.

Kontribusi pesantren terhadap upaya pemecahan problematika kehidupan buruh tampak dari berbagai aspek: ekonomi, sosial, psikis, mental, dan religius. Bagi buruh pabrik, kesempatan belajar agama setelah sebagian besar waktunya digunakan bekerja di pabrik, amat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pengamalan agama. Banyak di antara buruh pabrik yang sebelumnya tidak dapat membaca al-Qur'an, tidak melakukan shalat wajib, terlibat minum-minuman keras, narkoba, pergaulan bebas, dan merasa hidupnya hampa, menjadi bertambah pengetahuan dan pengamalan agamanya setelah mengikuti kegiatan pendidikan agama yang diadakan. Semua aktivitas yang negatif secara perlahan mulai ditinggalkan oleh buruh pabrik, dan mereka mulai menemukan hakikat hidup yang sebenarnya dengan menyeimbangkan kehidupan dunia (bekerja di pabrik) dan akhiratnya (belajar di pesantren).

Keberadaan pesantren buruh pabrik sesungguhnya memiliki landasan filosofis yang cukup kuat jika dilihat dari sudut pandang pendidikan Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam kerangka pendidikan Islam, pesantren merupakan salah satu dari jenis pendidikan Islam, sedangkan pesantren buruh pabrik dapat disebut sebagai fenomena baru dalam dunia pesantren. Sebab, selama ini masyarakat hanya mengenal jenis pesantren konvensional, seperti pesantren salaf dan pesantren modern. Pesantren buruh pabrik merupakan lembaga pendidikan Islam yang bertujuan memberikan bimbingan keagamaan kepada buruh pabrik yang terletak di kawasan industri. Tegasnya, pesantren buruh pabrik berupaya menggabungkan unsur-unsur tradisional pesantren dan nilai-nilai industri.

Elemen pesantren buruh pabrik pada intinya bisa diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama; (1) Kelompok aktor atau pelaku, yang meliputi kiai, ustadz, santri dan pengurus; (2) Sarana perangkat keras. Yakni masjid, rumah kiai, rumah dan asrama ustadz, pondok atau asrama santri, gedung sekolah atau tempat bagi berlangsungnya proses belajar mengajar, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti tempat berolahraga, tempat peternakan atau praktik kerja, tempat pelayanan kesehatan dan telekomunikasi, empang, makam, kantin dan sebagainya. Terpenting dari semua itu, keberadaan pesantren buruh pabrik harus dilingkupi oleh sebuah sistem makro lingkungan industri. (3) Sarana perangkat lunak, seperti tujuan didirikannya pesantren, kurikulum, evaluasi, tata tertib, metode pengajaran, keterampilan dan penempaan diri, dan lain sebagainya.

Beberapa kondisi pesantren buruh pabrik yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa; (1) ada unsur pesantren konvensional yang tidak dijumpai pada pada sebagian pesantren buruh pabrik, misalnya kitab kuning. Hal ini bisa dipahami karena materi ajar yang diberikan dalam proses pembinaan keagamaan di pesantren buruh pabrik bersifat adaptif, atau disesuaikan, dengan kebutuhan dan kapasitas santri buruh. Pada umumnya, santri buruh membutuhkan pembinaan keagamaan lebih karena alasan-alasan kebutuhan spiritual. Kehidupan industrial yang serba mekanistik itu rupanya mendorong sebagian buruh memilih ikut terlibat dalam proses pembinaan keagamaan. Sementara itu, jika dilihat dari kualitas pengetahuan keagamaan, tidak jarang dijumpai kapasitas pemahaman dan pengamalan keberagaman mereka masih jauh dari memadai. Hal ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan keagamaan sebelum mereka menjadi santri buruh di wilayah industri. Kondisi yang demikian ini mendorong para kiai atau ustadz pembina memberikan materi keagamaan yang sesuai dengan tingkat penerimaan atau kapasitas dan kebutuhan

para santri buruh dengan materi yang cukup bervariasi, tanpa harus diambilkan dari kitab tertentu. (2) Kebalikan dari kondisi pertama di atas, terdapatnya sejumlah elemen yang terdapat dalam pesantren buruh pabrik, namun tidak terdapat dalam elemen pesantren konvensional adalah, seperti lingkungan pabrik di mana mereka bekerja. Kondisi ini jelas jauh berbeda, bahkan bertolak belakang secara diametral, dengan kondisi pesantren konvensional yang sebagian besar mewajibkan santrinya tinggal di asrama santri atau pemondokan. Selain itu, mayoritas santri buruh adalah mereka yang sudah dewasa, bahkan ada yang sudah berumah tangga. Hal inilah yang menyebabkan jadwal, materi, dan metode pembinaan keagamaan kepada santri buruh disesuaikan dengan kondisi santri buruh. Penyesuaian itu bisa berupa penjadwalan proses pembelajaran yang fleksibel dan materi disampaikan dengan menggunakan metode andragogi, bukan pedagogi.

Berdasarkan temuan di lapangan dapat dikatakan bahwa sikap dan pandangan berbagai kalangan, baik dari unsur buruh pabrik, pengelola areal industri (perusahaan), tokoh organisasi kemasyarakatan (NU dan Muhammadiyah), serta pakar pendidikan, terhadap keberadaan pesantren buruh pabrik umumnya sangat apresiatif. Bagi buruh pabrik, keberadaan pesantren dapat dijadikan tumpuan harapan. Misalnya, buruh pabrik berharap pesantren buruh pabrik dibangun di dekat areal industri, dilengkapi sarana dan prasarana memadai, mushalla/masjid, ruang belajar, MCK, kantin, dan sarana olahraga. Berkaitan dengan kurikulum materi pelajaran, buruh pabrik mengusulkan agar materi yang diajarkan adalah ilmu agama, umum, dan keterampilan, dengan penekanan pada pendidikan akhlak. Sedangkan metode dan waktu pembelajaran, umumnya buruh pabrik menghendaki metode pembelajaran dengan ceramah dan dialog, waktu belajar berdasarkan keluangan waktu kerja dengan durasi sekitar 2 jam.

Sementara, dari kalangan perusahaan berpandangan bahwa keberadaaan pesantren buruh pabrik harus didukung, bahkan pada masa mendatang perusahaan harus memikirkan lokasi khusus pembinaan keagamaan buruh pabrik yang dilengkapi sarana asrama, ruang belajar, kantin, MCK, dan lain-lain. Berkaitan dengan beban biaya pengelolaan, maka harus ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait. Pandangan senada mengenai keberadaan pesantren buruh pabrik juga diberikan oleh tokoh organisasi kemasyarakatan dan pakar pendidikan. Mereka berpendapat pesantren buruh pabrik sebagai fenomena baru harus didukung semua pihak, buruh, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Karena santri dalam pesantren industri sekaligus berprofesi sebagai pekerja, maka berkaitan dengan kurikulum, metode pembelajaran, dan pengelolaan pesantren harus disesuaikan dengan kebutuhan buruh pabrik.

Berdasarkan temuan di lapangan dan kajian pustaka, dapat dikemukakan bahwa konstruksi model ideal pesantren buruh pabrik perlu diwujudkan. Bangunan model-ideal pesantren buruh pabrik disini bukan hanya bersifat pengembangan terhadap pesantren-pesantren buruh pabrik yang telah ada, melainkan usaha untuk mewujudkan pesantren buruh pabrik yang benar-benar baru. Jika selama ini keberadaan pesantren buruh pabrik lebih banyak merupakan usaha tokoh masyarakat (kiai, ustadz) tanpa banyak melibatkan pihak lain (misalnya perusahaan), maka pesantren buruh pabrik yang akan dibentuk harus didasarkan pada komitmen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Hal ini penting mengingat keberadaan pesantren buruh pabrik memang harus menjadi bagian yang integral dari kepentingan perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan perusahaan dapat berupa fasilitas sarana prasarana, pemerintah memberikan sarana pendukung, sementara masyarakat memberikan perlindungan bagi buruh pabrik.

Berkaitan dengan konstruksi model ideal pesantren buruh pabrik dapat dikemukakan bahwa secara substansial pesantren buruh pabrik harus memiliki elemen-elemen inti seperti halnya dalam pesantren konvensional, misalnya kiai/ustadz, santri, asrama/pemondokan, pengajian kitab kuning, masjid/mushala, serta sarana penunjang lainnya. Hanya saja, pada tingkat tertentu pesantren buruh pabrik memiliki beberapa perbedaan, misalnya dalam hal lingkungannya di areal industri, santri yang sekaligus pekerja, pengajian kitab-kitab kuning yang elementer dengan penekanan pada pelajaran akhlak, waktu belajar yang disesuaikan dengan kelonggaran santri, serta metode belajar yang aplikatif. Jadi, pesantren buruh pabrik bersifat sangat fleksibel, lentur, dan akomodatif terhadap kenyataan modernisasi dan industrialisasi.

Berkaitan dengan kehadiran pesantren buruh pabrik, kiranya dapat dikemukakan bahwa pesantren buruh pabrik merupakan respons terhadap dialog antara nilai-nilai keislaman dalam hal ini pendidikan Islam, dengan nilai-nilai modernisasi dan industrialisasi. Dalam hal ini, pesantren buruh pabrik dapat disebut dengan wujud "perkawanan" keislaman dan modernitas. Karena, pesantren sebagai implementasi nilai-nilai keislaman di bidang-bidang pendidikan telah mengakomodasi kepentingan buruh pabrik yang merupakan elemen penting dari modernisasi, khususnya pengembangan industrialisasi di kota-kota besar.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pesantren buruh pabrik, dapat dikemukakan bahwa kenyataannya pesantren buruh pabrik bersifat sangat fleksibel. Misalnya, berkaitan dengan santri yang sekaligus menjadi pekerja, dapat dipahami adanya prinsip yang dipegang para santri adalah "bekerja sambil belajar". Artinya, santri buruh pabrik tetap bekerja di perusahaan-perusahaan, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat religius, psikologis, dan ekonomis, mereka memilih tempat tinggal di pesantren. Selanjutnya, fleksibilitas pesantren buruh pabrik juga

dapat diamati dalam hal pengaturan waktu belajar, kurikulum materi pelajaran, pemondokan, serta sarana pendukung lainnya.

Pesantren buruh pabrik, pada akhirnya, mengemban tiga peran sekaligus: *tawassul, tawassuth,* dan *tawazzun.* Peran *tawassul (membangun hubungan),* dilakukan dengan cara membangun hubungan antara orisinalitas masa lalu dan idealitas masa depan, merupakan prinsip awal yang melandasi eksistensi pesantren buruh pabrik, sebagai modal dan bekal yang amat berharga untuk sampai pada *tawassuth (menempuh jalan tengah)* dalam pemecahan masalah yang dihadapi, dan semua itu mestilah dilakukan dengan sikap *tawazzun (menjaga keseimbangan)* dalam arti yang seluas-luasnya. Prinsip *tawassuth (menempuh jalan tengah),* kiranya tepat untuk diposisikan sebagai *kunci* atau *sentral* dari kedua sisi kanan-kirinya yang lain, yakni *tawassul* (membangun hubungan baik) dan *tawazzun* (menjaga keseimbangan hidup). Alur logikanya, dengan menempuh jalan tengah (*tawassuth*), maka segala langkah yang dilakukan oleh pesantren buruh pabrik, diharapkan berhasil maksimal sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Untuk sampai ke arah dan mencapai kemampuan tersebut, diperlukan langkah membangun hubungan baik (*tawassul*) dengan masa lalu, guna mencapai idealitas masa depan. Melalui keseimbangan hidup yang terjaga (*tawazzun*), semuanya akan berlangsung mulus sesuai dengan semangat ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdurrahman Saleh. 1990. *Teori-teori Pendidikan Menurut al-Qur'an*. Terj. M. Arifin. Jakarta: Rineka Cipta.

Abdullah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

————. 1988. "The Pesantren in Historical Perspective." Dalam Taufik Abdullah & Sharon Siddique (eds.). *Islam and Society in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

————. 1989. "Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara: sebuah Perspekrif Perbandingan." Dalam Taufik Abdullah & Sharon Siddique (eds.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Terj. Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES.

————. 1994. "Kata Pengantar", dalam M. Dawam Raharjo. *Masyarakat Madani: Agana, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: pustaka LP3ES.

Abdurrachman. 1982. *Kepemimpinan Dalam Administrasi Pembangunan di Jawa-Timur*. Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Ahmad, Khursyid. 1992. *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*. Terj. AS. Robith, Surabaya: Pustaka Progresif.

Alam, Dipo. 1996. "Perencanaan dan Pengembangan Industri dan Perdagangan." Dalam *Prisma*, Nomor Khusus 25 Tahun (1971-1996), Tahun XXV.

Al-Attas, Syed Muhammad al-Naquib. 1984. *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Terj. Haedar Baqir, penyunting Jalaluddin Rahmat. Bandung: Mizan.

————. 1984. *Konsep Pendidikan Islam Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan*. Terj. Haedar Baqir. Bandung: Mizan.

Al-hamdy, Md. Ali. 1974. *Jalan Hidup Muslim*. Bandung: al-Ma'arif.

Ali, Fachry & Bahtiar Effendi. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekontruksi/Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan.

—————. 1997. "Fisi Politik dan Intelektual Umat Islam Dalam Proses Modernisasi." Dalam Muslih Usa & Aden Wijdan SZ, *Pendidikan Islam Dalam Peradaban Industial*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.

Ali, Hasan Abdul. 1978. *Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qami al-Rabi' al-Hijriy*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.

Ali, K. 1980. *A Study of Islamic History*. Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli.

Ali, Mukti A. 1971. *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Nida.

—————. 1971. *Pelbagai Persoalan Islam di Indonesia Dewasa ini*. Yogyakarta: Yayasan Nida.

Ali, R. Muchammad. 1963. *Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara*. Jakarta: Bhratara.

Al-Jabiri, Muhammad Abed. 2000. *Post Tradisionalisme Islam*. Terj. Ahmad Baso. Yogyakarta: Penerbit LKiS.

Amsyari, Fuad. 1986. "Keharmonisan Lingkungan Sebagai Determinan Keberhasilan Pembangunan Bidang pendidikan: Suatu Analisis Dari pandangan Islam." Dalam Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam IAIN Sunan Ampel. *Pembangunan Pendidikan Dalam Pandangan Islam*. Surabaya: Indah Offset

Ansari, Fazlur Rahman. 1986. *Islam dan Peradaban Barat Modern*. Terj. Asmara Hadi Usman, penyunting Anwar Rasyidi. Bandung: Risalah.

Arifin, M. 1987. *Filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Bina Askara.

Ashraf, Syed Ali. 1985. *New Horizons in Muslim Education*. Cambrige: Hodder and Stoughton The Islamic Academy.

—————. 1988. "The Conseptual Framework of Education; The Islamic Perspective." Dalam *Muslim Education Quarterly*. Vol. V, No. 2 (United Kingdom: The Islamic Academy).

Atjeh, Aboebakar. 1957. *Sejarah Hidup KHA Wahid Hasjim*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan Almarhum KHA. Wahid Hasjim.

————. 1995. *Sejarah al-Qur'an*. Surabaya: Sinar Trading Company.

Azra, Azyumardi. 1997. "Pesantren Kotinuitas dan Perubahan." Dalam Nurcholish Madjid. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Peramadina.

Jawa Pos. 2001. "Bandung Mirip lautan Api." *Jawa Pos*. 14 Juni.

Baso, Ahmad. 2002. "Tradisi Sebagai Invensi." *Kompas*. 6 September.

Bawani, Imam. 1987. *Segi-segi Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.

————. 1993. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam: Studi tentang Daya Tahan Pesantren Tradisional*. Surabaya: Al-Ikhlas.

————. 2001. *Pendidikan Islam di Indonesia: Beberapa Problema dan Altematif Pemecahannya*. Makalah Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya, 10 Februari.

Bell, Daniel. 1973. *The Coming of Post Industrial Sociaty: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.

————. 1976. *The Cultural Contractions of Capitalism*. New York: Basic Books.

Bellah, Robert N. 1969. *Takugawa Religion*. New York: Harper and Row.

————. 1982. *Beyond Belief*. New York: Harper & Row Publisher.

————. 1984. *Takugawa Religion. The Values of Pre-Industrial Japan*. New York: Macmillan Publishing Company.

Berger, Peter L. 1990. *The Sacred Canopy*. New York: An Anchor Book.

Boland, B.J. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers.

Brewer, Anthony. 1999. *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Terj. Joebaar Ajoeb. Jakarta: Teplok Press.

Bruinessen, Martin van. 1992. *Pesantren and Kitab Kuning*. Bandung: Mizan.

Chirzin, Chabib. 1995. "Agama dan Ilmu dalam Pesantren." Dalam Dewan Rahardjo (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

Cox, Harvey. 1965. *The Secular City; Urbanization and Secularization in Theological Perspective*. New York: Macmillan.

Crow dan Crow. 1990. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Jurnal Kumpulan Abstrak Penelitian Universitas Airlangga Tahun 1997/1998-1998/1999 (Kelompok Ilmu Sosial). 2000. Surabaya.

De Graaf, H.J. & Th. Pigeaud. 1989. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1983. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain Asy-Syarifain li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif.

Dewey, John. 1958. *Democrazy and Education.* New York: The Macmillan Company.

Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai.* Jakarta: LP3ES

————. 1986. "Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia." *Majalah Prisma* No. 3. Februari.

Dirdjosanjoto, Pradjarta. 1999. *Memelihara Umat; Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa.* Yogyakarta: LKiS.

Djamil, Abdul. 1999. "Pesantren dan Kebudayaan: Kajian Ulang tentang Peran Pesantren sebagai Pembentuk Kebudayaan Indonesia." *Walisongo.* Edisi 12.

El-Ibrashi, Muhammad Atiya. t.t. *Education in Islam.* t.t.p.: The Supreme Council for Islamic Affairs.

Elster, Jon. 2000. *Marxisme; Analisis Kritis.* Jakarta: Pt. Prestasi Pustakaraya.

Engineer, Asghar Ali. 1990. *Islam and Liberation Theology.* New Delhi: Sterling Publishers Private Limited

————. 2000. *Islam dan Teologi Pembebasan.* Terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Essack, Farid. 1997. *Qur'an, Liberation & Pluralism.* Oxford: Oneword.

Fairchild, Henry Fratt, et.al. 1970. *Dictionary of Sociology and Related Sciences.* New Jersey: Totowa.

Fromm, Erich. 1964. *The Heart of Man: Its Genius for Good and Evil.* New York: Harper & Row.

Geertz, Clifford. 1960. "The Javanese Kijai: The Changing Role of A Cultural Broker." *Comparative Studies in Society and History.* 2.

Gellner, Ernest. 1981. *Muslim Society.* Cambridge: Cambridge University Press.

————. 1992. *Postmodernism, Reason and Religion.* London and New York: Routledge

Gibb, H.A.R. & J.H.Kramers. 1965. *Shorter Encyclopaedia of Islam.* Leiden: E.J.Brill.

Giddens, Anthony. 1987. "Strukturisasi Kelas dan Kesadaran Kelas." Dalam Anthony Giddens dan David Held (eds.). *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik.* Terj. Vedi R. Hadiz. Jakarta: Rajawali.

————. 1998. *The Third Way: The Renewal of Social Democracy.* Cambridge: Polity Press

Gilbert, Alan & Josef Gulger. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga.* Terj. Juanda Anshari. Jogjakarta: Tiara Wacana.

Gunawan, Riyadi. 1998. "Di tengah Deru Himpitan Mesin-Mesin Pabrik." Dalam Aris Wibawa (ed.). *Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik.* Yogyakarta: Fisipol Universitas Atamajaya Yogyakarta & Lapera Pustaka Utama.

Hadimulyo. 1985. "Dua Pesantren Dua Wajar." Dalam M. Dawam Rahardjo (ed.). *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah.* Jakarta: P3M.

Hadiz, Vedi R. 1996. "Buruh dalam Penataan Politik Awal Orde Baru." *Prisma.* No. 7. tahun XXV.

Hamid, A. 1996. "Agama dan Industrialisasi; Hubungan Pendidikan Agama dan Perilaku Seksual Pekerja Industri di Wilayah Kecamatan Gedangan Sidoarjo." (Laporan Hasil Penelitian, P3M Sunan Ampel, Surabaya).

Hamka. 1961. *Sejarah Ummat Islam.* Jakarta: NV. Nusantara.

————. *Dari Perbendaharaan Lama.* Medan: Firma "Madju".

Hasibuan, Nurimansjah. 1989. "Pemerataan, Pertumbuhan, dan Konsentrasi Ekonomi dalam Proses Industrialisasi." *Prisma.* No. 9. Tahun XVIII.

Hok Gie, Soe. 1990. *Di Bawah Lentera Merah: Riwayat Serikat Islam Semarang,* 1917-1920. Jakarta: Franz Fanon Foundation.

Horikoshi, Hiroko. 1987. *Kiai dan Perubahan Sosial.* Jakarta: P3M.

Hurgronje, Snouck. 1982. *Islam di Hindia Belanda.* Terj. S.Gunawan. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Husain, Syed Sajjad & Syed Ali Ashraf. 1979. *Crisis in Muslim Education.* Jeddah: Hodder and Stoughton King Abdul Aziz University.

————. 1986. *Krisis Pendidikan Islam.* Terj & Peny. Rahmani Astuti. Bandung: Risalah.

Ibrashi, el-Muhammad Atiya. t.t. *Education in Islam.* t.tp.: The Supreme Council for Islamic Affairs.

Jalal, Abdul Fatah. 1977. *Min Ushul al-Tarbiyah fi al-Islam.* Mesir: al-Markaz al-Dauli li al-Ta'lim al-Wazhif li al-Kibari fi al-Alam al-'Arabiy.

Jalaluddin dan Usman Said. 1999. *Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan.* Jakarta: Rajawali Press.

Jamil, Abdul. 1999. "Pesantren dan Kebudayaan; Kajian Ulang tentang Peran Pesantren sebagai Pembentuk Kebudayaan Indonesia." *Walisongo.* Edisi 12.

Jaya, Taman. 1965. *Pustaka Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang.

Kab. Gresik, BPS. 1999. *Gresik dalam Angka 1998.* Gresik: BPS Kab. Gresik.

Kab. Mojokerto, BPS, dan Bappeda Tk. II Mojokerto. 1999. *Kabupaten Mojokerto dalam Angka 1998.* Mojokerto: BPS Kab. Mojokerto dan Bappeda Tk. II Mojokerto.

Kab. Sidoarjo, BPS, dan Bappeda. 1999. *Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 1999.* Sidoarjo: BPS Kab. Sidoarjo

Kartono, Kartini. 1994. *Psikologi Sosial untuk Manajemen, Perusahaan dan Industri.* Jakarta: Grafindo Persada.

Kepel, Gilles. 1994. *The Revenge of God.* Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Khan, Mohd. Sharif. 1986. *Islamic Education.* New Delhi: Ashish Publishing House.

Kitaji, Tetsuya. 1990. *Islamic Versus Modern Western Education: Prospects for the Future.* t.tp.: IMES–I.U.J. Working Papers Series. No. 19.

Kota Surabaya, BPS. *Surabaya dalam Angka 1998* (segera terbit).

Kraemer, H. 1952. *Agama Islam.* Jakarta: Badan Penerbit Kristen.

Langgulung, Hasan. 1986. *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan.* Jakarta: Pustaka al-Husna.

Lauer. 1989. *Perspective Social Change.* New York: Tp.

Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 2000. *Jurnal Kumpulan Abstrak Hasil Penelitian Kelompok Ilmu Sosial.* Surabaya: tp.

Madjid, Nurcholish, dkk. 1983. *Aspirasi Umat Islam* Jakarta: Leppenas (Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional).

————. 1992. *Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia Untuk Generasi Mendatang* (Makalah Pidato di TIM, 21 Oktober 1992, tidak diterbitkan).

————. 1993. *Islam Kemodeman dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

————. 1995. "Tasawuf dan Pesantren." Dalam M. Dawam Rahardjo (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES.

Magnis-Suseno, Franz. 2000. *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mangunwijaya, Y.B. (ed). 1993. *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Marcuse, Herbert.1969. *One Dimensional Man: The Ideology of Industrial Society*. Great Britain: Sphere Books Ltd.

Mark, Karl dan Fredrick Engels. 1968. *Selected Works*. New York: International Publisher.

Mas'udi, Masdar F. et.al. 1986. *Direktori Pesantren*. cet. I. Jakarta: P3M.

Masduki, Teten. 1986. "Menunggu Reformasi Lewat Kemauan Politik." *Prisma*. No. 7. Tahun XXV (Juli).

Maslow, Abraham J. 1970. *Motivation and Personality*. New York: Van Nostrand Reinhold

Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.

Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Karya. cet. I.

Muchtarom, Zaini. 1988. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: Indonesian Netherlands Coorporation in Islamic Studies (INIS). cet.I.

Muhadjir, Noeng. 1987. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

————. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.

Nachrowi, Nachrowi D. & Salahudin A. Muhidin. 1997. "Pekerja Anak dan Industrialisasi." *Prisma*. No. 2. Tahun XXVI. (Februari).

Nashir, Haedar. 1997. *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasikun. 1996. "Kata Pengantar." Dalam Alkan Gilbert & Josef Gugler. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nasr, Seyyed Hossein. 1968. *The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man.* London: Allen & Unwin.

————————. 1975. *Islam and the Plight of Modern Man.* London: Longman.

Nata, Abudin. 2000. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Rajawali Press.

Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian.* Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Noer, Deliar. 1982. *Gerakann Islam Modern di Indonesia 1900-1942.* Jakarta: LP3ES.

Nottingham, Elizabeth K. 1985. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama.* Terj. Abdul Muis Naharong. Jakarta: CV. Radjawali.

O'dea, Thomas F. 1993. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal.* Terj. Tim Yasogama. Jakarta: Raja Grafindo Press.

Open, Manfred dan Walgang Karcher (ed.). 1988. *Dinamika Dunia Pesantren.* Terj. Sonhaji Saleh. Jakarta: P3M.

Parker, S.R. dan R.K. Brown, J. Child dan M.A. Smith. 1992. *Sosiologi Industri.* Terj. G. Kartasapoetra. Jakarta: Rineka Cipta.

Pasaribu, Bomer. 1996. "Menampilkan Seutuhnya Wajah Pekerja Indonesia." *Prisma.* No. 7. Tahun XXV. Juli.

Pelly, Usman dan Asih Menanti. 1994. *Teori-Teori Sosial Budaya.* Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud.

Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik. *Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun 1999/2000-2003/2004.* Gresik: Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, tt.

Pemerintah Kota Surabaya. 2000. *Surabaya dalam Angka.* Surabaya: Dinas Pengelola Statistik Kota.

Peters, R.D. 1964. *Education as Initiation.* London: The Macmillan Press Ltd.

Poot, Huib, Arie Kuyvenhovendan Jaap Jansen. 1982. *Industrialisation and Trade in Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Provinsi Jawa Timur, BPS. 1998. *Jawa Timur dalam Angka 1998.* Surabaya: BPS Prop. Jawa Timur.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. cet. III.

Rachbini, Didik J. 1989. "Dilema Transformasi Ketenagakerjaan." *Prisma.* No. 5. Tahun XVIII.

Rahardjo, Dawam et.al., (ed.). 1995. *Pesantren dan Pembaharuan.* cet. V. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Rahman, Mawdudur. "A Holistic and Institutional Analysis of Islamic Education." *The American Journal of Islamic Social Sciences.*

Razif. 1998. "Pengalaman Kelas Buruh dan Industri Manufaktur di Indonesia." Dalam Aris Wibawa. *Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik.* Yogyakarta: Fisipol Universitas Atmajaya & Lapera Pustaka Utama.

Robertson, Roland. 1974. "Religious and Sociological Factors in the Analysis of Secularization." Dalam Allan W. Eister (ed). *Changing Perspective in the Study of Religion.* Toronto: John Willey & Sons.

Rodinson, Maxime. 1981. *Islam and Capitalism.* Terj. Brian Pearce. Austin: University of Texas Press.

Sa'doellah, Aminoto. 2000. "Memburu Buruh, Problem "Qiyas" yang Tak Tuntas." *Gerbang.* Nomor 08. Volume 03. (Agustus-Oktober).

Sairin, Syafri dan Pujo Sumedi. 1992. *Telaah Pengelolaan Keserasian Sosial dari Literatur Luar Negeri dan Hasil Penelitian Indonesia.* Laporan Penelitian. Jakarta: Kantor Meneg KLH dan UGM.

Schleifer, Aliah. 1988. "The Role of Muslim Mother in Education in Contemporary Society." *Muslim Education Quarterly.* Vol. V. No. 2 (United Kingdom: The Islamic Academy).

Schluchter, Wolfgang. 1990. "The Future of Religion," dalam Jeffery C. Alexander & Steven Seidman (eds.). *Culture and Society: Contemporary Debates.* Cambridge: Cambridge University Press.

Scott, James C. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia." *Journal of Asian Studies.* Volume XXXII. Number 1.

Sehat. 2000. Tahun VI. No. 31. Juli.

Setiawan. 2000. *Konflik Sosial; Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan, dan Negara di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sharif Khan, Mohd. 1986. *Islamic Education.* New Delhi: Ashish Publishing House.

Shihab, M. Quraish. 1988. "Posisi Sentral al-Qur'an dalam Studi Islam." Makalah Seminar Nasional Metodologi Penelitian Agama (Tidak diterbitkan, Malang).

Shils, Edward. 1981. *Tradition*. Chicago: The University of Chicago.

Sholeh, Shonhadji. 2000. "Globalisasi dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Akademika*. Vol. 07. No. 1. Pascasarjana IAIN Sunan Ampel (September).

Sju'aib, Muhammad Basjir. 1996. "Kehidupan Umat Beragama Islam pada Masyarakat Transisi dari Agraris ke Industri di Kecamatan Wringin Anom Gersik." (Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Terbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel).

Smart, Barry. 1992. *Modern Conditions, Postmodern Controversies* (London: Routledge).

Smyth, Ines. 1997. *Industrialization and Natural Resources*. Bandung: Akatiga.

Soedjatmoko. 1987. "Masa Depan Manusia: Antara Transendensi dan Histori." *Majalah Panji Masyarakat*. No.543. Jakarta: Edisi 21 Juni.

————. 1993. "Teknologi, Pembangunan dan Kebudayaan." Dalam Y.B. Mangunwijaya (ed.). *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya*, Vol. I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.

————. 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modem*. Jakarta: LP3ES.

Sudjana, Egi. 2000. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. Jakarta: PPMI.

Sukamto. 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Sulistio, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta: KPG.

Sumartana, Th1992. *Spiritualitas Baru; Agama dan Aspirasi Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suroto, Suri. 1985. "Gerakan Buruh dan Permasalahannya." *Prisma*. 11. Tahun XIV.

Susanto, Achmad Wiherno. 1996. "Industrialisasi dan Pendidikan Agama Masyarakat Industri di Mojokerto Jawa Timur." (Laporan Hasil Penelitian, IAIN Sunan Ampel, Malang).

Susanto, Achmad Wihemo. 1996. *Pendidikan Agama di Lingkungan Masyarakat Industri: Studi Kasus di Mojokerto, Jawa-Timur*. Surabaya: Balai Penelitian IAIN Sunan Ampel

Susanto, Hadi. 2000. "Megatruh Kelas Buruh; Laporan Investigatif Buruh Pabrik di Surabaya." *Gerbang*. Nomor 08. Volume 03. Agustus-Oktober.

Syukur, Fatah. 1999. "Kemandirian Pesantren; Studi Kelembagaan dan Proses Pendidikannya." *Walisongo*. Edisi 13.

Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Thompson, Kenneth. 1996. "Religion, Values, and Ideology." Dalam Stuart Hall, et. al. (eds.). *Modernity: An Introduction to Modern Societies*. Cambridge: Blackwell Publishers Inc.

————. 1996. *Key Quotation in Sociology*. London & New York: Routledge.

Tibawi, A.L. *Islamic Education: Its Traditions and Modernization into the Arab National Systems*. London: Luzac & Company Ltd.

Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya. cet. IV.

————. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tofler, Alvin. 1989. *Future Shock* dan *The Third Wave*. New York: Bantam Books.

Trisna, Mulli. 2000. "Buruh, Siapa sih Sampeyan?" *Gerbang*. Nomor 08. Vol. 03. Agustus-Oktober.

Turner, Bryan S. 1994. *Religion and Social Theory*. London: SAGE Publications Ltd.

Uddin, Jurnalis. 1988. "Profile of Muslim Education in Indonesia." *Muslim Education Quartely*. Vol. V. No. 2 (United Kingdom: The Islamic Academy).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Veeger, KJ. 1993. *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Versenyl, Laszo. 1973. *Education as a Human Enterprise*. New York: Harper & Row.

W. Oetomo, Mochtar. 2000. "Wajah Buruh di Media; Sistem Konversasi, Hegemoni, Kekerasan 'Semiotik'." *Gerbang*. Nomor 08. Volume 03. (Agustus-Oktober).

Wach's, Joachim. 1971. *Sosiology of Religion*. London: The University of Chicago Press.

Wahid, Abdurrahman. "Pesantren sebagai Subkultur." Dalam M. Dawam Rahardjo (ed.). *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES).

————. 1981. *Muslim di Tengah Pergumulan.* Jakarta: Leppenas.

————. 1994. "Pondok Pesantren Masa Depan." Dalam Marzuki Wahid (ed.). *Pesantren Masa Depan.* Bandung: Pustaka Hidayah.

Wahid, Marzuki et.al., (ed.). 1999. *Pesantren Masa Depan.* Bandung: Pustaka Hidayah.

Weber, Max. 1958. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.* New York: Charles Scribner's Sons.

————. 1964. *The Sociology og Religion.* Terj. Ephrain Fischoff. Boston: Beacon Press.

Wilson, B.R. 1995. "Agama dalam Masyarakat Sekuler." Dalam Roland Robertson (ed.). *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis.* Terj. Achmad Fedyani Saifudidin. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wulff, David M. 1991. *Psychology of Religion.* New York: John Wiley & Sons.

Yinger, J. Milton. 1967. "Religion and Social Change: Functions and Dysfunctions of Sects and Cults among the Disprivileged." Dalam Richard D. Knudten (ed.). *The Sociology of Religion: an Anthology.* New York: Meredith Publishing Company.

Yunus, Mahmud. 1982. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Hidakarya Agung.

Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan.* Yogyakarta: BIGRAF Publishing.

Ziemek, Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial.* Jakarta: P3M.

Zuhri, Syaefuddin. 1977. *Guruku Orang-Orang dari Pesantren.* Bandung: Al-Ma'arif.

INDEKS

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

BIODATA PENULIS

Prof. Dr. H. Imam Bawani, MA. Lahir di Kediri, 12 Agustus 1952. Saat ini menjadi dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Menyelesaikan studinya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bendorejo, Udanawu, Blitar, 1965. Perguruan Muallimin 4 Tahun, Sambi, Kandat, Kediri, 1969. Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN) Kediri, 1971. Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel Malang, 1975. Sarjana Lengkap Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel Malang, 1978. Pendidikan dan Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIIS) Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 1983. Magister Pendidikan Islam, Program Pascasarjana (S2) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1989. Doktor Studi Islam, Program Doktor (S3) IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1995.

Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel. Pembantu Dekan I, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel. Kepala Pusat Penelitian, IAIN Sunan Ampel. Kepala Lembaga Penelitian, IAIN Sunan Ampel. Rektor Universitas Pesantren Tinggi (UNIPDU) Darul Ulum, Jombang.

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan penulis adalah "Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa" (skripsi, 1978), "Kebutuhan Guru Agama di Jawa Timur" (IAIN-Bappeda Jatim, 1981), "Dampak Makro Ekonomi Haji di Indonesia" (LP3ES Jakarta, 1982), "Kehidupan Anak Ulama di Aceh" (PLPIIS Universitas Syiah Kuala, 1983), "Direktori Pesantren di Jawa Timur" (Balitbang Departemen Agama, 1985), "Daya Tahan Pesantren Tradisional" (tesis, 1989), "Pesantren Anak-Anak di Indonesia" (disertasi, 1995), "Kursus Privat Agama di Kota Surabaya" (Ditbinpertais Dep. Agama, 1998), "Pesantren Buruh Pabrik" (Riset Unggulan, Kantor Menristek-LIPI, 2003).

Adapun karya ilmiah (buku ajar) yang telah dihasilan adalah *Pengantar Bahasa Arab* (Al-Ikhlas, Surabaya, 1983), *Tata Bahasa Arab* (Al-Ikhlas, Surabaya, 1984), *Pengantar Ilmu Jiwa Perkembangan* (Bina Ilmu, Surabaya, 1985), *Psikologi Perkembangan* (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), *Segi-Segi Pendidikan Islam* (Al-Ikhlas, Surabaya, 1990), *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam* (Al-Ikhlas, Surabaya, 1991), *Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam* (Bina Ilmu, Surabaya, 1992). Sementara itu, karya dalam bentuk artikel (jurnal) adalah "Pendidikan Islam di Indonesia dan Saudi Arabia" (*Jurnal Tarbiyah*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, 1984), "Konsep Ilmu dalam Islam" (*Jurnal Paramedia*, Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), "Kepemimpinan Pendidikan Islam" (Jurnal Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), "Paradigma Pendidikan Islam" (Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2001), "Rekonstruksi Pemikiran Cendekiawan Muslim" (Jurnal Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, 2002), "Pesantren Buruh Pabrik" (*Jurnal Kualita Ahsana*, Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel, 2003) "Pengembangan Pesantren Industri" (Jurnal LIPI, 2004), "Tradisi Keilmuan di Lembaga Pendidikan Islam" (Jurnal Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

Drs. Achmad Zaini, MA. Lahir di Surabaya, 12 Mei 1970. Menyelesaikan studinya di Surabaya mulai dari SD Al-Khairiyah, SMP Negeri 8, dan SMA Negeri 9 hingga menamatkan studi S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis diangkat menjadi dosen melalui program pembibitan calon dosen se-Indonesia tahun 1994 dan mengikuti Pre-Departure Training Program for Overseas Garduate Studies di Jakarta selama 9 bulan. Pada tahun 1995, mendapatkan kesempatan mengikuti English fot Academic Purposes (EAP) di IALF Bali untuk program pascasarjana di Kanada. Pada tahun 1996-1998, melanjutkan studi pascasarjana di McGill University. Tesis yang ditulisnya adalah "Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Educational Reform and to Indonesian Nationalism during the Twentieth Century." Selama menempuh program tersebut, penulis juga mengikuti McGill Summer Management Course at The McGill Executive Institute, Montreal, Kanada dan menjadi narasumber dalam SEASSI Conference di Arizona State University dengan paper berjudul "The Darul Islam Movement in Aceh from the Perspective of Western Scholarship."

Sejak 1998, penulis menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel dan sekarang diberi amanah menjadi Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama kariernya, penulis mengikuti berbagai workshop dan training, di antaranya: Workshop on Confirmatory Research Methodology di University of Melbourne, Training mentor IAIN Teacher Development II, Advanced Capacity Building Training, Certificate IV in Training and Assessment, Training of Trainers on Quality Assurance in Islamic Higher Education di University of Sydney, Australia, dan Workshop on Strategic Planning on A University

Context di Melbourne University. Beberapa tulisan yang pernah dipublikasikan, antara lain: "Mawdudi's Conception of the Islamic State" dalam *Islam and Development: A Politico-Religious Response,* diterbitkan oleh Permika, Montreal and LPMI; "The Darul Islam Movement in Aceh from the Perspective of Western Scholarship" dalam *Dynamics of Islamic Civilization,* diterbitkan oleh Forum Komunikasi Program Pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia; *Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Educational Reform and to Indonesian Nationalism during the Twentieth Century*, diterbitkan oleh the Indonesia Academic Society XXI; *K.H. A. Wahid Hasyim: Pembaru Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan*, diterbitkan oleh Forum Indonesia Satu.

Akh. Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil., Ph.D. Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, alumni Program Pembibitan Dosen IAIN se-Indonesia angkatan X/1997 di Jakarta. Pada awal 2010, penulis memperoleh PhD dari The University of Queensland, Australia dengan beasiswa *International Postgraduate Research Scholarship* (IPRS). Tahun 2001, memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Konsentrasi Pemikiran (Politik) Islam. Pada 2003, memperoleh gelar *Graduate Diploma in Southeast Asian Studies* (Grad Dip SEA) dari *Southeast Asian Studies Center, Faculty of Asian Studies, The Australian National University* (ANU), Canberra. Dari fakultas dan universitas yang sama (ANU), pada 2005 penulis menyelesaikan program Master of Philosophy (MPhil) dengan tesis yang berjudul "Contestation within Contemporary Indonesian Islamic Thought: Liberalism and Anti-liberalism."

Selama menjalani studi tiga tahun (2002-2005) di ANU Canberra, penulis dipercaya sebagai pengajar pada Faculty of Asian Studies, dan di *Indonesian Culture Program* di *Australian Defense Force Academy* (ADFA@UNSW), Canberra. Sejak pertengahan 2003 hingga awal 2005, juga dipercaya menjadi *research assistant* pada sejumlah proyek penelitian: "Shari'ah in Indonesia" di bawah pimpinan Prof. MB Hooker (ANU) dan Dr. Tim Lindsay (Melbourne University); "Religion, Power, and Crisis in Indonesia and Thailand: Islamic and Buddhist Responses to Globalising Market and Cultures" di bawah pimpinan Dr. Greg Fealy dan Dr. Peter Jackson (ANU); "Islamic Perspectives on State, Society, and Governance in Southeast Asia: A Sourcebook" di bawah pimpinan Prof. Virginia Hooker dan Dr. Greg Fealy (ANU); dan "The Origins and Trajectory of Secularism in Modern Indonesian Politics" di bawah pimpinan Prof. Robert Elson (The University of Queensland). Pernah menjadi *visiting scholar* di Freedom Institute, Menteng, Jakarta Pusat, sejak 15 Desember 2003 hingga 25 Februri 2004, dan di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta pada Januari hingga Juni 2008. Selain itu, beberapa tulisannya yang bersifat ilmiah-populer dimuat di Harian Pagi *Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, Jawa Pos, Koran Tempo, Republika, Duta Masyarakat, Sindo (Seputar Indonesia), Surya*, dan *Surabaya Post.* Tulisan-tulisannya yang lain dan bersifat ilmiah akademik dipublikasikan di jurnal-jurnal seperti *Jurnal Universitas Paramadina, al-Jami'ah,* dan *Journal of Indonesian Islam, Studia Islamika, Graduate Journal of Asia Pacific Studies,* dan *Analisis CSIS.* Karya dalam bentuk buku di antaranya adalah: *Cheng Hoo Mosque: Assimilating Chinese Culture, Distancing it from the State,* CRISE Working Paper No. 27, January 2010 (Oxford: Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, 2010); *Popular Print Islam: From Transmitting Teachings to Shaping Beliefs and Practices Within Ordinary Indonesian Muslims* (Bangkok and

Washington: AMAN and Rockefeller Foundation, March 2011); *Mengupas Pemikiran Agama dan Politik Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi* (Jakarta: Lentera, 2004); *Dinamika Baru Studi Islam* [bersama Masdar Hilmy] (Surabaya: Arkola, 2005). Karya dalam bentuk *book chapter* di antaranya adalah: "Reading Islam in Changing Indonesia (An Analysis of the Rise of Liberalism and Anti-liberalism in Islamic Thought)," dalam Faried Saenong dan Eko N. M. Saputro (eds.), *Enlightenment from Within: Discourses of Governance, Economics and Religion in Contemporary Indonesia* (Canberra: Minaret, 2007) dan "Islam as a Symbolic Commodity: Transmitting and Consuming Islam through Public Sermons in Indonesia," dalam Pattana Kitiarsa (ed.), *Religious Commodifications in Asia: Marketing Gods* (London: Routledge, 2008).

Drs. H. Saiful Jazil, M.Ag Lahir di Lamongan, 12 Desember 1969. Saat ini menjabat sebagai dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Menyelesaikan pendidikannya di MI/SD Lamongan (1982), MTs/SLTP Lamongan (1985), PGAN/SMU Mojokerto (1988), S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya (1992), S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1996), dan S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya (masih berlangsung).

Pengalaman akademik dan pengabdian sosial penulis, di antaranya adalah staf pengajar Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel (sejak 1993—sekarang), staf pengajar Universitas Sunan Giri Surabaya (1997-2001), staf pengajar IAINJ Paiton Probolinggo (2001-2004), staf ahli Jurusan PAI Tarbiyah IAIN Sunan Ampel (1996-2001), staf ahli Lembaga Penelitian IAIN Sunan

Ampel (1997-2005), staf ahli Lembaga Pengabdian pada Masyarakat IAIN Sunan Ampel (2005—sekarang), pengurus LPTQ Jawa Timur (2006—sekarang), sebagai narasumber (tutor) Studi Islam pada Kobangdikal Bumimoro Surabaya (2006—sekarang).

Karya tulis yang telah dihasilkan adalah: *Fiqh Siyasah dan Kaitannya dengan UU Perkawinan di Indonesia* (penelitian); *Senandung Cinta Jalaluddin Rumi* (Pustaka Pelajar Yogyakarta); *Al-Hubb al-Ilahi: Studi Perbandingan Tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah dengan Jalaluddin Rumi* (penelitian); *Studi Eksperimen tentang Efektivitas Metode Ceramah dan Tadribat dalam Pengajaran Bahasa Arab* (penelitian); *Reinterpretasi Dalil Qath'i–Dzanny dan Keberadaan Nasikh-Masukh: Telaah Kritis terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali* (penelitian); *Konsep Jihad dalam Perspektif Kitab-Kitab Kuning di Pesantren* (penelitian); *Dinamika Baru Studi Islam* (editor); *Modernisasi Pendidikan Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Sooko Mojokerto* (penelitian). Korespondensi bisa dihubungi melalui E-mail: <Saifuljazil@yahoo.com>

Dr. Biyanto. Lahir di Lamongan, 10 Oktober 1972 dari pasangan Lasbu dan Biyatun (alm.). Menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Ummah Gampang Sejati (lulus 1983) dan SD Negeri Gampang Sejati (lulus 1985), SMP Negeri Laren (lulus 1988), dan SMA Negeri Paciran (lulus 1991). Pernah belajar mengaji di Pesantren Al-Fatah, Siman, Lamongan (1983) dan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran, Lamongan (1989-1991). Menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Jurusan Aqidah Filsafat

(1991-1995), S2 di Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (1996-1998), dan S3 di Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel (2005-2008).

Sejak 1996-sekarang, penulis aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel. Selain itu, juga mengajar di Universitas Widya Kartika (2007-sekarang), Insitut Informatika Indonesia (2008-sekarang), Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel (2009-sekarang), Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2009-sekarang), dan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya (2010-sekarang). Pernah menjadi Tim Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel (1999-2006). Sejak 2005-2009 dipercaya menjadi Ketua Program Studi Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.

Karya tulis yang pernah dipublikasikan adalah *Pergumulan Tokoh Muhammadiyah Menunju Sufi: Catatan Pemikiran Abdurrahim Nur* (bersama A. Fatichuddin dan Sufyanto, 2003), *Teori Siklus Peradaban: Perspektif Ibn Khaldun* (2004), *Siapa dan Siapa: 50 Tokoh Muhammadiyah Jawa Timur* (kontributor, 2005), *Menembus Benteng Tradisi* (kontributor, 2005), *Resolusi Konflik Islam Indonesia* (kontributor, 2007), *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme* (kontributor dan penyunting, 2007), *Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah* (kontributor, 2008), dan *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah* (2009). Beberapa tulisan untuk jurnal ilmiah pernah dimuat di *Paramedia, Qualita Ahsana, Istiqro', al-Ijtima', Akademika, Islamica,* dan *al-Afkar*. Beberapa artikel tentang politik, pendidikan, dan sosial keagamaan pernah dimuat di *Jawa Pos, Kompas, Surya, Radar Surabaya, Surabaya Post, Majalah Matan,* dan *Suara Muhammadiyah*. Pada 2007 mendapat predikat Dosen

Teladan IAIN Sunan Ampel. Korespondensi bisa melalui e-mail: <mr_abien@yahoo.com>

Masdar Hilmy, MA., Ph.D. Lahir di Tegal, Jawa Tengah, 2 Maret 1971. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Tegal. Pada 1987-1990, penulis melanjutkan pendidikannya di PGAN Lasem Rembang. Selama tiga tahun, penulis *nyantri* di Pesantren Al-Hidayat Lasem Rembang, di bawah bimbingan KH. Ahmad Syakir Ma'shum. Dari Lasem, penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1990-1994), menyelesaikan jenjang S2 dan memperoleh gelar Master of Arts (MA) di Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, Canada pada 1997-1999. Pada 2004-2007, berhasil menyelesaikan studi S3 dan memperoleh gelar PhD di Asia Institute, The University of Melbourne, Australia, di bawah bimbingan Prof. Merle C. Ricklefs dan Prof. Arief Budiman.

Pada 1995-1996, penulis mengikuti program pembibitan dosen di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak 1996, diangkat sebagai tenaga pengajar tetap pada almamaternya dan mengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam (MSI). Sambil mengajar di program S1, penulis juga mengajar pada program pascasarjana (S2) di IAIN yang sama. Selain mengajar, juga aktif meneliti di Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada 2003, penulis memenangkan *research grant* untuk kategori penelitian unggulan dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KMNRT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan judul penelitian: "Membedah Anatomi Konflik Agama-Etnik: Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik Agama-

Etnik Pasca-Orde Baru." Selain meneliti, juga menulis di harian nasional seperti *Kompas*, *Jawa Pos*, *Republika,* dan *Surya*, serta jurnal akademik kampus seperti *Studia Islamika* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), *Al-Jami'ah* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Akademika, Paramedia, Qualita Ahsana, Nizamia, The Journal of Indonesian Islam* (kelimanya berada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya), dan *Asian Cultural Studies* (International Christian University, Tokyo, Jepang).

Karya yang sudah diterbitkan antara lain, *Islam Profetik: Substansiasi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Impulse-Kanisius, 2008); "Rekonstruksi Paradigma Teori dan Resolusi Konflik: Sebuah Diskursus Teoretik," dalam Thoha Hamim, et. al. (eds.), *Resolusi Konflik Islam Indonesia* (Yogyakarta: LKiS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007); *Dinamika Baru Studi Islam* (buku bersama Akh. Muzakki, 2005); "Panggilan Jihad Melawan Korupsi" dan "Paradoks Pemberantasan Korupsi" dalam buku *Jihad Melawan Korupsi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005). Bersama rekan-rekannya di Lembaga Studi Agama dan Perubahan Sosisal (LSAS) IAIN Sunan Ampel Surabaya, penulis merintis penerbitan jurnal internasional pertama di IAIN Sunan Ampel Surabaya, *The Journal of Indonesian Islam*. Sejak kepulangannya dari Australia, penulis mengepalai Kantor Penjaminan Mutu (KPM) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kehidupan buruh pabrik di kota-kota besar sangatlah rumit. Selain tuntutan kerja dari pabrik-pabrik besar dan upah yang belum sesuai dengan UMR, mereka juga dihadapkan pada masalah internal mereka sendiri, dalam interaksinya dengan lingkungan masyarakat sekitar, tempat mereka tinggal. Bahkan tidak jarang mereka menjadi sumber kerawanan sosial yang mengganggu masyarakat. Dari fenomena tersebut, muncullah komunitas-komunitas kecil yang kelak menjadi embrio lahirnya pesantren buruh pabrik. Pesantren ini didesain untuk kebutuhan pendidikan agama dan kehampaan spiritual kaum buruh, yang dipadukan dengan pendidikan khas pesantren.

Buku ini, yang merupakan hasil penelitian terhadap kehidupan buruh pabrik di kota-kota di Jawa Timur, menyajikan jawaban atas persoalan yang dihadapi kaum buruh, cara mengatasinya, dan bagaimana pendidikan pesantren yang ideal sesuai dengan kebutuhan mereka. Buku ini pantas dibaca oleh mahasiswa, dosen, kiai, aktivis buruh, pemerintah yang berkompeten, serta pemerhati masalah agama & kemasyarakatan.